

Analisis CSIS

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai jurnal berkala untuk menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISIS adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri. Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISIS sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis masing-masing.

Logo CSIS



Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: *Nalar Ajar Terusan Budi*. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukiran bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka beralaskan kain lampin. Tangan kiri menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas meng-

Pemimpin
Penanggung

Dewan

Redaksi Pelaksana

STT

ISSN

Clara JOEWONO, Djisman S. SIMANDJUNTAK, Onny S. PRIJONO

Bambang WALGITO, Sunarto NDARU MURSITO, Medelina K. HENDYTIO

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

0126-222X

ANALISIS CSIS

TAHUN XIX, NO. 6, NOVEMBER-DESEMBER 1990

Daftar Isi

- Pengantar Redaksi 500
- Cina dan Asia Tenggara Pasca Kamboja
Rizal SUKMA 502
- Dinamisme Pasifik dan Kebijakan Alternatif Jepang
Bantarto BANDORO 517
- Surutnya Signifikansi Masalah Kamboja dan
Perubahan-perubahan di Asia Tenggara
Edy PRASETYONO 540
- Peran dan Jawaban ASEAN dalam Kerjasama
Ekonomi Asia-Pasifik
Hadi SOESASTRO 554
- India: Kekuatan Militer Asia yang Sedang Tumbuh
Wisnu DEWANTO 576
- Mengapa 'Komunisme Lokal' Eropa Timur
Telah Gagal?
Ivan T. BEREND 589
- Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN
SUDIBYO, Yoyok ARIESSUSANTO & F. ANDREA 605

Pengantar Redaksi

PERUBAHAN-perubahan yang sedang berlangsung dalam percaturan politik internasional dewasa ini, ikut mempengaruhi keadaan politik regional kawasan Asia Tenggara. Arus peredaan ketegangan yang sedang berlangsung di Asia Tenggara, telah menghadapkan Cina kepada berbagai tantangan dan persoalan baru. Hal ini terutama sekali terasa sejak semakin dekatnya proses penyelesaian konflik di Kamboja. Pasca konflik Kamboja ini, Cina akan menghadapi sebuah Asia Tenggara yang agak berbeda dengan sebelumnya, sehingga merasa perlu untuk melakukan penyesuaian dalam politik luar negerinya. Penyesuaian dalam politik luar negeri RRC terhadap Asia Tenggara ini, menjadi pokok perhatian tulisan dari *Rizal Sukma*.

Dinamisme mungkin suatu istilah yang tepat untuk menggambarkan evolusi kawasan Pasifik selama dasawarsa terakhir ini. Pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan ekspansi perdagangan yang diperlihatkan oleh negara-negara Pasifik menunjukkan betapa pentingnya kawasan Pasifik dalam membentuk penyesuaian global hubungan internasional dan ekonomi dunia. Jepang pun selama dasawarsa itu mengalami perubahan yang cepat. Perubahan-perubahan itu telah menciptakan semacam *web of images* atas diri Jepang. Di satu pihak muncul kesan bahwa Jepang mempunyai kemampuan ekonomi yang kuat dan mudah melakukan penyesuaian dan inovasi teknologi secara mengesankan. Di lain pihak muncul kesan lain yang bertentangan dengan kesan ini, yaitu pasifitas militer dan politik. Di balik kesan yang saling bertentangan itu sebenarnya muncul sejumlah pilihan-pilihan kebijakan jangka panjang dan pendek mengenai peran Jepang di masa depan dan inilah yang akan menjadi fokus tulisan dari *Bantarto Bandoro*.

Peredaan ketegangan di Asia Tenggara menjadikan masalah Kamboja kehilangan signifikansi dalam menentukan pola hubungan internasional di kawasan ini. Pada masa pasca-Kamboja ini Asia Tenggara memasuki periode transisi; suatu periode yang ditandai oleh hubungan-hubungan baru yang belum pasti dan bersifat multipoler. Keadaan ini menyebabkan beberapa negara Asia Tenggara, khususnya ASEAN, mengadakan perubahan kebijaksanaan luar negeri baik dalam kaitan dengan interaksi antara negara-negara ASEAN maupun dengan kekuatan eksternal. Pada sisi inilah muncul pemikiran-pemikiran baru dalam masalah keamanan dan strategis untuk hadapi masa depan Asia Tenggara. Tulisan *Edy Prasetyono* membahas perubahan-perubahan di Asia Tenggara pasca-Kamboja dan implikasinya terhadap masalah-masalah keamanan di kawasan ini.

Dalam pembahasan ekonomi Pasifik, *Hadi Soesastro* menyoroti fenomena heterogenitas negara-negara di kawasan, bukan hanya dalam berbagai bidang kehidupannya melainkan juga dalam tingkat perkembangannya. Pembangunan perekonomian sejauh ini telah mengakibatkan interdependensi negara-negara di kawasan, terutama karena ciri komplementaritas di dalam hubungan perdagangan dan investasi. Supaya pembangunan kawasan ini dapat mengusahakan integrasi ekonomi yang menguntungkan segenap negara di kawasan dan bukannya negara besar mengeksploitasi negara yang lebih kecil ataupun berlangsung persaingan antar negara maupun kelompok negara yang justru saling merugikan, maka diulas bentuk kerjasama ekonomi dan faktor-faktor yang akan melancarkan dan mendukungnya.

Tulisan dari *Wisnu Dewanto* berusaha melihat potensi militer India sebagai salah satu kekuatan baru di Asia. Meningkatnya kekuatan militer negeri ini khususnya sejak awal dekade delapan puluhan terbukti telah menjadi perhatian banyak analis militer maupun politik. Diperkirakan dewasa ini kekuatan militer India menempati posisi keempat di dunia. Di kalangan negara-tetangganya peningkatan kekuatan militer ini telah menimbulkan kegelisahan dan persepsi ancaman terhadap stabilitas regional (Asia Selatan). Negara di luar kawasan berusaha ingin mengetahui apa latar belakang yang mendorong elit politik India sampai kepada pilihan pengembangan militer yang luar biasa kendati di satu sisi kemiskinan masih melilit negeri ini.

Dalam tulisannya *Ivan T. Berend* mengakui keberhasilan sementara sistem Komunisme Eropa Timur mengejar industrialisasi negara kapitalis dalam waktu relatif singkat. Namun Komunisme Eropa Timur mempunyai keterbatasannya, sebab dalam hal tertentu menuju malapetaka sejak awalnya dan dalam hal lain penuh kontradiksi. Terbukti pada tahun 1960-an peluang-peluangnya dalam persaingan internasional sudah payah. Karena memaksakan diri lebih lanjut dan menetapkan diri sebagai ideologi yang selalu benar, akhirnya sistem ini berubah dari model modernisasi menjadi model keterbelakangan. Penyebabnya adalah totaliterisme sosial budaya membuat ketidakmampuan sistem komunisme bersaing dalam perkembangan ekonomi dan teknologi memasuki era globalisasi.

Usaha untuk meningkatkan kerjasama intra ASEAN dengan menerapkan serangkaian kebijaksanaan baru di bidang perdagangan, kerjasama industri dan investasi merupakan salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-22 yang berlangsung di Jakarta tanggal 29 Oktober 1990 dan dilanjutkan di Denpasar tanggal 29-30 Oktober. Peristiwa lain yang cukup menarik adalah pertemuan Pejabat Tinggi Kehutanan ASEAN dengan para Pejabat Masyarakat Eropa (ME) yang berlangsung di Brussel tanggal 8-10 Oktober 1990 dan di Den Haag tanggal 11-16 Oktober 1990 untuk membahas kebijaksanaan pengelolaan dan konservasi hutan tropis di negara-negara ASEAN. Ringkasan peristiwa kegiatan ASEAN bulan Oktober-November ini disusun oleh *Yoyok Ariessusanto, F. Andrea* dan *Sudibyo* sebagai editornya.

Cina dan Asia Tenggara Pasca Kamboja

Rizal SUKMA

DEKADE 1990-an memang tepat disebut dekade yang akan diwarnai oleh berbagai perubahan dramatis. Inti perubahan interaksi antar *superpower* dalam sistem internasional, berupa upaya-upaya kompromi antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (US), ikut menyebar ke berbagai kawasan dunia. Baik Washington maupun Moskow cenderung mengkaji ulang kebijaksanaan luar negeri mereka selama ini. Penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan, kesepakatan-kesepakatan penghapusan, pengurangan, dan pembatasan persenjataan di antara keduanya merupakan contoh dari upaya peredaan ketegangan (*detente*) regional maupun global.

Di tengah perubahan yang sedang berlangsung dalam panggung hubungan internasional dewasa ini, persoalan stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara masih tetap perlu mendapat perhatian. Upaya-upaya ASEAN untuk menyelesaikan konflik Kamboja -- sebagai salah satu sumber instabilitas di kawasan -- memang telah memunculkan kembali harapan baru karena keberhasilan yang dicapai pertemuan di Jakarta 9-11 Sep-

tember 1990. Namun, kawasan Asia Tenggara masih tetap potensial memunculkan persoalan-persoalan baru pascakonflik Kamboja. Dalam konteks ini kehadiran Cina sebagai kekuatan yang cukup berpengaruh atas keadaan di kawasan merupakan faktor yang sulit diabaikan. Sikapnya yang "konsisten" dalam memandang konflik Kamboja, khususnya mengenai keberadaan dan peranan Khmer Merah dan persaingannya dengan Vietnam, harus diakui telah membawa dilema bagi negara-negara ASEAN.

Di lain pihak, Cina bukanlah negara yang kedap dari pengaruh-pengaruh yang disebabkan perubahan-perubahan di lingkungan internasional. Sejak awal dekade 1980-an, pergeseran prioritas hirauan di dalam negeri -- dari politik-ideologi ke pembangunan ekonomi -- telah mendorong Beijing untuk melakukan penyesuaian politik luar negerinya, seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Formulasi politik luar negeri independen pada bulan September 1982, misalnya, merupakan salah satu bentuk penyesuaian itu. Dari

berbagai studi juga terlihat kalau Cina kerap kali melakukan penyesuaian-penyesuaian taktis dalam politik luar negerinya.

Berbagai perubahan yang sedang berlangsung di Asia Tenggara sekarang ini kiranya akan memunculkan tantangan-tantangan kebijaksanaan baru bagi Cina. Bagaimana Cina menghadapi perubahan di Asia Tenggara ini? Apakah Cina akan mengadopsi kebijaksanaan yang lebih keras untuk mencegah dan mengurangi ambisi regional Vietnam? Atau, apakah Cina akan mencari pendekatan yang lebih fleksibel terhadap Asia Tenggara sebagai hasil dari kalkulasi rasional para pemimpinnya sekarang atas realitas politik yang berlaku di Asia Tenggara? Tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi Indonesia dan ASEAN sebagai akibat dari perubahan-perubahan strategis di kawasan dan implikasinya terhadap peranan Cina di Asia Tenggara?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tulisan ini akan menyoroti empat pokok bahasan yang saling terkait: (a) posisi Cina dalam struktur perubahan di Asia Tenggara; (b) strategi Cina dalam menghadapi Vietnam dan ASEAN; (c) kecenderungan politik luar negeri Cina di Asia Tenggara; dan (d) beberapa catatan mengenai kebijaksanaan Indonesia dan ASEAN menghadapi perubahan di Asia Tenggara, terutama dalam kaitannya dengan faktor kehadiran Cina di kawasan ini.

Cina dan Asia Tenggara yang Berubah

Pada perspektif global, tatanan hubungan internasional di Asia tidak dapat dipisahkan dari perspektif interaksi segitiga kekuatan besar AS, RRC, dan US. Ketiga *great powers* tersebut sama-sama ingin tampil do-

minan dalam mengembangkan pengaruh masing-masing di kawasan. Hasrat untuk tampil sebagai kekuatan utama di Asia ini terutama lebih menonjol pada Cina. Beijing melihat kawasan ini sebagai wilayah lingkup pengaruhnya (*sphere of influence*) di mana melalui runutan historis RRC memandang dirinya sebagai pusat yang harus menjadi patron negara-negara Asia lainnya. Sedangkan AS dan US dilihat Beijing sebagai masing-masing telah memiliki lingkup pengaruh sendiri di Eropa Barat dan Eropa Timur. Namun, realitas bahwa AS dan US sebagai *global power* juga memiliki *global interests* mau tidak mau membuat Cina harus mengakui kehadiran kedua *super-power* itu di kawasan Asia.¹

Walaupun demikian, pengakuan terhadap peranan *global superpower* tidak menghalangi Cina untuk berusaha mencapai tujuan-tujuan utamanya di kawasan Asia Tenggara yang dipandang Beijing sebagai wilayah terpenting bagi keamanan karena kedekatan geografis. Cina menginginkan dirinya menjadi pusat pengaruh di Asia Tenggara.² Ketidakpastian di kawasan ini menyusul "kekalahan" AS dalam perang Indocina tahun 1975 dan penyerbuan Vietnam ke Kamboja akhir tahun 1978, mendorong Cina untuk mengambil posisi kunci di Asia Tenggara. Pertama, Cina menjalin perserikatan (*alignment*) dengan US untuk menangkal persekutuan (*alliance*) antara Soviet dan Vietnam. Kedua, Cina memberi dukungan moral dan material kepada kelompok Khmer Merah yang terpaksa melepaskan kekuasaan di Kamboja akibat intervensi Vietnam. Ketiga, kekhawatiran negara-negara

¹Rizal Sukma, "Segitiga AS-RRC-US Pasca Rujuk Sino-Soviet," *Media Indonesia*, 1 Juni 1989.

²Golam Choudhury, "Role of China in Asia," *Journal of East Asian Affairs*, vol. III, no. 1 (Spring/Summer 1983): 177.

Asia Tenggara non-komunis terhadap maksud-maksud Vietnam di Asia Tenggara telah mempermudah Cina untuk memupuk hubungan baik dengan ASEAN, khususnya dengan Thailand.

Hanya saja dalam konteks percaturan politik di Asia Tenggara, struktur persaingan dan kerjasama yang terbentuk semakin diperumit oleh keikutsertaan negara-negara kawasan dalam isu konflik Kamboja. Dengan demikian, penggambaran atas struktur hubungan di Asia Tenggara harus memberikan perhatian kepada Vietnam dan negara-negara ASEAN sebagai pihak yang ikut memainkan peranan penting. Dalam perspektif yang lebih kompleks ini, persoalan penting bagi RRC adalah bagaimana menempatkan dirinya pada posisi yang paling menguntungkan sehubungan dengan adanya faktor pembatas yang berasal dari persaingannya dengan Vietnam dan Uni Soviet.

Ketika Cina memberi "pelajaran" kepada Vietnam bulan Februari 1979, hubungan Hanoi-Moskow dilihat Beijing sebagai persekutuan anti-Cina yang sedang berusaha mengepungnya dan memberi peluang bagi perluasan maksud-maksud hegemoni Soviet di Asia Tenggara.³ Dalam suasana politik dan keamanan seperti ini, perserikatan dan kerjasama dengan AS dan ASEAN jelas memiliki arti strategis yang cukup penting bagi Cina. Kerangka pengaturan strategis itu kerap dimanfaatkan Cina untuk menekan Vietnam secara militer maupun diplomatik,⁴

memberi dukungan terhadap gerakan perlawanan anti-Vietnam di Kamboja, dan sekaligus mengembangkan hubungan ekonomi dan diplomatik dengan AS dan negara-negara ASEAN.⁵ Pilihan kebijaksanaan seperti ini dapat ditafsirkan sebagai upaya RRC untuk menghambat tampilnya Vietnam sebagai kekuatan berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, yang pada gilirannya dapat merintangi hasrat Beijing untuk tampil sebagai satu-satunya kekuatan dominan di kawasan.⁶

Namun, sejak akhir dekade 1980-an terjadi serangkaian perubahan dalam peta politik regional Asia Tenggara yang membawa tantangan-tantangan baru bagi Cina. Pertama, *Cina tidak dapat lagi memainkan "kartu AS" dan "kartu Soviet" dalam kerangka politik segitiga AS-RRC-US dengan dimulainya peredaan ketegangan Washington-Moskow sejak awal tahun 1988*. Cara pandang AS terhadap Cina juga mengalami perubahan. Ketergantungan modernisasi RRC pada bantuan AS bagaimanapun dilihat sebagai lebih besarnya kebutuhan Beijing terhadap Washington ketimbang sebaliknya. Bagi AS, di satu pihak, satu-satunya sekutu yang dapat dipercaya dan diandalkan di kawasan Asia-Pasifik adalah Jepang. Sementara itu bagi Cina, di lain pihak, berbagai persoalan yang kembali menajam sejak kepemimpinan Ronald Reagan mendorongnya untuk menjaga jarak dengan Washington.

Pada saat yang sama, Beijing melihat Moskow sedang mengalami berbagai kesulitan di dalam negeri. Tawaran US yang

³Charles McGregor, "China, Vietnam, and the Cambodian Conflict: Beijing's End Game Strategy," *Asian Survey*, vol. XXX, no. 3 (Maret 1990): 267.

⁴Salah satu contohnya adalah ketika penyerbuan RRC ke Vietnam yang dilakukan bertepatan dengan waktu kunjungan Deng Xiaoping ke Amerika Serikat. Secara demikian, Cina ingin memunculkan kesan bahwa tindakan penyerbuan itu "didukung" oleh AS.

⁵Gary Klinworth, "China's Indochina Policy," *Journal of Northeast Asian Studies*, vol. VIII, no. 3 (Fall 1989): 25.

⁶McGregor, "China, Vietnam, and," 267.

berkali-kali untuk memperbaiki hubungan Beijing-Moskow, dipersepsikan oleh RRC sebagai mulai adanya penurunan ancaman US terhadapnya. Sikap diam Soviet ketika pecah pertempuran antara Cina dan Vietnam di Kepulauan Spratly bulan Maret 1988 memperkuat keyakinan Cina bahwa Soviet memang bersungguh-sungguh dengan tawaran normalisasinya.⁷ Peluang ke arah normalisasi penuh itu semakin terbuka dengan terpenuhinya tiga tuntutan yang selalu diajukan Beijing -- penarikan mundur pasukan Soviet dari Mongolia, perbatasan, dan Afghanistan -- sebagai prasyarat normalisasi. Dalam pertemuan antara Mikhail Gorbachev dan Deng Xiaoping bulan Mei 1989, kedua pemimpin negara komunis besar itu sepakat untuk mulai membuka babak baru dalam hubungan Moskow-Beijing. Cina tampaknya cukup menyadari bahwa dalam suasana *detente* AS-US, alternatif yang paling aman baginya adalah mengamankan dan menjaga hubungan positif dengan kedua *superpower*.

Kedua, *perubahan kebijakan Indo-cina-Vietnam*. Sikap Cina yang berusaha menjaga jarak dengan AS mampu mengubah posisi Beijing di mata Moskow. Soviet menyadari bahwa hubungan baik dengan Beijing memiliki arti penting strategis yang lebih tinggi daripada hanya mempertahankan persekutuan yang ketat dengan Hanoi. Arti penting Cina bagi Soviet ini antara lain terlihat dari kesediaan Moskow untuk "mendesak" Hanoi agar bersikap lebih akomodatif terhadap Beijing. Hal ini mau tidak mau telah melemahkan posisi Vietnam sebagai penentang utama Cina di kawasan,⁸ sehingga ia tidak memiliki pilihan lain ke-

cuali ikut menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Cina. Ha-srat Vietnam ini terlihat dari perubahan dalam politik luar negeri dan kebijaksanaan pertahanan Vietnam. Hanoi mulai bisa menerima suatu peranan yang lebih terbatas di Indocina, termasuk keputusan untuk menarik mundur pasukannya dari Kamboja.⁹

Sikap Vietnam yang melunak ini telah memperbesar harapan bahwa Cina akan menilai kembali bantuannya kepada kelompok Khmer Merah, yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat penyelesaian konflik Kamboja. Namun hal ini menjadi masalah bagi Beijing. Cina sulit untuk mengabaikan Khmer Merah sebelum ada penyelesaian konflik Kamboja yang tuntas, karena hal itu dapat melemahkan posisi Beijing dalam mencegah dan menangkal suatu penyelesaian yang mungkin akan menguntungkan Hanoi. Dengan demikian, tidak mengherankan kalau Beijing masih memperlihatkan sikap tidak percaya sepenuhnya terhadap penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Ketidakpercayaan ini dijadikan alasan oleh Beijing untuk terus memberi bantuan kepada Khmer Merah.

Ketiga, *perubahan dalam kebijakan luar negeri Thailand*. Bangkok yang sebelumnya selalu bersikap keras terhadap Vietnam dan rezim Hun Sen di Kamboja, kini mulai berubah sejak Chattichai Choonhavan menjadi perdana menteri bulan Agustus 1988.¹⁰ Kegagalannya dalam mendukung CGDK dan realitas semakin kuatnya pemerintahan Hun Sen telah mendorong Thai-

⁹McGregor, "China, Vietnam, and," 273.

¹⁰Rizal Sukma, "Indonesia-Cina dan Stabilitas Asia Tenggara Pasca 8 Agustus," *Media Indonesia*, 31 Juli 1990.

⁷*Asia Yearbook 1989*, 108.

⁸Klinworth, "China's Indochina," 27.

land untuk mengubah kebijaksanaannya terhadap Indocina.¹¹ Secara terbuka Bangkok menegaskan niatnya untuk memulai suatu pendekatan terhadap Vietnam, Laos dan Kamboja dalam rangka mengubah kawasan Asia Tenggara daratan dari *a battlefield to a marketplace*. Sebagai implementasi dari kebijaksanaan baru itu, tanggal 9-12 Januari 1989 Menlu Siddhi Savetsila mengunjungi Hanoi dan tanggal 24-28 Januari 1989 Bangkok menerima kunjungan PM Hun Sen ke Thailand.

Cina tampaknya tidak begitu antusias terhadap "politik independen" Thailand ini. Beijing bahkan sempat menolak usul PM Chattichai untuk menggunakan perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi sebagai alat untuk mendorong Vietnam dan Kamboja agar menerima suatu penyelesaian politik. Dalam pertemuannya dengan Chattichai yang berkunjung ke Beijing tanggal 14-17 Maret 1989, Deng Xiaoping menegaskan bahwa Cina tidak akan memberikan konsesi kepada Vietnam sebelum tercapainya suatu penyelesaian yang menyeluruh. Deng juga mengingatkan tentang masih perlunya suatu "front persatuan" antara Cina, Thailand, dan negara-negara ASEAN lainnya untuk menekan Vietnam.¹² Hanya saja, Cina harus mengakui bahwa ada realitas yang berubah di Asia Tenggara akibat perubahan kebijaksanaan Thailand ini, yaitu membaiknya hubungan Bangkok-Hanoi. Beijing tidak bisa lagi terlalu mengandalkan Bangkok sebagai mitra utama dalam penyusunan strategi bersama menentang Vietnam.

Keempat, *pencabutan pengakuan Washington terhadap kelompok perlawanan Kamboja pimpinan Sihanouk (CGDK)*. Washington yang sebelumnya memang sudah "risih" dalam mendukung CGDK karena di dalamnya ikut bergabung Khmer Merah, tanggal 18 Juli 1990 memutuskan untuk tidak lagi mengakui kursi CGDK di PBB. Washington memandang keputusan itu sebagai jalan terbaik untuk mencegah Khmer Merah kembali berkuasa di Kamboja. Pengakuan PBB terhadap CGDK yang memberi legalitas kepada Khmer Merah, oposisi pihak Kongres yang semakin kuat di AS, tidak tergoyahkannya Khmer Merah sebagai faksi terkuat dan keberhasilannya menguasai kembali sebagian wilayah Kamboja, menjadi dasar perubahan kebijaksanaan AS itu.

Keputusan AS itu telah mengubah karakteristik interaksi di Asia Tenggara dalam konteks konflik Kamboja. Dengan keputusan itu AS terpaksa menggeser posisi RRC dari mitra menjadi lawan dalam konflik Kamboja. ASEAN yang sebelumnya mendapat dukungan Washington dalam mendukung CGDK, kini terpaksa ditempatkan sebagai pihak yang memiliki strategi yang berbeda dengan AS. Dengan kebijaksanaan baru itu, untuk pertama kalinya AS berada di satu jalur dengan US dan Vietnam.

Pergeseran karakteristik interaksi demikian telah menempatkan Cina pada posisi "kerikuhan diplomatik", karena kebijaksanaan baru AS itu mendapat dukungan dari sekutu-sekutu Baratnya, termasuk Thailand dan Uni Soviet. Moskow menyebutkan bahwa dengan keputusan itu AS "telah mengambil langkah besar dalam arah yang tepat", karena "adalah hal yang mustahil membayangkan stabilitas di Asia Tenggara tanpa adanya normalisasi hubungan AS

¹¹ *Foreign Broadcast Information Service-East Asia*, 31 Januari 1989, 62. Berikutnya disingkat FBIS-EA.

¹² Michael Richardson, "Thailand Embraces Indochina," *Pacific Defence Reporter* (Juni 1989), 21.

dengan Vietnam dan Kamboja".¹³ Dalam suasana demikian, jelas Cina merupakan satu-satunya pihak yang masih bertahan dengan perspektif lama dalam memandang Khmer Merah dan sikap ini jelas melawan arus opini internasional.

Sikap kukuh Beijing ini antara lain tercermin dari reaksinya terhadap Washington. Cina menyesalkan keputusan AS itu dan menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberi bantuan militer kepada Khmer Merah sampai "tercapainya sebuah penyelesaian yang adil, menyeluruh dan masuk akal serta adanya bukti-bukti nyata bahwa pasukan Vietnam benar-benar telah ditarik seluruhnya". Menurut Cina, membiarkan kursi Kamboja di PBB kosong sebelum tercapainya sebuah penyelesaian komprehensif akan menjadi penghalang bagi usaha-usaha penyelesaian.¹⁴ Dalam konteks itu, keputusan AS dilihat Cina sebagai tidak memberi sumbangan apa pun baik bagi penyelesaian konflik Kamboja secara menyeluruh maupun bagi langkah-langkah berbagai pihak yang sudah berusaha ke arah itu.¹⁵

Reaksi Cina ini tampaknya memiliki kaitan erat dengan keputusan AS untuk memulai dialog langsung dengan Vietnam. Cina tampaknya khawatir pembukaan dialog Washington-Hanoi itu, yang pertama kali sejak berakhirnya Perang Vietnam tahun 1975, dapat meningkatkan posisi internasional Vietnam. Dengan demikian, Cina akan berada pada posisi sulit yang memiliki keterbatasan ruang gerak manuver dan dalam memperoleh keuntungan-keuntungan yang lebih besar dari konflik Kamboja. Hal ini dapat dimengerti karena selama lebih dari satu dekade, kepentingan Cina di Asia

Tenggara lebih dipusatkan pada upaya menekan ambisi Vietnam untuk tampil sebagai kekuatan dominan di kawasan. Warisan sejarah yang panjang dan penuh konflik dengan Vietnam, telah menempatkan Hanoi sebagai ancaman di mata Beijing.

Namun, implikasi positif keputusan AS terhadap konflik Kamboja mau tidak mau harus diakui sebagai sebuah terobosan yang memberi harapan lebih besar bagi penyelesaian secara politik. Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja, terutama Khmer Merah, tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima pembentukan SNC (*Supreme National Council*) menurut formula yang ditawarkan rezim Pnom Penh yang sebelumnya telah disepakati antara Hun Sen dan Siha-nouk dalam pertemuan Tokyo. Kesepakatan mengenai fungsi dan komposisi SNC ini dicapai dalam pertemuan di Jakarta 9-11 September 1990.¹⁶ Dalam hal ini, Cina yang sebelumnya "kurang antusias" terhadap hasil pertemuan Tokyo ikut menyesuaikan diri pada perubahan yang ada dalam dimensi eksternal dan internal dari konflik Kamboja dengan menyatakan dukungan terhadap hasil pertemuan Jakarta itu.¹⁷ Untuk pertama kalinya pula Cina kemudian menyatakan bahwa pihaknya akan membuka kontak dengan rezim Hun Sen.¹⁸

Vietnam dan ASEAN: Antara "Lawan yang Kuat" dan "Mitra yang Sulit"

Seperti telah disinggung sebelumnya, tujuan strategis utama Cina di Asia Tenggara adalah mencegah lawan-lawannya mem-

¹³ *South China Morning Post*, 20 Juli 1990. Berikutnya disingkat SCMP.

¹⁴ *Straits Times*, 20 Juli 1990.

¹⁵ *Straits Times*, 1 Agustus 1990.

¹⁶ *Kompas*, 11 September 1990.

¹⁷ *Kompas*, 13 September 1990.

¹⁸ *International Herald Tribune*, 13 September 1990.

peroleh keuntungan dan mengembangkan posisi dominan di antara negara-negara tetangganya.¹⁹ Sejak invasi Vietnam ke Kamboja dan serangan Cina ke Vietnam tahun berikutnya, Cina menjalankan strategi kembar untuk mencapai tujuannya itu. Di satu pihak, Cina menjalankan strategi yang mengkombinasikan tekanan militer, diplomatik dan ekonomi terhadap Vietnam. Di lain pihak, Cina berusaha menggunakan pengaruhnya terhadap negara-negara ASEAN untuk membangun perimbangan kekuasaan di kawasan dalam melawan aliansi Soviet-Vietnam.²⁰

Permusuhan antara Beijing dan Hanoi mencakup berbagai masalah, mulai dari perbedaan ideologi, kebijaksanaan terhadap minoritas etnik Cina di Vietnam, klaim atas kepulauan di Laut Cina Selatan, sampai pada persoalan pengungsi. Namun, dari semua persoalan yang ada, masalah Kamboja merupakan pusat permusuhan antara Cina dan Vietnam.²¹ Cina melihat persoalan keterlibatan Vietnam di Kamboja memerlukan perhatian lebih, karena hal itu dapat mengancam keamanannya. Di samping itu, kejatuhan pemerintahan Khmer Merah dukungan Cina di Kamboja akibat penyerbuan Vietnam memperkuat persepsi ancaman Beijing terhadap maksud-maksud hegemoni Hanoi di Asia Tenggara, khususnya di Asia Tenggara daratan.

¹⁹Sheldon W. Simon, "China and Southeast Asia: Protector or Predator?" *Australian Outlook*, vol. 39, no. 2 (Agustus 1985), 95.

²⁰Robert G. Sutter, *Chinese Foreign Policy: Developments After Mao* (New York: Praeger Publisher, 1986), 191-192.

²¹William J. Duiker, "Looking Beyond Cambodia: China and Vietnam," *Indochina Issues*, no. 88 (Juni 1988): 1.

Namun, Cina harus mengakui bahwa Vietnam tidak mudah ditaklukkan. "Pelajaran pertama" yang diberikan Cina tidak membuat Vietnam mengambil langkah-langkah kompromi dalam masalah pendudukannya di Kamboja. Di samping itu, Vietnam juga mampu menunjukkan bahwa ia mampu menangkal tekanan-tekanan militer Cina di perbatasan secara efektif.²² Perkiraan Cina bahwa Vietnam akan memikul beban ekonomi yang berat akibat konfliknya dengan Cina, tidak sepenuhnya tepat. Karena, Soviet selalu siap menanggung biaya pertahanan dan beban ekonomi yang dipikul oleh Vietnam.²³

Di samping tindakan-tindakan yang dilakukannya secara unilateral, Cina juga berusaha membentuk suatu "front persatuan" melawan Vietnam. Untuk tujuan ini, Cina berusaha mempengaruhi negara-negara ASEAN untuk membentuk koalisi anti-Vietnam. Beijing melancarkan propaganda bahwa Vietnam adalah ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara dan harus dilawan bersama. Pada tingkat yang lebih global, Cina berusaha meyakinkan ASEAN bahwa Vietnam adalah alat Soviet dalam memperluas ekspansi pengaruhnya ke kawasan.²⁴ Invasi Vietnam ke Kamboja membuka peluang bagi Cina untuk menarik ASEAN ke pihaknya, terutama Thailand yang cukup khawatir terhadap maksud ekspansionis Vietnam di Asia Tenggara daratan.

Hubungan dengan Thailand ini, memberi keuntungan tambahan bagi Cina. Mela-

²²Klinworth, "China's Indochina," 25.

²³Charles McGregor, "The Sino-Vietnamese Relationship and the Soviet Union," *Adelphi Papers*, no. 232 (Autumn 1988): 52.

²⁴Choudhury, "Role of China," 183-184.

lui Thailand, Cina dapat menyalurkan bantuan militer kepada Khmer Merah yang menjadi alat Beijing dalam menekan Vietnam. Di samping itu, kerjasama militer Beijing-Bangkok memperkuat keterlibatan Cina secara strategis di Asia Tenggara. Alasan keterancaman pihaknya sebagai negara terdepan dalam menghadapi agresivitas Vietnam yang sering dikemukakan Thailand, membuat ASEAN tidak punya pilihan lain kecuali memberikan semacam persetujuan diam-diam (*tacit agreement*) terhadap semi-persekutuan antara Beijing dan Bangkok.

Meskipun demikian, di sisi lain Cina harus menghadapi kenyataan bahwa hubungannya dengan ASEAN diwarnai oleh berbagai persoalan. Pertama, Cina harus menghadapi warisan kecurigaan dari beberapa negara ASEAN yang sulit untuk dihapuskan begitu saja.²⁵ Selama lebih dari tiga dekade, Beijing dipandang sebagai sumber persenjataan bagi pemberontakan-pemberontakan komunis pro-Beijing di seluruh kawasan Asia Tenggara. Kedua, Cina tidak dipercaya sepenuhnya, terutama oleh Indonesia dan Malaysia, karena kecurigaan terhadap ambisi-ambisi regional Cina. Malaysia dan Indonesia lebih melihat Cina sebagai ancaman ketimbang Vietnam. Penyerbuan Vietnam ke Kamboja dipandang oleh kedua negara ini sebagai akibat dari ancaman Cina terhadap Vietnam.²⁶ Ketiga, Indonesia dan Malaysia tidak sepakat dengan cara-cara Beijing menghadapi Vietnam, karena hal itu dipandang dapat mempersulit penciptaan perdamaian dan stabilitas di kawasan, yang

pada gilirannya akan menghambat terbentuknya Asia Tenggara yang damai, bebas, dan netral.²⁷

Hanya saja, kesamaan tujuan antara Cina dan ASEAN mengenai masalah Kamboja, yakni penarikan mundur pasukan Vietnam dan penyelesaian intern antara faksi-faksi yang bertikai, membuat Cina memperoleh dukungan diplomatik dari ASEAN. Untuk itu, ia pun memberikan hal yang sama yakni memberikan dukungan terhadap upaya-upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik Kamboja, meskipun untuk hal ini tidak selamanya kedua belah pihak memiliki kesamaan pandangan terutama mengenai Khmer Merah. Paling tidak, dalam batas-batas tertentu Cina berhasil memperoleh keuntungan-keuntungan politik dari hubungan positifnya dengan ASEAN, di samping berbagai kesulitan yang dihadapi akibat sikap ASEAN yang kadang-kadang menjadi *uneasy partner* bagi Beijing.

Pengelolaan hubungan dengan ASEAN dan Vietnam yang memberikan keuntungan maksimal bagi Cina, dengan masalah Kamboja sebagai faktor pengait, semakin sulit bagi Beijing karena adanya perubahan-perubahan seperti yang dipaparkan di atas. Kecenderungan politik di kawasan Asia Tenggara sekarang ini, lebih mengarah kepada peredaaan ketegangan (*detente*) regional. Beijing sendiri mengakui ada dua perkembangan mendasar dalam peta politik regional Asia Tenggara. Pertama, Cina mengakui dan menyambut baik menurunnya ancaman hegemonisme Soviet, namun ia tetap tidak puas dan masih memendam kecurigaan terhadap kerjasama Vietnam-Soviet. Kedua, Cina mengakui munculnya era peredaaan ke-

²⁵Simon, "China and Southeast Asia," 94.

²⁶C.Y. Chang, "The Sino-Vietnam Rift: Political Impact on China's Relations with Southeast Asia," *Contemporary Southeast Asia*, vol. 4, no. 4 (Maret 1983): 540.

²⁷Sheldon W. Simon, "The Two Southeast Asias and China: Security Perspective," *Asian Survey*, vol. XXIV, no. 5 (Mei 1984): 527-528.

tegangan politik, namun bersamaan dengan itu Cina melihat kompetisi ekonomi di antara negara-negara semakin meningkat.²⁸

Dalam konstelasi politik global dan regional yang mengalami pergeseran karakteristik dari persaingan politik ke persaingan ekonomi, Cina mengikuti pandangan bahwa kekuatan ekonomi dan kemajuan teknologi menjadi komponen penting bagi kekuatan nasional serta semakin pentingnya faktor ekonomi dalam persaingan strategis internasional.²⁹ Dengan persepsi seperti ini, tidak ada pilihan lain bagi Beijing kecuali menyesuaikan diri dengan kecenderungan *detente* regional dan menghindari terjadinya ketegangan, sehingga ia dapat lebih memusatkan perhatiannya pada pembangunan ekonomi di dalam negeri.

Penyesuaian dalam Kebijaksanaan Cina: Strategi "Berjalan Atas Dua Kaki"

Dari keseluruhan perkembangan di Asia Tenggara sekarang ini, dapat dikatakan Cina telah berhasil mencapai beberapa tujuan utamanya.³⁰ Pertama, Vietnam telah menarik mundur pasukannya dari Kamboja. Kedua, kekuatan regional Vietnam mulai berkurang akibat berbagai kesulitan yang dihadapinya di dalam negeri, dan akibat dari berbagai perubahan dalam politik luar negeri Soviet di kawasan. Ketiga, posisi menonjol Cina di Indocina telah diterima dan

diakui oleh kedua superpower. Keempat, Cina mendapat pengakuan dari negara-negara ASEAN mengenai sikap kerjasamanya dalam menyelesaikan konflik Kamboja, meskipun masih diwarnai oleh perbedaan dalam memandang Khmer Merah. Kelima, melemahnya arti penting persekutuan Hanoi-Moskow. Keenam, Khmer Merah tetap diikutsertakan dalam keanggotaan SNC meskipun terpaksa menerima pengaturan menurut kesepakatan Tokyo.

Semakin dekatnya penyelesaian konflik Kamboja dan berakhirnya keterlibatan Vietnam di sana, akan menghadapkan Cina pada persoalan baru dalam menata strategi politik luar negerinya di Asia Tenggara. Pertama, bagaimana menata hubungan dengan Vietnam yang masih tetap dilihat sebagai ancaman terhadap keamanannya meskipun persepsi itu mulai mengalami pergeseran. Di samping itu persoalan klaim terhadap kepulauan di Laut Cina Selatan tetap potensial sebagai salah satu sumber konflik terbuka di masa mendatang. Kedua, bagaimana mendesain pola hubungan antara Cina dan negara-negara Indocina, terutama dengan Kamboja, yang dapat menutup peluang bagi munculnya kembali hasrat dominasi Vietnam di Asia Tenggara daratan. Ketiga, bagaimana mencegah kembalinya persepsi ancaman terhadap Cina di beberapa negara ASEAN sehubungan dengan hilangnya faktor pengait kerjasama berupa kepentingan bersama menentang Vietnam.

Tampaknya Cina sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan di Asia Tenggara sejak awal. Untuk itu, sejalan dengan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak selalu berada di bawah kendalinya, Cina mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan melakukan penyesuaian dalam politik luar negerinya di Asia Tenggara,

²⁸Robert S. Ross, "China's Strategic View of South-east Asia: A Region in Transition," *Contemporary Southeast Asia*, vol. 12, no. 2 (September 1990): 101.

²⁹Ross, "China's Strategic View," 102.

³⁰Klinworth, "China's Indochina," 39-40.

yang antara lain dapat dilihat dari pernyataan Deng Xiaoping yang mengatakan:

Di dunia ini banyak sekali terjadi konflik. Untuk itu, harus dicari cara-cara penyelesaian untuk memecahkan konflik-konflik tersebut. Selama beberapa tahun yang lalu, saya telah memiliki beberapa gagasan untuk itu. Apakah cara yang terbaik untuk memecahkan masalah? Melalui cara-cara damai dan bukan melalui perang. Saya percaya cara-cara ini dapat menyelesaikan konflik-konflik yang ada.³¹

Sejak Vietnam mengumumkan kesediaannya untuk menarik mundur pasukannya dari Kamboja, Beijing memberikan semacam konsesi berupa janji untuk mengurangi dukungannya terhadap kekuatan Khmer Merah anti-Vietnam. Hal ini ditegaskan oleh PM Li Peng:

Kalau Vietnam dapat menetapkan waktu pengunduran pasukannya dari Kamboja sehingga memuaskan semua pihak, dan pada saat yang sama mengizinkan pengawasan internasional, maka bantuan militer terhadap keempat faksi di Kamboja harus dikurangi secara bertahap dan bahkan dihentikan sama sekali.³²

Cina telah mengurangi kekuatannya di sepanjang perbatasan Cina-Vietnam. Vietnam juga menarik pasukannya dari perbatasan. Wilayah Lao Shan yang diduduki oleh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dikembalikan kepada petani setempat. Perdagangan di perbatasan Mong Cai dibuka kembali tanggal 5 Februari 1989. Menurut Cina, langkah-langkah ini dikarenakan adanya penurunan aktivitas militer Vietnam di perbatasan dan berkurangnya kehadiran Vietnam di Kamboja. Di samping itu, Cina juga mulai melakukan pembicaraan dengan Vietnam. Pada tanggal 13-17 Januari 1989, Wakil Menlu RRC Liu Shuqing mengada-

kan pembicaraan dengan Wakil Menlu Vietnam Dinh Nho Liem, dan pertemuan itu merupakan yang pertama kali sejak penyerbuan Cina tahun 1979.³³

Meskipun demikian, tampaknya Cina masih menyimpan kecurigaan bahwa walaupun Vietnam menarik mundur pasukannya dari Kamboja bisa jadi Hanoi akan melakukan intervensi kembali sekiranya diminta oleh rezim Hun Sen di Pnom Penh. Kecurigaan ini memang beralasan karena Vietnam tidak pernah menyebutkan bahwa ia tidak akan melakukan intervensi kembali. Dalam pandangan Cina, alasan untuk "mencegah kembalinya unsur-unsur pembantai Pol Pot ke Kamboja" pasca penarikan mundur Vietnam, bisa saja dipakai oleh Hanoi sebagai pembenaran sekiranya ia berniat untuk kembali ke Kamboja.³⁴ Artinya, Cina tidak memiliki jaminan kalau pada suatu saat Vietnam akan mencoba kembali mengambil keuntungan dari keadaan di Kamboja, yang masih rawan terhadap konflik bersenjata di antara mereka.

Ada empat kenyataan yang membuat Cina menyimpan kekhawatiran terhadap Vietnam. Pertama, perubahan kebijaksanaan AS mengenai Kamboja, diikuti oleh pembukaan dialog langsung antara Hanoi dan Washington.³⁵ Walaupun langkah itu belum segera diacukan pada normalisasi hubungan diplomatik, bukan tidak mungkin AS akan mengubah sikapnya yang selalu memveto pemberian bantuan kepada Vietnam oleh IMF dan Bank Dunia. Kedua, sekutu terdekatnya di Asia Tenggara, Thailand, sudah mulai menjalin hubungan dagang dengan Vietnam. Hal ini akan ikut membantu Viet-

³¹Klinworth, "China's Indochina," 33.

³²McGregor, "China, Vietnam, and," 277.

³³Klinworth, "China's Indochina," 33-34.

³⁴Klinworth, "China's Indochina," 35.

³⁵*Bangkok Post*, 7 Agustus 1990.

nam dalam menata kembali kehidupan ekonomi dalam negerinya. Ketiga, seperti yang dialaminya selama ini, Cina tidak selalu bisa menarik negara-negara ASEAN ke dalam koalisi anti-Vietnam. Indonesia dan Malaysia, misalnya, lebih memandang Vietnam sebagai mitra potensial ketimbang sebagai ancaman permanen. Keempat, penarikan mundur pasukannya dari Vietnam dan sikapnya yang mulai lebih fleksibel, telah memperbaiki citra Vietnam di mata negara-negara Barat. Keempat kenyataan ini telah memperkuat posisi Vietnam dalam opini internasional.

Secara demikian, agak sulit bagi Cina untuk tetap bersikap keras terhadap Vietnam. Berdasarkan kekhawatiran di atas, tampaknya Cina terpaksa harus menjalankan kebijaksanaan pendekatan (*policy of rapprochement*) yang hati-hati terhadap Vietnam. Seraya tetap mengingatkan berbagai masalah yang belum terselesaikan, bulan Januari 1990 Cina menyatakan keinginannya untuk segera melakukan normalisasi hubungan dengan Vietnam.³⁶ Bulan Mei 1990, titik terang ke arah kontak-kontak positif semakin terlihat dengan bertemunya Deputi Menlu Vietnam Ngo Din Lim dan Menlu RRC Qian Qichen untuk membicarakan berbagai persoalan di antara kedua negara, terutama masalah penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja.³⁷ Pembicaraan berikutnya, dilanjutkan pada bulan Juni 1990 di Hanoi antara Asisten Menlu RRC Xu Dunxin dan Wakil Menlu Vietnam Tran Quang Co. Perkembangan penting juga dapat dilihat ketika tiga pemimpin terkemuka Vietnam -- Sekjen PKV Nguyen Van Linh, PM Do Muoi, dan Pham Van Dong -- melakukan kunjungan rahasia ke Beijing

tanggal 3-4 September untuk bertemu dengan Jiang Zemin dan Li Peng. Dalam pertemuan itu kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri konflik Kamboja dan akan segera mengambil langkah-langkah normalisasi hubungan Beijing-Hanoi.³⁸

Dari proses perdamaian antara Cina dan Vietnam itu tampak ada hal yang menarik baik dari sikap Hanoi maupun Beijing dalam menilai hasil-hasil pembicaraan antara kedua belah pihak. Hanoi selalu menilai setiap pembicaraan sebagai memberikan "kemajuan, hasil yang menggembirakan, dan berlangsung dalam suasana akrab dan hangat". Sementara, di lain pihak Beijing kerap melontarkan komentar bahwa perundingan-perundingan itu memang bermanfaat tapi "tidak memberikan kemajuan-kemajuan yang berarti". Beijing selalu menyebutkan bahwa perundingan dan pembicaraan dengan Vietnam tidak ada artinya sebelum dicapai penyelesaian yang menyeluruh dalam konflik Kamboja.

Cina tampaknya berusaha untuk mengulur-ulur pembicaraan dengan selalu mengaitkan soal normalisasi dengan penyelesaian konflik Kamboja. Bahkan setelah terjadi perubahan dalam konstelasi konflik Kamboja akibat perubahan kebijaksanaan AS, PM Li Peng masih tetap menyatakan kesediaan pihaknya untuk menormalkan hubungan dengan Vietnam asal atas dasar penyelesaian damai Kamboja.³⁹ Tanggal 12 Agustus 1990, ketika berkunjung ke Singapura PM Li Peng kembali mengungkapkan syarat yang sama dengan menekankan bahwa hal itu penting artinya bagi pembicaraan secara damai mengenai masalah Spratly.⁴⁰ Kesan

³⁶ *Antara*, 13 Januari 1990.

³⁷ *Kompas*, 11 Mei 1990.

³⁸ *SCMP*, 26 September 1990.

³⁹ *Antara*, 24 Juli 1990.

⁴⁰ *Antara*, 14 Agustus 1990.

bahwa Beijing tidak ingin segera melakukan normalisasi dengan Hanoi ini semakin jelas ketika menjawab tanggapan Vietnam. Vietnam menyambut baik keinginan Cina untuk memperbaiki hubungan, bahkan Sekjen Partai Komunis Vietnam Nguyen Van Linh menyatakan bahwa ia siap untuk segera bertemu dengan Deng Xiaoping dalam suatu KTT yang akan membicarakan langkah-langkah normalisasi. Namun, Deng menolak usul Van Linh itu dan Cina kembali menegaskan bahwa hal itu baru bisa dilaksanakan setelah penyelesaian menyeluruh konflik Kamboja dicapai.⁴¹

Dalam negara-negara Indocina lainnya, sikap Cina juga mulai melunak meskipun ia yakin bahwa negara-negara di kawasan ini memiliki hubungan erat dengan Vietnam. Dengan Laos, misalnya, meskipun tentara Vietnam masih berada di sana, Beijing menerima kunjungan pemimpin Laos Kaysone Phomyihane pada bulan Oktober 1989. Menteri Hubungan Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri Cina Zheng Tuobin telah berkunjung ke Laos untuk membicarakan kemungkinan perluasan kerjasama perdagangan kedua negara. Pada tahun yang sama, sebuah delegasi "tidak resmi" Cina mengunjungi Pnom Penh,⁴² dan untuk pertama kalinya pula Cina kemudian menyatakan keinginannya untuk membuka dialog secara resmi dengan Hun Sen.⁴³

Sementara itu, seraya "mengulur-ulur" proses pendekatan dengan Vietnam dan melakukan pendekatan terbatas dengan Laos, Cina juga berusaha memperkuat hubungannya dengan negara-negara non-komunis

anggota ASEAN. Kunjungan PM Li Peng awal Agustus 1990 ke Indonesia, Singapura, dan Thailand untuk mencairkan hubungan diplomatik dengan Jakarta, menjajaki pembukaan hubungan formal dengan Singapura, dan memperkuat kembali "persekutuan" dengan Bangkok, memberi peluang bagi Cina untuk menegaskan kembali statusnya sebagai *great powers* yang berkepentingan di Asia Tenggara. Sebelum meninggalkan Bangkok, PM Li Peng menyebutkan kunjungannya itu sebagai "sangat berhasil dan telah meningkatkan status internasional Cina serta memperkuat saling pengertian dengan ASEAN".⁴⁴ Li juga mengatakan bahwa pembicaraannya dengan para pemimpin ketiga negara yang dikunjunginya itu akan "mempercepat tercapainya penyelesaian politik" masalah Kamboja.

Selama kunjungan itu, PM Li Peng kerap kali menegaskan pendekatan Cina yang lebih fleksibel terhadap Asia Tenggara. Pertama, Li Peng mengatakan bahwa meskipun Beijing akan tetap mendukung dan membantu Khmer Merah, pihaknya tidak ingin melihat Khmer Merah tampil sebagai kekuatan yang dominan di Kamboja.⁴⁵ Cina akan menghentikan bantuannya kalau pihak-pihak asing menghentikan campur tangannya dalam kemelut Kamboja. Kedua, dalam rangka menyelesaikan masalah Kamboja dan menciptakan stabilitas di Asia Tenggara, Cina bersedia melakukan normalisasi dan bekerjasama dengan Vietnam. Ketiga, Cina bersedia menempuh cara damai dalam menyelesaikan masalah Spratly dengan bekerjasama baik dengan negara-negara ASEAN maupun Vietnam.⁴⁶ Keem-

⁴¹ SCMP, 24 Agustus 1990.

⁴² Ross, "China's Strategic View of," 106.

⁴³ SCMP, 13 September 1990.

⁴⁴ SCMP, 15 Agustus 1990.

⁴⁵ SCMP, 15 Agustus 1990.

⁴⁶ Far Eastern Economic Review, 30 Agustus 1990.

pat, Cina berjanji tidak lagi menjalin hubungan dan membantu partai-partai komunis yang ada di Asia Tenggara. Kelima, lebih khusus untuk Indonesia, Cina berjanji tidak memanfaatkan orang-orang Cina yang ada di Indonesia untuk kepentingan Cina.

Penegasan terhadap kelima hal di atas memang penting untuk meningkatkan kredibilitas Cina di mata negara-negara ASEAN. Sebuah Cina yang tidak lagi dipandang sebagai sumber instabilitas dan ancaman oleh negara-negara tetangganya, paling tidak untuk waktu dekat, merupakan hal yang penting bagi Beijing. Tampaknya Cina sadar atas keterbatasannya dalam mengontrol setiap perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Dalam kondisi seperti ini, Cina terpaksa beralih pada tujuan yang lebih terbatas, yakni menciptakan sebuah lingkungan Asia Tenggara di mana negara-negara tetangganya tidak boleh bersekutu dengan musuh-musuhnya, dan berusaha mencegah Vietnam untuk memperoleh keuntungan-keuntungan lebih lanjut, walaupun tidak semua peluang yang muncul dari perkembangan itu dapat dimanfaatkan bagi kepentingan RRC.

Beberapa Tantangan Kebijakan Bagi Indonesia dan ASEAN

Dengan kecenderungan kebijakan seperti yang dipaparkan di atas, tampaknya Cina belum mau melepaskan strategi menekan Vietnam. Hanya saja, perkembangan yang mendekati penyelesaian konflik Kamboja telah mendorong Cina untuk bersikap lebih fleksibel. Sementara itu, kekhawatirannya terhadap maksud-maksud Vietnam di masa depan telah mendorong Cina untuk menegaskan kembali kepentingan dan keha-

dirannya di kawasan Asia Tenggara dengan memperbaharui kembali hubungannya dengan Jakarta, Singapura, dan Bangkok. Dengan strategi "berjalan atas dua kaki" ini, tampaknya Cina sedang berusaha mengontrol arah perkembangan Asia Tenggara agar kondisi yang tercipta nantinya akan memunculkan Cina sebagai aktor yang paling berpengaruh di kawasan. Kecenderungan seperti ini tampaknya menjadi obsesi Beijing terhadap prinsip bahwa tidak ada masalah di Asia Tenggara yang bisa diselesaikan tanpa kehadiran dan keikutsertaan Cina.

Dalam konteks pertentangannya dengan Vietnam ini, titik konflik lainnya yang perlu diamati adalah Laut Cina Selatan. Tindakan-tindakan Cina untuk memperkuat kehadirannya secara militer di kawasan ini, berikut pertempuran yang terjadi Maret 1988 dengan Vietnam, dapat pula dipandang sebagai bagian dari strateginya untuk menekan Vietnam. Yang menjadi persoalan adalah, meningkatnya konflik Cina-Vietnam mengenai kawasan ini akan melibatkan pula dua anggota ASEAN, Malaysia dan Filipina, yang juga memiliki klaim atas beberapa pulau di Laut Cina Selatan. Dengan kata lain, ASEAN akan menghadapi persoalan baru setelah konflik Kamboja, yakni konflik di Laut Cina Selatan yang lebih rumit dari konflik Kamboja.

Dalam perubahan dan perkembangan demikian, Indonesia dihadapkan pada dua tugas yang tidak ringan. Pertama, bagaimana mendesain kebijakan Asia Tenggara yang memberikan keuntungan optimal tanpa harus mengurangi perhatian kepada maksud-maksud regional Cina. Kedua, kebijakan itu harus memuat pilihan-pilihan yang memberi keleluasaan bertindak (*free-*

dom of action) secara unilateral tanpa harus menimbulkan kesan mengabaikan eksistensi ASEAN. Sedangkan bagi ASEAN sebagai satu kesatuan dihadapkan pada persoalan bagaimana membantu proses transformasi sisa-sisa pola hubungan *adversarial* menjadi pola hubungan *consensual*. Sasaran untuk ini adalah hubungan Vietnam-Cina, hubungan ASEAN-Indocina, dan Cina-Laos dan Kamboja. Acuan dari tantangan-tantangan demikian adalah menciptakan sebuah Asia Tenggara di mana tidak ada satu kekuatan pun, baik dari lingkungan Asia Tenggara sendiri maupun dari luar kawasan, yang bisa tampil sebagai kekuatan dominan yang dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan terhadap maksud-maksud satu sama lain, atau tampil secara dominan dengan merugikan pihak yang lain.

Bagi Indonesia, perubahan-perubahan mendasar yang sedang terjadi di Asia Tenggara dan implikasinya bagi Cina ini memerlukan desain kebijaksanaan luar negeri yang lebih tepat. Untuk ikut menata hubungan internasional di Asia Tenggara pasca konflik Kamboja, Indonesia bisa mempertimbangkan dua preskripsi berikut ke dalam kerangka strategi politik luar negeri di Asia Tenggara di waktu mendatang dalam kaitannya dengan dua tantangan seperti yang dikemukakan di atas. Pertama, *menata model hubungan Cina-Indonesia-Vietnam yang mampu meminimalisasi perasaan keterancaman Hanoi terhadap Beijing*. Dalam hal ini Indonesia memupuk hubungan kerjasama dengan Cina, yang untuk sementara dipusatkan terlebih dahulu pada aspek perdagangan, seraya meningkatkan hubungan ekonomi dengan Vietnam. Tindakan seperti ini akan bermanfaat untuk memberi jaminan kepada Vietnam, bahwa hubungan Jakarta-Beijing tidaklah dijalin atas dasar yang da-

pat merugikan Hanoi.

Di samping itu, ia akan bermanfaat pula untuk mengejar ketinggalan dari Thailand yang sudah terlebih dahulu menjalankan kebijaksanaan seperti ini. Hanya saja, tindakan ini akan mempertajam kesan bahwa antara Indonesia dan Thailand terdapat semacam persaingan diam-diam dalam memainkan peran sebagai *regional power*. Namun, model hubungan demikian dapat menunjukkan bahwa tanpa harus mengikat diri ke dalam kerjasama militer dengan Cina, Indonesia mampu melibatkan Vietnam ke dalam struktur interaksi di Asia Tenggara yang bercirikan kerjasama ekonomi ketimbang konflik. Berbeda dengan model hubungan Cina-Thailand-Vietnam yang dikembangkan oleh Bangkok, model hubungan seperti ini dapat meminimalisasi kecurigaan Vietnam terhadap hubungan Indonesia-RRC.

Kedua, *mendukung model hubungan Thailand-Indocina yang sedang dibentuk oleh Bangkok*. Melalui tindakan seperti ini, Indonesia tidak perlu ragu dalam memberikan semacam pengakuan bahwa Thailand lebih berkepentingan untuk menjadikan dirinya sebagai pusat kegiatan ekonomi di Asia Tenggara daratan. Di samping itu, bentuk tindakan ini akan mengurangi kesan bahwa antara Indonesia dan Thailand sedang terjadi persaingan diam-diam. Sebagai kompensasi dari diversifikasi kerjasama ekonomi Thailand itu, Indonesia bisa memperluas kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti melalui model kerjasama Batam-Singapura-Johor.

Namun harus diakui tindakan demikian itu tampaknya seperti "melemahkan" posisi Thailand baik dalam hubungannya dengan Cina dan Vietnam maupun dalam kerangka

kerjasama negara-negara ASEAN. Sehingga bagi Bangkok tidak ada pilihan lain yang lebih rasional kecuali menjalin hubungan baik dengan Vietnam yang harus memperhitungkan faktor Indonesia sebagai faktor yang ikut berperan dalam menata keadaan

di Asia Tenggara. Hal ini tentu saja jauh lebih baik karena dengan demikian Indonesia menempatkan dirinya pada posisi aktif ketimbang hanya reaktif atau "adaptif" terhadap kemauan Thailand seperti yang terjadi selama ini.

Dinamisme Pasifik dan Kebijakan Alternatif Jepang

Bantarto BANDORO

KAWASAN Pasifik yang terdiri dari berbagai negara dengan beragam kebudayaan, bahasa, sistem politik, pengalaman sejarah dan tingkat pertumbuhan ekonomi, menunjukkan posisi yang unik di dunia. Di tengah-tengah berbagai macam kesulitan yang melanda dunia, kawasan Pasifik masih dapat mempertahankan dinamismenya yang cukup mengesankan.

Selama dua abad terakhir ini perhatian terhadap perkembangan di Pasifik sebagai suatu kawasan telah memperlihatkan suatu arah tertentu. Pada mulanya perhatian dipusatkan pada pengaruh perkembangan global terhadap ekonomi-ekonomi Pasifik utama dan bagaimana ekonomi-ekonomi Pasifik itu harus menghadapi pengaruh-pengaruh eksternal. Kemudian, oleh karena pengakuan atas kemajuan ekonomi negara-negara di Pasifik, perhatian difokuskan pada dinamika internal kawasan dan bagaimana kelompok ekonomi kawasan (*Pacific economies*) dapat menyumbang kepada kemajuan ekonomi regional.

Beberapa tahun belakangan ini perhatian difokuskan pada implikasi global pertum-

buhan ekonomi kawasan yang mengesankan. Majalah *Newsweek* 22 Februari 1988 melaporkan bahwa dunia sekarang ini sedang mengalami pergeseran geopolitik yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi Jepang dan ekonomi Asia Timur; mereka sedang bergerak ke arah suatu posisi untuk mendominasi ekonomi dunia. Laporan itu menggambarkan "era Pasifik" sebagai "era bangkitnya kekuatan Asia".

Pergeseran itu mungkin dianggap sebagai suatu peristiwa sejarah yang memang harus terjadi. Nakasone adalah orang yang secara jelas mengakui kenyataan itu. Ia mengatakan bahwa "era Pasifik merupakan kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari."¹ Tetapi sebelum pernyataan Nakasone itu muncul, sesungguhnya telah muncul keyakinan di Jepang bahwa abad mendatang akan merupakan abad Pasifik. Jiro Tokuyama, misalnya, mengajukan pendapat bahwa "jatuh banggunya peradaban Barat

¹Staffan Burenstan Linder, *The Pacific Century: Economic and Political Consequences of Asia-Pacific Dynamism* (Stanford: Stanford University Press, 1986).

dan Timur berlangsung secara bergantian dalam kurun waktu 800 tahunan". Ia juga mengatakan bahwa peradaban Eropa yang dimulai abad 13 kini mulai memperlihatkan penurunan dan abad 21 sampai abad 28 akan menyaksikan banggunya peradaban Asia-Pasifik.² Pandangan-pandangan itu menunjukkan bahwa sesungguhnya cendekiawan Jepang telah mulai mengkaji secara serius arti abad Pasifik bagi masa depan ekonomi mereka.

Istilah "abad Pasifik", yang banyak muncul dalam tulisan-tulisan akademik, laporan media, atau pidato-pidato³ sering digunakan untuk menunjukkan pergeseran pusat gravitasi dunia dari Atlantik ke Pasifik. Robert Gilpin, misalnya, melihat kecenderungan Pasifik itu sebagai kekuatan besar yang akan membentuk tatanan ekonomi internasional untuk beberapa dasawarsa mendatang.⁴ Staffan Burenstam Linder juga yakin bahwa kecenderungan Pasifik sedang menghidupkan kembali seluruh dunia.⁵ Memang banyak orang menaruh harapan pada abad Pasifik sebagai landasan perekonomian dunia. Barangkali yang menjadi fokus dari harapan itu adalah Jepang yang sedang berusaha memainkan peranan lebih besar dalam dunia internasional sesuai dengan

kekuatan ekonominya. Jepang memang tidak pernah kehabisan ide dan hal-hal yang mendorong Jepang untuk melakukan peranan itu akan semakin besar di kemudian hari.

Ada pengamat yang begitu yakin bahwa abad mendatang merupakan abad Jepang. Clyde Prestowitz, misalnya, mengatakan bahwa Jepang akan tampil sebagai negara adidaya yang besar.⁶ Mereka yang menganut pandangan ini percaya bahwa kekuatan ekonomi Jepang akan terus tumbuh dan bahkan akan dapat melampaui Amerika Serikat dan jika hal itu terjadi Jepang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memelihara rezim internasional. Pandangan semacam ini tampaknya dikaitkan, meskipun tidak selalu, dengan petunjuk "menurunnya" peranan internasional Amerika Serikat. Lawrence Krause berpendapat bahwa mungkin Amerika Serikat harus menerima pergeseran ke arah hegemoni Jepang.⁷ Prestowitz sendiri menganggap era Amerika Serikat telah berakhir, dan era yang akan muncul kemudian adalah era Jepang.

Posisi Jepang memang selalu disorot tidak hanya dalam setiap analisis mengenai profil Pasifik, tetapi juga analisis mengenai peranan kawasan Pasifik dalam ekonomi dunia. Peran regional Jepang selama ini dianggap sebagai salah satu faktor yang tidak hanya menyumbang pada dinamisme Pasifik, tetapi juga membentuk paradigma Pasifik bersama ekonomi-ekonomi Pasifik lainnya.⁸

²Jiro Tokuyama, "The Advantage of a Pacific Economic Basin," *Far Eastern Economic Review*, 23 Maret 1979.

³Untuk tulisan akademik lihat misalnya Christopher Coher, "The Myth or Reality of the Pacific Century," *Washington Quarterly* (Summer 1988); Linder, *Pacific Century*; Norman Macrae, "Pacific Century, 1975-2075," *Economist*, 4 January 1975. Untuk laporan lihat misalnya "The Pacific Century," *Newsweek* 22 Februari 1988.

⁴Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations* (Princeton: Princeton University Press, 1987), 5-6.

⁵Linder, *Pacific Century*.

⁶Clyde Prestowitz, *Time*, 4 Juli 1988.

⁷Sebagaimana dikutip oleh Hadi Soesastro, "The Role of Pacific Basin in the International Political Economy," *Foreign Relations Journal*, Vol. IV, No. 2 (Juni 1990).

⁸Bantarto Bandoro, "Dialektika Paradigma Hubungan Internasional: Aliansi Atlantik dan Kawasan Pasifik," *Analisis* (Juli-Agustus 1990).

Dinamisme mungkin suatu istilah yang tepat untuk menggambarkan evolusi kawasan Pasifik selama dasawarsa terakhir ini. Pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan ekspansi perdagangan yang diperlihatkan oleh negara-negara Pasifik menunjukkan betapa pentingnya kawasan Pasifik dalam membentuk penyesuaian global hubungan internasional dan ekonomi dunia. Selanjutnya, dengan ekonominya yang berkembang dari tingkat menengah ke ekonomi yang paling maju di dunia dan dengan posisinya sebagai negara *core* dalam paradigma Pasifik, maka Jepang tidak hanya dituntut untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi kawasan Pasifik tetapi juga untuk membentuk dan mempertahankan dinamisme Pasifik sebagai refleksi interaksi negara-negara di kawasan.

Dengan perkembangan Pasifik yang demikian dinamis, dan mungkin akan semakin dinamis di kemudian hari, sesungguhnya Jepang menghadapi ketidakpastian mengenai ke arah mana seharusnya ia bergerak.⁹ Perubahan-perubahan cepat yang dialami oleh Jepang dalam sepuluh tahun terakhir ini telah menciptakan *web of images* yang sangat ruwet mengenai diri Jepang. Di satu pihak muncul kesan Jepang sebagai ekonomi yang kuat, produsen industrial yang mudah menyesuaikan dan inovator teknologi yang mengesankan. Tetapi ada kesan lain yang bertentangan dengan kesan di atas, yaitu pasifitas militer dan politik.

⁹Masalah ini mulai didiskusikan di Jepang pada awal tahun 1980-an ketika posisi internasional Jepang mulai disorot bersamaan dengan menurunnya secara relatif kekuatan Amerika Serikat. Tetapi Jepang belum menentukan secara resmi bentuk konkret peran internasionalnya di masa depan. Salah satu karya akademik yang membahas masalah ini adalah karya Kuniko Inoguchi, *Posto-haken shisutemu to Nihon no sentaku*, (Sistem Paska Hegemoni dan Opsi Jepang) (Tokyo: Chikuma Shobo, 1987).

Kesan mengenai kekuatan dan efisiensi ekonomi Jepang memang tidak begitu mudah dibandingkan dengan kesan Jepang sebagai penantang (*challenger*) potensial Amerika Serikat dalam masalah-masalah militer dan ekonomi. Tetapi, di antara dua kesan itu sesungguhnya terletak kesan mengenai pertumbuhan ekonomi Jepang yang sehat dan menurut pengakuan beberapa pengamat, hal ini telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara di kawasan Pasifik dan interaksi di antara mereka. Di balik kesan yang saling bertentangan di atas sebenarnya muncul sejumlah opsi kebijakan mengenai peranan Jepang di masa depan dan inilah yang akan menjadi fokus tulisan ini.

Beberapa Keistimewaan Pasifik

Untuk menjelaskan adanya suatu pergeseran diperlukan suatu analisis yang tidak hanya melihat satu faktor penentu. Pergeseran adalah suatu proses yang dinamis dan akan banyak dipengaruhi oleh berbagai macam ide, peristiwa, dan juga pelaku. Hal ini sangat tampak di kawasan Pasifik.¹⁰ Pertumbuhan ekonomi yang menyolok dan interaksi yang semakin intensif antar negara di kawasan sebagai akibat dari beberapa variabel tadi telah membuat kawasan Pasifik menjadi fokus perkembangan ekonomi global. Ini dapat dilihat sebagai hal positif¹¹

¹⁰Ide-ide seperti *Pacific Basin*, *Pacific Community* atau *Pacific Economic Cooperation* terutama dicetuskan oleh orang-orang Jepang, antara lain Kiyoshi Kojima, Saburo Okita. Lebih lanjut baca Hadi Soesastro dan Han Sung-joo (eds.), *Pacific Economic Cooperation: The Next Phase* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1983).

¹¹Positif dalam arti negara-negara di kawasan Pasifik dapat menikmati hasil pembangunan yang muncul dari dinamisme Pasifik.

dari dinamisme Pasifik. Tetapi keberhasilan mereka (negara-negara di kawasan Pasifik) dalam pembangunan ekonomi telah menciptakan suatu ketidakpastian atau hal yang tidak dapat diramalkan, misalnya dalam bidang perdagangan dan juga dalam bidang pengaturan keamanan. Jadi, munculnya aktor-aktor ekonomi yang kompetitif di kawasan Pasifik telah mendorong kelompok negara di bagian dunia lainnya untuk melakukan tindakan tandingan (*counteract*) dengan cara-cara lain. Salah satu petunjuk adalah adanya gelombang proteksionisme dan regionalisme di beberapa bagian tertentu di dunia. Dengan perkataan lain, karena kemajuan mereka sendiri, Pasifik Asia telah menjadi pihak dalam friksi perdagangan dengan kawasan-kawasan lainnya. Ketidakpastian hubungan kawasan Pasifik dengan kawasan-kawasan lainnya (misalnya Amerika Utara atau Eropa Barat), yang tampak dalam friksi perdagangan, merupakan aspek negatif dari dinamisme Pasifik.¹² Dalam bagian ini kita akan melihat beberapa keistimewaan yang muncul dari interaksi ekonomi intra-Pasifik.

Ekonomi kawasan Pasifik dianggap jauh lebih berhasil daripada ekonomi kawasan lainnya selama tahun 1980-an. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan keberhasilan itu, antara lain: (1) ekonomi-ekonomi Pasifik mampu membentuk konsensus untuk lebih mengutamakan pertumbuhan daripada tujuan *societal*; (2) mereka menerapkan kebijakan ekonomi yang disesuaikan dengan pasar (*market-conforming*) dan terutama bersifat *outward*

looking; dan (3) mereka memperoleh keuntungan dari faktor-faktor regional yang muncul karena keberadaan mereka yang dikelilingi oleh negara-negara yang lebih dahulu berhasil dalam pembangunan ekonomi mereka.¹³ Keberhasilan mereka memang tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Amerika Serikat. Tetapi, Jepang telah memainkan peranan yang lebih menonjol dalam beberapa tahun belakangan ini. Ini berarti bahwa Jepang layak memperoleh kredit untuk kemajuan-kemajuan ekonomi kawasan.

Sebagai salah satu pelaku utama ekonomi kawasan Pasifik, Jepang tentu tidak akan berhenti mengambil inisiatif-inisiatif ekonomi yang penting.¹⁴ Dinamika internal di kawasan itu sendiri secara ekonomi sebenarnya terletak pada dan muncul dari inisiatif-inisiatif yang diambil oleh Jepang, antara lain dapat dilihat dari interaksi mereka yang semakin intensif dari tahun ke tahun. Dari perspektif ini kita dapat mengidentifikasi beberapa keistimewaan Pasifik, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi dalam formasi angsa terbang; (2) meningkatnya interaksi horizontal antar negara di kawasan; dan (3) ketegangan antara kawasan Pasifik dan kawasan lainnya (misalnya Amerika Utara dan Eropa Barat).

Pola pembangunan "angsa terbang", pertama kali dikemukakan oleh Kaname Akamatsu, adalah suatu pola yang menggambarkan pembangunan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Menurut pola ini Jepang berada pada pucuk pema-

¹²Dampak negatif diartikan sebagai keterlibatan kawasan Pasifik dalam friksi perdagangan dengan kawasan-kawasan lainnya, friksi mana akan membuat perkembangan kawasan Pasifik menjadi tidak menentu oleh karena tanggapan kawasan-kawasan lainnya yang berbentuk proteksionistis.

¹³Lawrence B. Krause, "Changes in the International System in the Pacific Basin," *Analisis* 505 (September 1989).

¹⁴Bantarto Bandoro, "Peran Internasional Jepang," *Analisis* (September-Oktober 1989).

ngunan Asia-Pasifik, yang kemudian diikuti oleh negara-negara industri baru (NICs) Asia dan di belakang negara-negara industri baru ini adalah negara-negara anggota ASEAN, dan sampai tingkat tertentu juga Cina, Vietnam dan Korea Utara. Esensi pembangunan dalam pola semacam ini adalah negara-negara NICs dan negara-negara berkembang lainnya di kawasan tidak hanya belajar dari pengalaman dan keberhasilan pembangunan Jepang tetapi juga mencoba mengejar ketinggalan mereka. Yang hendak dicari dalam proses ini adalah pola-pola pembangunan yang berhasil, yang kemudian dapat diterapkan dan disesuaikan untuk kebutuhan-kebutuhan domestik. Menurut salah seorang penulis dua unsur yang penting dalam proses ini adalah *copying* dan *adapting*.¹⁵

Memang ada banyak alasan bagi negara-negara berkembang dan negara industri baru untuk memiliki kepentingan dalam pengalaman Jepang. Dengan mempelajari dan kemudian mengadopsi pola pertumbuhan Jepang yang pesat, negara-negara berkembang dan negara-negara industri baru di kawasan berharap dapat mengikuti haluan Jepang. Konsekuensinya ialah dinamisme yang muncul dari proses semacam itu akan melebur (*diffuse*) negara yang berada pada puncak formasi angsa terbang itu (Jepang ke negara-negara lain yang dianggap sebagai pengikutnya, yaitu negara-negara industri baru (Korea, Taiwan, Hong Kong Singapura)¹⁶ dan negara-negara anggota ASEAN, dan juga Cina, Vietnam dan Korea Utara.

¹⁵Krause, *Changes in the International System*, 111.

¹⁶Negara-negara Industri Baru ini sering dijuluki macan-macan Asia tetapi juga dianggap sebagai partner kunci bisnis Jepang. Lihat misalnya Osamu Nariai, "The Asian Tigers Come of Age," *Economic Eye*, Vol. 9, No. 3 (September 1988).

Jadi proses ini sebenarnya memberi peluang kepada negara-negara berkembang untuk melangkah maju dan naik kelas lebih cepat.

Struktur ekonomi regional di kawasan Pasifik seperti digambarkan melalui pola di atas sebenarnya masih dalam proses pembentukan, dan struktur itu bukan merupakan blok ekonomi regional yang eksklusif oleh karena adanya pola pembagian kerja internasional yang sangat dinamis sifatnya. Sifat dinamis itu dapat dilihat dari formasi itu sendiri dengan elemen-elemennya yang bergerak secara bersama-sama. Pola angsa terbang ini harus dibedakan dari pola pembagian kerja yang bersifat horizontal, seperti yang terjadi di antara negara-negara MEE, dan juga harus dibedakan dari pola pembagian kerja secara vertikal seperti yang biasanya masih dijumpai antara negara-negara industri maju dan negara-negara berkembang.

Walaupun semua negara di kawasan Pasifik, dan bahkan juga ASEAN, memainkan peran ekonomi dalam perkembangan ekonomi regional, tidak dapat dibantah bahwa peran utama terutama dimainkan oleh dua ekonomi terbesar, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Kedua ekonomi ini merupakan dua motor penggerak atau motor pertumbuhan ekonomi regional. Pasar Amerika Serikat yang besar dan terbuka serta rezim perdagangan bebas yang dimotori oleh Amerika Serikat adalah faktor yang tidak dapat dielakkan dari pola pembangunan ekonomi seperti digambarkan di atas. Jadi, Amerika Serikat memainkan peran sebagai motor pertumbuhan melalui kegiatan menyerap produk-produk ekspor. Sementara itu, tampaknya Jepang belum dapat diharapkan menggantikan peranan Amerika Serikat sebagai penyerap (*absorber*) produk negara-negara kawasan Pasifik yang dewasa ini sangat bergantung pada pasar Amerika Seri-

kat. Tetapi harus diakui pula bahwa Jepang selama ini juga telah memainkan peranan sebagai motor pertumbuhan dari segi peningkatan kapasitas produksi di kawasan Pasifik.

Peranan Jepang yang menonjol terlihat sejak paruh kedua dasawarsa 1980-an dan yang kini dapat dilihat adalah terciptanya suatu struktur produksi regional di kawasan Pasifik dengan Jepang sebagai pusatnya. Instrumen utama yang diterapkan oleh Jepang dalam sistem pembagian kerja ini adalah Penanaman Modal Asing (PMA) yang secara nyata meningkat jumlahnya.¹⁷ Jadi, apa yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik dewasa ini adalah globalisasi produksi dengan perusahaan-perusahaan Jepang sebagai ujung tombaknya. Dapat diambil contoh di sini adalah UNIDEN, suatu perusahaan elektronik yang berkedudukan di Jepang yang mengalihkan lokasi produksinya (*production sites*) ke Filipina dan Cina,¹⁸ dan secara demikian melebur keuntungan-keuntungan ekonomi pada Filipina dan Cina.

Selain digambarkan oleh adanya pembagian kerja internasional dalam formasi angsa terbang, dinamisme Pasifik juga digambarkan oleh semakin meningkatnya interaksi horizontal antar negara di kawasan Pasifik.

¹⁷Nilai total investasi langsung Jepang di Asia secara keseluruhan sebesar US\$8.238 juta. *Japan 1991. An International Comparison* (Tokyo: Keizai Koho Center, 1990), 56-57. Seorang penulis berpendapat bahwa meskipun investasi langsung Jepang banyak ditujukan ke Asia, tetapi dari waktu ke waktu *share* investasi Jepang di Asia menjadi kecil oleh karena wawasan para investor Jepang yang semakin luas. Lihat Edward J. Lincoln, "Japan's Role in Asia Pacific Cooperation: Dimensions, Prospect, and Problems," *Journal of Northeast Asian Studies*, Vol. VIII, No. 4 (Winter 1989).

¹⁸Takashi Inouguchi, "Shaping and Sharing Pacific Dynamism," *Annals*, 505 (1989): 98.

Interaksi yang perlu dicatat di sini adalah interaksi antara Jepang dan negara-negara industri baru, sebagaimana diperlihatkan oleh meningkatnya impor Jepang atas barang-barang manufaktur dari NICs dan ASEAN sebesar 50% setiap tahun sejak tahun 1985. Selain itu, telah pula muncul pola perdagangan yang kompleks di antara negara-negara industri baru Asia yang membuat mereka menjadi partner dagang horizontal terhadap yang lainnya.

Interaksi horizontal ini juga dapat dilihat tidak hanya dari perdagangan negara industri baru dengan dan investasi langsung di beberapa negara ASEAN, tetapi juga bantuan-bantuan ekonomi kepada negara-negara yang disebut terakhir dan juga Cina, Kore Utara dan Vietnam. Misalnya, Taiwan adalah negara yang arus investasi langsungnya di Filipina mampu melebihi Jepang dan Amerika Serikat. Kecenderungan ini dianggap positif oleh karena interaksi semacam itu sangat membantu membentuk suatu kawasan yang akan lebih mengandalkan pada sumber-sumber regional daripada sumber atau pasar ekstraregional. Selain itu, interaksi horizontal antar negara di Pasifik juga akan membuat formasi angsa terbang menjadi kurang tajam dan secara demikian akan membantu menciptakan *sense of equality* dalam bidang pembangunan ekonomi di antara negara-negara di kawasan.

Aspek negatif dari dinamisme Pasifik adalah ketegangan hubungan antara kawasan Pasifik dan kawasan Amerika Utara maupun Eropa Barat. Dilihat dari sudut *saving rate*, tingkat pertumbuhan, surplus perdagangan dan kekuatan finansial, Jepang dan negara-negara industri baru Asia oleh kawasan-kawasan lain dianggap sebagai kekuatan yang dapat menciptakan ketidakstabilan dalam ekonomi dunia. Ini berarti

bahwa karena tingkat pertumbuhannya yang tinggi, kawasan Pasifik telah menjadi pihak dalam friksi perdagangan dengan kawasan-kawasan lain. Aktor ekonomi lain, seperti Amerika Serikat, mencoba melakukan apa yang dinamakan *aggressive bilateral peace-keeping* dalam bidang perdagangan, misalnya dengan Kanada.¹⁹ Demikian pun kepercayaan diri yang semakin meningkat dan kuat dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) untuk membentuk pasar tunggal mungkin dapat dilihat sebagai reaksi atas pertumbuhan yang spektakuler dari ekonomi-ekonomi Pasifik. Jadi, apa yang tampak dari hasil interaksi antar kawasan antara lain adalah regionalisme yang *inward looking* dan pembentukan blok melalui regionalisme di kawasan lain. Dengan perkataan lain, jika apa yang dinamakan "abad Pasifik" itu betul-betul muncul, abad itu tampaknya akan ditandai oleh antagonisme kawasan Pasifik dengan kawasan-kawasan lainnya.

Keistimewaan-keistimewaan di atas menjadi lebih penting, apabila kita memperhatikan persoalan bagaimana Jepang memandang dinamisme Pasifik dari sudut pandangnya sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi regional. Apa yang diperhatikan oleh Jepang kepada negara-negara di kawasan Pasifik selama ini (terutama dalam bidang pembangunan ekonomi) sebenarnya mengandung suatu intensi untuk menekankan kepada negara-negara di kawasan bahwa Jepang berbeda dari negara industri lainnya dalam memperlihatkan perhatian dan kepentingannya di kawasan. Dalam arti sebagai "warga Asia" yang paling maju, Jepang menyadari adanya pola pembangunan Asia yang tidak merata dan oleh karenanya ia tergerak untuk mengambil peran yang

lebih aktif dalam bidang ekonomi. Bagaimanapun juga Jepang tetap memiliki kepentingan di kawasan Pasifik. Bagi Jepang pola pembangunan Asia yang tidak merata berarti bahwa kawasan itu akan tetap memberi peluang untuk meningkatkan dan mengaktifkan kegiatan-kegiatan ekonomi regional. Di sinilah sebenarnya Jepang dituntut untuk mempertahankan dinamisme kawasan. Tetapi interaksi Jepang yang luas dengan negara lain di kawasan juga menimbulkan kekhawatiran tertentu. Bagaimana visi Jepang mengenai peranannya dalam dinamisme itu akan didiskusikan dalam bagian lain.

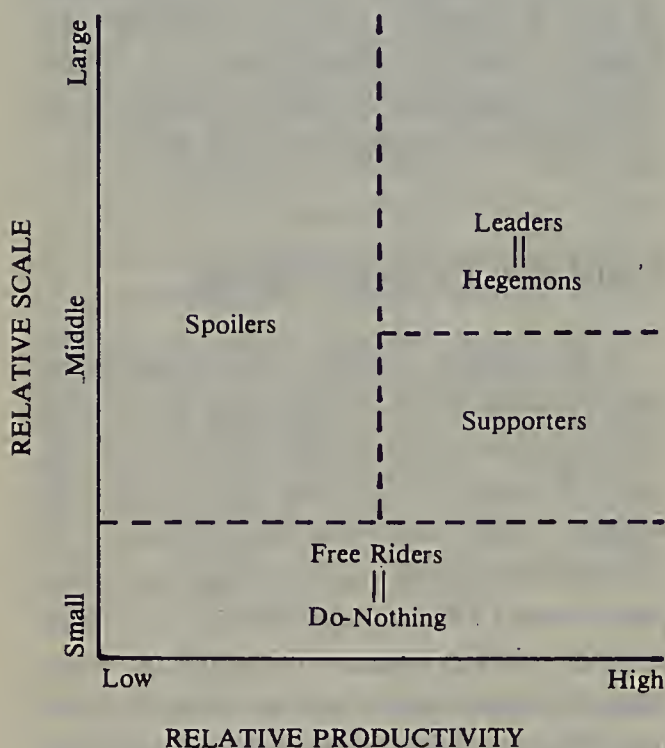
Posisi dan Peranan Jepang

Keberhasilan Jepang mempertahankan pertumbuhan ekonominya yang pesat telah membuatnya menjadi salah satu negara termaju di dunia. Selain itu keberhasilannya sebagai *modernizer* yang agak terlambat telah membawa pada suatu ledakan perhatian pada tahun 1970-an dalam bentuk riset tidak saja di negara-negara berkembang tetapi juga di negara-negara industri maju. Literatur-literatur penuh dengan studi yang mengarah pada jawaban atas pertanyaan mengapa Jepang begitu berhasil dalam pembangunan ekonominya.²⁰ Implikasi keberhasilan Jepang sangat luas dan mendalam, tidak hanya pada masyarakat Jepang sendiri tetapi juga secara internasional dalam pengertian akomodasi timbal balik antara sistem global dan posisi maupun peranan Jepang pada saat mana ia bangkit sebagai kekuatan baru di satu pihak dan menurunnya secara relatif kapasitas Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia di lain pihak.

¹⁹Paula Stern dan Paul A. London, "A Reaffirmation of US Trade Policy," *Washington Quarterly*, Vol. 11/4 (Autumn 1988): 55-57.

²⁰Lihat misalnya Hugh Patrick dan Henry Rosovsky, ed., *Asia's New Giant: How the Japanese Economy Works* (Washington: Brookings Institution, 1976).

Jepang dewasa ini berada dalam era transisi menuju era baru di mana ekonomi politik Jepang dan sistem internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat dramatis.²¹ Dalam era ini kekuatan relatif Jepang akan disorot dan dalam konteks ini pula ia harus menilai kembali politik luar negeri dan posisinya di dunia internasional.



Sumber: Diambil dari David A. Lake, "International Economic Structure and American Foreign Economic Policy, 1887-1934," *World Politics*, Vol. 35, No. 4 (Juli 1983), hal. 522.

Dalam membahas politik luar negeri suatu negara mana pun, kita perlu mengkaitkan dengan posisi dan peranan negara itu di dunia. Lake, misalnya, menggunakan konsep *relative size* dan *relative productivity* dalam membahas politik dan hubungan luar

negeri Amerika Serikat.²² Ia berpendapat bahwa faktor ekonomi ini akan membentuk peran suatu negara dalam masyarakat internasional. Ia membagi peran dalam empat jenis, yaitu *leaders*, *supporters*, *spoilers* dan *free riders* (lihat diagram), dan atas dasar jenis-jenis peran ini kita akan mencoba menganalisis posisi dan peranan Jepang.

Menurut Lake suatu negara yang dianggap sebagai pemimpin (*leaders*) memiliki *relative size* dan *relative productivity* yang paling tinggi. Agar dapat mengelola ekonomi dunia dan lingkungan internasional, negara pemimpin harus mampu mempola berbagai pengaturan sesuai dengan kepentingannya, dan pengaturan-pengaturan itu mencerminkan pilihan-pilihan keuntungannya. Misalnya, negara-negara berkembang melihat institusi Dana Moneter Internasional (*IMF*) dan Bank Dunia (*World Bank*) sebagai institusi ekonomi internasional yang dapat membantu mereka jika mereka menghadapi masalah seperti perimbangan perdagangan internasional atau rencana pengembangan.²³ Tetapi institusi yang sama sebenarnya juga mencerminkan kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat. Demikian pun NATO, suatu sistem pakta militer yang menggabungkan kawasan Amerika Utara dan Eropa Barat, oleh karena penempatan rudal anti Soviet di Eropa Barat hal itu secara langsung juga untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat. Jadi, apa yang dilakukan oleh *leaders* adalah menjalankan fungsi pengaturan-pengaturan tertentu dan mempertahankan interaksi dalam tingkat global.²⁴

²²David A. Lake, "International Economic Structure and American Foreign Economic Policy," *World Politics*, Vol. 35/4 (Juli 1983): 521-522.

²³Ibid.

²⁴George Modelski, "The Long Cycles of Global Politics and Nations States," *Comparative Study in Society and History* (April 1978): 214-235.

²¹Takeshi Inouguchi dan Daniel I. Okimoto, Ed., *The Political Economy of Japan* (Stanford: Stanford University Press, 1988), Vol. 2, "The Ideas and Structures of Foreign Policy Looking Ahead with Caution," by Takeshi Inouguchi.

Sementara itu, *supporters* memiliki *relative size* yang lebih kecil daripada *leader*, tetapi dari segi *relative productivity*, posisi *supporter* sama dengan *leader*. Sesuai dengan posisinya sebagai *supporter* ia akan mendukung dan menyesuaikan diri pada aturan-aturan yang dikembangkan oleh *leader*, dan meskipun harus mengeluarkan ongkos untuk perannya itu, posisi *supporter* biasanya dipegang oleh negara yang cukup penting dan oleh karena itu ia sering disebut sebagai "partner junior". Tetapi perlu dicatat bahwa *supporter* sesungguhnya bukan pengikut *leader* yang buta, dalam arti selalu mengikuti apa pun kebijakan yang diambil oleh *leader*. Jika ongkos yang dikeluarkan untuk menyesuaikan diri pada *leader* terlalu tinggi, *supporter* cenderung mengesampingkan kepentingan-kepentingan *leader*. Jadi aliansi antara *supporter* dan *leader* seringkali digambarkan melalui ungkapan "mimpi hal berbeda dalam satu ranjang".²⁵

Kategori ketiga adalah *spoiler* atau *challenger* yang memiliki *relative size* yang sama dengan *leader*, tetapi dianggap inferior terhadap *leader* dalam hal *relative productivity*. *Spoiler* adalah negara yang selalu mencoba menciptakan ketidakstabilan dalam sistem internasional melalui kebijakan-kebijakan yang cenderung berlawanan dengan kebijakan *leader*. Oleh karena cocok perilakunya yang cenderung menentang sistem yang ada, *spoiler* sering kali dianggap *challenger*.

Membedakan *supporter* dari *spoiler* memang tidak mudah. Jika *supporter* memutuskan tidak lagi bersedia menyesuaikan diri atau mempertahankan kepentingan-kepen-

tingan *leaders*, maka tindakan yang diambil oleh *supporter* adalah tindakan-tindakan yang biasanya diambil oleh *spoiler*. Misalnya, mungkin saja Amerika Serikat menganggap pemimpin Perancis De Gaulle sebagai *spoiler* karena kebijakannya menarik Perancis dari struktur militer Nato. Bahkan akhir-akhir ini banyak orang Amerika Serikat yang melihat Jepang sebagai *spoiler* terhadap Amerika Serikat oleh karena kemajuan-kemajuan ekonominya.²⁶ Michel Roberts, bekas Menteri Perdagangan Luar Negeri Perancis, pernah mengatakan bahwa dunia akan lebih tenteram tanpa ancaman militer Soviet dan ancaman ekonomi Jepang. Jadi, dalam tingkatan demikian Uni Soviet dan Jepang berada dalam kategori peran yang sama, yaitu sebagai *spoiler*.

Kategori peran yang terakhir adalah *free riders*, yang memiliki *relative size* yang kecil, tetapi dapat menyamai *leader* dan *spoiler* dalam hal *relative productivity*, atau bahkan bisa lebih rendah daripada *spoiler*. Contohnya di sini adalah negara-negara berkembang yang menerima keuntungan-keuntungan dari tingkat tarif preferensial yang disediakan oleh GATT.

Pertanyaan yang muncul dari beberapa jenis peran di atas adalah dalam kategori peran yang bagaimana kita menempatkan Jepang, atau dengan perkataan lain kategori peran seperti apa yang paling cocok untuk menggambarkan posisi dan peran Jepang dewasa ini. Ada beberapa indikator untuk melihat *relative size* suatu negara. Misalnya, melihat perbandingan populasi antara Jepang, Amerika Serikat dan Eropa (MEE),

²⁵Takashi Inouguchi, "Japan's Image and Option: Not a Challenger, But a Supporter," *Journal of Japanese Studies*, Vol. 12/1 (Winter 1986): 98.

²⁶Lihat misalnya Richard Rosecrance dan Jennifer Taw, "Japan and the Theory of International Leadership," *World Politics*, Vol. XLII/2 (Januari 1990); Ronald Morse, "Japan's Drive to Pre-eminence," *Foreign Policy* 64 (Winter 1987-1988).

kita akan memperoleh rasio 1:2:2,5 dan dari perbandingan GNP akan didapatkan rasio 1:3:2. *Relative productivity* tidak mudah diukur. Kalau dilihat dari nilai tambah sektor manufaktur, *relative productivity* Amerika Serikat jauh lebih besar daripada Jepang. Tetapi dalam sektor industri baja, elektronik dan otomotif, tingkat produktivitas Jepang lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Tingkat produktivitas beberapa sektor tertentu di Jepang beberapa tahun belakangan ini memang meningkat, meskipun untuk sektor agrikultur, industri pertahanan dan sektor jasa, produktivitas Jepang masih di bawah Amerika Serikat. Jelasnya dalam sektor industri, Jepang telah mampu mencapai tingkat produktivitas yang dapat menyaingi Jerman Barat, Kanada, Perancis atau Belanda.

Banyak yang mengakui bahwa dilihat dari tingkat skala ekonomi dan tingkat produktivitas, Jepang telah banyak menstimulir kegiatan ekonomi internasional. Di sini kita melihat bagaimana Jepang telah memberi kontribusi pada masyarakat internasional. Dalam bidang ODA, misalnya, Jepang mula-mula menduduki peringkat empat pada tahun 1982 dan kemudian meningkat ke peringkat dua tahun 1988.²⁷ Bantuan-bantuan Jepang lebih ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur, sosio-ekonomi dan industri dasar seperti tekstil, baja, listrik dan petrokimia.

Demikian pun, Jepang berada dalam peringkat dua dalam jumlah kontribusi kepada badan-badan internasional, seperti PBB, Bank Dunia.²⁸ Posisinya semakin kuat oleh karena dari sepuluh bank terbesar di dunia sembilan di antaranya adalah bank Jepang²⁹

dan melalui kekuatannya itu Jepang telah banyak membantu operasi bank dengan tujuan menciptakan pembangunan yang sehat di negara-negara peminjam dan penerima bantuan. Kesan yang timbul kemudian adalah bahwa Jepang telah menggantikan Amerika Serikat sebagai pemimpin finansial dunia.³⁰

Atas dasar uraian tentang kontribusi Jepang pada masyarakat internasional kita dapat menempatkan Jepang dalam tiga peran yang berbeda, yaitu *free rider*, *supporter* atau *spoiler*. Pertanyaan yang dapat diajukan di sini adalah faktor apa saja yang menciptakan *image* Jepang seperti itu. Ada beberapa faktor, tetapi dua faktor yang paling utama adalah pertumbuhan Jepang yang sangat pesat dan penekanan kembali (*reassertion*) hegemoni Amerika Serikat.

Mengenai faktor yang pertama dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan Jepang yang tinggi tampaknya akan terus berlanjut. Begitu cepat dan spektakuler pertumbuhan dan perubahan Jepang membuat negara-negara di dunia sulit memahami apa sesungguhnya yang terjadi. Kecerdasan luar biasa Jepang terletak pada kemampuannya mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu atas suatu dualisme, yaitu pemerintahan yang kuat dan efektif yang memberi stabilitas, prasarana yang sehat, dan kebijakan-kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi; dan sektor swasta yang giat mendukung tetapi tidak didominasi oleh peme-

²⁷ *Japan 1991*.

²⁸ *Ibid.*, 55.

²⁹ Gilpin, *Political Economy*, 329.

³⁰ Yoichi Sinkai, "Japan's Positive Role as the World's Bank," *Economic Eyes*, Vol. 11/2 (Summer 1990): 22-25. Tetapi ada penulis yang mengkritik posisi finansial global Jepang. Mengenai kritik ini baca R. Taggart Murphy, "Power Without Purpose: The Crisis of Japan's Global Financial Dominance," *Harvard Business Review* (March-April 1989).

rintah, yang digalakkan untuk menganut kebijakan ekonomi nasional di bawah kondisi persaingan substansial dalam negeri tetapi memberi perlindungan terhadap persaingan dari luar. Dengan ditopang oleh sistem semacam itu, Jepang telah mampu dalam waktu yang relatif singkat menempatkan dirinya di antara deretan negara-negara industri maju.³¹ Bahkan muncul pandangan bahwa dalam bidang teknologi, industri, keuangan dan bidang-bidang lain, Jepang akan melampaui negara-negara lain. Oleh karena itu cepat atau lambat identitas militerisme Jepang akan tampak nyata.

Mengenai faktor yang kedua, memang ada anggapan bahwa hegemoni Amerika Serikat mulai menyusut, seperti dikemukakan oleh sejarawan dari Yale, Paul Kennedy dan ilmuwan politik dari Princeton, Robert Gilpin.³² Perdebatan mengenai hal itu masih terus berlangsung. Tapi kritik yang diajukan oleh Lutwak, Pfaff dan Will terhadap argumen Kennedy seolah-olah menunjukkan bahwa penyusutan kekuatan Amerika Serikat bersifat relatif dan berlangsung dalam periode yang lama, karena akhirnya diakui bahwa Amerika Serikat tetap dianggap seba-

gai kekuatan ekonomi terbesar di dunia.³³ Penyusutan relatif itu terutama disebabkan oleh kemajuan-kemajuan perekonomian sekutu-sekutu dan teman-teman Amerika Serikat sendiri, terutama di kawasan Pasifik. Jadi menurut mereka belum waktunya untuk membicarakan kemerosotan hegemoni Amerika Serikat. Demikian pun Susan Strange dari *the London School of Economics* berpendapat bahwa hegemoni Amerika Serikat belum pudar. Ia mengatakan "the lament on 'after hegemoni' is the favorite habit of American self-indulgence".³⁴

Selanjutnya, Jepang di bawah Nakasone berusaha melakukan apa yang disebut *Defense Midterm Review* untuk meningkatkan kemampuan Jepang membagi beban pertahanan dengan Amerika Serikat, di samping meningkatkan bantuan-bantuan strategisnya. Siapa pun yang memerintah di Amerika Serikat di masa mendatang akan memelihara hubungan strategisnya dengan Jepang, dan Amerika Serikat akan mengharapkan suatu pembagian beban (*burden sharing*) yang lebih besar dari Jepang. Walaupun Jepang telah memberikan tanggapan positif³⁵ terhadap tuntutan pembagian beban, tekanan-tekanan yang berkelanjutan diperkirakan masih akan terjadi di masa mendatang, terutama jika masalahnya dikaitkan dengan persoalan-persoalan hu-

³¹Bandoro, "Dialektika Paradigma."

³²Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000* (New York: Random House, 1987). Robert Gilpin, *War and Change in World Politics* (New York: Cambridge University Press, 1981). Tetapi apa yang dikemukakan oleh Kennedy mengenai merosotnya peranan AS dipertanyakan oleh Charles Wolf Jr. dalam artikelnya "US Decline, Illusion and Reality," *Asian Wall Street Journal*, 13-14 Mei 1988. Penulis Jepang sendiri juga memperingati orang-orang Jepang agar tidak terlalu gegabah membicarakan jatuhnya supremasi Amerika Serikat, karena hal itu akan mempengaruhi hubungan Jepang-Amerika Serikat. Lihat Akihiko Tanaka, "When Hegemony Falls," *Look Japan* (Oktober 1988).

³³Edward Lutwak, "How and Why Are the Mighty Fallen,"? *Guardian Weekly*, 21 Februari 1988; William Pfaff, "America is in Decline if it Choose to Be," *International Herald Tribune*, 10 Februari 1988; George F. Will, "Talk of US Decline Comes Too Easily," *International Herald Tribune*, 3 Maret 1988.

³⁴Susan Strange, "The Persistent Myth of Lost Hegemony," *International Organisation*, Vol. 41/4 (Autumn 1987): 551-557.

³⁵Jusuf Wanandi, "Japan's International and Regional Role," *Indonesian Quarterly*, Vol. XVI/3 (Juli 1988): 329.

bugan ekonomi Amerika Serikat-Jepang dan ketidakseimbangan perdagangan. Dari sudut pandang kebijakan Amerika Serikat, Jepang memainkan peran sebagai *free rider*. Jepang telah memanfaatkan lingkungan internasional yang menguntungkan untuk pembangunan ekonominya yang diciptakan oleh Amerika Serikat.³⁶ Tetapi keasyikan Jepang ini dapat menimbulkan tekanan-tekanan yang lebih besar dari Amerika Serikat agar Jepang mengambil peran yang lebih aktif dengan meninggalkan predikat *free rider*.

Analisis berikut akan melihat kebijakan ekonomi dan keamanan Jepang yang menunjukkan perubahan peranana Jepang dari *free rider* ke *supporter*. Ekonomi Jepang mengalami kemajuan yang demikian pesat dalam satu dasawarsa terakhir. Diukur dengan rekor bangsa-bangsa lain, ekonomi Jepang telah memperlihatkan pola pertumbuhan tertopang yang luar biasa dan telah menjadi negara kaya hanya setelah melalui laju tinggi pertumbuhan ekonomi dalam periode panjang. Penampilan ekonomi Jepang merupakan yang terbaik di dunia dan bahkan menimbulkan *nightmare* bagi Amerika Utara dan Eropa Barat. Banyak artikel yang terbit di Amerika Serikat menggambarkan Jepang sebagai suatu negara yang terlibat dalam "economic Pearl Harbour".³⁷

Perubahan dalam kebijakan ekonomi luar negeri Jepang terutama dipicu oleh perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam lingkungan ekonomi internasional, misalnya dalam bidang liberalisasi finansial dan proteksionisme yang berhubungan dengan liberalisasi perdagangan.

Liberalisasi finansial sangat berhubungan dengan sistem *exchange rate* yang fleksibel yang beroperasi sejak tahun 1973. Tetapi sebagai suatu sistem ia tidak lepas dari persoalan yang dihadapi, sebagaimana terlihat dari pergeseran besar-besaran dalam *exchange rate* yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan ekonomi Amerika Serikat untuk mendapatkan kembali penampilan ekonominya seperti pada tingkat sebelumnya. Memang setelah Perang Dunia II Amerika Serikat menjadi kekuatan finansial yang hegemonik, tetapi status finansialnya mulai menurun selama tahun 1970-an (karena pergeseran *exchange rate* tadi), dan mendapatkan kembali posisi dominannya pada saat Reagan menjadi Presiden Amerika Serikat.³⁸

Pada tahun 1980-an, untuk mengurangi inflasi domestik dan mempertahankan nilai dolar, Amerika Serikat mengambil kebijakan bunga yang tinggi. Tetapi kombinasi kebijakan itu menyebabkan akselerasi masuknya modal ke Amerika Serikat, dan membuatnya menjadi negara penghutang terbesar. Sementara itu, dalam periode yang sama Jepang memperlihatkan kemampuannya menjadi pengeksport modal terbesar di dunia. Surplus perdagangannya yang pada tahun 1983 sebesar US\$35 milyar meningkat menjadi US\$53 milyar pada tahun 1985, dan hal ini telah memungkinkan Jepang berkembang menjadi kekuatan finansial.³⁹ Posisi Jepang itu semakin diperkuat tidak hanya oleh bank-bank Jepang yang mencari peluang di luar negeri dalam bentuk misalnya *syndicate loans*, tetapi juga oleh besarnya arus investasi langsung Jepang di berbagai negara dan kawasan di dunia. Sampai tahun

³⁶Bandoro, "Dialektika Paradigma."

³⁷Inouguchi, "The Ideas and Structures," 31.

³⁸Gilpin, *The Political Economy*, 328.

³⁹Ibid.

fiskal 1989 nilai investasi langsung Jepang per kawasan dan negara sebesar US\$67,540 juta.⁴⁰

Perubahan lingkungan ekonomi internasional kedua adalah munculnya proteksionisme yang selalu dihubungkan dengan liberalisasi perdagangan. Tahap permulaan resmi global tahun 1973 telah mempercepat kemajuan berarti dari ekonomi-ekonomi yang sebelumnya bukan merupakan kekuatan utama dalam perdagangan dan industri dunia. Selain Jepang, ekonomi-ekonomi lainnya adalah negara industri baru (NICs); mereka mulai memperlihatkan potensi mereka menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan dalam perdagangan dan industri dunia.⁴¹ Dengan memanfaatkan menurunnya tingkat persaingan dalam sektor manufaktur di beberapa negara industri utama seperti Eropa Barat dan Amerika Utara, mereka (negara-negara NICs) mendapatkan pasar ekspor yang besar di negara-negara industri, antara lain dalam sektor tekstil, baja, otomotif, peralatan elektrik dan elektronik. Sementara itu, penyesuaian industrial di negara-negara industri berjalan lambat dan menghadapi berbagai *resistance* dari dalam yang sebagian besar disebabkan karena *self complacency*. Sebagai akibatnya muncul gagasan proteksionisme terhadap produk-produk luar.

Bersamaan dengan terjadinya perubahan fundamental dalam lingkungan ekonomi internasional terjadi pula perubahan dalam asumsi mengenai manajemen ekonomi Jepang dalam tahun 1980-an. Asumsi pertama adalah bahwa ekonomi kecil tidak akan mempengaruhi ekonomi-ekonomi lainnya, sedangkan ekonomi besar akan memberi pe-

ngaruh. Asumsi kedua adalah bahwa ekonomi dapat diisolasi (ekonomi tertutup) dan kekuatan-kekuatan eksternal dapat dikendalikan di perbatasan ekonomi itu.

Asumsi "ekonomi kecil" dikesampingkan ketika Jepang mulai memperlihatkan ekspansi ekonominya yang begitu cepat, suatu ekonomi yang mulai memberi dampak berarti pada ekonomi dunia, termasuk ekonomi-ekonomi tetangga Jepang. Kondisi bisnis di Jepang sering kali mempengaruhi arah perkembangan ekonomi negara-negara Pasifik Barat, terutama negara industri baru di mana sektor manufaktur dan perdagangan mereka sangat bergantung pada impor modal dari Jepang dan pinjaman dana-dana Jepang.⁴² Dapat dikatakan bahwa Jepang merupakan partner dagang dan negara donor nomor satu bagi negara-negara Pasifik Barat. Kontribusi ekonomi Jepang pada pembangunan negara-negara Pasifik khususnya dan negara-negara di kawasan lain membuktikan bahwa ia tidak lagi dapat dianggap sebagai "ekonomi kecil" dan "ekonomi tertutup".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa status Jepang telah berubah dari negara kecil yang tertutup menjadi negara terbuka dalam pasar dunia, dan dewasa ini ia merupakan sebuah negara yang maju secara ekonomis yang telah berhasil dalam perkembangan ekonomi. Kemajuan ekonomi Jepang yang begitu mengagumkan terutama bila dilihat dari *size* dan produktivitas ekonominya akan menempatkan Jepang dalam posisi atau peranan sebagai *supporter* Amerika Serikat.

Seperti halnya asumsi "ekonomi kecil" dalam bidang ekonomi, asumsi "free rider" dalam bidang keamanan juga mulai diang-

⁴⁰*Japan 1991*, 57.

⁴¹Lihat catatan kaki No. 16.

⁴²Inouguchi, "Image and Options," 106.

gap tidak berlaku. Kendati kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, asumsi "free rider" masih terus tampak sampai akhir tahun 1970-an. Sejak awal tahun 1980-an Amerika Serikat menekan Jepang agar bersedia mengadakan pembagian beban yang lebih memadai dalam bidang keamanan. Usaha menciptakan itu antara lain dilakukan dengan meninjau kembali secara teratur hubungan keamanan Jepang-Amerika Serikat atau melalui pernyataan-pernyataan yang bernada sinis terhadap fungsi Pasukan Bela Diri Jepang.⁴³ Jepang memang telah memberi tanggapan positif, tetapi tekanan-tekanan Amerika Serikat yang semakin kuat tampaknya akan terus terlihat di masa depan.

Jadi sebagai *supporter*, arah tindakan-tindakan yang diambil oleh Jepang seharusnya memberi arti penting pada kebijakan Amerika Serikat. Salah satu cara di mana Jepang dapat memainkan peranan *supporter* adalah menekankan kualitas multidimensional dari keamanan nasional. Hal ini diungkapkan oleh gagasan Perdana Menteri Ohira mengenai sistem keamanan komprehensif.⁴⁴ Dalam gagasan ini terkandung harapan bahwa kontribusi Jepang pada lingkungan ekonomi internasional, seperti bantuan luar negeri, penjadwalan kembali hutang, dan kontribusi pada badan-badan internasional akan dianggap sebagai faktor pendukung kebijakan Amerika Serikat.

Persepsi mengenai kerawanan Jepang dan kerugian atau biaya yang besar yang harus dikeluarkan, jika perjanjian keamanan

an Jepang-Amerika Serikat dihentikan, menjadi pendorong yang cukup kuat bagi pemerintah Jepang untuk memenuhi tekanan dan tuntutan Amerika Serikat. Tanpa hal ini orang tidak akan memahami secara penuh persekutuan pemerintah Jepang dengan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir ini, misalnya dalam masalah kerjasama pertahanan, liberalisasi perdagangan dan liberalisasi finansial dan pasar modal. Jadi secara hati-hati pemerintah Jepang menerima tuntutan Amerika Serikat dengan memperhatikan kepekaan pasifisme Jepang.

Beberapa kata kunci yang menggambarkan karakteristik hubungan keamanan Jepang-Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir ini misalnya adalah "member of the Western bloc" (Ohira), "an allied country" (Suzuki), dan "unsinkable aircraft carrier" (Nakasone).⁴⁵ Ini menunjukkan usaha-usaha pemerintah Jepang untuk lebih mempererat hubungannya dengan Amerika Serikat. Tetapi memang sulit mengatakan sejauh mana pemerintah Jepang akan mengikuti kebijakan persekutuan dengan Amerika Serikat. Bila kita amati secara seksama harapan dan keinginan pemerintah Amerika Serikat atas Pasukan Bela Diri Jepang, tampak secara jelas bahwa tingkat kemampuan militer Jepang masih sangat terbatas.⁴⁶ Tetapi oleh karena pemerintah Jepang percaya bahwa senjata nuklir jarak menengah Soviet tidak diarahkan padanya, Jepang dapat menghindari diri dari keputusan mengenai postur pertahanan bagaimana yang harus dikembangkan dalam hubungan aliansi Jepang-Amerika Serikat.

⁴³Bantarto Bandoro, "Trends in Japan's Defense Policy, 1978-1983," (MA Thesis, 1986).

⁴⁴Mengenai ringkasan laporan tentang keamanan komprehensif Jepang baca Robert Bernet, *Beyond War* (New York: Pergamon Brassey, 1984), 1-6.

⁴⁵Bandoro, "Trends in Japan's Defense Policy."

⁴⁶Ibid.

Beberapa Opsi Jepang

Seperti telah dikatakan di muka bahwa perubahan-perubahan yang cepat dalam lingkungan ekonomi politik internasional dan yang dialami oleh Jepang sendiri, telah menimbulkan berbagai kesan mengenai diri Jepang dan peranannya dalam dunia internasional. Sehubungan dengan itu muncul berbagai alternatif kebijakan mengenai peran apa yang harus dimainkan oleh Jepang dalam lingkungan yang dinamis itu. Dalam bagian ini kita akan melihat beberapa opsi atau skenario Jepang mengenai sistem dunia untuk sekitar dua puluh lima tahun mendatang, dan dalam masing-masing skenario ini peranan Jepang dan tingkat pembagian beban dengan Amerika Serikat juga akan dibahas. Selanjutnya, pembahasan mengenai skenario mana yang paling mungkin direalisasi akan dikaitkan dengan beberapa kondisi.

Ada empat skenario yang oleh Jepang dilihat sebagai suatu *visions of future*. Meskipun ada yang tumpang tindih, skenario-skenario ini mencerminkan berbagai pandangan yang berbeda mengenai perkembangan global dan distribusi kekuatan ekonomi dan militer. Perlu dicatat bahwa bukan hanya Jepang saja yang mengembangkan skenario ini melainkan juga non-Jepang mengingat peranan yang akan dimainkan oleh Jepang akan lebih meningkat di masa depan.⁴⁷ Skenario-skenario itu adalah *Pax Americana Tahap II*, *Bigemony*, *Pax Con-sortis* dan *Pax Nipponica*.

Kesan mengenai masa depan yang berupa *Pax Americana Tahap II (Pax Americana Phase II)* pertama kali diartikulasikan oleh

⁴⁷Penulis-penulis Barat yang juga mengembangkan skenario-skenario ini antara lain Zbigniew Brzezinski, Ezra Vogel, Clyde Prestowitz.

orang-orang Amerika untuk memperlihatkan bahwa Amerika telah memperoleh kembali posisi utamanya di dunia dengan memanfaatkan kapasitasnya menciptakan tata tertib dan keamanan dalam masa post-Perang Dunia II. Garis besar skenario ini pertama kali dipola pada sekitar pertengahan tahun 1970-an ketika trauma perang Vietnam masih terasa kuat dan ketika pengaruh global Soviet dirasakan secara berlebihan di Amerika Serikat. Kata kunci yang dipakai oleh ilmuwan politik Amerika Serikat untuk menggambarkan kondisi itu adalah "rezim" di mana Amerika Serikat mempertahankan hegemoninya dan mengendalikan arah perkembangan dunia. Ungkapan-ungkapan seperti "after hegemony" dan "cooperation under anarchy", yang kedua-duanya dipakai sebagai judul buku,⁴⁸ mencerminkan kepentingan-kepentingan akademik dalam mengartikulasikan model masa depan ini.

Kesan ini merupakan kesan yang cukup favorit bagi Jepang oleh karena kesan itu mengandung arti mempertahankan konsentrasi tradisional Jepang pada peran ekonomi tanpa peningkatan drastis dalam peran keamanan, yang seluruhnya didelegasikan kepada Amerika Serikat.

Peran Jepang dalam skenario *Pax Americana Tahap II* sesungguhnya tidak jauh berbeda dari yang dimainkan dewasa ini, yaitu peran yang bersifat ekonomi di mana beban keamanan global ditanggung oleh Amerika Serikat. Kendati terjadi akselerasi dalam kerjasama keamanan Jepang-Ameri-

⁴⁸Lihat misalnya Stephen Krasner, *International Regime*, ed. (Ithaca: Cornell University Press, 1983); Robert Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Politics* (Princeton: Princeton University Press, 1984). Karya akademik lain yang juga membahas masalah "hegemoni" adalah Gilpin, *War and Change*.

ka Serikat, pembagian kerja antara kedua negara tidak akan berubah. Demikian pun jika Jepang memperluas kerjasama keamanannya, misalnya dengan mengirim kapal perang ke Teluk Parsi,⁴⁹ hal itu malah akan memperkuat sistem dunia yang didominasi oleh Amerika Serikat. Peningkatan bantuan-bantuan strategis Jepang kepada negara Dunia Ketiga, seperti Pakistan, Turki atau Honduras, juga akan memperkuat kepemimpinan keamanan Amerika Serikat. Meskipun demikian, Jepang suatu saat akan mencoba menanamkan pengaruhnya melalui cara-cara itu di negara-negara lain. Tetapi dalam skenario ini Jepang menghadapi kendala-kendala yang berasal dari dalam negeri atau lingkungan internasional.

Sementara itu, peran regional Jepang akan lebih dititikberatkan pada bidang ekonomi, dalam arti Jepang menjadi *core* yang vital dalam pertumbuhan kawasan Pasifik, yang mencakup tiga wilayah, yaitu: (1) Meksiko bagian utara, Amerika Serikat dan Kanada; (2) Jepang; dan (3) Pasifik, termasuk di dalamnya negara industri baru, Cina, dan negara anggota ASEAN.⁵⁰ Dimasukkannya kelompok ekonomi kedua dan ketiga dalam zone ekonomi Amerika Serikat yang diperluas akan merupakan faktor utama dalam kebangkitan kembali Amerika Serikat. Singkatnya, peran Jepang dalam skenario ini adalah mengkaitkan ekonomi Amerika Serikat dengan ekonomi-ekonomi Pasifik dalam cara-cara yang lebih memadai daripada sekarang.

⁴⁹Pemerintah Kaifu pernah mengajukan usul kepada Sidang Luar Biasa Diet untuk membentuk *Peace Cooperation Corps* untuk dikirim ke Teluk Parsi. Seirit-su Ogura, "Managing the Kuwait Crisis: Japan at the Crossroads," *JCER Report*, Vol. 2/9 (November 1990).

⁵⁰Peter Drysdale, *International Economic Pluralism: Economic Policy in East Asia and the Pacific* (Sydney: George Allen & Unwin, 1988).

Skenario Jepang kedua (*bigemony*) terutama diartikulasikan oleh para ekonom dan pengusaha oleh karena perkembangan dan integrasi cepat yang oleh Robert Gilpin disebut sebagai *nichibei economy* (ekonomi Jepang-Amerika Serikat).⁵¹ C. Fred Bergsten, seorang ekonom dan bekas birokrat senior pada zaman pemerintahan Carter, menggunakan istilah *bigemony* untuk menunjukkan hubungan yang dekat antara Amerika Serikat dan Jepang dalam mengelola ekonomi dunia. Sementara itu, Zbigniew Brezezinski, bekas penasihat keamanan Presiden Carter, menggunakan istilah *Amerippon* untuk menggambarkan integrasi yang dekat antara Amerika Serikat dan Jepang dalam sektor manufaktur, finansial dan komersial.

Di Jepang kesan ini dikemukakan oleh bekas Perdana Menteri Nakasone. Dalam salah satu pertemuannya dengan Presiden Reagan, Nakasone mengatakan bahwa Jepang dan Amerika Serikat perlu mengembangkan komunitas tunggal dengan tujuan yang sama, meskipun yang dimaksud oleh Nakasone itu lebih difokuskan pada aspek keamanan daripada aspek ekonomi dari hubungan bilateral mereka.⁵²

Peran Jepang dalam skenario *bigemony* ini kurang lebih sama dengan peran Jepang dalam skenario yang disebut pertama. Tetapi bahwa kekuatan ekonomi dapat berkembang menjadi kekuatan militer sulit dilakukan, dan Jepang tidak dapat dikecualikan dari asumsi itu. Tetapi bentuk di mana kekuatan ekonomi Jepang dapat diterjemahkan dalam kekuatan militer memerlukan suatu analisis yang cermat. Dalam skenario ini, kerjasama dan integrasi ekonomi, teknik dan strategi antara Jepang dan Amerika Se-

⁵¹Gilpin, *The Political Economy*, 6.

⁵²*Asahi Evening News*, 19 Januari 1983.

rikat akan menonjol dan memiliki skala yang luas. Oleh sebab itu, mungkin tidak akan sulit bagi kita melihat misalnya pengembangan secara bersama sebuah pesawat tempur yang khusus diproduksi untuk Jepang, dengan menggunakan dana Jepang, tetapi menggunakan teknologi *know-how* Amerika Serikat dan dijual ke negara Dunia Ketiga di bawah nama "buatan Amerika Serikat". Jadi integrasi strategi antara kedua negara di Pasifik akan merupakan bukti peran hegemoni yang dimainkan oleh Jepang dalam bidang keamanan.⁵³

Sementara itu, peran regional Jepang akan merupakan akselerasi dari perannya yang terdapat dalam skenario pertama, yaitu pengembangan komunitas ekonomi Pasifik yang dimotori oleh peran luas Jepang. Dalam skenario ini persaingan antara Jepang dan Amerika Serikat mengenai kerangka struktural hubungan ekonomi Pasifik dengan Amerika Serikat akan dapat dihilangkan. Tetapi kalau kita amati kembali kawasan Pasifik, kawasan ini sesungguhnya menghadapi alternatif yang cukup jelas mengenai kerangka ekonominya, yaitu menciptakan rezim perdagangan bebas yang dimotori oleh Amerika Serikat melalui hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, atau komunitas regional dengan inisiatif-inisiatif *de facto* Jepang, yang mencoba mempertahankan zone perdagangan bebas. Selanjutnya, dalam skenario ini Eropa Barat akan cenderung terlokalisasi di kawasan mereka sendiri. Gambaran ini mengingatkan kita pada skenario masa depan yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein, yaitu pembentukan dua blok *de facto* yang terdiri dari

Amerika Serikat, Jepang dan Cina di satu pihak dan Eropa Barat dan Eropa Timur di lain pihak.⁵⁴

Skenario Jepang ketiga -- *Pax Consortis* -- menggambarkan dunia yang terdiri dari berbagai konsorsium, di mana aktor-aktor utama dalam konsorsium itu mencoba membentuk suatu koalisi dan melakukan penyesuaian kebijakan dan persetujuan-persetujuan di antara mereka sendiri. Di sini kita tidak menemukan aktor tunggal yang akan mendominasi aktor-aktor lainnya. Skenario ini menyerupai skenario pertama bila kita lihat dari "rangka mentahnya", yaitu "rezim". Perbedaan besar antara kedua skenario itu adalah skenario ketiga terutama didasarkan atas penyesuaian kebijakan yang bersifat pluralistik antara negara/aktor utama, sedangkan skenario pertama lebih menonjolkan kepemimpinan moral atau *administrative guidance* dari negara yang dianggap sebagai *primus inter pares*, yaitu Amerika Serikat. Image ketiga ini cukup populer di kalangan orang Jepang tidak hanya karena adanya keengganan Jepang untuk memikul beban keamanan yang lebih besar tetapi juga karena Jepang tidak begitu menyambut baik sikap Amerika Serikat yang mengatur negara lain di saat kekuatan Amerika Serikat sendiri sedang mengalami "penyusutan". Kesan *Pax Consortis* ini tampaknya lebih sesuai dengan sentimen-sentimen pasifis yang ada di Jepang.

Dalam skenario ini, kita dapat mengidentifikasi dua jenis peran yang dapat dimainkan oleh Jepang. Pertama, dengan kemungkinan netralisasi arsenal nuklir strategis baik melalui proses *detente* Amerika Serikat-Uni Soviet atau melalui dobrakan

⁵³Hal ini tampak dari keputusan Jepang untuk melakukan alih teknologi militer kepada Amerika Serikat (1983) dan keputusan Jepang untuk partisipasi dalam program perang bintang Amerika Serikat (1986).

⁵⁴Immanuel Wallerstein, "Friends as a Foes," *Foreign Policy* (Fall 1980): 119-131.

teknologi. Di sini peran utama Jepang adalah diplomasi ekonomi secara diam-diam untuk mengembangkan suatu koalisi dan membentuk penyesuaian-penyesuaian kebijakan di antara para anggota konsorsium itu, di mana tidak ada satu negara pun yang dominan.⁵⁵ Kedua, membantu menciptakan dunia yang bebas dari penyelesaian militer, termasuk difusi sistem pertahanan anti nuklir dan perluasan bantuan-bantuan ekonomi yang masif.

Peran regional Jepang dalam skenario ini sebagai koordinator dan promotor kepentingan-kepentingan negara Asia-Pasifik yang belum seluruhnya diwakili dalam sistem PBB atau institusi ekonomi dari negara-negara industri, seperti OECD. Di sini Jepang memainkan peran semacam "juru bicara" negara berkembang dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh institusi ekonomi itu. Peran regional Jepang kedua adalah moderator khususnya dalam masalah-masalah keamanan, misalnya bertindak sebagai penengah dalam mencapai rekonsiliasi antara Korea Utara dan Korea Selatan, atau rekonstruksi Kamboja melalui bantuan dari institusi multilateral seperti bank Pembangunan Asia. Sementara itu, peran Eropa Barat akan lebih menonjol dalam skenario ini daripada skenario-skenario sebelumnya, oleh karena secara tradisional dalam setiap pertemuan tingkat tinggi negara-negara Barat, Eropa Barat dapat menyesuaikan dengan situasi di mana berbagai aktor mencoba menyesuaikan kepentingan-kepentingan mereka yang saling bertentangan. Selain itu, hubungan ekonomi yang se-

makin meningkat antara Eropa Barat dan Asia-Pasifik juga akan mendorong munculnya pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan skenario ini.

Kesan yang terakhir adalah *Pax Nipponica* yang pertama kali dikemukakan oleh sosiolog dari Harvard University, Ezra Vogel.⁵⁶ Kesan ini mengandung arti bangkitnya kembali kekuatan ekonomi Jepang. Skenario semacam ini disebarluaskan oleh orang-orang Amerika yang merasa kuatir atas hilangnya daya saing teknologi dan manufaktur Amerika Serikat. Ronald Morse dari US Library Congres misalnya, pernah mengajukan pandangan demikian dalam artikelnya yang berjudul "Japan's Drive to Pre-eminence".⁵⁷ Meningkatnya nasionalisme Jepang bersamaan dengan apa yang oleh Jepang disebut internasionalisasi Jepang memberi kekuatan pada skenario ini oleh karena intrusi kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi eksternal ke dalam masyarakat Jepang akan mendorong timbulnya reaksi terhadap internasionalisasi.

Peran regional Jepang dalam skenario ini dapat dibandingkan dengan peranan Inggris dalam abad 19 ketika ia berperan sebagai kekuatan pengimbang (*balancer*) di antara kekuatan kontinental, dan ketika kepentingan-kepentingan perdagangannya membantunya memenuhi peranan itu. Kondisi-kondisi yang dapat membantu terciptanya skenario ini adalah penghapusan arsenal nuklir strategis negara-negara adidaya atau pengembangan sistem pertahanan anti-nuklir. Tanpa netralisasi senjata nuklir, peran Jepang dalam bidang keamanan akan berkurang, dan *Pax Nipponica* dalam bentuknya yang

⁵⁵Kecenderungan peran Jepang seperti ini tampak dari keikutsertaannya dalam setiap pertemuan negara-negara industri maju. Kerjasama antara negara-negara industri maju yang tergabung dalam G-7 memberi kesan adanya semacam konsorsium.

⁵⁶Ezra Vogel, "Pax Nipponica," *Foreign Affairs*, vol. 64/4 (Spring 1986): 753-767.

⁵⁷Morse, "Japan's Drive."

utuh tidak akan dapat direalisasi. Sementara itu, peran regional Jepang akan lebih disesuaikan dengan peran globalnya oleh karena posisinya yang menonjol juga memungkinkanannya memainkan peran utama di kawasan Pasifik.

Pertanyaan utama yang muncul dari skenario-skenario di atas adalah sejauh mana skenario itu dianggap layak dan dalam kondisi apa saja skenario-skenario itu dapat direalisasi. Jika kita perhatikan seksama analisis terhadap skenario-skenario di atas, kita dapat mengidentifikasi tiga faktor yang dapat membantu kita membedakan skenario yang satu dari skenario yang lainnya, yaitu: (1) netralisasi arsenal nuklir strategis; (2) dinamisme teknologi dan saintifik negara-negara besar, terutama Jepang dan Amerika Serikat; dan (3) hutang sejarah. Di bawah ini kita akan melihat kemungkinan realisasi skenario-skenario di atas dilihat dari tiga faktor tadi.

Apakah skenario pertama -- *Pax Americana* tahap kedua -- dapat direalisasi atau tidak sangat tergantung atas faktor kedua. Argumentasinya adalah skenario ini cenderung didasari atas *free spirit*, kompetisi terbuka dan karakter dinamis dari masyarakat Amerika Serikat, yang dari sudut pandang Amerika Serikat akan membantu Amerika Serikat memperkuat kemampuan inovasi dan invensinya. Skenario ini sangat mungkin direalisasi jika Amerika Serikat dapat mengatasi posisinya yang "sulit" sekarang ini. Ada dua kebijakan esensial agar Amerika Serikat dapat mengatasi posisinya itu, yaitu: (1) kerjasama kebijakan makro-ekonomi yang erat dengan Jepang; dan (2) mengkaitkan ekonomi Amerika Serikat secara luas dengan ekonomi-ekonomi Asia-Pasifik di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Apakah Amerika Serikat dapat mencapai tu-

juan ini tanpa harus membangkitkan nasionalisme Asia terhadapnya merupakan persoalan yang masih harus kita kaji lagi.

Sementara itu, fisibilitas skenario kedua -- *bigemony* -- tergantung pada faktor ketiga (hutang sejarah). Dengan perkataan lain, apakah perasaan pasifis Jepang dapat diatasi dan apakah tetangga-tetangga Jepang di Asia Timur dapat menerima kepemimpinan Jepang dalam masalah keamanan global dan regional, meskipun kepemimpinan itu didasarkan atas kerjasama dengan Amerika Serikat, belum dapat diketahui secara pasti. Jelasnya, skenario ini hanya dapat direalisasi jika hubungan dekat Jepang-Amerika Serikat mampu mengatasi persoalan hutang sejarah. Jadi, skenario ini akan berjalan agak cukup lamban tapi mantap, apalagi kemajuan teknologi dan dinamisme ekonomi akan semakin mendorong Jepang dan Amerika Serikat untuk menjalin hubungan yang lebih dekat.

Lebih lanjut, skenario ketiga -- *Pax Consortis* -- akan tergantung pada faktor kesatu (netralisasi nuklir). Skenario ini sangat mungkin direalisasi untuk jangka panjang dan bukan jangka pendek, oleh karena usaha negara adidaya untuk menghapuskan sama sekali arsenal nuklir dan mengubah peran mereka menjadi peran yang kurang penting memakan waktu yang sangat lama, seperti halnya jatuhnya imperium Roma yang memakan waktu 300 tahun setelah mengalami penyusutan yang sulit dielakkan. Jika netralisasi arsenal nuklir dapat diciptakan, maka pengawasan senjata konvensional melalui semacam konsorsium akan menjadi fokus *Pax Consortis*.

Sementara itu fisibilitas *Pax Nipponica* akan tergantung pada faktor pertama (netralisasi nuklir) dan faktor kedua (dinamis-

me teknologi dan saintifik). Kalau misalnya kedua faktor itu dapat direalisasi, maka hal itu akan membuat faktor ketiga (hutang sejarah) menjadi kurang penting. Tetapi sebagaimana telah dikatakan di muka, tidak mudah bagi negara adidaya untuk begitu saja menghapuskan senjata nuklir. Demikian pun, Jepang akan menghadapi berbagai hambatan dalam memainkan peran keamanan. Pertama, sentimen pasifis publik Jepang tidak mudah dihilangkan. Kedua, sulit bagi Jepang memikul beban keamanan yang lebih besar yang berlangsung dalam waktu yang lama. Ketiga, ingatan bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia, mengenai tingkah laku Jepang dalam masa perang masih cukup kuat. Kendala-kendala ini sudah tentu akan membatasi sejauh mana skenario *Pax Nipponica* dapat menjadi kenyataan.⁵⁸

Dari analisis mengenai empat skenario di atas tampaknya dua skenario yang, untuk jangka menengah, paling mungkin direalisasi, yaitu skenario *Pax Americana* tahap kedua dan skenario *bigemony*. Untuk jangka waktu yang lebih panjang, misalnya 50 tahun, suatu campuran antara skenario *Pax Americana* dan *Pax Consortis* mungkin akan muncul. Tetapi dari 2 skenario yang dapat berlaku untuk jangka menengah, skenario *Pax Americana* tahap kedua adalah lebih mungkin direalisasi oleh karena skenario ini tidak mengandung resiko yang terlalu besar bagi Amerika Serikat maupun negara-negara lain di dunia. Dengan perkataan lain, dalam skenario ini Jepang dapat lebih berkonsentrasi pada peran ekonomi, sementara Amerika Serikat tidak perlu risau mengenai kesan negatif atas perannya selama ini atau mengambil kebijakan khusus untuk menga-

tasi posisinya, sebab hal itu justru akan memberi kesan menyusutnya peranan Amerika Serikat.

Apa yang hendak dikemukakan di sini adalah pandangan bahwa skenario *Pax Americana* tahap kedua dititikberatkan pada pembaruan yang akan dialami oleh Amerika Serikat dan bukan pada kemerosotannya. Pandangan ini tidak hanya menekankan pentingnya perkembangan yang terjadi di dunia terutama di kawasan Pasifik, tetapi juga berbagai kesempatan yang dapat diraih oleh Amerika Serikat melalui kekuatannya.⁵⁹ Bagaimanapun juga masih banyak yang mengakui Amerika Serikat sebagai kekuatan yang belum pudar.

Kebijakan yang Berorientasi Jangka Pendek

Seperti telah dikatakan di muka, berbagai perubahan cepat yang dialami oleh Jepang dan dalam lingkungan ekonomi politik internasional, telah menimbulkan berbagai kesan mengenai diri Jepang dan perannya di masa mendatang. Berbagai kebijakan alternatif muncul dalam setiap diskusi mengenai peran Jepang dalam konteks dinamisme Pasifik dan dalam dasawarsa-dasawarsa mendatang. Bersamaan dengan munculnya kebijakan alternatif jangka panjang, muncul pula kalkulasi kebijakan yang berorientasi jangka pendek, yaitu dalam bidang ekonomi (*prosperity*) dan keamanan.

Dalam bidang ekonomi, opsi Jepang dapat dilihat dalam bentuk *trilateralisme* atau *regionalisme*. Opsi ini sangat berhubungan

⁵⁸Bantarto Bandoro, "Amerika Serikat-Jepang: Dari Pax Americana ke Pax Consortis," *Analisis* (Januari-Februari 1989).

⁵⁹Joel Kotkin dan Yoriko Kishimoto, *The Third Century: America. Resurgence in the Asian Era* (New York: Crown Publisher, 1987).

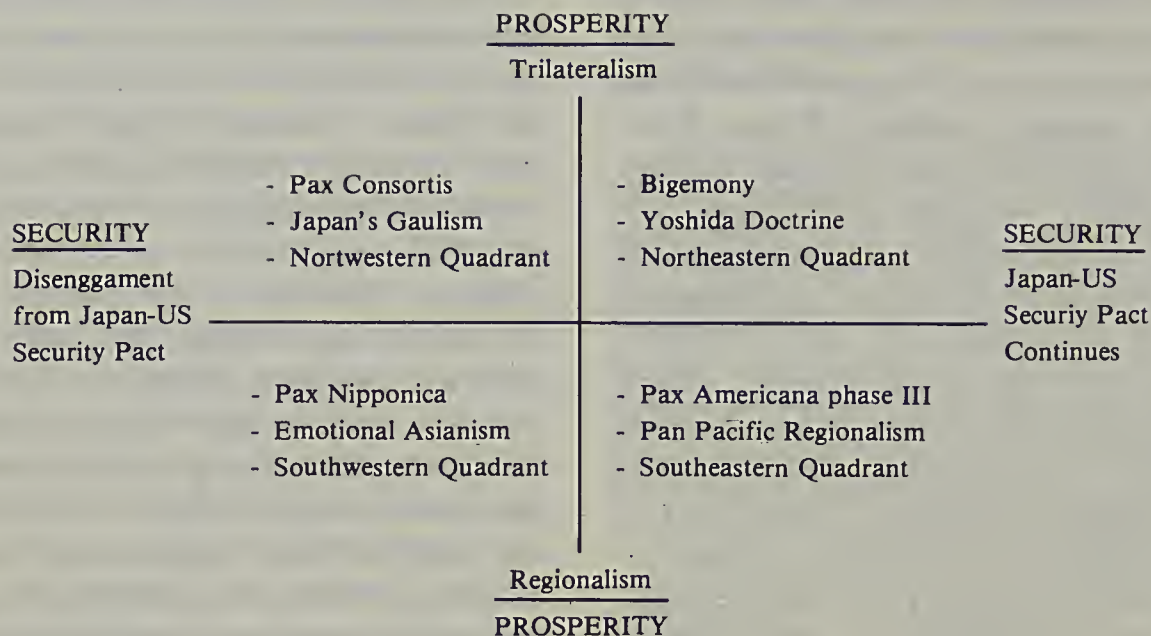
dengan persoalan seberapa besar Jepang harus memberi bobot atau perhatian pada kawasan Asia, atau seberapa besar perhatian Jepang kepada kawasan Eropa Barat sebagai salah satu pilar kawasan industri. Opsi Jepang ini sangat dipengaruhi oleh tingkat proteksionisme di Amerika Utara dan Eropa Barat, dan tingkat pembangunan ekonomi di kawasan yang disebut terakhir. Selanjutnya bila proteksionisme, seperti yang berlangsung di Eropa selama dasawarsa terakhir, tetap berlanjut, dan bila sistem perdagangan multilateral di bawah GATT retak, maka Jepang tidak akan memiliki pilihan kecuali mencari pasar dan membuka pasar baru. Demikian pun, jika proteksionisme Amerika Serikat bergerak ke arah yang sama dengan proteksionisme Eropa, maka Jepang mungkin akan lebih mengutamakan kerjasama dalam kerangka regionalisme. Dalam kerangka ini kawasan Pasifik akan mendapat perhatian yang lebih besar dari Jepang daripada Eropa atau bahkan Amerika Utara.

Dalam bidang keamanan, opsi Jepang adalah tetap melanjutkan hubungan keamanan dengan Amerika Serikat atau memutuskan hubungan itu. Oleh karena yang membentuk kebijakan keamanan adalah penilaian pemerintah Jepang sendiri terhadap hubungan keamanan Jepang-Amerika Serikat, maka Jepang tentu memiliki alasan khusus untuk tetap mempertahankan hubungan keamanan dengan Amerika Serikat. Sebagai "partner junior" Amerika Serikat, Jepang memperoleh keuntungan tertentu dari payung nuklir Amerika Serikat. Kemungkinan Jepang menjadi sasaran nuklir atau non-nuklir Uni Soviet dapat menjelaskan lebih lanjut, mengapa Jepang tidak akan menanggalkan hubungan keamanannya dengan Amerika Serikat.

Sementara itu ada beberapa formula mengenai bagaimana Jepang dapat menanggalkan atau melepaskan hubungan keamanannya dengan Amerika Serikat. Misalnya, model Perancis. Perancis memutuskan secara sendiri mengembangkan sistem pertahanan nuklir, tetapi ia tetap mempertahankan hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Jepang dapat mengambil model ini tanpa harus melepaskan sama sekali hubungan dengan Amerika Serikat. Formula lain adalah membiarkan Jepang memiliki kemampuan nuklir yang independen. Tetapi pilihan atas opsi ini tentu mengeluarkan ongkos yang sangat besar, terutama untuk mengatasi oposisi domestik dan oposisi dari luar. Aspek paling penting dari opsi ini adalah reaksi Amerika Serikat jika Jepang mengembangkan kemampuan nuklirnya. Dalam arti apakah Amerika Serikat akan bertindak sebagai penonton jika Jepang memilih opsi itu.

Alternatif kebijakan jangka pendek Jepang dapat digambarkan melalui dua koordinat, yaitu kemakmuran (*prosperity*) dan keamanan (*security*) seperti terlihat dalam diagram pada halaman berikut.

Prosperity mengandung unsur *trilateralism* dan *regionalism* pada masing-masing *axisnya*, sementara koordinat *security* (keamanan) memiliki unsur melanjutkan hubungan keamanan dengan Amerika Serikat atau melepaskan hubungan dari Amerika Serikat (lihat diagram). Masing-masing kuadran dari kedua koordinat itu memiliki beberapa opsi yang dapat mewakili alternatif kebijakan Jepang, yaitu: (1) *Northeastern quadrant* - kuadran ini mewakili pemikiran yang menekankan integrasi dengan Amerika Serikat (*bigemony*) dan keengganan untuk membentuk semacam komunitas Asia-Pasifik. Opsi ini menunjukkan besarnya penga-



ruh doktrin Yoshida⁶⁰ pada kebijakan keamanan Jepang; (2) *Northwestern quadrant* - kuadran ini memperlihatkan kecenderungan Jepang untuk mengambil jarak dalam hubungan keamanan dengan Amerika Serikat, tetapi tetap mempertahankan hubungan ekonomi dalam kerangka trilateralisme; (3) *Southeastern quadrant* - suatu kuadran yang mewakili kebijakan yang mempertahankan hubungan keamanan dengan Amerika Serikat dan dalam masalah ekonomi kawasan

Asia-Pasifik akan mendapat perhatian yang lebih besar daripada Eropa Barat. Arah opsi ini adalah pembentukan regionalisme Pan Pasifik; dan (4) *Southwest quadrant* - kuadran ini mewakili suatu pemikiran yang memberi arti kecil pada hubungan keamanan Jepang-Amerika Serikat, tetapi tetap mempertahankan hubungan ekonomi dengan kawasan Pasifik yang mencerminkan Asianisme emosional. Kalau terjadi globalisasi pada skenario Asia-Pasifik ini, maka skenario ini akan lebih tepat disebut sebagai skenario *Pax Nipponica*.

⁶⁰Pandangan Yoshida mengenai kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang dikemukakan dalam pidatonya di muka Diet tanggal 29 Januari 1950. Lebih lanjut lihat Reinhard Drifte, *The Security Factors in Japan Foreign and Security Policy* (London: Saltire Press, 1983), 90. Lihat pula Shigeru Yoshida, *The Yoshida Memoir* (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1961), 262-268. J.W. Dower, *Empire and Aftermath Yoshida Shigeru and the Japanese Experience, 1878-1954* (Cambridge: Council on East Asian Studies, 1979). Mengenai asal usul strategi Yoshida yang dibahas secara khusus lihat Tetsuya Kataoka dan Ramon H. Meyers, *Defending an Economic Superpower: Reassessing the US-Japan Security Alliance* (Boulder Colorado: Westview Press, 1989). Bab 2.

Penutup

Lingkungan ekonomi politik internasional dan kebijakan pemerintah Jepang telah banyak berubah dalam beberapa tahun ini. Setelah ketergantungan yang begitu besar pada hubungan keamanan Jepang-Amerika Serikat, kebijakan Jepang mulai bergeser pada tahun 1970-an dengan menekankan

hubungan trilateralisme dan regionalisme Pasifik. Selanjutnya, elemen-elemen *Gaunist* mulai muncul pada tahun 1980-an untuk mendukung pertahanan Jepang yang lebih kuat. Dalam tahun-tahun berikutnya terlihat indikasi bahwa Jepang melepaskan peran *free rider* dan mulai memainkan peran sebagai *supporter*. *Supporter* berbeda dari *free rider* pada segi opsi-opsi yang luas, dalam arti bahwa pilihan atas opsi-opsi yang diambil oleh *supporter* akan mempengaruhi kesejahteraan yang bersifat global. Apa yang dilakukan Jepang sebagai *supporter* telah membuktikan hal itu.

Uraian di atas, secara tidak langsung, sebenarnya telah mengidentifikasi suatu agenda yang tersembunyi dalam diskusi mengenai kebijakan Jepang sepuluh tahun terakhir ini, yaitu apakah hegemoni Amerika Serikat telah memudar? Sulit dipastikan secara pasti apakah hal itu betul-betul terjadi. Tapi munculnya dugaan itu sesungguhnya telah memperluas opsi-opsi yang dihadapi Jepang. Selain itu, ketidakstabilan jangka panjang dari percaturan ekonomi dan politik in-

ternasional mengharuskan Jepang mengembangkan strategi yang berorientasi jangka panjang. Karena dua alasan ini Jepang menghadapi kesulitan dalam memilih opsi-nya. Pertanyaan yang muncul, misalnya, bagaimana Jepang harus memainkan peran sebagai *supporter*? Mungkin yang harus diperhatikan oleh Jepang sebagai *supporter*, tanpa didominasi oleh aktor utama, adalah memperlihatkan kualitas yang sesungguhnya dengan cara tidak hanya membantu aktor utama, tetapi juga membantu membuat keseluruhan produksi global menjadi lebih baik.

Jika dikaitkan dengan kawasan Pasifik, isu dalam pemikiran Jepang mengenai dinamisme Pasifik dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu: (1) bagaimana mempertahankan dan meningkatkan hubungan dan persahabatannya dengan Amerika Serikat; dan (2) bagaimana memelihara hubungan bertetangga baik dengan kawasan Asia-Pasifik. Ini merupakan isu utama Jepang dalam menghadapi dinamisme Pasifik.

Surutnya Signifikansi Masalah Kamboja dan Perubahan-perubahan di Asia Tenggara

Edy PRASETYONO

SELAMA lebih dari satu dekade, sejak invasi Vietnam ke Kamboja pada tahun 1978, Asia Tenggara terpolarisasi dalam dua blok yang saling bertentangan yaitu aliansi diplomatik, politik, dan strategis antara ASEAN-Amerika Serikat-RRC *vis à vis* Vietnam-Uni Soviet. Variabel pokok polarisasi tersebut adalah persepsi ancaman keamanan dari pihak lain karena adanya konflik Kamboja. Masalah Kamboja kemudian muncul sebagai variabel penting yang membentuk pola hubungan internasional di Asia Tenggara.

Sejak tahun 1989 telah terjadi perubahan-perubahan hubungan internasional baik pada tingkat global maupun regional yaitu peredaan ketegangan Amerika Serikat-Uni Soviet, normalisasi hubungan RRC-Uni Soviet, perbaikan hubungan RRC-Vietnam, Vietnam-Thailand, serta normalisasi hubungan diplomatik RRC-Indonesia. Dalam konteks Asia Tenggara adanya perkembangan-perkembangan ke arah peredaan ketegangan demikian akan mempertanyakan apakah masalah Kamboja masih merupakan faktor penting dalam hubungan internasio-

nal di Asia Tenggara? Apakah masih relevan Asia Tenggara terpolarisasi dalam kutub-kutub yang saling bertentangan karena masalah Kamboja? Bagaimanakah wajah hubungan internasional di Asia Tenggara setelah terjadi perubahan-perubahan di atas? Dan terakhir, langkah-langkah apakah yang mungkin akan diambil oleh negara-negara Asia Tenggara, terutama ASEAN, menghadapi perubahan-perubahan di atas? Tulisan berikut dimaksudkan untuk membahas masalah-masalah di atas.

Asia Tenggara Pra 1989: Masalah Kamboja Sebagai Masalah Stabilitas dan Perdamaian di Asia Tenggara

Masalah Kamboja telah menimbulkan perhatian besar dari negara-negara Asia Tenggara dan menyebabkan keterlibatan kekuatan-kekuatan eksternal, terutama Amerika Serikat, Uni Soviet, dan RRC dengan segala kepentingan politik dan strategis mereka di kawasan ini. Masalah Kamboja kemudian menjadi masalah pokok

stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara serta membentuk pola hubungan internasional di kawasan ini.

Pentingnya masalah Kamboja bagi perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara ialah karena masalah ini mempunyai tiga dimensi yang saling terkait. Pertama, dimensi domestik. Masalah Kamboja merupakan hasil dari pertentangan politik memperebutkan kekuasaan di antara empat kekuatan di Kamboja, yaitu kelompok Heng Samrin dan Hun Sen, KPLNF yang dipimpin oleh Son Sann, Khmer Merah, dan kelompok Siha-nouk. Kedua, dimensi regional. Masalah Kamboja mencerminkan perbedaan perspektif geopolitik, pertentangan historis dan etnis, dan perselisihan masalah keamanan antara Vietnam-RRC, Vietnam-Kamboja, dan Vietnam-Thailand. Ketiga, dimensi internasional. Masalah Kamboja disebabkan oleh hubungan segitiga antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan RRC. Ketiga negara ini melihat pentingnya distribusi kekuasaan di Asia Tenggara, khususnya di Indocina, sebagai masalah penting yang mempengaruhi kepentingan keamanan mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan konsekuensinya, mereka berusaha untuk memperluas pengaruh di kawasan ini, atau paling tidak mereka berusaha mencegah pihak lain memperoleh kedudukan strategis di kawasan ini.¹

Karena dimensi-dimensi itu masalah Kamboja menjadi masalah penting yang mempengaruhi hubungan-hubungan Vietnam, RRC, dan ASEAN. Karena itu dapat dipahami bahwa usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah Kamboja menjadi sangat rumit karena esensi masalahnya tidak hanya

menyangkut persoalan bagaimana masing-masing negara-negara tersebut merumuskan kebijaksanaan mereka mengenai masalah Kamboja, melainkan juga karena kebijaksanaan mereka mengenai masalah Kamboja pun melibatkan kepentingan-kepentingan keamanan dan strategis mereka di Asia Tenggara, khususnya di Indocina.

ASEAN, misalnya, merumuskan kebijaksanaan mengenai masalah Kamboja dengan mengkombinasikan tekanan politik, ekonomi, diplomatik, dan militer terhadap Vietnam. Kebijakan ASEAN pada dasarnya mempunyai tiga elemen dasar. Pertama, isolasi baik secara ekonomi maupun politik terhadap Vietnam dengan menciptakan dan mempertahankan aliansi anti-Hanoi di arena internasional. Kedua, tekanan militer kepada Vietnam tanpa terlibat langsung dalam masalah Kamboja. Langkah ini dilakukan dengan memberikan bantuan kepada kelompok perlawanan anti-Hanoi dan anti-Heng Samrin melalui kerjasama dengan RRC dan Amerika Serikat. Ketiga, melibatkan diri dalam proses perundingan mengenai masalah Kamboja dengan Vietnam.

Walaupun kebijakan ASEAN mengenai masalah Kamboja sesuai dengan strategi RRC, dalam artian baik ASEAN maupun RRC menentang dominasi Vietnam di Indocina, sebenarnya hubungan antara ASEAN dan RRC diwarnai oleh ambivalensi. Di satu pihak karena RRC mendukung Thailand menentang Vietnam, maka ASEAN terlibat dalam kerjasama diplomasi dengan Beijing dalam masalah Kamboja. Di lain pihak, oleh sebagian negara ASEAN RRC masih dilihat dengan rasa curiga karena ambisi regionalnya di Asia Tenggara.

¹Sukhumband Paribatra, "The Challenge of Co-existence: ASEAN Relations with Vietnam in the 1990s" *Contemporary of Southeast Asia*, Vol. 9/2 (September 1987): 40.

ra.² Dengan demikian ambivalensi itu terletak pada peran RRC dalam masalah Kamboja yang selalu menjadi pertimbangan dalam setiap perumusan kebijaksanaan ASEAN mengenai masalah tersebut.

Berbeda dengan kepentingan ASEAN, kepentingan Vietnam dalam masalah Kamboja adalah:³ pertama, menghilangkan ancaman dan usaha-usaha RRC untuk menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara, khususnya di Indocina; kedua, konsolidasi kekuasaan oleh pemerintahan yang bersahabat di Kamboja; ketiga, konsolidasi Indocina di bawah kepemimpinan Vietnam; dan keempat, netralisasi Asia Tenggara. Dalam pandangan Vietnam, masalah Kamboja adalah masalah regional yang disebabkan oleh ambisi RRC untuk menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara. Sebaliknya menurut RRC, masalah Kamboja lahir karena ambisi Vietnam untuk mendominasi Indocina dengan bantuan politik dan militer dari Uni Soviet. Dengan demikian dalam konteks Asia Tenggara secara keseluruhan, masalah Kamboja menjadi isu sentral dalam hubungan-hubungan ASEAN-Vietnam-RRC, di mana persepsi ancaman menjadi isu pokok dalam setiap perumusan kebijaksanaan negara-negara tersebut mengenai masalah Kamboja.

Hubungan-hubungan di antara mereka mengarah pada terbentuknya polarisasi politik dan strategis di Asia Tenggara yaitu kubu Vietnam-Uni Soviet *vis à vis* Amerika Serikat-ASEAN-RRC. Selama lebih dari

satu dekade Asia Tenggara diwarnai polarisasi seperti itu.

Perubahan-perubahan Global dan Regional

Dewasa ini situasi politik global, sejauh yang menyangkut hubungan Amerika Serikat-Uni Soviet, ditandai oleh berakhirnya Perang Dingin. Setelah jatuhnya imperium Soviet di Eropa Timur dua negara adidaya (*superpower*) mengurangi keterlibatan militer mereka yang saling konfrontatif dalam konflik-konflik regional. Amerika Serikat merencanakan untuk menarik pasukannya sebanyak lima belas ribu personil dari Jepang, Korea Selatan, dan Filipina dalam kurun waktu tiga tahun yang akan datang.⁴ Sementara itu Uni Soviet dan RRC telah sepakat mengurangi jumlah pasukan masing-masing yang ditempatkan di sepanjang perbatasan kedua negara tersebut.⁵ Uni Soviet juga telah mengurangi bantuan dan kehadiran militer di Vietnam.⁶

Perkembangan-perkembangan di atas diikuti oleh normalisasi hubungan Uni Soviet-RRC, perbaikan hubungan RRC-Vietnam, penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan inisiatif Thailand untuk mengembangkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Indocina dan Myanmar yang mendapat sambutan positif dari Vietnam. Dalam konteks Asia Tenggara, perubahan-perubahan itu akan mempertanyakan masalah Kamboja sebagai dasar terciptanya

²Sheldon W. Simon, "The Two Southeast Asias and China: Security Perspectives," *Asian Survey*, Vol. XX-IV/5 (Mei 1984): 526-527.

³C.P.F. Luhulima, "Hubungan ASEAN-Indocina di Tahun 1990-an: Beberapa Skenario," *Analisis* (September-Oktober 1989): 441.

⁴*Jakarta Post*, 21 April 1990.

⁵*Jakarta Post*, 25 April 1990.

⁶Sheldon W. Simon, "The United States and Conflict Reduction in Southeast Asia," *Contemporary of Southeast Asia*, Vol. 12/2 (September 1990): 86.

polarisasi politik dan strategis dalam hubungan internasional di Asia Tenggara. Perubahan-perubahan itu juga akan mempertanyakan apakah masalah Kamboja masih merupakan variabel penting yang mempengaruhi hubungan internasional di Asia Tenggara.

Masalah-masalah di atas penting untuk dikaji karena perbaikan hubungan di antara negara-negara tersebut berlangsung dalam keadaan masalah Kamboja belum selesai. Tampaknya masalah Kamboja tidak lagi dipandang sebagai penghalang dan menjadi syarat perbaikan hubungan di antara mereka, terlepas dari persoalan apakah masalah tersebut telah selesai atau belum.

Fenomena menarik dari perubahan-perubahan yang kini terjadi di Asia Tenggara adalah bahwa masalah Kamboja mulai dipandang sebagai masalah internal Kamboja sendiri, dan mulai disurutkan keterkaitan masalah tersebut dengan persepsi ancaman Vietnam bagi Thailand, ASEAN, dan RRC; persepsi ancaman RRC bagi Vietnam; persepsi ancaman Uni Soviet bagi Asia Tenggara dan RRC melalui Vietnam. Semua pihak yang bertikai dan negara-negara yang berkepentingan kini mengangkat isu Dewan Nasional Tertinggi (SNC - *Supreme National Council*) sebagai isu utama masalah Kamboja. Dengan demikian, polarisasi politik dan strategis yang disebabkan oleh masalah Kamboja menjadi tidak relevan.

Perkembangan terakhir yang menunjukkan surutnya signifikansi masalah Kamboja dalam hubungan internasional di Asia Tenggara adalah pencabutan pengakuan Amerika Serikat terhadap pemerintahan koalisi perlawanan Kamboja (CGDK) di PBB. Pada satu sisi sikap baru Amerika Serikat tersebut disebabkan oleh desakan Kongres dan opini

masyarakat di negara itu tentang kekhawatiran kembalinya Khmer Merah ke tampuk kekuasaan. Namun pada sisi lain, dalam konteks Asia Tenggara, sikap baru Washington itu menunjukkan bahwa polarisasi di Asia Tenggara dalam bentuk aliansi anti Soviet dan anti Vietnam yang selama ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat, ASEAN, RRC tidak dapat dipertahankan. Demikian pula tidak ada lagi *raison d'être* untuk mempertahankan aliansi *de facto* Thailand-RRC untuk menentang Vietnam dan Uni Soviet dalam masalah Kamboja.

Asia Tenggara dan ASEAN dalam Masa Transisi

Surutnya signifikansi masalah Kamboja dan polarisasi Asia Tenggara yang disebabkan oleh masalah tersebut membawa kawasan ini dalam masa transisi yang ditandai oleh kecenderungan untuk menata (memformulasi) hubungan internasional baru. Sampai saat ini belum dapat ditentukan bagaimana pola hubungan internasional di Asia Tenggara pada masa pasca-Kamboja. Variabel-variabel apakah yang akan banyak berperan dalam hubungan internasional baru di Asia Tenggara pada masa yang akan datang?

Tampaknya negara-negara Asia Tenggara dihadapkan pada situasi yang belum pasti (*uncertainty*) di tengah-tengah optimisme meredanya ketegangan di kawasan ini. Hal ini menyebabkan beberapa negara mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap masa depan Asia Tenggara dengan mengubah kebijaksanaan yang selama ini dijalankan. Thailand, misalnya, mulai mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-

negara Indocina dan Myanmar serta mengubah sikapnya mengenai masalah Kamboja. Indonesia dan RRC kini telah menormalisasi hubungan diplomatik. Amerika Serikat telah mencabut pengakuan diplomatik pada CGDK⁷ dan mulai mengadakan dialog langsung dengan Vietnam dan pemerintahan Phnom Penh. Demikian pula dengan Uni Soviet, Moskow mulai mendekati ASEAN. Sejak tahun 1987 Uni Soviet mendukung gagasan ZOPFAN ASEAN yang sebelumnya selalu ditentang.⁸ Langkah politik ini diikuti dengan pendekatan Moskow untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN. Singapura memutuskan memberi izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan fasilitas militer di negara tersebut. Dan terakhir Brunei merencanakan menjadi anggota FPDA (*Five Power Defense Arrangement*) pada awal dekade 1990-an.⁹

Persoalan sekarang adalah bagaimana menghubungkan perkembangan-perkembangan baru di atas sehingga kita memperoleh gambaran umum tentang hubungan internasional yang kini terjadi di Asia Tenggara.

Usaha menghubungkan dan selanjutnya menganalisis perkembangan-perkembangan baru di Asia Tenggara bukan usaha yang mudah. Hal ini karena kita tampaknya

masih akan dihadapkan pada kejutan-kejutan baru, seperti halnya dengan langkah-langkah antisipasi oleh beberapa negara untuk menghadapi masa depan Asia Tenggara. Dengan demikian diperlukan suatu patokan sebagai kerangka pemikiran untuk menganalisis perkembangan-perkembangan di atas.

Inti dari perkembangan-perkembangan baru di Asia Tenggara adalah pudarnya pola hubungan internasional yang bersifat *bipolar-confrontative* yang tercakup dalam aliansi RRC-Amerika Serikat-ASEAN *vis à vis* Vietnam-Uni Soviet, serta surutnya isu ancaman Vietnam dan Uni Soviet di Asia Tenggara. Baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat kini menunjukkan tanda-tanda akan menutup pangkalan militer mereka di kawasan ini. Masa transisi Asia Tenggara yang demikian menjadikan negara-negara di kawasan ini dan kekuatan-kekuatan eksternal yang berkepentingan sangat *concern* mengenai *kevakuman* kawasan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan karena tidak ada lagi penyangga atau penjamin kestabilan dan keamanan regional di Asia Tenggara.

Ketidakpastian (*uncertainty*) dan isu kevakuman kawasan mendominasi agenda hubungan internasional di Asia Tenggara pasca-Kamboja. Masalah tersebut melahirkan dan menghangatkan beberapa pemikiran strategis, antara lain tentang keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Asia Tenggara; tentang kemungkinan masuknya kekuatan eksternal yang lain ke Asia Tenggara terutama RRC, Jepang, dan India; dan tentang kemungkinan penciptaan mekanisme kerjasama keamanan di Asia Tenggara.

Dalam kaitan dengan masalah di atas, negara-negara ASEAN melihat kehadiran militer Amerika Serikat sebagai unsur positif

⁷*Time*, 6 Agustus 1990. 7.

⁸Untuk mendekati negara-negara ASEAN, Uni Soviet, di samping mendukung ZOPFAN, juga memberikan jaminan kepada Filipina bahwa negara tersebut tidak akan menjadi sasaran serangan nuklir walaupun masih terdapat pangkalan militer Amerika Serikat. Lihat *FBIS*, Maret 1988, hal. 19. Dengan sikap baru itu, Moskow dapat melemahkan posisi dominan Amerika Serikat di Asia Tenggara. Lihat Sheldon W. Simon, "ASEAN Security in 1990s," *Asian Survey*, Vol. XXIX/6 (June 1989): 586.

⁹Simon, "ASEAN Security in 1990s," 585.

dalam keseimbangan regional di Asia Tenggara. Walaupun demikian dari mereka enggan secara terang-terangan menyetujui kehadiran militer Amerika Serikat, namun beberapa negara ASEAN yang lain menyediakan fasilitas militer kepada Amerika Serikat. Bahkan Singapura menyetujui memberi izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan fasilitas militer di negara tersebut jika Amerika Serikat mundur dari Filipina.¹⁰

Karena itu masalah yang menjadi perhatian ASEAN bukanlah masalah apakah Uni Soviet akan menarik pangkalan militernya dari Vietnam atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari reaksi dingin ASEAN terhadap isu penutupan pangkalan militer Uni Soviet di Vietnam yang dilontarkan oleh Gorbachev. Yang menjadi perhatian ASEAN adalah jika Amerika Serikat meninggalkan Filipina, maka kekuatan-kekuatan eksternal yang lain terutama RRC, Jepang, dan India akan masuk ke Asia Tenggara mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat.¹¹ ASEAN dan negara-negara Asia Tenggara yang lain tampaknya yakin bahwa Amerika Serikat suatu saat akan menutup pangkalan militernya di kawasan ini. Karena itu perundingan Washington-Manila tentang pangkalan militer Amerika Serikat di Subic dan Clark menjadi isu yang menonjol.

Di tengah-tengah isu kevakuman kawasan, kehadiran RRC dengan kepentingan strategisnya di Asia Tenggara menjadi perhatian negara-negara di kawasan ini, terutama ASEAN. Kekhawatiran mereka adalah mengenai sasaran jangka panjang RRC ter-

hadap kepulauan di Laut Cina Selatan yang masih dalam persengketaan RRC-Vietnam-ASEAN dan kemungkinan hegemoni RRC di Asia Tenggara pada masa yang akan datang. Para analis ASEAN berpendapat bahwa RRC adalah satu-satunya negara yang sampai saat ini belum puas atas *status quo* batas teritorial di Asia Tenggara.¹² Terlebih Malaysia dan Indonesia belum dapat menerima argumen Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang menyatakan bahwa bantuan Washington pada RRC dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian. Dua negara ASEAN ini berpandangan bahwa perbaikan hubungan RRC-Uni Soviet dan modernisasi militer RRC dengan bantuan Amerika Serikat membuat Beijing dapat bergerak lebih bebas di Asia Tenggara.¹³ Tindakan militer RRC terhadap Vietnam dan pertempuran Laut Cina Selatan pada bulan Maret 1988, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak memberikan tindakan kongkret, makin memperkuat kekhawatiran ASEAN. Beberapa analis menyatakan bahwa dengan bantuan Amerika Serikat, Angkatan Laut Cina telah membangun kekuatan baik kekuatan kapal selam maupun kapal perang permukaan yang didukung oleh pesawat-pesawat pembom jarak jauh. Sampai pertengahan dekade 1990-an diperkirakan RRC akan mampu merebut kepulauan Spratly.¹⁴ Dalam perspektif ini, bagi negara-negara ASEAN, kehadiran militer Amerika Serikat akan merupakan kekuatan penangkal terha-

¹²Muthiah Alagappa, "The Major Powers in South-east Asia", *International Journal*, No. 44 (Summer 1989): 550.

¹³Simon, "The United States and", 91.

¹⁴Michael Richardson, "New Fears of China's Military Power", *Pacific Defense Reporter* (Agustus 1989): 15-16.

¹⁰F.A. Mediansky, "Security Cooperation in South-east Asia and the Pacific Islands in a Multipolar Regional Order," *Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. II/1 (Summer, 1990): 85.

¹¹*Far Eastern Economic Review*, 22 Maret 1990, 26.

dap kemungkinan aksi militer RRC di Laut Cina Selatan pada masa yang akan datang. Atau kalau pada akhirnya Amerika Serikat harus mundur dari Asia Tenggara, ASEAN tetap berharap kekuatan militer Washington tetap bertahan di Pasifik Barat.

Sementara itu pada pihak RRC, surutnya signifikansi masalah Kamboja dalam hubungan internasional di Asia Tenggara yang diikuti dengan mudarnya aliansi strategis Thailand-RRC atas dasar masalah tersebut menyebabkan Beijing berusaha mempertahankan kepentingan politik dan strategis dengan jalan menciptakan hubungan-hubungan baru dengan negara-negara Asia Tenggara, khususnya ASEAN. Hubungan-hubungan baru dengan ASEAN, sebagai kompensasi mudarnya *aliansi de facto* Thailand-RRC, menjadi makin penting ketika secara politik dan ekonomi Uni Soviet mulai mendekati ASEAN. Karena itu dewasa ini RRC gencar melakukan ofensif diplomatik untuk mendekati ASEAN, sebagaimana dilakukan oleh Perdana Menteri Li Peng pada bulan Agustus dan September 1990 yang baru lalu.

Dengan demikian isu kevakuman kawasan telah mendorong negara-negara ASEAN dan RRC untuk saling memodifikasi kebijaksanaannya terhadap yang lain dalam situasi baru di Asia Tenggara. Hal ini diwujudkan dengan tercapainya normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-RRC pada tanggal 8 Agustus 1990 dan Singapura-RRC pada tanggal 3 Oktober 1990. Kebijaksanaan tersebut lahir sebagai hasil kekuatan tarik-menarik antara kekhawatiran ASEAN terhadap ambisi regional RRC dan kebutuhan RRC untuk menciptakan hubungan-hubungan baru dengan ASEAN pada masa pasca-Kamboja.

Selain terhadap RRC, ASEAN juga memberi perhatian bahwa mundurnya kekuatan Amerika Serikat dari Asia Tenggara akan menyebabkan kehadiran kekuatan laut Jepang untuk mengamankan SLOCs (*Sea Line of Communications*) yang membentang dari Selat Bashi, Asia Tenggara sampai Teluk Parsi di Timur Tengah. Juga diperkirakan Jepang akan menambah kekuatan militernya jika RRC di masa depan mengembangkan kekuatan militer yang besar dan modern, padahal tidak ada lagi kekuatan AS dan US yang dapat mengimbangnya di Asia Tenggara.¹⁵ Menanggapi kekhawatiran ASEAN terhadap Jepang, Perdana Menteri Jepang, Toshiki Kaifu, menyatakan bahwa mundurnya Amerika Serikat dari Asia Tenggara tidak akan menyebabkan Jepang melakukan intensifikasi militernya yang ditujukan ke kawasan Asia Tenggara.¹⁶ Pernyataan Kaifu tersebut berkaitan dengan adanya trauma yang melanda negara-negara Asia Tenggara yang pernah dijajah oleh Jepang pada Perang Dunia II. Sedangkan India yang tampaknya mulai berkembang sebagai kekuatan di Asia akan melihat Samudera Hindia sebagai ruang gerak pengaruhnya yang tentu akan membawa pengaruh pada Asia Tenggara.

Namun demikian kekhawatiran terhadap Jepang masih dipertanyakan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, tampaknya sangat kecil kemungkinan Armada VII Amerika Serikat akan meninggalkan kawasan Pasifik Barat walaupun Washington menutup pangkalan militernya di Filipina. Kehadiran militer Amerika Serikat di Pasifik

¹⁵Sayidiman Suryohadiprojo, "ZOPFAN dan Kepentingan Maritim Negara-negara Ekstra Regional Asia Tenggara," *Pelita*, 8 Agustus 1990.

¹⁶M. Rusli, "ASEAN Agar Realisasikan ZOPFAN," *Angkatan Bersenjata*, 30 Maret 1990.

Barat dapat berperan sebagai penangkal kemungkinan petualangan militer Jepang, dan juga RRC. Kedua, kekuatan udara dan laut Jepang lebih ditujukan pada perlindungan dan pengamanan kawasan di sekitar Jepang sendiri. Terlebih angkatan lautnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan operasi laut jarak jauh. Ketiga, walaupun negara-negara di Asia Tenggara memberi perhatian serius terhadap besarnya anggaran belanja militer Jepang yang melebihi 4.000 milyar Yen pada tahun 1990, tampaknya mereka yakin bahwa di kalangan politisi dan masyarakat Jepang masih menyimpan kenangan pahit pada waktu Jepang mempraktekan nasionalisme-militerisme.¹⁷ Bagi negara-negara ASEAN dan Asia Tenggara kemungkinan yang lebih realistis adalah adanya kerjasama antara Jepang dan Amerika Serikat untuk mempertahankan stabilitas Asia Tenggara.

Dalam hubungan dengan masalah ancaman Jepang di masa yang akan datang, RRC tampak sangat vokal. Salah seorang analis menyatakan: "Contrary to the world-wide disarmament talks, the Japanese authority are increasing strength and spare no efforts to develop a high-tech national defence".¹⁸ Selanjutnya pengamat di Xinhua menyatakan: "the obstacles blocking Japan's military expansion have been ... removed and concern over Japan's potential to repeat history cannot help but heighten our vigilance and lead us to launch struggle against it if necessary".¹⁹ Menteri Luar Negeri RRC, Qian Qichen, secara implisit

juga mengakui adanya kekhawatiran RRC terhadap Jepang dan memandang masalah ini sebagai hal penting dalam kebijaksanaan RRC di Asia Tenggara. Selanjutnya dia menyinggung adanya kompetisi RRC-Jepang di Asia Tenggara dan kemungkinan-kemungkinan eskalasi pada masa yang akan datang.

Beijing menyadari bahwa negara-negara ASEAN memandang RRC sebagai potensi ancaman yang lebih besar daripada Jepang, walaupun ASEAN juga tidak mengesampingkan kemungkinan ancaman Jepang terhadap Asia Tenggara pada masa yang akan datang. Dengan mengangkat isu potensi ancaman Jepang di Asia Tenggara, Beijing tampak berusaha mengimbangi dan menetralsir persepsi ancaman RRC yang berkembang di Asia Tenggara, terutama di kalangan ASEAN, sebagai usaha untuk mengadakan kerjasama dengan negara-negara di kawasan ini.

Dalam hubungan dengan kekuatan-kekuatan eksternal seperti RRC, Jepang, Amerika Serikat dan Uni Soviet, ASEAN tampak dihadapkan situasi yang kontradiktif. Pada satu sisi, hubungan baru ASEAN-RRC setelah normalisasi hubungan diplomatik RRC-Indonesia dan RRC-Singapura, menandai kuatnya posisi dan keyakinan ASEAN dalam berhubungan dengan negara-negara besar setelah munculnya peredaan ketegangan antara Amerika Serikat, Uni Soviet dan RRC di Asia Tenggara. Namun pada sisi lain, kini ASEAN dihadapkan pada masalah penting yaitu bagaimanakah situasi interaksi di antara mereka dan bagaimanakah sikap ASEAN terhadap situasi interaksi tersebut pada masa pasca-Kamboja. Hubungan baru ASEAN-RRC dan kompleksitas masalah yang berkaitan dengan hubungan ASEAN, RRC, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Soviet di Asia Tenggara merupakan

¹⁷Simon, "The United States and". 91.

¹⁸Robert S. Ross, "China's Strategic View of Southeast Asia: A Region in Transition," *Contemporary of Southeast Asia*, Vol. 12/2 (September 1990): 112.

¹⁹Ibid.

momentum baru dan sulit bagi ASEAN.

Selain itu momentum baru yang lain adalah adanya pemikiran ke arah kerjasama yang lebih baik, terutama dalam bidang ekonomi, antara ASEAN, Indocina, dan Myanmar. Vietnam pernah menyatakan keinginannya untuk mengadakan kerjasama ekonomi dengan ASEAN pada tahun 1989. Saat itu Presiden Soeharto menyatakan bahwa ASEAN membuka diri bagi keanggotaan Vietnam dalam ASEAN. Di samping itu pada *Jasa Conference (Japan-Southeast Asia)* dan *Second Southeast Asia Forum* yang diselenggarakan di Malaysia pada tahun 1989 yang lalu, pemikiran ke arah kerjasama ekonomi ASEAN, Indocina, dan Myanmar menjadi masalah utama dalam diskusi para peserta konferensi.²⁰ Dalam kaitan dengan masalah di atas Thailand telah mengambil langkah inisiatif mengadakan hubungan ekonomi dengan Indocina dan Myanmar, yang kemudian membawa implikasi politik dan perubahan kebijaksanaan Thailand mengenai masalah Kamboja.

Opsi Kebijakan Bagi ASEAN: Dimensi Keamanan dan Strategis

Bagaimanapun, bagi ASEAN, dua momentum itu menambah kompleks masalah hubungan internasional di Asia Tenggara pada masa pasca-Kamboja. Ternyata surutnya signifikansi masalah Kamboja, terlepas dari persoalan apakah masalah tersebut akan selesai atau tidak, menjadikan masalah keamanan dalam hubungan internasional di Asia Tenggara lebih rumit. ASEAN pun dipaksa untuk menetapkan prioritas kebijaksanaan. Untuk sementara, ASEAN, kecuali Thailand, kurang bergairah memfokuskan perhatian pada negara-negara Indo-

cina. Bahkan negara-negara ASEAN yang lain merasa keberatan dengan inisiatif Thailand terhadap negara-negara Indocina, karena inisiatif tersebut membawa implikasi politik berupa pengakuan secara *de facto* pada pemerintahan Hun Sen yang selama ini tidak diakui oleh ASEAN. Pada prinsipnya ASEAN mendukung pendekatan ekonomi antara Thailand-Indocina sebagai ujung tombak dan perintis kerjasama ekonomi antara ASEAN-Indocina. Namun dalam pandangan ASEAN, langkah itu harus tidak mensyaratkan pemenuhan tuntutan-tuntutan politik dari pihak Vietnam dan Hun Sen yang akan memperkuat posisi politis dan diplomatik pemerintahan Phnom Penh.

Adanya hubungan baru ASEAN-RRC setelah normalisasi Jakarta dan Singapura dengan Beijing, menunjukkan bahwa ASEAN melihat hubungan dengan RRC lebih penting dan mendesak, terlebih untuk kepentingan keamanan dan strategis. Hanya saja persoalannya apakah hubungan baru ASEAN-RRC tersebut tidak akan mengarah pada munculnya RRC sebagai kekuatan dominan di Asia Tenggara, yang selanjutnya akan semakin memojokkan Vietnam. Hal ini penting diperhatikan sebab masalah-masalah keamanan dan stabilitas Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan dan suasana hubungan RRC, Vietnam, dan ASEAN. Dari bentuk hubungan segi tiga di antara mereka ganjalan yang masih ada ialah bagaimana mendorong terciptanya hubungan baik Vietnam-RRC.

ASEAN dapat menempuh dua jalur untuk mendorong hubungan baik Vietnam-RRC setelah terciptanya hubungan baru ASEAN-RRC. Pertama, menggunakan hubungan baru ASEAN-RRC untuk lebih menekan Vietnam mendekati RRC, atau membiarkan Vietnam terisolasi di Asia Tenggara.

²⁰Lihat *ISIS Focus*, No. 58, Januari 1990.

Langkah ini tentunya akan sangat menguntungkan RRC, baik dalam konteks hubungan RRC-Vietnam maupun dalam konteks Asia Tenggara. Karena itu langkah pertama ini tampaknya kecil kemungkinan dilakukan oleh ASEAN, terutama oleh Indonesia dan Malaysia yang selalu mewaspadai tujuan-tujuan jangka panjang RRC di Asia Tenggara. Kedua, ASEAN mendukung inisiatif Thailand pada negara-negara Indocina sebagai ujung tombak hubungan ASEAN-Indocina. Langkah ini dapat memberikan tekanan baik kepada RRC maupun Vietnam untuk menciptakan hubungan segi tiga yang lebih baik antara ASEAN-Vietnam-RRC. Bagaimanapun RRC tidak akan mengorbankan hubungannya dengan ASEAN hanya untuk sekedar menentang dukungan ASEAN pada inisiatif Thailand terhadap negara-negara Indocina. Dengan adanya hubungan baru ASEAN-RRC, dukungan ASEAN pada inisiatif Thailand tersebut dapat meyakinkan Vietnam akan pentingnya hubungan baik antara Vietnam-RRC. Selain itu, langkah kedua ini dapat dipandang sebagai pengimbang antara hubungan ASEAN-RRC dan hubungan ASEAN-Vietnam. Karena itu, pendekatan Indonesia-Vietnam yang selama ini telah terwujud mempunyai arti strategis di Asia Tenggara.²¹

Pendekatan diplomatik ASEAN kepada RRC pada masa pasca-Kamboja, sebagai

²¹Lihat pernyataan Presiden Soeharto yang menyatakan bahwa Vietnam harus diajak bekerjasama dalam usaha menjaga perdamaian dan ketahanan regional di Asia Tenggara. *FBIS/East Asia-Southeast Asia*, 26 April 1990, hal. 40-41. Sikap Indonesia ini makin kuat ketika Presiden Soeharto mengadakan kunjungan ke Vietnam, sebagai bagian dari kunjungan ke Jepang, RRC, dan Vietnam, pada bulan November 1990. Dengan demikian sangatlah tepat jika dikatakan kunjungan Presiden Soeharto ke Vietnam di atas mempunyai arti strategis di Asia Tenggara, terutama sebagai pengimbang atas ofensif diplomatik RRC pada negara-negara ASEAN.

salah satu upaya ASEAN menghadapi perubahan di Asia Tenggara dan isu kevakuman kawasan setelah mundurnya Amerika Serikat dan Uni Soviet, pada akhirnya mengkhawatirkan berbagai pihak. Mereka khawatir pada masa yang akan datang RRC akan menjadi kekuatan eksternal yang dominan di Asia Tenggara. Dalam perspektif ini kita dapat memahami mengapa Amerika Serikat mencabut pengakuan kepada CGDK dan mulai mengadakan pendekatan dengan Vietnam untuk memacu tercapainya normalisasi hubungan diplomatik kedua negara.²²

ASEAN pada masa pasca-Kamboja menghadapi situasi hubungan internasional yang lebih rumit. Ia dihadapkan pada persoalan bagaimana merumuskan kebijaksanaan untuk menghadapi/menetralisasi kekuatan-kekuatan eksternal, terutama RRC dan Jepang, di tengah-tengah isu kevakuman kawasan setelah mundurnya Uni Soviet dan Amerika Serikat dari Asia Tenggara. Penarikan kekuatan Uni Soviet dari Vietnam dan pengurangan kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat dari Asia Tenggara memunculkan friksi di antara negara-negara ASEAN. Hal ini disebabkan karena pada periode pasca-Kamboja kesatuan persepsi keamanan ASEAN tidak lagi dapat didasarkan pada isu ancaman Soviet dan Vietnam.

Sampai saat ini masih terdapat perbedaan persepsi keamanan di kalangan negara-negara ASEAN. Singapura dan Thailand masih memandang Uni Soviet sebagai ancaman terhadap Asia Tenggara dan tetap melihat perlunya kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan ini.²³ Di sam-

²²*Time*, 6 Agustus 1990, 7.

²³Sheldon W. Simon, "ASEAN Security Prospects," *Journal of International Affairs*, Vol. 41/1 (1987), 19. Lihat pula *FBIS/East Asia-Southeast Asia*, 24 Mei 1990, 40.

ping itu seperti halnya RRC, Singapura sangat khawatir terhadap kemungkinan kehadiran militer Jepang, seperti yang dikemukakan oleh Lee Kuan Yew, kepada *Le Monde*.

Le Monde: "Do you want the Americans to remain in Southeast Asia"? Lee menyatakan: Yes ... If Americans go, the Japanese will come. Why not maintain the existing balance? Japan's economic and diplomatic initiatives benefit Asia provided Japan remains a U.S. partner in a strategic alliance and provided the U.S. nuclear umbrella extends over the whole region. If Japan leaves that partnership, everything will be different". Selanjutnya ketika ditanyakan: "What worries you most"? Lee mengatakan: "Most the current Japanese leaders do not want Japan to play its own cards again. They prefer to keep the present type of relations, which are comfortable for them and rest of Asia. But a new generation will take over in the next ten years. They do not have the same level of awareness".²⁴ Karena itu Singapura tetap melihat perlunya kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di Asia Tenggara.

Sedangkan Thailand tetap mempertahankan aliansi *de facto* dengan RRC, walaupun sekarang ini Thailand telah memperbaiki hubungan dengan negara-negara Indocina, terutama dengan Vietnam. Manuver Bangkok tersebut, yang kelihatan saling kontradiktif, mengungkapkan sikap skeptis Thailand terhadap peran Amerika Serikat sebagai penjaga keamanan regional di Asia Tenggara, terutama di kawasan Asia Tenggara *mainland*, pada masa yang akan datang.

Dengan memproyeksikan penarikan kekuatan militer AS dari Filipina pada akhir abad ke-20 dan menurunnya bantuan militer dan keamanan AS pada Thailand, Bangkok berpendapat bahwa Washington pada akhirnya akan menarik diri dari keterlibatan konflik-konflik di daratan Asia Tenggara. Dengan mempertahankan aliansi *de facto* dengan RRC dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara Indocina, Thailand akan mampu mempertahankan kepentingan keamanannya, jika akhirnya Amerika Serikat meninggalkan Asia Tenggara. Sementara itu Malaysia dan Indonesia berpendapat bahwa pada saat ini, dengan adanya perubahan-perubahan di Asia Tenggara dan munculnya isu kevakuman kawasan karena mundurnya kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet, konsepsi ZOPFAN memperoleh momentum yang tepat untuk diwujudkan.

Perbedaan pendapat di antara negara-negara ASEAN mengenai keputusan Singapura memberikan fasilitas militer kepada Amerika Serikat adalah contoh adanya friksi di antara mereka. Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang secara terbuka mendukung keputusan Singapura dan pada tingkat tertentu Brunei tampaknya mempunyai sikap yang sama dengan Thailand; Malaysia menentang; sedangkan Indonesia lebih bersikap *wait and see*, namun akan menentang jika pada akhirnya ditujukan untuk mendirikan pangkalan militer di Singapura. Sikap Filipina tidak begitu jelas, namun ada sedikit 'keberatan' karena tawaran Singapura tersebut dapat melemahkan posisi tawar-menawar Manila dalam negosiasi dengan Washington mengenai pangkalan militer Amerika Serikat di Clark dan Subic.

Situasi baru hubungan internasional di Asia Tenggara melahirkan pemikiran-

²⁴ *FBIS/East Asia-Southeast Asia*, 24 Mei 1990, 40. Lihat pula "Security Role Not for Japan," *FBIS/East Asia-Southeast Asia*, 11 Mei 1990, 38-39.

pemikiran strategis untuk menjajagi kemungkinan penciptaan kerjasama keamanan di kawasan ini. Bagaimanakah bentuk kerjasama keamanan itu dan apakah perlu melibatkan pihak lain di luar ASEAN masih menjadi perdebatan. Namun yang pasti, masalah kerjasama keamanan di Asia Tenggara baru pertama kali ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan negara-negara ASEAN sejak organisasi ini dibentuk pada tahun 1967.

Malaysia tampak sangat tertarik pada bentuk kerjasama keamanan ASEAN, hanya jika Singapura menarik kembali tawarannya kepada Amerika Serikat yang dipandang sebagai pelanggaran atas prinsip ZOPFAN.²⁵ Demikian pula dengan Indonesia. Indonesia, melalui Menteri Pertahanan L.B. Moerdani, menekankan pentingnya negara-negara ASEAN mengembangkan industri pertahanan regional. Kerjasama seperti itu dipandang sebagai langkah menuju pembentukan kerjasama keamanan multilateral ASEAN. Sementara itu, Menteri Pertahanan Filipina, Fidel Ramos, mengusulkan agar negara-negara ASEAN meningkatkan kerjasama pertahanan untuk mengisi kekosongan jika seluruh pangkalan militer AS di Filipina dipindahkan/ditutup dan mengubah kawasan ini menjadi suatu *blok* yang kuat untuk mengusir pengganggu-pengganggu asing.²⁶ Ditambahkannya bahwa bagi negara mana pun adalah berbahaya dan tidak realistis untuk mendahulukan kepentingan pertahanan negara asing.²⁷ Pernyataan Ramos tersebut menunjukkan bahwa Filipina mulai kurang menyukai ke-

hadiran pangkalan militer Amerika Serikat di negaranya. Namun demikian, masih sulit diukur apakah sikap baru Filipina tersebut benar-benar merupakan sikap yang prinsipil ataukah sekedar taktik-diplomatik untuk memperoleh penggantian keuangan dari Amerika Serikat seperti yang diinginkan oleh pihak Manila. Selanjutnya, dalam kaitan dengan kerjasama keamanan ASEAN, Malaysia menyatakan perlunya kerjasama patroli laut antara negara-negara ASEAN di Laut Cina Selatan, terutama untuk menghadapi perkembangan masalah klaim kepulauan di Laut Cina Selatan pada masa yang akan datang. Pandangan Malaysia ini senada dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, yang melihat pentingnya kerjasama keamanan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.²⁸ Dalam hubungan dengan masalah ini ada pendapat yang menyatakan bahwa pengembangan kekuatan laut yang kini dilakukan oleh Malaysia, Singapura, dan Indonesia akan menjadi kekuatan penangkal di Laut Cina Selatan jika dioperasikan secara bersama-sama.

Namun, perbedaan persepsi keamanan dan perbedaan pandangan tentang kehadiran kekuatan-kekuatan eksternal di kalangan negara-negara ASEAN akan mempersulit upaya untuk mewujudkan kerjasama keamanan di Asia Tenggara. Mungkin hanya Indonesia dan Malaysia yang secara sungguh-sungguh berusaha mewujudkan kerjasama keamanan di Asia Tenggara dalam kerangka ZOPFAN.²⁹ Sementara itu Singapura, Thailand, dan Brunei masih sulit diharapkan mendukung pemikiran Indone-

²⁵FBIS/*East Asia-Southeast Asia*, 18 Agustus 1989, 36.

²⁶*Merdeka*, 21 Mei 1990; *Antara*, 28 Juni 1990.

²⁷*Antara*, 28 Juni 1990.

²⁸Mochtar Kusumaatmadja, "Time for a Three-Nation ASEAN Defence Arrangement," *Straits Time*, 27 September 1990.

²⁹Simon, "ASEAN Security," 22-23.

sia dan Malaysia tentang ZOPFAN dan tentang kerjasama keamanan di Asia Tenggara. Tampak bahwa negara-negara ASEAN belum mempunyai kesamaan sikap menghadapi situasi vakum setelah mundurnya kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet dari kawasan. Pada dasarnya perbedaan-perbedaan tersebut berkisar pada masalah apakah negara-negara ASEAN dan Asia Tenggara lainnya akan membentuk kerjasama keamanan di kalangan mereka sendiri atau apakah harus melibatkan/bekerjasama dengan pihak asing.

Jika kerjasama keamanan dipandang oleh ASEAN sebagai salah satu jawaban atas masalah-masalah hubungan internasional di Asia Tenggara pada masa mendatang, kini persoalannya adalah bagaimanakah prospek dari masing-masing alternatif bentuk kerjasama keamanan di atas. Melihat perbedaan-perbedaan pandangan di atas, tampaknya upaya mewujudkan kerjasama keamanan di kalangan negara-negara ASEAN sendiri seperti yang diinginkan oleh Indonesia dan Malaysia akan banyak menemui hambatan, terutama dari Singapura, Thailand, dan Brunei. Ketiga negara ini berpendapat perlunya keterlibatan kekuatan eksternal untuk menjamin keamanan Asia Tenggara. Ini berarti, bagi ketiga negara ini, perubahan hubungan internasional di Asia Tenggara justru memperkuat pandangan perlunya mempertahankan kehadiran kekuatan militer asing di kawasan ini, suatu pandangan yang tidak disetujui oleh Indonesia dan Malaysia. Keputusan Singapura menawarkan penggunaan fasilitas militer kepada Amerika Serikat dan rencana Brunei untuk menjadi anggota FPDA adalah contoh dari pandangan di atas. Akibatnya, kini muncul pemikiran lain yaitu pembentukan kerjasama keamanan di Asia Tenggara dengan melibatkan pihak luar, di tengah-

tengah dibangkitkannya kembali ide ZOPFAN. Dalam hal ini model kerjasama keamanan seperti FPDA dimunculkan kembali sebagai bahan pemikiran.³⁰ Dengan melihat kenyataan di atas, maka persoalan yang dihadapi oleh Asia Tenggara, khususnya ASEAN, bukanlah masalah alternatif mana yang harus dipilih di antara dua kutub itu, melainkan bagaimana merumuskan kebijaksanaan dengan memanfaatkan setiap perkembangan atau momentum menuju perwujudan alternatif pertama. Artinya, ASEAN kini berada dalam proses untuk membentuk kerjasama keamanan Asia Tenggara dalam kerangka ZOPFAN, tanpa mengabaikan realitas adanya perbedaan pandangan dan kehadiran kekuatan asing di kawasan ini.

Kebijaksanaan ASEAN harus didasarkan pada pertimbangan bahwa masalah kerjasama keamanan di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah hubungan internasional di kawasan ini. Jikaantisipasi ke depan adalah mundurnya AS dan US dari Asia Tenggara, maka persoalan-persoalan hubungan internasional di kawasan ini akan banyak tergantung dari hubungan ASEAN, Indocina, dan RRC. Dengan demikian, masalah kerjasama keamanan Asia Tenggara, yang diidealkan dalam bentuk ZOPFAN, harus melibatkan tiga negara Indocina.

PENUTUP

Kerjasama keamanan Asia Tenggara dengan melibatkan negara-negara Indocina mempunyai pengaruh positif, baik pada ASEAN maupun negara-negara di luar ASEAN. Secara berangsur-angsur model

³⁰Phillip Methven, "Five Power Defence Arrangements: Pact Relevant to the Security of Southeast Asia," *Straits Times*, 25 Oktober 1990.

kerjasama seperti itu akan mengurangi persepsi ancaman Vietnam pada negara-negara ASEAN, terlebih Uni Soviet telah mulai meninggalkan Vietnam. Jika ini berjalan, tidak ada alasan bagi Filipina dan rencana Singapura untuk meneruskan kehadiran AS di Asia Tenggara; bagi Thailand untuk mempertahankan aliansi *de facto* dengan RRC; dan bagi Brunei untuk menjadi anggota FPDA, dengan alasan akan terjadi kevakuman penjaga stabilitas regional di Asia Tenggara. Kerjasama keamanan Asia Tenggara seperti itu dapat berperan sebagai penangkal ekspansi kekuatan eksternal ke kawasan ini. Dan yang terpenting kerjasama itu juga berperan sebagai pengimbang ofensif diplomatik RRC, sehingga RRC tidak akan menjadi kekuatan dominan setelah mundurnya AS dan US dari Asia Tenggara. Karena itu ASEAN perlu segera merangkul Indocina, khususnya Vietnam, setelah suksesnya ofensif diplomatik RRC ke ASEAN baru-baru ini.

Pendekatan ASEAN pada Indocina akan memberikan tekanan pada RRC untuk memperbaiki hubungan dengan Vietnam. Jika RRC tidak bersedia memperbaiki hubungan dengan Vietnam dalam situasi baru di Asia Tenggara, sebagaimana dilakukan oleh ASEAN, maka akan muncul kembali persepsi dan kecurigaan pada RRC sebagai ancaman jangka panjang terhadap Asia Tenggara. Tentu hal ini merugikan upaya Beijing mendekati negara-negara Asia Teng-

gara. Karena itu ASEAN perlu mendukung kebijaksanaan baru Amerika Serikat untuk menormalisasikan hubungan diplomatik Washington-Hanoi. Pendekatan ASEAN-Indocina, sebagai kelanjutan kebijaksanaan Amerika Serikat, akan memperkuat tekanan pada RRC untuk menciptakan hubungan baik dengan Vietnam.

Bagaimana jika ASEAN membentuk kerjasama keamanan eksklusif di kalangan mereka sendiri? Upaya semacam ini akan banyak menemui kesulitan. Pertama, di kalangan negara-negara ASEAN sendiri masih terdapat perbedaan pandangan tentang persepsi ancaman keamanan. Kedua, kalau pun kerjasama keamanan eksklusif ASEAN terbentuk, mungkin akan muncul kecurigaan yang lebih besar oleh pihak RRC dan negara-negara Indocina, terutama Vietnam, akan maksud-maksud ASEAN. Dalam hal ini ASEAN akan dituding mengobarkan kembali polarisasi politik yang bersifat konfrontatif di Asia Tenggara. Dan yang lebih buruk adalah jika kebijaksanaan ASEAN tersebut mempercepat perbaikan hubungan RRC-Vietnam yang dapat mengarah pada penciptaan persekutuan Beijing-Hanoi atas dasar sikap anti-ASEAN. Jadi, ASEAN harus merekayasa hubungan ASEAN dan Indocina yang dapat mempererat hubungan segi tiga ASEAN, Indocina, dan RRC. Inilah kunci pokok masalah-masalah stabilitas dan perdamaian Asia Tenggara.

Peran dan Jawaban ASEAN dalam Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik

Hadi SOESASTRO

Pengantar

DARI penelitian mengenai sejarah timbulnya berbagai ide mengenai kerjasama ekonomi regional di kawasan Pasifik, terlihat bahwa berbagai skema institusional yang telah diusulkan berasal dari aneka ragam pemikiran mengenai kerjasama yang berbeda satu sama lain.¹ Munculnya skema-skema awal di pertengahan kedua dekade 1960-an, salah satunya yang paling menonjol adalah skema Kojima mengenai PAFTA (Wilayah Perdagangan Bebas Pasifik - *Pacific Free Trade Area*), diakibatkan terutama oleh berbagai perkembangan yang terjadi di luar kawasan, misal-

Dialihbahasakan dari Dr. Hadi Soesastro, "Pacific Economic Cooperation: ASEAN's Role and Responses" dalam Third Indonesia-Singapore Conference, Bandung, November 5-6, 1990, oleh M. Bambang Walgito.

¹Sejarah timbulnya beberapa ide untuk menjalin kerjasama ekonomi di kawasan Pasifik dapat dilihat di Hadi Soesastro, "Institutional Aspects of Pacific Economic Cooperation," *Pacific Economic Cooperation: The Next Phase* (Jakarta: CSIS, 1983), 3-52.

nya terbentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Namun gagasan untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas antar lima negara maju di Pasifik, yakni Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru dan Amerika Serikat, ternyata tidak dapat diterima baik bila dilihat dari segi ekonomi maupun politik. Yang menentang ide tersebut adalah negara-negara yang perekonomiannya lebih 'kecil' seperti Australia, Kanada dan Selandia Baru.² Sesungguhnya studi Kojima tersebut menunjukkan kepada kita bahwa sementara PAFTA (Wilayah Perdagangan Bebas Pasifik) akan memperluas perdagangan antar negara anggota, diakui bahwa pembagian keuntungan akan menjadi amat timpang karena adanya ketidaksamaan dalam tingkat industrialisasi di antara ke-lima negara tersebut.

Skema lain yang menonjol adalah skema yang diusulkan di pertengahan kedua dekade 1970-an oleh Drysdale dan Patrick mengenai OPTAD (Organisasi dari Perdagangan dan Pembangunan Pasifik). Usul ini

²Lihat, H.W. Arndt, "PAFTA: An Australian Assessment," dalam *Intereconomics*, 10, 1967, 272-76.

mencuat dari diskusi mengenai PAFTA. Kedua usulan tersebut berbeda satu sama lain tidak hanya bila dilihat dari ciri-cirinya -- yakni sasaran, fungsi, ruang lingkup, keikutsertaan dan pembentukan lembaga -- tetapi juga bila dilihat dari dasar pemikiran untuk mengorganisasi kawasan Pasifik. Kalau Kojima lebih menitikberatkan peristiwa eksternal serta dampaknya terhadap negara-negara Pasifik, Drysdale dan Patrick lebih memusatkan perhatian mereka pada dinamika internal negara-negara Pasifik yang akan berakibat terjadinya suatu transformasi mendalam di kawasan itu sendiri. Menurut penglihatan dan ramalan mereka, kawasan tersebut semakin menjadi bergantung satu sama lain dalam bidang perdagangan maupun investasi. Arus bantuan juga merupakan faktor penting yang mempererat hubungan ekonomi regional. Mereka berpendapat bahwa dari suatu titik acuan regional baru ini kawasan Pasifik akan mampu mendapatkan keuntungan untuk memudahkan orang meraih sasaran perdagangan dan pembangunan serta mengatasi konflik di sekitar kawasan. Harus diakui bahwa interdependensi ini tidak hanya dapat menciptakan berbagai peluang tetapi juga dapat menjadi sumber perpecahan mengingat interdependensi itu cenderung tidak simetris sifatnya. Boleh jadi negara yang perekonomiannya lebih kecil merasa cemas bahwa kerjasama ekonomi Pasifik justru akan secara efektif melembagakan interdependensi yang asimetris.

Akhir-akhir ini orang lebih banyak memusatkan perhatian pada implikasi global pembangunan ekonomi kawasan yang spektakuler. Istilah "Abad Pasifik", yang semakin banyak dijumpai dalam pidato, laporan media massa maupun tulisan-tulisan akademis, telah dipakai untuk menandai adanya pergeseran titik berat dunia dari Atlantik ke

Pasifik.³ Suatu usul yang diajukan oleh Senator Bradley dalam idenya mengenai "Koalisi Pasifik" didasarkan atas kebutuhan untuk membangun suatu koalisi guna memperbaiki sistem perdagangan multilateral. Ia mengemukakan sejumlah alasan yang melatarbelakangi perhatiannya pada masalah Pasifik. Pertama, di kalangan negara-negara pinggiran Pasifik terjadi ketimpangan besar sekali di bidang perdagangan. Kedua, negara-negara tersebut amat bergantung pada kesehatan dan kekuatan sistem perdagangan multilateral. Ketiga, Eropa akan disibukkan oleh proyek 1992-nya. Keempat, Pasifik terdiri dari beraneka ragam negara yang dapat dilihat sebagai suatu mikrokosmis dunia.

Dari tinjauan singkat di atas kiranya jelas arah perkembangan ide mengenai kerjasama ekonomi Pasifik selama seperempat abad yang lampau. Kerangka institusional yang diusulkan juga telah beralih dari skema 'integrasi institusional' yang lebih ketat (PAFTA) menuju ke suatu skema 'integrasi fungsional' yang lebih longgar (OPTAD), dan kini perhatian orang lebih dipusatkan pada bentuk 'koalisi' yang bahkan lebih longgar lagi. 'Fenomena difusi' ini tidak harus dilihat sebagai suatu perkembangan yang negatif. Kenyataannya, fenomena itu muncul dari pendekatan yang lebih realistis terhadap kebhinnekaan kawasan tersebut. Sebenarnya, telah menjadi jelas bahwa usaha-usaha untuk mempromosikan kerjasama ekonomi Pasifik hanya akan membuahkan hasil sekiranya mereka mengambil keuntungan dari keanekaragaman kawasan itu.

³Hadi Soesastro, "The Role of the Pacific Basin in the International Political Economy," dalam *Foreign Relations Journal*, diterbitkan oleh The Phillipine Council for Foreign Relations, Vol. IV, No. 2 (Juni 1989): 64-83.

Interdependensi dan keanekaragaman merupakan ciri utama ekonomi Pasifik. Hal itu menciptakan berbagai kesempatan luas tetapi juga membangkitkan kepekaan politik. Sudah bukan rahasia lagi bahwa negara-negara yang perekonomiannya "lebih kecil" telah melontarkan kekhawatiran mereka yang mendalam mengenai tempat dan posisi mereka yang kurang menguntungkan dalam kerjasama ekonomi regional di Pasifik. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir misalnya, telah terang-terangan mengungkapkan pandangannya bahwa negara-negara yang lebih besar sudah barang tentu akan mendominasi kerjasama tersebut.⁴ Tulisan ini akan menelaah persoalan yang berkaitan dengan peran negara-negara yang perekonomiannya lebih 'kecil' dalam kerjasama ekonomi Pasifik ini, khususnya negara-negara anggota ASEAN. Telaah ini diawali dengan pembahasan mengenai perdagangan di kawasan Pasifik serta struktur produksi dan peran negara-negara ASEAN dalam pengembangannya. Di bagian akhir akan dibahas persoalan-persoalan pokok mengenai peranserta ASEAN dalam kerjasama ekonomi Pasifik.

Ekonomi Pasifik yang Sedang Tumbuh

Kawasan Pasifik merupakan wilayah yang banyak memiliki keanekaragaman. Kawasan tersebut amat heterogen baik di bidang budaya, agama, politik, ekonomi, sosial maupun geografis. Dalam arti luas kawasan ini meliputi "setengah dunia"; perbatasan sebelah timur adalah Lengkungan St. Louis, perbatasan sebelah ujung barat ada-

lah Tembok Besar Cina, sedangkan yang menjadi tapal batas utara adalah Borrow, Alaska dan di sebelah selatan Punta Arenas, di ujung bawah Chili.⁵ Seperti terlihat di mana-mana, kawasan ini "jelas akan merupakan salah satu dari kawasan yang paling tidak berbentuk di dunia."⁶

Tabel 1 memperlihatkan keanekaragaman-keanekaragaman yang mencolok di seluruh kawasan. Termasuk di situ negara-negara yang memiliki wilayah serta tingkat ekonomi yang jauh berbeda satu sama lain. Dilihat dari segi ekonomi, ada dua negara yang mendominasi kawasan yakni Amerika Serikat dan Jepang. Kedua negara ini menghasilkan sekitar 80% dari seluruh penghasilan kotor kawasan. Jumlah ekspor mereka ternyata lebih dari 50% ekspor kawasan ke seluruh dunia. Ditinjau dari segi pendapatan bruto nasional per kapita, kedua negara tersebut menduduki ranking teratas. Kanada, Australia dan Selandia Baru memang merupakan negara industri namun tetap dapat dibanding 'kecil' dibandingkan dengan perekonomian Amerika Serikat maupun Jepang. Di bidang ekspor, Kanada menduduki tempat ketiga mencapai sekitar 10% dari seluruh ekspor kawasan. Hal ini tentu saja jauh dari mencolok. Namun sekitar 70% dari eksportnya adalah bersama Amerika Serikat. Hal ini menandakan bahwa perekonomian Kanada telah terpadu dengan perekonomian Amerika Serikat seperti dirumuskan akhir-

⁵Definisi ini dibuat oleh Gerald W. Fry, dalam "The Pacific Challenge: A Transnational Future," *Asia Pacific Community* (Summer 1983): 36-37.

⁶Lihat Norman D. Palmer, "Security Dimensions of Pacific Basin Cooperation," dalam Roy Kim dan Hilary Conroy (penyunting), *New Tides in the Pacific -- Pacific Basin Cooperation and the Big Four (Japan, PRC, USA, USSR)* (New York: Greenwood Press, 1987), 147.

⁴Masalah ini dibahas dalam Hadi Soesastro, "ASEAN and the Political Economy of Pacific Cooperation," *Asian Survey*, Vol. XXVIII, No. 12 (Desember 1983): 1255-1270.

Tabel 1

KAWASAN CEKUNGAN PASIFIK - DATA KOMPARATIF (1)

	Penduduk Thn 1988 (% Keseluruhan)	Wilayah (% Keseluruhan)	GDP 1988 (%)	Ekspor 1988 (% Keseluruhan)
Brunei	0,0	0,0	0,0	0,0
Indonesia	8,8	4,2	0,9	1,7
Malaysia	0,9	0,7	0,4	1,9
Filipina	3,0	0,7	0,4	0,6
Singapura	0,1	0,0	0,2	3,6
Thailand	2,8	1,1	0,6	1,4
ASEAN	15,6	6,8	2,5	9,4
Cina	55,0	21,3	3,9	4,2
Hong Kong	0,3	0,0	0,5	5,6
Jepang	6,2	0,8	29,7	23,6
Korea	2,1	0,2	1,8	5,5
Taiwan	1,0	0,1	1,2	5,4
Australia	0,8	17,1	2,6	2,9
New Zealand	0,2	0,6	0,4	0,8
PNG	0,2	1,0	0,0	0,1
ASIA TIMUR	81,4	48,0	42,6	57,5
Kanada	1,3	22,2	4,6	10,4
Amerika Serikat	12,4	20,9	50,7	28,6
ASIA PASIFIK	95,1	91,1	97,9	96,5
Chili	0,6	1,7	0,2	0,6
Meksiko	4,2	4,4	1,8	2,6
Peru	1,0	2,9	0,3	0,2
KAWASAN PASIFIK	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Bank Dunia, *Laporan Perkembangan Dunia 1990*; statistik nasional.

akhir ini dalam Persetujuan Perdagangan Bebas (*Free Trade Arrangement/FTA*) Amerika Serikat-Kanada.

Walaupun termasuk negara besar bila dilihat dari segi jumlah penduduk dan luas wilayah, namun ekspor Cina dan andilnya dalam pendapatan kotor kawasan hanya sekitar 4%. Perekonomian Cina kurang lebih tetap merupakan ekonomi yang tersentralisasi, walaupun terus dilakukan berbagai pembaruan. Yang lebih meningkatkan interaksi antara Cina dan negara-negara lain di kawasan bukanlah kecilnya perekonomian Cina melainkan justru pembaruan tersebut. Negara-negara lain boleh dikata memang memiliki perekonomian yang lebih kecil. Pendapatan kotor tiap negara hanya kurang dari 2% pendapatan kotor seluruh kawasan. Pendapatan kotor semua negara ASEAN kurang lebih sama dengan pendapatan kotor Australia. Namun seluruh pendapatan ekspor ASEAN telah meningkat mendekati ekspor Kanada. Dalam tahun 1988 jumlah keseluruhan ekspor ASEAN itu meningkat menjadi tiga kali lipat ekspor Australia dan sekitar 12 kali lipat ekspor Selandia Baru. Hal ini menandakan tingginya tingkat keterbukaan ekonomi-ekonomi tersebut.

Jumlah pendapatan kotor gabungan tiga negara industri baru Asia (Korea, Taiwan dan Hong Kong) kurang lebih sama dengan Cina, namun ekspor mereka itu -- yang jumlahnya sekitar 16% dari seluruh ekspor kawasan -- diperkirakan 4 kali lipat jumlah ekspor Cina. Selama kurun waktu 1980-an negara-negara tersebut telah memperlihatkan tingkat pertumbuhan yang paling baik, sekitar dua setengah kali lebih cepat dari tingkat pertumbuhan rata-rata kawasan. Penampilan para negara anggota ASEAN pun, kecuali Filipina, juga amat luar biasa. Pen-

dapatan kotor gabungan semua negara berkembang di Asia Timur sekarang ini sekitar 33% dari GDP/GNP Jepang dan sekitar 18% dari perekonomian Amerika Serikat. Melihat pertumbuhan dan potensi negara-negara ini di masa depan sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Riset Nomura baru-baru ini memproyeksikan bahwa dalam tahun 2000 nanti GNP gabungan negara-negara tersebut akan meningkat menjadi 47% dari GNP Jepang dan hampir sepertiga perekonomian Amerika. Jadi sekiranya negara-negara yang lebih kecil ini mau bertindak sebagai kelompok, maka mereka mampu memainkan peran yang mencerminkan bobot mereka secara keseluruhan. Bila Australia diikutsertakan, maka secara keseluruhan besarnya perekonomian mereka akan mencapai sekitar 55% dari perekonomian Jepang dan sekitar 35% dari perekonomian Amerika Serikat. Jika Jepang diikutsertakan ke dalam kelompok ini maka GNP keseluruhan negara-negara di Asia Timur tersebut dalam tahun 2000 akan menjadi sama besarnya dengan Amerika Serikat dan meningkat menjadi 6% lebih besar dibanding GNP Masyarakat Ekonomi Eropa. (Lihat Tabel 2)

Dapatkah dan bolehkan orang membicarakan semacam subkelompok Asia Timur ataupun Pasifik Barat seperti dibahas di atas? Dilihat dari keanekaragaman subkelompok tersebut, apakah tidak lebih realistis bila kita berbicara tentang subkelompok yang lebih kecil seperti ASEAN, subkelompok Pasifik Barat Daya, dan Asia Timur Laut? Atau apakah lebih bermanfaat berbicara mengenai suatu kawasan Pasifik yang lebih luas yang mencakup semua ekonomi negara di lingkaran Pasifik? Implikasi-implikasi keanekaragaman kawasan bagi kerjasama ekonomi regional jangan diremehkan.

Tabel 2

ASIA TIMUR DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN -- 1988 dan 2000

	GNP			
	1988		2000	
	(\$6)	Indeks	(\$6)	Indeks
Brunei	-	-	-	-
Indonesia	78	1,5	172	2,4
Malaysia	33	0,6	77	1,1
Filipina	39	0,7	79	1,1
Singapura	25	0,5	57	0,8
Thailand	57	1,1	148	2,1
ASEAN	232	4,4	533	7,5
Cina	377	7,0	870	12,1
Hong Kong	55	1,0	104	1,4
Jepang	2.857	53,2	4.652	64,5
Korea	169	3,1	425	5,9
Taiwan	125	2,3	274	3,8
Australia	238	4,4	344	4,8
New Zealand	-	-	-	-
PNG	-	-	-	-
ASIA TIMUR	4.054	75,4	7.202	99,8
AMERIKA UTARA	5.375	100,0	7.213	100,0
MEE	4.726	87,9	6.771	93,9

Sumber: Institut Penelitian Nomura sebagaimana dikutip dalam *FEER*, 9 Agustus 1990, 52.

Lagipula orangpun tahu bahwa kini sedang tumbuh berkembang di Pasifik sejenis struktur ekonomi regional seperti itu.

Rumusan suatu kawasan secara geografis seringkali dipengaruhi oleh pandangan tentang hakekat dari struktur kawasan itu sendiri. Rumusan suatu kawasan seringkali timbul dari pemikiran-pemikiran yang fungsional daripada didasarkan atas pertimbangan geografi yang ketat. Dalam masalah yang pertama kita dapat berbicara mengenai kawasan fungsional. Suatu hal yang tidak dapat dihindari adalah bahwa setiap *kawasan fungsional* seperti itu memiliki inti atau 'anggota inti'. Hendaknya kawasan Pasifik yang sedang tumbuh ini dilihat sebagai suatu kawasan yang fungsional. Dalam kurun waktu pertumbuhannya, kawasan itu dapat mencakup wilayah geografis yang luas. Dalam proses ini, hakekat fungsionalnya dapat dikompromikan guna menyesuaikan diri dengan aneka faktor geografis yang khusus. Hasil akhir tergantung pada kekuatan dan daya kohesi intinya. Suatu inti yang lemah sudah barang tentu tidak akan memungkinkan timbulnya suatu struktur regional utama. Atau walaupun struktur itu ada, tentu usianya pun tidak akan panjang. Walaupun keanekaragaman dalam kawasan seringkali dilihat sebagai penghalang pembentukan suatu inti yang kuat, namun barangkali hal itu dapat merupakan suatu aset terbesar bagi kawasan itu sendiri, dapat menjadi suatu komplementaritas ekonomi, misalnya mampu menciptakan suatu landasan bagi terbentuknya inti-inti yang kuat.

Sesungguhnya, faktor-faktor ekonomi dilihat sebagai suatu kekuatan menonjol yang mengarah ke pembentukan struktur regional Pasifik. Harlan Cleveland, misalnya, sejak awal menolak anggapan bahwa munculnya Cekungan Pasifik (*Pacific Basin*)

sebagai suatu wilayah bersumber pada geopolitik.⁷ Menurut pendapatnya, kawasan Pasifik muncul sebagai akibat dari jalinan interdependensi ekonomi yang semakin rapat. Interdependensi ekonomi itu sendiri dimengerti sebagai akibat dari dan dilihat sebagai pencerminan interaksi ekonomi yang intensif, yang mempererat dan memperkuat ikatan di bidang perdagangan, investasi dan modal serta teknologi. Teorinya adalah bahwa ikatan-ikatan seperti itu akan dapat melipatgandakan aneka hubungan dan sebaliknya pula cenderung memaksa pemerintah dan sektor-sektor swasta untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakannya. Jadi yang muncul adalah jenis-jenis struktur regional seperti itu.

Di kawasan Pasifik, interdependensi ekonomi yang tinggi dan semakin meningkat ini jelas terlihat di Pasifik Barat dan kawasan Amerika Utara, atau pada apa yang dapat diistilahkan sebagai PECC ataupun APEC.⁸ Yang paling didengungkan adalah

⁷Harlan Cleveland, "The Future of the Pacific Basin," dalam *Pacific Viewpoint*, vol. 25, no. 1 (1984): 1.

⁸PECC atau Pacific Economic Cooperation Conference (Konperensi Kerjasama Ekonomi Pasifik), lembaga non-pemerintah dengan anggota seperti Australia, Brunei, Kanada, Cina, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Cina Taipei (Taiwan), Muangthai, Amerika Serikat serta Kepulauan Pasifik Selatan (diwakili oleh Sekretariat Forum), para wakil lembaga regional lainnya yakni PAFTAD (Pacific Trade and Development/Pembangunan dan Perdagangan Pasifik) -- suatu forum akademik -- dan PBEC (Pacific Basin Economic Council/Dewan Ekonomi Kawasan Pasifik) -- suatu forum usahawan. PECC didirikan tahun 1980 dan sejak 1990 telah memiliki sekretariat tetap di Singapura. APEC merupakan singkatan dari *Asia Pacific Economic Cooperation/Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik*, pertemuan non-formal para menteri dari Australia, Brunei, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina,

interdependensi perdagangan antar negara-negara tersebut. Seperti terlihat pada Tabel 3, negara-negara Pasifik sebagian besar berdagang dengan negara-negara di kawasan itu sendiri. Pada tahun 1970, tingkat perdagangan ekspor intra kawasan adalah sebesar 53,4%; tahun 1989 jumlah itu meningkat menjadi dua per tiga (65,6%). Kini Amerika Serikat sendiri mengeksport lebih dari separuh eksportnya ke kawasan Pasifik, sedangkan pada tahun 1970 jumlahnya hanya 40%. Andil negara-negara lainnya dalam perdagangan intra kawasan di tahun 1988 berkisar antara 62,1% untuk Muangthai, dan 83,2% untuk Indonesia. Tabel 3 juga memperlihatkan pergeseran-pergeseran penting dalam pola perdagangan intra kawasan selama dua dekade yang baru lalu. Ada sedikit kenaikan dalam perdagangan intern Amerika Utara, namun andil ekspor Amerika Utara ke Asia (tidak termasuk Jepang) meningkat cukup meyakinkan. Ekspor Jepang baik ke Amerika Utara maupun negara-negara Asia Timur lainnya telah pula meningkat.

Cina juga telah secara jelas mengalihkan beberapa dari perdagangannya dari Eropa ke kawasan Pasifik Asia. Ekspor dari Asia Timur Laut ke kawasan Asia Timur juga meningkat. Hal yang sama juga terjadi pada ekspor dari Pasifik Barat Daya (Australia dan Selandia Baru). Ekspor negara-negara ASEAN ke Amerika Utara juga meningkat tajam. Namun, andil pasar Amerika Serikat di dalam ekspor Muangthai dan Singapura yang besarnya sekitar 20 sampai 25% masih berada di bawah ekspor Korea dan Taiwan yang besarnya sekitar 40%.

Singapura, Muangthai dan Amerika Serikat. Diskusi-diskusi yang diadakan sekarang ini adalah untuk menemukan cara untuk mengajak Cina, Hong Kong dan Taiwan menjadi anggota APEC. APEC dimulai di Canberra bulan November 1989, diikuti oleh pertemuan kedua bulan Juli 1990 di Singapura.

Interaksi intensif antar sesama negara Pasifik juga dapat diamati di bidang keuangan dan investasi. Sekitar 60 sampai 80% dari Penanaman Modal Asing Langsung (PMAL) yang ditanam di kawasan tersebut berasal dari negara-negara di kawasan itu sendiri.⁹ Pelipatgandaan jalinan yang berkembang di antara negara-negara Pasifik bukanlah penyebab, namun lebih merupakan gejala dari timbulnya tata regional Pasifik. Yang secara fundamental penting dalam struktur yang tumbuh ini adalah kenyataan bahwa faktor ekonomilah yang mendekatkan negara-negara tersebut. Terjadi peningkatan perdagangan antara negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik, misalnya antara Korea Selatan dan Cina selama tiga tahun terakhir ini dan antara Indonesia dan Cina sejak 1985. Menurut pendapat Nathaniel Thayer hal ini merupakan keadaan yang paling penting dalam "tata internasional baru" yang telah muncul di Pasifik.¹⁰ Menurut pemikirannya biasanya yang menjadi inti dari suatu tata internasional adalah masalah keamanan militer, namun hal seperti itu tidak berlaku di Pasifik.

Menurut tradisi, interdependensi ekonomi hanya terjadi di lingkungan negara industri. Studi-studi terdahulu mengenai interdependensi ekonomi hanya secara eksklusif dipusatkan pada negara-negara maju.¹¹ Hakekat dari interdependensi ekonomi di kawasan Pasifik barangkali agak tidak lazim

⁹Lihat PECC, *Pacific Economic Outlook 1990-1991*.

¹⁰Nathaniel B. Thayer, "The United States, Japan, and the Emerging East Asian Order," *SAIS Review*, Vol. 4, No. 1 (Winter-Spring 1984): 1-14.

¹¹Lihat misalnya Richard N. Cooper, *The Economic of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic Community* (New York: Columbia University Press, 1968).

Tabel 3

TUJUAN EKSPOR -- 1988

	Ekspor ke Kawasan Pasifik	Ekspor ke ASEAN	Ekspor ke Asia Timur	Ekspor ke Asia Pasifik
	(Prosentase Ekspor ke Kawasan Pasifik)			
Brunei	86,2	16,8	98,4	100,0
Indonesia	83,8	12,8	79,9	99,9
Malaysia	75,4	32,3	75,7	99,7
Filipina	76,5	9,0	51,6	99,9
Singapura	72,3	29,6	65,5	99,8
Thailand	62,3	18,7	64,9	99,9
ASEAN	74,1	23,5	70,3	99,8
Cina	70,0	8,5	88,5	99,8
Hong Kong	70,8	8,6	61,8	99,7
Jepang	67,7	11,9	44,8	98,7
Korea	72,3	6,9	46,6	99,0
Taiwan	96,0	9,5	43,3	99,5
Australia	70,7	11,3	81,8	99,6
New Zealand	63,9	7,8	79,1	98,2
PNG	65,5	9,2	95,8	100,0
ASIA TIMUR	72,1	12,5	56,3	99,2
Kanada	82,6	1,0	14,0	99,4
Amerika Serikat	57,6	7,0	50,3	87,8
ASIA PASIFIK	68,9	9,6	49,3	96,4
Chili	44,4	5,1	51,2	97,2
Meksiko	84,1	0,5	9,0	99,6
Peru	47,2	0,6	46,1	95,3
KAWASAN PASIFIK	69,1	9,3	48,0	196,5

Sumber: Data Base CSIS.

dalam arti bahwa yang saling bergantung itu ternyata bukan hanya negara maju tetapi juga kelompok negara industri baru dan negara-negara berkembang. Pada kenyataannya, yang menjadi "inti" dalam perekonomian Pasifik baik di bidang pembangunan ekonomi maupun di banyak bidang lainnya adalah negara-negara yang amat heterogen. Perekonomian kawasan ini mencakup negara-negara besar, negara yang lebih kecil serta yang benar-benar memang kecil. Fenomena ini perlu dipelajari lebih mendalam lagi. Pada akhirnya interdependensi ekonomi itu terjadi karena negara-negara itu sendiri membiarkan hal tersebut tumbuh berkembang. Dengan kata lain, interdependensi memang muncul dari kebijakan.¹²

Interdependensi ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi merupakan dua sisi mata uang yang sama. Di satu pihak dianjurkan agar untuk lebih memahami arti interdependensi maka perlu diteliti sumber-sumber serta mekanisme pertumbuhan ekonomi di kawasan. Namun di lain pihak orangpun dapat mengatakan bahwa adanya perjuangan besar untuk meraih pertumbuhan dan pembangunan ekonomi -- khususnya di negara-negara berkembang yang ada di kawasan -- telah memberikan justifikasi terhadap eksistensi dari interdependensi ekonomi. Dalam satu hal kelihatan bahwa interdependensi itu jarang yang simetris. Dalam hal lain diakui bahwa interdependensi itu sendiri bukannya tanpa 'harga'. Walaupun interdependensi ekonomi tersebut tidak membuat negara-negara bangsa menjadi usang seperti anggapan banyak orang, namun tetap menghambat kebebasan mereka

untuk bertindak dan dengan demikian juga akan memberi dampak nyata bagi proses politik internal mereka sendiri.

Penelitian mengenai pembangunan ekonomi kawasan selama seperempat abad kiranya dapat mengesampingkan peran Jepang selaku motor penggerak utama. Amerika Serikat memang juga merupakan motor penggerak yang sama pentingnya, tidak hanya bagi kawasan itu sendiri melainkan juga bagi seluruh dunia. Perekonomian Amerika Serikat masih dua kali lipat besarnya dibanding perekonomian Jepang dan tetap merupakan pasar terbesar bagi ekspor barang-barang industri di kawasan tersebut.

Pola interdependensi di Pasifik yang memperlihatkan situasi saling bersaing tetapi juga saling melengkapi itu tampak kondusif bagi pengembangan pembagian kerja yang khusus dan dinamis. Pola yang dinamakan "pola angsa terbang" ini menyarankan agar kawasan itu secara keseluruhan mampu berkembang mengikuti Amerika Serikat dan Jepang yang menjadi panutan mereka. Munculnya pola semacam itu dipermudah berkat keanekaragaman antara negara di kawasan dan karena mereka itu diijinkan untuk mengeksploitasi keunggulan komparatif mereka. Dapat dipersoalkan apakah tumbuh dan berkembangnya struktur interdependensi ekonomi di kawasan Pasifik itu diakibatkan oleh karena interdependensi tersebut telah mempermudah terjadinya penyesuaian industri. Sekiranya memang demikian, maka tantangan yang kini dihadapi kawasan tersebut adalah bagaimana menjadikan dirinya mampu menahan proses tersebut di tengah-tengah resistensi yang semakin meningkat di pihak industri yang merosot itu untuk menyesuaikan diri. Beberapa tahun yang lalu telah disarankan agar proses penyesuaian yang terus berlanjut

¹²Peter Gourevitch, "The Second Image Reversed: The International Source of Domestic Politics," dalam *International Organization*, Vol. 32, No. 4 (Autumn 1978): 881-991.

ini hendaknya menjadi fokus kerjasama regional di Pasifik.¹³

Keberhasilan ekonomi di kawasan itu tidaklah hanya disebabkan oleh situasi regional yang kondusif seperti diuraikan di atas. Seperti yang diungkapkan oleh Saburo Okita, ada sejumlah faktor domestik dan kebijakan yang ikut berjasa besar menunjang keberhasilan pembangunan negara-negara di kawasan, misalnya: kebijakan yang berorientasi ke ekspor, tingginya angka investasi yang didukung oleh tingginya angka tabungan domestik, peran aktif sektor swasta di bidang ekonomi, kemajuan-kemajuan besar di bidang pertanian, serta berbagai kebijakan penyesuaian ekonomi yang berhasil.¹⁴ Namun masih perlu diperjelas lagi mengapa negara-negara industri baru Asia dan juga negara-negara anggota ASEAN telah memilih strategi interdependensi ekonomi.

Di berbagai negara apa yang menjadi penyebab utamanya memang kompleks dan beraneka ragam. Walaupun demikian menurut pengamatan William Overholt ada suatu logika pemikiran yang sama-sama dianut dalam pembangunan baik di negara-negara industri baru Asia maupun negara anggota ASEAN. Karena itu ditawarkannya pula suatu model ekonomi politik. Apa yang dinamakan model Asia Pasifik mencakup beberapa unsur sebagai berikut: (a) dorongan rasa kebangsaan; (b) pembersihan lembaga-lembaga (dari korupsi, ketidakmampuan, dsb.); (c) penurunan angka kejahatan, pemogokan politik, kekacauan; (d) pengekangan kelompok penekan (*pressure group*) yang

mengakibatkan sistem bapak asuh (*patronage*), korupsi, inflasi; (e) kesepakatan dengan negara-negara industri maju dalam rangka berbagi modal, pasar dan teknologi; (f) usaha untuk tetap memperkecil anggaran militer namun memperbesar anggaran pembangunan; (g) pergeseran ke arah pengembangan yang berorientasi ekspor; (h) pembauran distribusi pendapatan; (i) membujuk Kelompok Kiri dengan reformasi persamaan dan membujuk Kelompok Kanan dengan pengembangan; (j) menciptakan firma-firma yang modern dan besar untuk memacu perdagangan; (k) memburu teknologi, modal dan perdagangan dari perusahaan-perusahaan multinasional; (l) mencoba maju terus yang dimulai dari sektor-sektor yang padat karya; (m) mempergunakan cara-cara otoriter sejauh perlu untuk mencapai hal-hal tersebut di atas.¹⁵ Menurut pengakuan Overholt model Asia-Pasifik ini tidak hanya merupakan model ekonomi yang berhasil tetapi juga suatu model politik yang berhasil pula.

Barangkali apa yang diungkapkan Overholt itu tepat sekali bila dikatakan bahwa hubungan di atas itu terletak pada kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadikan politik tidak lagi merupakan suatu "zero-sum game". Sesungguhnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi telah membawa konsekuensi lebih besar terhadap negara-negara berkembang dibandingkan negara-negara yang telah maju. Tambahan pula untuk menjadi suatu prasyarat bagi pembangunan bangsa, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan hal yang krusial sekali bagi stabilitas internal suatu bangsa. Negara-negara ASEAN melihat ancaman besar yang mengancam keamanan

¹³Cleveland, *The Future of Pacific Basin*, 6-9.

¹⁴Saburo Okita, "Pacific Development and Its Implications for the World Economy," dalam James W. Morley (Penyunting), *The Pacific Basin -- New Challenges for the United States* (New York: Academy of Political Science, 1986), 26-27.

¹⁵William Overholt, "The Moderation of Politics," dalam James W. Morley, *ibid.*, 38-40.

mereka terutama berasal dari dalam masyarakat mereka sendiri, dan karenanya mereka amat memprioritaskan pembangunan ekonomi yang merupakan sarana paling efektif untuk menjawab jenis tantangan seperti itu. Berbagai tambahan, legitimitas pemerintahan mereka sebagian besar berasal dari keberhasilan usaha pembangunan ekonomi mereka. Jadi, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dilihat sebagai suatu kebutuhan politik. Hal ini memberikan suatu landasan bagi justifikasi politik negara-negara ASEAN untuk melaksanakan kebijakan mereka mengenai interdependensi ekonomi. Akan tetapi, hal seperti itu baru sah selama interdependensi ekonomi tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Bagi negara-negara anggota ASEAN, persoalan yang paling penting adalah apakah kerjasama ekonomi itu mampu meningkatkan pendekatan mereka ke pasar, baik secara global maupun regional, serta mendukung usaha mereka untuk maju terus dalam pembangunan tersebut melalui pengembangan dan peningkatan kemampuan produksi mereka. Bagian berikut ini akan membahas peran ASEAN dalam kerjasama perdagangan regional.

ASEAN dan Kerjasama Pasifik di Bidang Perdagangan

Sebagai tambahan atas fenomena difusi seperti telah dibahas di muka, berbagai ide tentang pengorganisasian kawasan Pasifik juga telah menghadapi suatu gejala fragmentasi. Fenomena ini mengacu pada berbagai usulan untuk membentuk serangkaian kelompok subregional sebagai dasar terbentuknya suatu struktur luas untuk seluruh kawasan Pasifik. Pendekatan khusus ini telah menggelitik ASEAN karena sekarang ini

ASEAN masih terlalu disibukkan oleh aneka usaha untuk memperkuat organisasi sub-regionalnya dan untuk menjaga identitas dirinya sendiri.

Di kawasan Pasifik sekarang ini orang melihat adanya kecenderungan ke arah pembangunan struktur perdagangan subregional. Sebagai tambahan untuk kerjasama perdagangan antar negara-negara ASEAN, persetujuan perdagangan bebas telah dibuat di kawasan Pasifik Barat Daya antara Australia dan Selandia Baru serta antara Amerika Utara dengan Amerika Serikat dan Kanada.¹⁶ Yang jelas hilang dari peta kerjasama perdagangan Pasifik adalah wilayah Asia Timur Laut, khususnya Jepang. Ada suatu pandangan bahwa kini sedang tumbuh berkembang di Asia Timur Laut sejenis 'regionalisme lunak' seperti terlihat jelas dalam perkembangan pesat di bidang perdagangan antara Jepang, Korea Utara, Taiwan dan bahkan Cina.¹⁷

Kecenderungan lain yang muncul di kawasan ini adalah kecenderungan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan bilateral. Kecenderungan ini jadi semakin menonjol karena makin parahnya sistem perdagangan internasional seperti terlihat dalam makin tersebar luas apa yang dinamakan ukuran 'wilayah rawan'. Perkembangan yang terjadi ini jelas merongrong peraturan-peraturan fundamental perdagangan yang dibuat oleh GATT yang di antara sekian banyak tugasnya juga memiliki beberapa

¹⁶Untuk menelaah lebih lanjut mengenai struktur subregional, lihat Hadi Soesastro, "Prospects for Pacific Asian Regional Trade Structures," dalam Robert Scalapino (penyunting), *Pacific-Asian Economic Policies and Regional Interdependence* (Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, 1988), 308-328.

¹⁷Pandangan ini diutarakan oleh Prof. Robert Scalapino.

fungsi pokok antara lain: (a) memastikan adanya persamaan atau non-diskriminasi dalam perdagangan antar negara; dan (b) menjamin stabilitas dalam dunia perdagangan, yaitu menghindari timbulnya perubahan-perubahan mendadak dalam kondisi akses ke pasar.

Perundingan perdagangan multilateral (Babak Uruguay) sekarang ini merupakan suatu usaha untuk memperbaiki sistem perdagangan multilateral. Banyak negara Pasifik terlibat aktif dalam usaha seperti itu termasuk melalui kelompok the *Cairns*, pertemuan informal para pejabat senior Pasifik Barat di bidang perdagangan serta pertemuan para pejabat senior perdagangan negara-negara ASEAN (ASTO). Sementara usaha-usaha tersebut dilaksanakan, negara-negara itu tampak lebih memusatkan perhatian mereka pada stabilitas pendekatan pasar dibandingkan pada persamaan dalam pendekatan pasar. Hal ini menjelaskan mengapa banyak negara sekarang ini lebih berminat untuk memasuki persetujuan dagang bilateral dalam rangka mengamankan akses ke pasar. Ini merupakan inti dari perdagangan yang diatur. Perjanjian Perdagangan Bebas antara Amerika Serikat dan Kanada dapat dilihat baik sebagai suatu struktur perdagangan subregional maupun sebagai suatu persetujuan bilateral sejenis yang telah dibahas di muka. Dalam peristiwa apapun, hal itu telah memberi inspirasi pada usul-usul lain termasuk Perjanjian Perdagangan Bebas antara Amerika Serikat dan Meksiko. Yang menjadi masalah utama di sini adalah apakah di masa mendatang perkembangan yang telah difragmentasikan ini mampu menghasilkan suatu struktur yang lebih terpadu yang luasnya meliputi seluruh kawasan. Usul umum yang dapat dikembangkan di sini sebagai suatu syarat terciptanya integrasi adalah bahwa subgrup-subgrup terse-

but hendaknya merupakan subgrup yang "berorientasi ke luar".

Dalam subgrup ASEAN, Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA - *Preferential Trading Arrangement*) yang diperkenalkan tahun 1977 mendapat rangsangan baru dalam Pertemuan Puncak ASEAN ketiga di Manila pada bulan Desember 1987. Akan tetapi, keputusan untuk meningkatkan lebih jauh pembebasan perdagangan selektif antar ASEAN melalui PTA bahkan masih jauh dari mencukupi untuk menghasilkan suatu kawasan dagang bebas yang terbatas dalam dasawarsa 1990-an, seperti direncanakan dalam persetujuan tahun 1977. Akan tetapi dilihat dari pentingnya perdagangan bagi negara-negara ASEAN dan ditinjau dari ketidakpastian yang terjadi di dunia perdagangan global, para pejabat ekonomi senior ASEAN baru-baru ini telah sepakat memperbaiki kembali usaha mereka guna mencari inisiatif-inisiatif yang berani, termasuk inisiatif di bidang kerjasama perdagangan. Masalahnya di sini adalah yang berkaitan dengan arah kerjasama di masa mendatang.

Baik dari segi konsepsi maupun kebijakan, adalah penting untuk memasukkan sedini mungkin suatu orientasi keluar dalam proses kerjasama ekonomi ASEAN itu. Dilihat dari inti hubungan ekonomi ASEAN baik di masa sekarang maupun mendatang maka orientasi keluar haruslah bersifat global (multilateral) dan regional (Pasifik). Hanya baru-baru ini saja ASEAN meningkatkan kepentingan dan keterlibatannya dalam perundingan-perundingan GATT. Demikian juga halnya dengan "Forum Pasifik" ASEAN, yang juga baru muncul akhir-akhir ini. Namun dengan berkembangnya APEC (Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik) yang prosesnya baru diawali pada bulan November 1989 di Canberra, ASEAN dapat

memanfaatkan forum tersebut sebagai suatu forum konsultasi untuk meningkatkan kepentingan perdagangan regional mereka.

Dalam agenda mendatang hendaknya usaha ASEAN untuk mencari struktur hubungan perdagangan dengan partner-partner dagangnya di Pasifik dijadikan salah satu prioritas utamanya. Walaupun secara eksplisit ASEAN dan para mitra dagangnya di Pasifik telah menolak ide untuk membentuk suatu blok dagang Pasifik, ASEAN hendaknya secara serius meneliti skema-skema regional lainnya. Salah satu usulan ialah agar melibatkan diri dalam "Babak Pasifik" yang mencakup pembebasan perdagangan antar negara-negara Pasifik. Usul ini mengundang banyak minat teristimewa jika Perundingan Uruguay itu gagal.¹⁸ Hendaknya pula diteliti kemungkinan mengadakan perjanjian-perjanjian bilateral. Usul untuk mengadakan suatu struktur bilateral antara ASEAN dengan Amerika Serikat yang pertama kali diusulkan di tahun 1982 kini sedang dipertimbangkan oleh sebuah panitia gabungan dan telah dipelajari oleh sekelompok riset gabungan. Inisiatif ini dikenal sebagai AUI (*ASEAN-U.S. Initiative*) atau Inisiatif Amerika Serikat-ASEAN.¹⁹

Persetujuan Dagang Bilateral antara Amerika Serikat dan ASEAN jelas akan

berbeda secara hakiki dari Perjanjian Perdagangan Bebas antara Amerika Serikat dan Kanada. Tidakkah segera jelas apakah persetujuan bilateral semacam ini akan non-resiprokal untuk sebagian besar, ataukah preferensial yang parsial, atau benar-benar secara esensial resiprokal. Ketika William Brock, wakil Perdagangan Amerika Serikat mengusulkan diadakannya suatu persetujuan dagang bebas dengan ASEAN di tahun 1982, pihak ASEAN tidak begitu berminat sebab mereka takut jangan-jangan persetujuan semacam itu akan mengakibatkan membanjirnya barang-barang Amerika Serikat ke kawasan. Kemudian, setelah menyadari pentingnya menjamin akses ke pasar Amerika Serikat yang luas itu, para anggota ASEAN mengungkapkan keinginan mereka untuk mengadakan program kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Amerika Serikat yang lebih terstruktur dan komprehensif. Usul tandingan ASEAN ini sejalan dengan garis besar CBI (*Caribbean Basin Initiative*)nya Amerika Serikat, yang pada dasarnya merupakan pengaturan perdagangan preferensial. Pihak Amerika Serikat menolak usul seperti itu karena adanya beberapa alasan yang jelas. Dalam pertemuan berikutnya dengan para menteri ekonomi ASEAN, Brock melontarkan gagasan ketiga, yakni bahwa kedua belah pihak mengambil pendekatan dua tahap. Tahap pertama, kedua belah pihak akan membahas secara luas persetujuan mengenai masalah-masalah ekonomi. Tahap kedua, dan ini lebih penting, akan mencakup perjanjian terpisah tiap negara ASEAN dengan Amerika Serikat, masing-masing dilakukan menurut gayanya sendiri-sendiri dan menghasilkan perjanjian dagang bilateral yang terpisah satu dengan lainnya. Langkah pendekatan inilah yang diambil oleh *ASEAN-U.S. Initiative*.

¹⁸Ide untuk mengadakan Putaran Pasifik diusulkan pertama kali oleh Peter Drysdale dan Ross Garnaut dalam suatu konperensi di Washington D.C. Desember 1988. Dalam pertemuan APEC kedua, para menteri APEC mengusulkan agar ide tersebut dipelajari secara serius.

¹⁹Laporan final gabungan yang dilakukan oleh kelompok riset telah diterbitkan; lihat Seiji Naya, Kernial Sandhu, Michael Plummer, Narongchai Akrasanee (koordinator-koordinator), *ASEAN-U.S. Initiative - Assessment and Recommendation for Improved Relations* (Honolulu: East West Center, 1989).

Lepas dari usul yang diajukan AUI, ada juga ide mengenai skema yang mencakup seluruh kawasan Pasifik, suatu skema yang sejalan dengan yang ditempuh oleh CBI (*Caribbean Basin Initiative*). Apa yang dinamakan Inisiatif Kawasan Pasifik (*Pacific Basin Initiative*) itu akan meliputi ASEAN dan negara-negara berkembang Pasifik lainnya di satu pihak serta semua negara OECD Pasifik di lain pihak. Namun, ide tersebut belum pernah disetujui oleh para pengambil keputusan.

Kajian singkat di atas menunjuk pada tiga kesimpulan penting. Pertama, struktur dan pengaturan subregional di kawasan Pasifik memang sedang dicari dan dikembangkan secara serius. Fenomena fragmentasi ini merupakan fenomena yang paling banyak didengungkan di bidang kerjasama perdagangan. Hal ini barangkali merupakan akibat dari ketidakpastian yang terus berlanjut yang terjadi di lingkungan perdagangan dunia yang diakibatkan oleh memburuknya sistem perdagangan internasional. Dilihat dari taruhan besar ASEAN dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, maka ASEAN haruslah mengambil sikap yang lebih aktif. Pada kenyataannya ASEAN telah berbuat seperti itu dalam Pertemuan Kedua APEC yang diselenggarakan di Singapura bulan Juni 1990, ketika ASEAN menghasilkan suatu putusan bersama yang tajam sekali mengenai Putaran Uruguay. Pernyataan bersama itu tampaknya memberi dampak pada para mitra dagang ASEAN di Pasifik.

Kedua, fragmentasi seperti itu barangkali merupakan suatu refleksi dari keanekaragaman kawasan. Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi di kalangan negara Pasifik tampaknya menghasilkan berbagai subgrup di tingkat subregional. Perjanjian per-

dagangan bilateral, seperti perjanjian perdagangan antara ASEAN dan Amerika Serikat dapat mengatasi kecenderungan-kecenderungan alamiah seperti itu. Merupakan suatu hal yang lebih penting bahwa struktur perdagangan subregional yang beranekaragam itu memahami pentingnya mempertahankan orientasi ke luar dan kebutuhan untuk mengaitkan diri mereka sendiri. Hal ini dapat mempermudah pembangunan struktur-struktur subregional ini menjadi suatu struktur yang lebih terpadu yang luasnya mencakup seluruh kawasan. Kalau tidak, maka kawasan akan berakhir menjadi serangkaian struktur dagang subregional yang saling bersaing.

Ketiga, struktur subregional yang mencakup Jepang jelas tidak ada. Sehubungan dengan ini barangkali Jepang merupakan tempat yang paling baik dan akan memainkan peran penting dalam pengembangan suatu struktur regional yang lebih terpadu di Pasifik. Akan tetapi peran semacam itu barangkali akan lebih dapat dimainkan Jepang bila struktur regional tersebut dimengerti bukan sekedar struktur yang melulu mengurus perdagangan. Kebijakan perdagangan Jepang kurang begitu diberi informasi untuk memungkinkannya memainkan peran yang konstruktif dalam kerjasama perdagangan regional. Namun lepas dari fakta ini, barangkali perlu untuk bergerak di luar bidang perdagangan bila yang menjadi persoalan adalah pembentukan struktur regional yang terpadu.

Bagian berikut ini akan membahas struktur produksi regional yang baru tumbuh di Pasifik dan peran Jepang yang krusial dalam struktur tersebut serta menelaah implikasi-implikasinya bagi ASEAN dan negara-negara lain yang lebih kecil di kawasan.

ASEAN dan Struktur Produksi Regional Pasifik yang Baru Tumbuh

Interdependensi ekonomi di Pasifik ditandai tidak hanya dengan adanya arus perdagangan tetapi juga dengan adanya arus modal, khususnya arus investasi modal asing secara langsung. Seperti telah dibahas di muka, diperkirakan bahwa dari arus masuk penanaman modal asing langsung yang masuk ke kawasan sekitar 60 sampai 80% berasal dari kawasan itu sendiri. Penanaman Modal Asing Langsung (PMAL) tersebut memainkan peran penting dalam merombak struktur industri-industri di kawasan. Dalam tahun 1988 PMAL (Penanaman Modal Asing Langsung) merupakan 2,5 sampai 5% dari seluruh modal kotor di negara-negara seperti Kanada, Cina, Indonesia dan Selandia Baru. Andilnya adalah antara 5 sampai 10% untuk Malaysia, Muangthai dan Amerika Serikat, dan lebih dari 10% untuk Australia dan Singapura.²⁰

Seperti terlihat dalam Tabel 4, Jepang merupakan sumber utama PMAL. Dari 1980 sampai 1984 PMAL Jepang meningkat sebesar 2,5 kali lipat, tetapi dari tahun 1984 sampai 1988 jumlah tersebut meningkat lebih dari lima kali. Taiwan juga telah menjadi sumber PMAL ke kawasan. Investasi langsung Jepang telah memainkan dan akan terus memainkan peran yang krusial untuk membangun struktur produksi regional di Pasifik. Seperti terungkap di mana-mana, arus PMAL Jepang dipergunakan untuk meningkatkan pembentukan suatu sistem pembagian kerja internasional.²¹ Sudah jelas se-

kali bahwa Jepang telah menjadi inti dari struktur produksi regional yang sedang muncul.

Dalam tahun 1987, nilai tambah industri Jepang berjumlah sekitar sepertiga dari seluruh nilai tambah yang ada di Pasifik. Jumlah itu masih tetap di bawah Amerika Serikat yang jumlahnya mencapai sekitar 48% dari seluruh kawasan. Namun nilai tambah industri di seluruh kawasan Asia Timur (termasuk Jepang) telah setingkat dengan Amerika Serikat di tahun 1987, dan boleh jadi sekarang melampaui. (Lihat Tabel 5). Andil ASEAN hanyalah sekitar 2% dari seluruh nilai industri kawasan. Walaupun demikian ASEAN jelas telah menjadi suatu bagian integral dalam struktur produksi kawasan. Dilihat dari sudut Jepang, ASEAN telah menjadi suatu landasan menarik bagi produksi luar negerinya.²²

Peningkatan PMAL Jepang telah menjadi amat dramatis. Di tahun 1980 seluruh arus ke luar PMAL Jepang berjumlah hampir US\$5 trilyun. Di tahun 1984 jumlah tersebut meningkat sedikit di atas US\$10 trilyun. Pada tahun 1986 jumlah tersebut meningkat dua kali lipat menjadi sekitar US\$22 trilyun. Dalam tahun 1989 besarnya malahan meningkat menjadi US\$67,5 trilyun atau sedikit di atas 10% investasi swasta dalam perekonomian domestik. Di tahun 1970-an PMAL Jepang berjumlah sekitar 3 sampai 4% dari PMDN swasta.

Yang juga sama pentingnya adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam pola gelombang baru PMAL Jepang. Perubahan tersebut diakibatkan oleh sejumlah faktor, salah satu di antaranya adalah apresiasi nilai

²⁰Lihat Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Australia, *Recent Developments in Asia Pacific Direct Investments*, Research and Policy Discussion Papers No. 7 (Canberra, April 1990), Tabel 3.1.

²¹Hirobumi Takaoka, "Trends in Japan's Direct Investment Abroad in FY 1987," dalam *EXIM Review*, Vol. 9, No. 2 (March 1989). 111.

²²Akiyoshi Sato dan Akira Aoki, "The Role of ASEAN States as Production Bases," Bagian I dan II, dalam *Pacific Business and Industries*, Vol. 1, No. 3 dan 4 (1989).

Tabel 4

ARUS MASUK INVESTASI LANGSUNG BERSIH
(Dalam Jutaan US\$)

	1980	1984	1986	1988
Brunei	-	-	-	-
Indonesia	183	222	258	542
Malaysia	934	797	489	611
Filipina	-106	9	127	936
Singapura	1.138	1.210	479	1.066
Thailand	187	400	261	1.092
ASEAN	2.336	2.638	1.614	4.247
Cina	n.a.	1.124	n.a.	n.a.
Hong Kong	-	-	-	-
Jepang	-2.110	-5.970	-14.250	-34.710
Korea	-7	73	325	7.200
Taiwan	124	131	260	-3.161
Australia	1.365	-1.149	464	-303
New Zealand	71	102	101	119
PNG	-	-	-	-
ASIA TIMUR	-	-	-	-
Kanada	-3.169	-836	-1.731	-3.320
Amerika Serikat	-2.300	22.570	6.280	40.920
ASIA PASIFIK	-	-	-	-

(-) berarti arus keluar bersih

Sumber: Departemen Perdagangan dan Luar Negeri (Australia).

Tabel 5

KAWASAN CEKUNGAN PASIFIK -- DATA KOMPARATIF (II)

	GNP/Kapita	Nilai Tambah Pertanian 1987 (% Total)	Nilai Tambah Manufaktur 1987 (% Total)
Brunei	15.000	-	-
Indonesia	440	5,2	0,6
Malaysia	1.940	2,0	0,4
Filipina	630	2,4	0,4
Singapura	9.070	0,0	0,3
Thailand	1.000	2,3	0,6
ASEAN	-	11,9	2,3
Cina	330	26,2	5,2
Hong Kong	9.220	0,0	0,5
Jepang	21.020	19,0	32,7
Korea	3.600	4,0	1,7
Taiwan	6.000	1,5	2,1
Australia	12.340	2,1	1,7
New Zealand	10.000	0,9	0,3
PNG	8,0	0,2	0,0
ASIA TIMUR	-	66,0	46,5
Kanada	16.960	3,0	3,4
Amerika Serikat	19.840	25,5	47,7
ASIA PASIFIK	-	94,5	97,5
Chili	1.510	0,5	0,3
Meksiko	1.760	3,6	1,8
Peru	1.300	1,4	0,4
CEKUNGAN PASIFIK	-	100,0	100,0

Sumber: Data Base CSIS.

yen di tahun 1985/1986. Investasi-investasi di Amerika Serikat dan Eropa meningkat karena apresiasi nilai telah membuat merger dan pemilikan lebih menguntungkan. Akan tetapi investasi-investasi yang berarti yang dilakukan di negara-negara tersebut adalah untuk menghindari hambatan-hambatan dalam dunia perdagangan dan untuk menghindari friksi-friksi dalam perdagangan. Investasi yang dilakukan di Asia lebih digerakkan oleh kebutuhan perusahaan-perusahaan Jepang agar mampu menghadapi persaingan yang semakin meningkat -- teristimewa dari negara-negara industri baru Asia -- serta untuk mempertahankan daya saing mereka di bidang harga internasional yang telah digrogoti oleh apresiasi nilai mata uang yen.

Suatu ciri penting dalam PMAL Jepang ke Asia Timur adalah bahwa PMAL yang berasal dari produsen akhir selalu disertai dengan PMAL yang berasal dari pemasok suku cadang. Dengan kata lain, arus masuk investasi dari perusahaan-perusahaan besar diikuti oleh perusahaan-perusahaan kecil yang di negara asalnya telah biasa memasok suku cadang dan bahan-bahan ke perusahaan besar. Hal ini yang mengarah pada pembentukan suatu "pola investasi terpadu". Menurut pemikiran Matoji Sakurai, PMAL Jepang di Asia Timur memiliki ciri-ciri yang diakibatkan oleh jalinan antara investasi dan perdagangan yang pada dasarnya *saling melengkapi*, yang jelas berbeda dari kaitan *substitusional* yang mewarnai PMAL Jepang di Amerika Serikat.²³

Masih banyak ciri-ciri penting lainnya dari PMAL Jepang baik secara global maupun yang ditanamkan di Asia Timur. Sebe-

lum kita kaji ciri-ciri tersebut, ada baiknya secara ringkas kita bahas penyebaran PMAL Jepang tersebut secara regional. Sejak 31 Maret 1990, secara kumulatif jumlah PMAL Jepang adalah US\$254 trilyun. Sekitar 40% dari jumlah itu ditanam di Amerika Utara, khususnya di Amerika Serikat. Asia menduduki ranking kedua, disusul Amerika Latin dan Eropa. Secara keseluruhan, arah kecenderungannya adalah ke peningkatan kecepatan arus PMAL Jepang ke negara-negara industri. Akan tetapi, kemerosotan relatif saham Asia sebagian disebabkan oleh lebih kecilnya jumlah PMAL Jepang per kasus di Asia dibandingkan dengan investasinya di kawasan lain. Misalnya, sejak 31 Maret 1988 nilai rata-rata PMAL Jepang per kasus di Asia adalah sebesar US\$1,9 trilyun, yang jelas lebih rendah dibandingkan dengan PMAL per kasus di Amerika Utara yang jumlahnya mencapai US\$3,2 trilyun, sedangkan di Amerika Latin jumlahnya sebesar US\$4,2 trilyun per kasus, dan di Eropa sebesar US\$4,3 trilyun per kasus.

Dari seluruh cadangan PMAL Jepang sampai 31 Maret 1990, lebih dari 70% ditanamkan di sektor non-industri (sektor jasa). PMAL terbesar adalah di sektor perbankan, keuangan dan asuransi, diikuti oleh real estate. Kecenderungan yang menyeluruh adalah percepatan kenaikan PMAL Jepang ke negara lain di sektor jasa, 40% lainnya berada di sektor industri, dan sisanya sekitar 20% berada di sektor pertambangan. Sekarang ini, sekitar 40% sampai 70% dari seluruh investasi langsung Jepang berada di sektor jasa, dan 20 sampai 30% di sektor industri sedangkan hanya 10% berada di sektor pertambangan.

Walaupun arus PMAL Jepang di sektor industri itu menurun dilihat dari persentase arus keseluruhan, namun justru jenis inves-

²³Makoto Sakurai, "Japan's Direct Foreign Investment and Asia," *TRI Discussion Paper Series* No. 7, May 1990.

tasi inilah yang telah menjadi ujung tombak strategi globalisasi perusahaan-perusahaan Jepang. Ciri penting PMAL Jepang di bidang industri sepanjang dekade 1980-an adalah peningkatan saham mereka dalam subsektor mesin (umum, listrik, mesin transportasi); andil mereka itu sekarang ini mencapai lebih dari 60% pada hal di tahun 1970-an jumlahnya hanya 30%. Juga di negara-negara ASEAN andil tersebut kini mencapai 60% dari hanya kurang dari 15% di pertengahan dekade 1970-an.

Sesungguhnya, industri-industri mesin dapat digambarkan sebagai industri yang menghasilkan multi produksi yang membantu pembagian kerja intra perusahaan dan intra industri di antara sebegitu banyak negara tuan rumah dengan berbagai keuntungan. Strategi globalisasi ini memungkinkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk merealisasikan produksi dengan biaya yang paling kecil dilihat dari perspektif dunia. Akan tetapi, perkembangan ini bukannya tanpa tantangan besar bagi perusahaan-perusahaan Jepang. Kini dirasa perlu untuk merombak kembali pembagian kerja di antara perusahaan-perusahaan itu sendiri. Barangkali juga ada kebutuhan yang lebih mendasak di kalangan perusahaan tersebut untuk mendirikan markas besar regionalnya yang akan bekerja dalam gaya yang lebih didesentralisasi. Mereka yang bersikap skeptis berpendapat bahwa keberhasilan perusahaan-perusahaan Jepang dalam menjangkau hal yang global belumlah menghasilkan perusahaan multinasional yang tumbuh secara penuh dan bahwa perusahaan-perusahaan itu lebih banyak melibatkan diri dalam globalisasi semu daripada globalisasi lunak karena produksi-produksi luar negerinya tetap dikendalikan dan diatur oleh orang-orang Jepang.

Subsektor-subsektor mesin listrik dan elektronika telah menyebabkan peningkatan pesat dalam gelombang kedua (yaitu era setelah apresiasi mata uang yen) PMAL Jepang di Asia Timur. Sektor-sektor tersebut menggambarkan pergeseran menonjol ke arah produksi luar negerinya. Lihat misalnya masalah produksi radio kaset. Di tahun 1986, rasio perbandingan produksi anak-anak perusahaan di lima negara Asia dengan produksi keseluruhan Jepang sudah mendekati 60%. Angka ini telah meningkat menjadi 50% dari seluruh produksi radio kaset di kelima negara tersebut. Seperti dibahas di muka, pola baru PMAL Jepang ini membawa dampak nyata bagi arus perdagangan internasional antara Jepang dan negara-negara yang menerima PMAL Jepang. Kini komponen-komponen elektronika dikirimkan dari perusahaan induk ke cabang-cabangnya di luar Jepang di mana komponen tersebut dirakit guna menghasilkan segala macam peralatan listrik. Andil ekspor ekspor perusahaan intra ini pada ekspor perusahaan induk Jepang kini telah mencapai sekitar 60% di sektor permesinan dan jumlahnya akan terus meningkat. Untuk sektor manufaktur secara keseluruhan, lebih dari tiga perempat ekspor anak-anak perusahaan di Asia ke Jepang berbentuk perdagangan intra perusahaan.

Sejumlah penelitian yang dilakukan baru-baru ini menyimpulkan bahwa arus PMAL Jepang ke Asia Timur akan terus bergeser dari negara-negara industri baru Asia ke ASEAN, mengingat keuntungan-keuntungan ekonomi dari negara-negara industri baru tersebut merosot.²⁴ Sebagai tambahan, negara-negara ASEAN itu sendiri telah semakin berani untuk bergerak membangun apa yang dinamakan "jaringan be-

²⁴Ibid.,

lanja global'' sebagai sumber luar negerinya. Dengan kata lain, mereka sendiri secara aktif mengambil peran dalam proses globalisasi produksi. Akhirnya, peran dan tempat ASEAN dalam struktur produksi regional Pasifik juga bergantung atas kebijakan-kebijakan ASEAN dalam menarik dan memanfaatkan PMAL dari Jepang maupun dari negara-negara Pasifik lainnya.

Sampai 31 Maret 1989 PMAL Jepang dalam sektor industri di lima negara ASEAN (tidak termasuk Brunei) berjumlah sekitar US\$8.3 trilyun atau 44,5% dari seluruh PMAL Jepang ke kawasan Asia. Jumlah itu juga sama dengan sekitar 17% dari seluruh cadangan PMAL-nya pada sektor industri di seluruh dunia. Tentu saja hal itu bukan suatu jumlah yang berarti. Dengan melihat perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam struktur ekonomi baik di Jepang sendiri maupun di negara-negara ASEAN, dapat diharapkan adanya kesinambungan peningkatan PMAL Jepang ke kawasan ASEAN. Hal ini akan meningkatkan pengembangan pembagian kerja yang lebih horisontal antara ASEAN dan Jepang. Akan tetapi kini masalah yang telah berulang kali diutarakan adalah apakah negara-negara anggota ASEAN itu akan merasa senang menjadi hanya bagian dari suatu struktur produksi regional di mana yang menjadi intinya adalah Jepang.

Sebagai kesimpulan, tampaknya bahwa persoalan atau pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab jika orang memiliki pemikiran yang jelas mengenai akibat-akibat menyeluruh dari struktur produksi regional itu terhadap setiap negara anggota ASEAN maupun bagi ASEAN itu sendiri secara keseluruhan. Ambil saja sebagai contoh, fasilitas produksi komponen di wilayah ASEAN. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat menjadi

sumber utama untuk meningkatkan industri intra ASEAN. Mereka dapat memperkokoh jalinan horisontal antar industri-industri ASEAN. Inilah yang justru telah lama menjadi tujuan kerjasama ASEAN. Ironinya, berbagai skema kerjasama ASEAN -- termasuk skema komplementasi industri ASEAN -- jauh dari berhasil dibandingkan PMAL-PMAL Jepang dalam mempromosikan jalinan-jalinan horisontal seperti itu. Dengan mengambil bagian dalam struktur produksi regional tersebut ASEAN dapat memperoleh manfaat dengan memperkuat struktur produksinya sendiri. PMAL Jepang haruslah diarahkan untuk dapat mencapai tujuan seperti itu. Negara-negara ASEAN harus mulai mendefinisikan sendiri ''pusat-pusat pertumbuhan asli'' mereka sendiri seperti diungkapkan dalam ide pembentukan segi tiga emas Malaka yang meliputi Singapura, Indonesia (Propinsi Riau) dan Malaysia (Johor). Serupa dengan itu, sekiranya ide Muangthai untuk membentuk jasad emas Indocina dapat direalisasikan, maka hal ini dapat menciptakan suatu struktur bagi PMAL baik dari Jepang maupun dari negara-negara Pasifik lainnya untuk ikut serta memperkuat landasan produksi ASEAN.

Catatan Penutup

Implikasi-implikasi dari timbulnya struktur produksi regional dan fragmentasi struktur perdagangan di kawasan Pasifik terhadap negara-negara yang lebih kecil, khususnya terhadap ASEAN, tidaklah dapat diremehkan. Itu semua merupakan tantangan besar bagi ASEAN. Ikatan-ikatan antara investasi dan perdagangan yang banyak dapat memperumit masalah yang ada; misalnya Amerika Serikat dapat saja menganggap ASEAN melulu sebagai negara yang me-

ngembangkan diri sebagai landasan produksi luar negeri perusahaan-perusahaan Jepang. Yang pasti sekarang ini tengah berlangsung proses restrukturisasi industri dan basis-basis produksi lainnya di seluruh Pasifik. ASEAN harus terus mengembangkan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan tersebut. Situasi eksternal yang dihadapi ASEAN sekarang ini memang benar-benar kompetitif. Semua ini menunjukkan alasan yang dapat diterima bagi ASEAN untuk mulai mengadakan 'rolling adjustments' bagi industri-industri di kawasan sebagai fokus kerjasama ekonomi Pasifik. Tidak diragukan lagi, ASEAN memiliki taruhan besar dalam cara yang akan ditempuh oleh proses tersebut untuk menyingkap masa depan. Apakah ASEAN mampu mempengaruhi proses itu?

Dilihat dari segi ekonomi, ASEAN memang tidak memiliki bobot yang memadai dalam percaturan Pasifik. Namun, sebagai subregio ASEAN juga tidak dapat dikesampingkan. Dilihat dari jumlah penduduk dapat dikatakan bahwa ASEAN juga kurang berarti: di tahun 1988 jumlah penduduk ASEAN hanya 15% dari jumlah penduduk Pasifik. Di tahun 2000 jumlah andilnya akan meningkat sedikit (16%). ASEAN juga

bukan merupakan pasar yang tidak berarti bagi ekspor negara-negara Pasifik. Dalam tahun 1988 andil ASEAN dalam perdagangan intra Pasifik sebesar 9%.

Dalam analisis akhir, peran masing-masing negara atau sekelompok negara dalam struktur regional Pasifik yang sedang tumbuh ini tidaklah hanya bergantung pada serangkaian dari apa yang dinamakan faktor 'obyektif' seperti diukur dari segi keamanan ekonomi maupun teknologinya. Faktor-faktor lain, seperti faktor politik dan bahkan juga faktor organisasi, juga sama pentingnya. Justru dalam bidang-bidang inilah hendaknya ASEAN berkembang dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya. ASEAN mampu memainkan peran yang lebih luas dalam ruang lingkup kawasan sekiranya mekanisme internalnya berfungsi dengan baik. Kelemahan ASEAN adalah tiadanya mekanisme yang mampu secara efektif menangani tugas untuk merumuskan peran dan posisinya dalam struktur ekonomi regional yang sedang tumbuh ini. Sekiranya ASEAN gagal untuk mengembangkan pendekatan bersama dalam masalah yang teramat penting ini, maka ASEAN hendaknya tidak mengeluh kalau nanti sadar telah dieksploitir oleh negara lain.

India: Kekuatan Militer Asia yang Sedang Tumbuh

Wisnu DEWANTO

SITUASI internasional dewasa ini telah mengalami berbagai perubahan. Fokus perhatian analisis militer tidak lagi terpusat pada dua kekuatan besar dunia, yang kini cenderung saling meredakan ketegangan dan bahu-membahu mengupayakan penyelesaian berbagai krisis dunia. Gejala multipolarisasi hubungan kekuatan dunia semakin tampak dengan munculnya kekuatan-kekuatan militer alternatif baru di berbagai kawasan pada dekade terakhir ini. Kekuatan-kekuatan baru tersebut diperkirakan akan memegang peran semakin penting pada masalah-masalah regional dan global di masa mendatang.

Kajian berikut ini akan melihat pertumbuhan dan potensi militer India sebagai salah satu kekuatan baru di Asia. Meningkatnya kemampuan militer negeri ini sejak awal dekade delapan puluhan telah menarik perhatian internasional. India kini telah menjadi salah satu kekuatan militer dunia. Angkatan bersenjata negeri ini berkekuatan lebih dari satu juta personil militer didukung sekitar 800 pesawat tempur, 60 kapal perang

dan 3.100 tank berbagai jenis. Selain itu sekitar 80 unit produksi dan riset perlengkapan militer terus dikembangkan. Hingga akhir dekade 1980-an India tercatat sebagai salah satu negara produsen senjata terkemuka dan menjadi satu dari lima negara pengimpor senjata terbesar dunia.¹

Perkembangan ini tampaknya telah mengusik persepsi keamanan negara-negara tetangganya di kawasan Asia Selatan maupun di luar kawasan. Negara-negara tetangganya lebih melihat apa yang dilakukan India sebagai ancaman terhadap keamanan regional Asia Selatan. Negara-negara di luar kawasan tergerak untuk mengetahui apa yang menjadi maksud dan latar belakang kebijakan pengembangan militer ini. Pengembangan armada lautnya yang dinilai luar biasa misalnya, sempat membuat Australia gusar dan mencari tahu peran apa sesungguhnya yang hendak dimainkan angkatan laut India di kawasan Samudera Hindia. Bagi Indonesia

¹Lihat di antaranya Amlt Gupta, "Indian Arms Industry: A Lumbering Giant", *Asian Survey*, Vol. XXX No. 9 (September 1990): 846-861.

dan negara-negara ASEAN perlu juga kiranya mengamati perkembangan ini mengingat kedekatan letak geografis dan taruhan kepentingan nasional dan regional kita di kawasan Asia Tenggara.

Dari Pasifisme ke Militerisme

Dalam sejarah politik nama India pernah mencatat kedekatan arti dengan prinsip Gandhisme, pasifisme dan tanpa kekerasan (*non-violence*). Predikat ini memang telah dicoba dibuktikan oleh para pemimpin India seperti Mahatma Gandhi pada masa sebelum kemerdekaan. Gandhi menegaskan bahwa militer yang kuat bukan merupakan pilihan bangsa India. Peran seorang militer di India tidak harus dibedakan dengan masyarakat pembajak ladang dan pekerjaan sipil lainnya. Bahkan visi Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru tentang "The Great India", juga tidak banyak dikaitkan dengan besarnya kekuatan militer. Dalam kebijakan pemerintahannya ia cenderung untuk menerapkan *low military profile* di samping teguh menjalankan politik non-blok.²

Perkembangan internasional sejak perang pertama India-Pakistan 1948 agaknya menuntut peninjauan kembali relevansi berbagai predikat yang pernah disandang India. Hal ini disebabkan oleh kemampuan militer India telah menjadi semakin penting artinya bagi keterlibatan negeri ini dalam peredaran politik di tingkat regional Asia Selatan. Keberhasilan percobaan peledakan piranti nuklir di Gurun Rajastan tahun 1974 secara dramatis telah menaikkan peran India

dari aktor regional ke internasional. Meskipun harus diakui kemiskinan masih melilit negara ini, bukti bahwa India memiliki kekuatan militer yang ditafsirkan sebagai yang keempat terbesar di dunia dewasa ini semakin tampak. Dengan aset industri militernya yang luar biasa seiring dengan peningkatan dua kali lipat anggaran belanja dan riset militernya selama dekade delapanpuluhan, menjadikan negeri ini paling terkemuka di antara negara-negara produsen senjata non-Barat.³

Sejalan dengan seringnya India menghadapi ancaman perang baik dengan Pakistan maupun Cina pada dua dekade setelah kemerdekaan, pasifisme militer India semakin dipandang tidak relevan dengan perkembangan internasional yang ada. New Delhi melihat perlunya penetapan kebijakan pengembangan kekuatan militernya secara hati-hati berdasarkan potensi dan persepsi keamanannya. Dalam hal ini tampak sedikitnya empat faktor utama yang menjadi latar belakang. Pertama adalah cukup tersedianya potensi sumber alam dan manusia yang terpadu dengan persepsi elite politik negeri ini untuk menjadikan India salah satu aktor dunia. Kedua adalah upaya mengamankan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya dari ancaman negara lain baik dalam konteks regional maupun global. Ketiga berkaitan dengan keamanan domestik yang disebabkan gejolak dalam negeri yang terus-menerus mengancam kesatuan nasionalnya dan keempat keajaiban penampilan India di bidang industri dan penerapan teknologi.⁴

³Sejak tahun 1986 India tercatat sebagai importir senjata terbesar kelima dunia dengan membelanjakan sekitar US\$5,2 milyar, lebih besar daripada jumlah gabungan impor senjata Iran dan Irak pada tahun 1987.

⁴Lebih lanjut lihat Ashequa Irshad, "India Military Power and Policy", *BIIS Journal*, Vol. 10, No. 4 (Oktober 1989): 383-394.

²Lihat Raju G.C. Thomas, "The Armed Service and Indian Defense Budget", *Asian Survey*, 20:3 (March 1980): 281. Lebih lanjut lihat juga Stephen P. Cohen dan Richard Park, *India: Emergent Power?* (New York: Crane, Russak, 1978), 7-10.

Berkaitan dengan butir pertama, keinginan India menjadi aktor internasional memang beralasan. Di kawasan Asia Selatan saja negeri ini merupakan negara terkemuka dengan menguasai 73% wilayah, 77% penduduk dan 78% GDP kawasan. Ditambah dengan letak geopolitiknya yang strategis dalam peta bumi dan kekayaan mineral serta peradaban budaya yang tinggi, masyarakat India yakin negaranya mampu menjadi salah satu kekuatan besar dunia. Keyakinan ini selalu ditanamkan pula oleh para elite politik negeri ini dengan menyatakan bahwa peran besar India bagi dunia adalah peran yang layak. Hal ini disebabkan tidak hanya karena India mempunyai semua potensi untuk menjadi besar tetapi juga karena merasa memiliki hak mewaris warisan kolonial Inggris khususnya dalam perwujudan keamanan kontinental.

Berkaitan dengan persepsi ancaman terhadap integritasnya sebagai negara besar dan berdaulat India telah banyak belajar dari sejarah masa lalu. Ancaman Cina yang dianggap sebagai ancaman ekstra regional merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan pertahanan dan keamanan India. Kedua negara telah memulai konflik perbatasan sejak tahun 1954 dan memuncak tahun 1962 sewaktu Cina mengklaim lebih dari 50.000 km² wilayah yang diduduki India berdasarkan garis Mac Mahon.⁵ Hingga akhir dekade lalu telah dilakukan sembilan kali putaran perundingan membicarakan masalah konflik teritorial tersebut, tetapi

hingga kini hasil positif belum juga tampak. Di samping itu dalam persepsi India, Cina sebagai raksasa Asia merupakan pesaing utamanya dalam masalah supremasi. "Keirian" terhadap Cina yang memperoleh status sebagai anggota tetap dalam Dewan Keamanan PBB, dan pengakuan dalam keanggotaan eksklusif negara nuklir dunia, memacu India untuk bangkit. Tidak ada alasan bagi India untuk tidak bisa menyamai kemampuan militer Cina yang telah mampu masuk ke jajaran negara nuklir dunia.

Ancaman regional dari tetangganya Pakistan merupakan faktor penting lain yang mendorong perkembangan militer India. India menganggap pantas untuk meningkatkan kemampuan militernya sejalan dengan adanya hubungan khusus Pakistan dengan Amerika Serikat sejak tahun 1954. Kekhawatiran terbentuknya poros Cina-Amerika-Pakistan serta bayangan munculnya aliansi Pakistan-Amerika dan negara-negara Asia Barat Daya yang kaya minyak terus menjadi pemikiran New Delhi, meskipun untuk waktu sekarang hal ini semakin diragukan kemungkinan terjadinya. Masalah pembagian air sungai di wilayah perbatasan untuk pengairan, sentimen kesukuan dan keagamaan, seperti tercermin dalam konflik Kashmir yang telah menyeret kedua negara dalam perang terbuka sebanyak tiga kali hingga pada rivalitas pemilikan senjata nuklir merupakan sumber konflik yang sewaktu-waktu dapat mengubah pola hubungan kedua negara.

Rivalitas negara adidaya dalam berebut pengaruh di kawasan Asia Selatan untuk melindungi kepentingan strategi mereka khususnya pengamanan jalur minyak dari Teluk Parsi mau tidak mau ikut menyeret India dalam militerisasi kawasan. Penempatan kekuatan laut/armada negara adidaya

⁵Setelah tahun 1954 insiden-insiden berdarah dalam sengketa kedua negara terus terjadi seperti di Himachal Pradesh (1956) dan Lakdesh (1957) sebelum tahun 1962 Cina secara besar-besaran menyerang masuk wilayah India sejauh 80-100 km. Selain itu pemberontakan suku-suku Naga di Perbatasan sebelah timur yang didukung Cina juga ikut mewarnai ketegangan hubungan kedua negara.

di kawasan Samudera Hindia dan tidak konsistennya sikap mereka dalam masalah transfer persenjataan kepada negara-negara di kawasan ini telah mengembangkan persaingan saling curiga antar negara kawasan dan pada gilirannya menaikkan ketegangan regional. New Delhi tampaknya sangat khawatir apabila negara-negara "luar" ini sampai mendapatkan pangkalan-pangkalan militer di Pakistan, Srilanka, dan Bangladesh tetangganya. Hal ini semakin tampak setelah invasi Soviet ke Afganistan akhir dekade 1970-an yang mengakibatkan berubahnya keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Selatan.

Berkaitan dengan masalah keamanan domestik, peningkatan kemampuan militer merupakan suatu yang mutlak bagi keamanan nasional India. Masalah dalam negeri India banyak diwarnai dengan konflik intern mulai dari masalah politik kasta, fanatisme golongan hingga separatisme. Masalah-masalah ini sering mengancam kesatuan nasional dan menggoyahkan paham sekularisme yang dicoba ditegakkan oleh para pemimpin India sejak zaman Nehru. Kekhawatiran utama elite politik dan militer negeri ini adalah apabila konflik intern ini terkait dengan faktor eksternal yang secara nyata tidak dapat dipisahkan dalam hubungan intra regional di kawasan Asia Selatan. India harus bertemu dengan Srilanka apabila masalah separatisme Tamil dibicarakan. New Delhi harus melibatkan Bangladesh jika masalah separatisme Assam disinggung. Demikian pula halnya apabila masalah Punjab dan Kashmir ditarik kepermukaan, India akan berhadapan dengan Pakistan.⁶

Faktor penampilan pembangunan ekonomi yang menunjukkan perbaikan sejak awal dekade 1980-an, tampaknya ikut andil mendukung pesatnya perkembangan militer India. Diakui bahwa naiknya taraf hidup masyarakat India semakin tampak. Diperkirakan jika pertumbuhan ekonomi konstan dalam waktu kurang dari sepuluh tahun lagi 300 juta dari sekitar 1 milyar penduduk India akan menjadi anggota kelas menengah. Hal ini beralasan mengingat laju pertumbuhan tahunan nyata dalam pendapatan nasional kotor selama tiga dasawarsa pertama perencanaan (1951-1980) yang tercatat hanya rata-rata sekitar 3,5% bertambah menjadi lebih dari 5% sejak awal dekade delapanpuluhan. Akselerasi ini berarti bahwa laju pertumbuhan pendapatan per jiwa telah meningkat dua kali dari 1,5% pada awal kemerdekaan menjadi 3% sejak satu dekade terakhir ini.⁷

Kemajuan ekonomi masyarakat India dibarengi pula oleh kemajuan pesat tiga sektor produksi penting negeri ini, pertanian, energi dan industri termasuk industri militer. Revolusi pertanian yang terus digalakkan diproyeksikan untuk mampu memenuhi target produksi padi 200 juta ton menjelang tahun 2000 sekaligus mengurangi ketergantungan impor 6 juta ton padi tiap tahun sejak tahun 1960-an. Di bidang energi produksi minyak mentah dalam negeri telah meningkat dari nol pada awal kemerdekaan hingga 26 juta ton per tahun pada tahun 1987. Sejak 1979 ketergantungan impor minyak mulai dapat dikurangi untuk selanjutnya ditargetkan mampu berswasembada pada akhir abad ini. Basis industri kini juga semakin beragam dan bahkan mampu menjadi yang terkemu-

⁶Lebih lanjut lihat di antaranya Bhahani Sen Gupta, "Changing Pattern of Conflict in South Asia", *Asia Perspectives*, Vol. 9, No. 2 (Fall-Winter 1985): 220-241.

⁷Lihat artikel "The Indian Miracle", diterjemahkan oleh Kirdi Dipoyudo dalam *Analisa*, No. 4 (April 1986): 258.

ka di antara negara Dunia Ketiga. Ekspor barang-barang permesinan seperti baja dan perkakas tangan hingga persenjataan naik dari US\$155 juta tahun 1970-an menjadi US\$921 juta tahun 1980-an.

Berdasar latar belakang di atas maka tampaknya India akan terus memantapkan kekuatan militernya pada jajaran kekuatan dunia. Di bidang militer India secara pelan tapi pasti telah mampu membangun strategi pengembangan kekuatan militer yang luar biasa. Diawali dari suatu profil militer yang kecil berkekuatan hanya sekitar 300.000 personil dengan dua pesawat tempur dan satu skuadron pesawat pengangkut berikut beberapa kapal fregat dan pengawal pantai, kini India telah mencapai peringkat keempat kekuatan militer dunia. Perkembangan ini bahkan mulai menjadi bahan keraguan banyak negara khususnya berkaitan dengan pertanyaan apakah kekuatan militer ini hanya akan sekedar untuk melindungi persepsi keamanannya atau untuk maksud lain yang berkonotasi negatif.

Tahapan Pembangunan Militer India

Untuk lebih jauh memahami latar belakang kebijakan pengembangan kekuatan militer India perlu kiranya menyimak tahapan pengembangan kekuatan militer India sejak kemerdekaannya dari Inggris tahun 1947. Kebijakan awal pembangunan militer India memang belum tampak jelas pada saat mulai beranjaknya kolonial Inggris dari wilayah ini. Pemerintah British India menerapkan suatu kebijakan demobilisasi kekuatan militernya secara cepat sehingga secara kualitatif kekuatan militer tersisa di India menyusut dari 2,5 juta menjadi hanya sekitar 300.000 personil. Hampir semua perlengkapan militer merupakan warisan Inggris

termasuk sejumlah pabrik persenjataan yang hanya mampu memproduksi senjata mesin ringan jenis Lee Enfield Rifles, dan senjata alteleri yang belum sempurna.⁸

Pemikiran Nehru untuk memodernisir dan memperkuat angkatan bersenjata masih belum tampak. Pengetahuan dan pengalaman tentang peran angkatan bersenjata sebagai bagian dari struktur pemerintahan negara hampir tidak dimiliki. Tidak ada hubungan keterkaitan antara kepemimpinan nasional dengan militer. Alokasi dana bagi kepentingan militer sangat kecil.⁹ Meskipun militer tetap dipandang sebagai penjaga keamanan negara, status subordinatnya pada sektor sipil masih sangat tinggi. Kekuatan militer tampaknya diproyeksikan hanya cukup untuk mengimbangi ancaman militer tetangganya, Pakistan. Hal ini dirasa telah cukup memadai, terlebih setelah terbukti India berhasil mengalahkan Pakistan dalam perang pertama kedua negara tahun 1948.

Pengambilalihan Tibet oleh Cina tahun 1950 mulai mempengaruhi perencanaan pertahanan India. Suatu komite tinggi militer memerintahkan penyusunan kekuatan militer di perbatasan India-Tibet untuk menghadapi pemberontakan suku-suku Naga dukungan Cina. Meskipun demikian pemerin-

⁸Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pertumbuhan dan tahapan pembangunan militer India lihat antara lain Glyn I. Wood dan Daniel Vaagenes "India Defense Policy, A New Phase", *Asian Survey* Vol. XXIV, No. 7 (July 1984): 721-735 juga A.L. Venkateswaran, *Defence Organisation in India* (New Delhi Pub., 1967) demikian juga K. Subrahmanyam, *Perspective in Defence Planning* (New Delhi: Abhinav Pub., 1972).

⁹Antara tahun fiskal 1951-1952 anggaran belanja India tidak pernah melebihi 2% dari GNP-nya. Tahun 1953 jumlah seluruh angkatan bersenjata hanya berkisar 3.500 personil, lihat selanjutnya S. Nihal Singh, "Why India Goes to Moscow Arms", *Asian Survey*, Vol. 24, No. 7 (July 1984): 708.

tah India masih terus ragu untuk membangun sistem pengamanan militer yang tangguh di seluruh negeri khususnya di sektor utara negeri ini. Baru setelah terjadinya penandatanganan pakta saling menjaga keamanan tahun 1954 antara Amerika Serikat dan Pakistan, yang diikuti mengalirnya berbagai macam persenjataan Amerika ke Pakistan, New Delhi mulai memusatkan perhatian pada strategi menyeluruh bagi pertahanannya. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan V.K. Kresna Menon dalam pemerintahan PM Nehru, keputusan untuk memasuki era pengembangan militer muncul dengan diletakkannya dasar-dasar bagi pengembangan industri persenjataan domestik di antaranya industri pesawat, tank dan senjata ringan lainnya.¹⁰

Faktor memburuknya hubungan New Delhi-Beijing pada masa ini di satu pihak tampaknya telah mengubah pandangan Nehru tentang pentingnya pengembangan militer negaranya. Di lain pihak suatu pandangan moderat tentang pertahanan dicoba terus ditampilkan Nehru mengingat pertimbangan prioritas pembangunan perekonomian negara di satu sisi dan kepercayaan pada upaya diplomatik memecahkan konflik yang menyangkut India di sisi lain serta pandangan politik non-blok yang terus dicoba dipertahankan. Akibat kekalahan India dalam perang 12 minggu melawan Cina tahun 1962, visi Nehru tentang pertahanan pun mengalami pergeseran. Anggaran belanja pertahanan naik dua kali lipat, disertai pembenahan struktur militer di semua angkatan termasuk keputusan dimulainya pe-

ngembangan armada laut negeri ini. India segera meninggalkan kebijakan selektivitas dalam suplai persenjataannya menyusul meningkatnya hubungan Amerika Serikat dan Pakistan terutama setelah bergabungnya Pakistan ke dalam SEATO dan Cento.

Perlengkapan militer datang dari sumber yang beragam seperti dari Amerika, Uni Soviet, Inggris, Jerman Barat, Canada dan Yugoslavia. Kekuatan militer segera dipandang Nehru sebagai komponen penting kekuatan nasional dan digunakan sebagai suatu kebutuhan vital untuk menghadapi ancaman musuh-musuh India. Sementara mencari suplai senjata dari manapun, India juga melakukan suatu penetapan usaha membangun kapasitas produksi senjata dalam negeri. Industri aeronautik merupakan salah satunya yang mendapatkan suntikan pertama. Perusahaan pesawat terbang India, *Hindustan Aeronautic Industry* (HAL) yang sudah berdiri sejak tahun 1940 mendapatkan perhatian utama. Usaha perakitan di bawah lisensi *Percival Prentice* yang dilakukan HAL dan menghasilkan pesawat rakitan lokal pertama tahun 1948 dan pesawat jet jenis Vampire tahun 1956 sejak tahun 1962 dikembangkan dengan adanya persetujuan pembuatan MIG 21 di bawah lisensi Soviet.

Selain itu pabrik pembuatan tank dan kapal-kapal fregat mulai dibangun bekerjasama dengan pabrik Vickers Inggris. Sejak tahun 1964 rancangan pertahanan lima tahunan menjadi pemikiran tambahan rencana limatahunan pembangunan India. Hal ini semakin mendapatkan perhatian setelah pada bulan Oktober 1964 Cina berhasil meledakkan perangkat nuklirnya yang pertama. Hal ini mempengaruhi dua aspek dari rencana pertahanan India. Pertama bahwa rencana pengembangan industri mesin perang kembali akan terus didorong dan riset

¹⁰Kresna Menon adalah Menteri Pertahanan sejak tahun 1956 yang merupakan perancang utama pertahanan India. Dalam kepemimpinannya alokasi dana bagi militer meningkat dari sekitar 1,8% pada paruh kedua dekade iimapuluhan menjadi 2,4% dari GNP menjelang akhir dekade tersebut.

angkasa luar diperluas untuk mencapai kapasitas teknis yang sama dengan Cina.

Pengalaman India dalam dua perang berikutnya dengan Pakistan tahun 1965 dan 1971 semakin meyakinkan pemimpin India untuk terus menentukan pilihan pada kebijakan pengembangan produksi persenjataan dalam negeri. Embargo senjata yang dilakukan Amerika dan Soviet setelah perang kedua negara tahun 1971 telah memberi pengalaman berarti dan menuntut India untuk dapat berswasembada dalam penyediaan sarana pertahanan khususnya suku cadang perlengkapan militernya. Kebutuhan akan pemilikan perlengkapan militer hingga tingkat senjata nuklir dirasakan mendesak. Faktor Cina yang dianggap telah memulai aktif dalam riset nuklirnya mendesak India untuk menuju era nuklir. Tahun 1974 keputusan untuk mencoba kemampuan nuklirnya (*peaceful nuclear explosion*) terlaksana di Gurun Rajasthan hingga mencatatkan India sebagai negara nuklir keenam dunia.¹¹

Dengan bantuan Uni Soviet, India memasuki era pembangunan militer yang lebih matang, khususnya setelah penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama jangka panjang (20 tahun) dengan Soviet bulan Agustus 1971. Kebijakan pembangunan militer India lebih dititikberatkan pada usaha melanjutkan proyek-proyek lisensi persenjataan dengan bantuan teknologi Soviet dan usaha-usaha mengurangi kerawanan terhadap embargo suku cadang perlengkapan militer. Perkembangan angkatan

laut India yang mulai tampak sejak tahun 1966 terpacu dengan persetujuan Soviet mendatangkan beberapa kapal selam kelas F 2.300, kapal patroli dan fregat kelas Leander. Akhir dekade tujuh puluhan Soviet tercatat memasok 70% kebutuhan militer India.

Invasi militer Soviet ke Afganistan akhir dekade tujuh puluhan kembali memacu pengembangan militer India karena Amerika Serikat segera menjadikan Pakistan sebagai garis depan untuk membendung apa yang dianggapnya sebagai keinginan ekspansi Soviet. Mengalirnya berbagai persenjataan canggih ke Pakistan menjadikan India merasa terancam dari sisi Barat negaranya. Dalam menanggapi perkembangan ini India kembali melihat Soviet sebagai sumber pemasok senjata untuk mendukung kebijakan penyeimbangan kemampuan militernya dengan Pakistan. Sejak awal dekade delapan puluhan baik dengan dukungan Soviet maupun melalui langkah diversifikasi suplai senjata baik dari negara Eropa Barat maupun Amerika, India melakukan langkah modernisasi semua kekuatan militernya baik darat, laut maupun udara.¹²

Profil Militer India Dekade 1980-an

Sebagai petunjuk paling nyata bagi dimulainya program modernisasi angkatan bersenjata India adalah peningkatan anggaran belanja pertahanannya sejak awal dasawarsa delapan puluhan. Menurut suatu laporan, anggaran pertahanan India telah me-

¹¹Usaha menuju era nuklir sebenarnya telah dirintis sebelum tahun 1947 ketika Homi Bhabha seorang ahli nuklir India mulai membujuk Nehru untuk mulai memanfaatkan tenaga nuklir bagi kebutuhan energi negeri ini. Percobaan senjata nuklir Cina tahun 1964 agaknya yang mengarahkan pemanfaatan nuklir ini untuk keperluan militer.

¹²Langkah ini didukung oleh sistem *the Dual Path* dalam industri persenjataan militer India. Pertama terus memacu produk-produk lisensi dari berbagai jenis mesin perang dan kedua mencoba menciptakan sistem produksi dalam negeri bagi produk-produk tersebut, lihat Amit Gupta, *Indian Arms Industry* 848.

tingkat tiga kali dari US\$2,75 milyar pada tahun 1981 menjadi US\$8,64 milyar pada tahun 1988. Hal ini merupakan peningkatan yang berarti dari 3,5% menjadi 4,7% dari pendapatan nasional bruto (GNP India tahun 1988-1989 sekitar US\$270 milyar). Investasi di bidang industri pertahanan diperkirakan mencapai lebih dari US\$19,64 milyar dalam 40 tahun terakhir.¹³ Jumlah anggaran sebesar ini dipakai untuk membiayai kekuatan angkatan bersenjata, termasuk personil yang ada, pengembangan industri persenjataan dan pusat-pusat penelitian, latihan kemampuan militer serta pembangunan prasarana (termasuk pangkalan militer) yang baru.

Pilihan untuk memodernisir angkatan bersenjata semakin dianggap sangat beralasan oleh kalangan ilmuwan militer India khususnya menjelang akhir dekade delapanpuluhan. Peta geostrategis di Asia menjelang akhir dekade delapanpuluhan memang berubah, seperti ditandai dengan menurunnya pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet di kawasan Asia. India begitu juga Cina dan Jepang, yang memiliki potensi untuk berpengaruh di kawasan Asia, merasa sama-sama mempunyai peluang untuk lebih berpengaruh di masa depan. Para perencanaan pertahanan di tiga negara Asia ini, tampaknya mulai meluaskan cakupan perspektif keamanan nasional mereka, dari sekedar mengamankan perbatasan negerinya menuju kepada gagasan pertahanan luar yang berdimensi regional, bahkan mungkin kontinental. Kebutuhan untuk mengamankan zona ekonomi eksklusif 200 mil misalnya, kini mendapat perhatian lebih besar dari banyak negara, termasuk India.

Military Balance 1989-1990 terbitan IISS London mencatat bahwa angkatan bersen-

jata India memiliki kekuatan 1,3 juta personil. Ini merupakan yang keempat terbesar di dunia setelah Uni Soviet, Cina dan Amerika Serikat. Angkatan Daratnya memiliki jumlah personil terbesar, yaitu sekitar 1,1 juta prajurit. Angkatan ini dilengkapi dengan 3.150 tank tempur utama, yang sebagian besar terdiri dari jenis T-55 (800), T-52 (350) dan Vijayatna (1.500). Ini masih ditambah 100 tank amfibi jenis PT-76 dan 1.150 kendaraan lapis baja lainnya. Angkatan Darat ini juga dilengkapi dengan 99 helikopter Chetak dan 60 Cheetah.

Angkatan Laut India yang mulai langkah modernisasi awal dekade enampuluhan, kini memiliki kekuatan 1 kapal selam nuklir (Chakra), 14 kapal selam taktis, 2 kapal induk, 5 kapal perusak, 24 fregat, 32 kapal patroli pantai dan 52.000 personil. Dalam rencana pengembangannya untuk tahun 1995 ditargetkan akan menambah lagi 3 kapal selam nuklir, 1 kapal induk, 2 kapal perusak, 7 kapal fregat dan beberapa kapal korvet dan kapal cepat lainnya. Angkatan Udara memiliki 725 pesawat tempur berbagai jenis, 12 helikopter tempur, lebih dari 150 pesawat pengangkut, dan 115.000 personil.

Dalam hal penyediaan persenjataan bagi ketiga angkatan bersenjata India ini, Uni Soviet masih merupakan pemasok senjata utama India. Selama ini Moskow telah memasok mulai dari pesawat tempur MIG-29, MIG-27 dan MIG-21 (yang sudah diproduksi di India dengan lisensi Soviet), pesawat pengintai Tupolev TU-142, pesawat pengangkut Ilyushin Il-76, sampai kapal perusak jenis Kashin II dan Korvet jenis Nanucha II lengkap dengan peluncur rudalnya. Demikian pula untuk jajaran kendaraan lapis baja dengan primadona tank T-72 yang kini sudah mampu diproduksi India sendiri.

¹³Lihat, *Far Eastern Economic Review*, 27 Juli 1989.

Di samping itu India juga membeli sejumlah perlengkapan militer terbaik di dunia antara lain pesawat *Jaguar* dan *Harrier* helikopter *Seaking* dan rudal *Seaeagle* dari Inggris, peluru kendali dan pesawat tempur *Mirage-2000* dari Prancis, dan kapal selam dari Jerman Barat. Jalur pembelian perlengkapan militer dari Amerika Serikat diharapkan meningkat menyusul kesepakatan tahun 1987 untuk membuat turbin gas dengan lisensi dari *General Electric* (AS). Amerika Serikat tampaknya juga menaruh perhatian terhadap proyek *The Light Combat Aircraft* (LCA) yang dipromosikan sebagai tumpuan industri perlengkapan militer India abad mendatang dengan telah ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* tentang transfer teknologi sejak tahun 1984.

Dalam pengembangan industri pertahanan, produk peluru kendali *Agni* yang berhasil diuji coba pertengahan Mei 1990 yang lalu telah meyakinkan kemampuan teknologi tinggi India. Dengan jarak tembak sekitar 1.500 mil senjata yang diklaim tidak akan dikembangkan sebagai senjata nuklir ini dapat mencapai sasaran di kawasan Asia Selatan, termasuk Cina. Sebagai kelanjutan sukses pengembangan peluru kendali terdahulu, antara lain *Pritvi* dan *Trishul*, *Agni* merupakan raihan yang membanggakan industri militer India. Diperkirakan bahwa produk-produk peluru kendali India tersebut merupakan hasil produksi Litbang India melalui 45 laboratoriumnya yang mempekerjakan sekitar 5.000 orang ilmuwan dan tidak kurang 30.000 teknisi. India sejak tahun 1986 tercatat memiliki 25.000 tenaga terdidik yang bekerja di laboratorium dan pusat penelitian dan pengembangan persenjataan, alat elektronik dan suku cadang peralatan militer. Di bidang penelitian dan pengembangan ini saja pemerintah India telah mengeluarkan anggaran sebesar 16

milyar rupee atau sekitar US\$1 milyar per tahun.¹⁴

Rencana pembuatan pesawat tempur ringan dan helikopter jenis *Alouette III* serta tank tempur utama (jenis *Arjun*) kini sedang dalam tahap realisasi. Selain itu rencana pembuatan kapal induk berukuran 28.000 ton beserta pangkalannya di Karnataka, rencana memproduksi MIG-29, rencana pembelian sistem peringatan dini dan wahana peluncur satelit terus dipersiapkan. Sejumlah 14 pabrik perlengkapan militer India telah dipacu untuk memproduksi senjata ringan, amunisi, alat-alat elektronik dan sejumlah besar barang non-militer lunak yang dipakai pasukan seperti seragam, sepatu dan sebagainya. Dewasa ini Departemen Pertahanan juga sedang menjajagi penggalakan ekspor perlengkapan militer untuk membantu menyeimbangkan beban impor senjata yang seluruhnya mencapai lebih dari US\$5,2 milyar untuk tahun 1987 saja.

Kemampuan nuklir India tampak akan terus dikembangkan mencakup pembangkitan tenaga listrik dan penerapan tenaga nuklir dalam bidang riset. Kemampuan India mengembangkan senjata nuklir dalam waktu dekat ini tidak diragukan lagi. India telah mengembangkan fasilitas untuk memproses dan memproduksi bahan bakar nuklir serta merancang komponen-komponen untuk menunjang program nuklirnya. Pusat tenaga nuklir India yang antara lain terdapat di Tarapur (Bombay), Rajastan, Kalpakkam (Tamil Nadu), Narora (Utar Pradesh) dan Kakrapar (Gujarat) masing-masing dilengkapi dengan fasilitas pemrosesan uranium, produksi bahan bakar dan produksi air berat dengan target tenaga nuklir sebesar 10.000

¹⁴Lihat *Kompas*, 17 September 1989 dan *Suara Karya*, 23 Januari 1989.

megawatt untuk tahun 2000. Diterimanya sebuah kapal selam nuklir dari Uni Soviet awal tahun 1988 tidak saja menjadikan India negara kedua di Asia yang memilikinya (setelah Cina), tetapi juga dapat menjadi sarana pemacu pengembangan persenjataan nuklir negeri itu di masa mendatang.

Dalam upaya peningkatan kemampuan militer, angkatan bersenjata India menerapkan program Wahana Taktis Maju (*Forward Based Defense*). Penyewaan sebuah kapal selam kelas Charlie dari Uni Soviet untuk tujuan latihan adalah suatu langkah maju untuk mencapai maksud ini, walaupun program ini hanya menempati urutan kedua sesudah proyek perancangan kapal induk dan penancangan peluncuran kapal selam diesel pertama buatan India yang diharapkan terealisasi tahun ini.

Hal lain yang menarik dalam rangka modernisasi angkatan bersenjata India adalah peningkatan kekuatan lautnya. Dengan membeli dan meminjam perlengkapan dan teknologi dari "Timur dan Barat", menurut laporan *The International Institute of Strategic Studies* (IISS) London, sampai akhir Desember tahun 1987 angkatan laut India menempati nomor delapan terbesar di dunia dan tahun 1990-an diperkirakan akan menjadi kekuatan nomor lima dunia. Pembangunan angkatan laut terpacu pesat sejak tahun 1986, saat dicanangkannya dasar-dasar matra kesamuderaan (*Blue Water Navy*). Angkatan laut India diperkirakan akan mencapai tahapan baru dengan pengembangan tiga armadanya, masing-masing Armada Barat berpangkalan di Bombay, Timur di Vishakapatnam dan Selatan di Chochin yang masing-masing akan dilengkapi dengan kapal induk.

Angkatan laut India juga akan mengembangkan pangkalan laut terpadu di kepulauan

an Andaman dan Nikobar yang letaknya sangat strategis. Selain dilengkapi dengan fasilitas militer, di sana telah dibentuk komando terpadu yang bertanggungjawab atas keamanan kedua pulau tersebut yang diberi nama FORTAN (*Fortress Commander for Andaman and Nicobar*). Dengan adanya berbagai fasilitas di pangkalan itu angkatan laut India akan mampu memperluas jangkauan operasi patroli dan pengintaian samudera pada paruh utara Samudera Hindia.

Berdasarkan catatan di atas, tampak bahwa postur kekuatan militer India sudah layak dijadikan alasan untuk julukan India sebagai *superpower* Asia, kendati hal ini selalu ditolak para pemimpin pemerintahan New Delhi. Kalangan pemimpin India tidak setuju dengan gambaran tentang India sebagai kekuatan regional yang sedang bangkit. Mereka menganggap apa yang dilakukan India bukanlah suatu peningkatan kekuatan militer melainkan sekedar memodernisir peralatan perang yang memang sudah lama diinginkan, dan bertujuan defensif. Namun demikian, kekhawatiran dari masyarakat internasional tentunya menyangkut masalah akankah momentum penambahan kekuatan militer ini akan berujung pada perumusan kembali alasan-alasan yang memperbolehkan penggunaan kemampuan militer bersangkutan.

Dampak Perkembangan Militer India

Akibat nyata dari semakin meningkatnya pembangunan militer India memang dirasakan terutama di kawasan Asia Selatan. Kebesaran militer India memang telah mengusik persepsi keamanan negara-negara tetangganya dan bagi mereka hal ini merupakan

suatu realitas politik yang nyata dan harus mereka hadapi. Menarik gambaran Prof. G.B. Khanal mengenai eksistensi India di kawasan dengan mengatakan bahwa bagi negara-negara tetangga India, tetangga yang baik adalah negara kaya dengan kekuatan militer yang lemah, dan tetangga yang membahayakan adalah tetangga miskin dengan militer yang kuat. Profil India di kawasan memang harus diakui membuat negara-negara tetangganya tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima kenyataan bahwa India adalah *superpower regional*.¹⁵

Konsep kontinental India tentang keamanan kawasan mencakup anggapan bahwa segala macam ancaman yang dialamatkan terhadap negara-negara penyangga (*buffer states*) dalam parameter militer India harus dianggap sebagai suatu ancaman terhadap India. Persepsi keamanan dan kesatuan strategis India di sub kontinen ini dikenal sebagai "Monroe Doktrin" versi India. Tentang doktrin ini para penulis India mengatakan: India tidak memiliki keinginan untuk mencampuri konflik internal dari salah satu negara Asia Selatan dan sangat menentang segala bentuk intervensi negara luar terhadap masalah dalam negeri negara lain. India tidak akan mentolerir campur tangan luar dalam suatu konflik di negara Asia Selatan mana pun, jika campur tangan tersebut secara implisit berbau anti India. Tidak satu pun negara di Asia Selatan oleh karenanya berhak meminta pihak luar untuk membantu secara militer tanpa sepengetahuan New Delhi. Pengucilan India dari suatu persekongkolan tersebut akan dipandang sebagai tindakan anti India.

Ada alasan mengatakan beberapa aksi militer India ke beberapa negara tetangga se-

perti pengiriman pasukan perdamaian ke Srilanka (45.000 personil), ke perbatasan Cina, dan daerah Kashmir (Gletser Siachen) sebagai petunjuk munculnya perilaku agresif, khususnya di kalangan pembuat kebijakan pertahanan India. Kecenderungan para pemimpin politik untuk memanfaatkan meningkatnya kemampuan militer bagi penentuan kebijakan luar negeri dilihat cenderung tampak. Peningkatan skala latihan perang untuk menguji konsep operasional baru, di perbatasan Cina dan Pakistan merupakan contoh lain. Demikian pula dengan *Operasi Brass Tacks* pada Musim Dingin 1987 yang merupakan latihan angkatan darat terbesar India dengan melibatkan 150.000 prajurit dan 2.500 tank dan berlangsung hanya beberapa kilometer dari perbatasan India-Pakistan. Tetapi rasionalitas dari kebijakan tersebut tampaknya masih harus dipertanyakan dalam situasi internasional dewasa ini yang ditandai dengan menurunnya militerisme internasional yang dipelopori dua negara adikuasa.

Meningkatnya penolakan ketergantungan global pada kekuatan militer dan beralih pada masalah-masalah pembangunan ekonomi dewasa ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap laju pengembangan kekuatan militer India. Dapat diperkirakan kebijakan pengembangan militer India untuk masa mendatang akan lebih banyak dititikberatkan pada pengembangan industri senjata guna meningkatkan penerimaan devisa negara dari penjualan mesin perang daripada untuk tindakan provokatif yang berkonotasi negatif terhadap negara kawasan atau negara lain yang mungkin tergolong "musuh" nya. Dengan lebih dari 80 buah industri pertahanan dan unit-unit penelitian yang kini dimiliki India alasan ekonomi tampaknya akan lebih dominan. Kebutuhan akan

¹⁵Lihat, Ashequa Irshad, *India Military Power*, 409.

keamanan suplai senjata, penyerapan teknologi tinggi guna memacuan industri dalam negeri, penghematan devisa guna pembelian persenjataan hingga hasrat untuk mendapatkan devisa sebanyak-banyaknya dari nilai jual mesin perang produknya tampak telah menjadi kebijakan pemerintah India dewasa ini.

Tahun 1989-1990 lalu pemerintah India melakukan pembatasan pembelanjaan pertahanan sama seperti tahun sebelumnya. Hal ini dikatakan oleh para pejabat India sebagai isyarat bagi Islamabad dan Beijing bahwa New Delhi menginginkan dihentikannya perlombaan persenjataan. Namun apakah keinginan ini akan direalisasikan akan sangat tergantung pada Pakistan dan Cina. Keputusan Amerika Serikat menunda penjualan 60 pesawat tempur F-16 tambahan kepada Pakistan dan penghentian bantuan militer per 1 Oktober 1990 yang lalu kiranya merupakan pertanda baik bagi meredanya pacuan senjata dan meningkatnya militerisme di kawasan Asia Selatan.

Bagi negara-negara di luar kawasan Asia Selatan kecemasan terhadap perkembangan militer India sejauh ini tampaknya lebih didasari kekaburan asumsi seperti ketidakjelasan alasan campur tangan India menangani dinamisme konflik di berbagai negara tetangganya seperti Srilanka dan Maladewa. Selain itu sikap politik India yang ditampakkan terhadap krisis Afganistan dan Kamboja, di mana New Delhi mengakui eksistensi rezim orbitan Rusia dan Vietnam, merupakan hal yang tampaknya dinilai tidak bersahabat oleh sebagian besar negara-negara Asia khususnya di kalangan ASEAN.¹⁶ Lebih jauh pergerakan kapal-

kapal selam India di Samudera Hindia yang diyakini membawa senjata nuklir cukup mencemaskan negara pantai di Samudera Hindia seperti yang ditampakkan oleh sikap cemas Australia.¹⁷

Negara-negara di luar kawasan Asia Selatan tampak juga berkeinginan mengetahui masa depan Perjanjian Persahabatan India dengan Uni Soviet yang akan berakhir 9 Agustus 1991 mendatang. Apakah perjanjian sampai di situ saja. Melihat perkembangan internasional dewasa ini khususnya menyangkut perkembangan dalam negeri Uni Soviet, agaknya pilihan kedua lebih dimungkinkan. Apabila hal ini benar maka kekhawatiran negatif terhadap berkembangnya kekuatan militer India tampak menjadi kurang beralasan.

Harus diakui ada semacam kekaburan dalam proses perkembangan India menjadi kekuatan dunia yang efektif. Predikatnya sebagai kekuatan militer besar akan terus dirongrong oleh kendala-kendala ekonomi yang dihadapinya. Dalam keadaan militernya yang cukup mengagumkan India tetap merupakan salah satu negara miskin di dunia. Banyak pengamat menanyakan alasan moral tindakan negara mengeluarkan beberapa juta dollar untuk roket dan mesin perang lainnya, sementara di sisi lain kebanyakan penduduknya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menikmati air bersih. Masalah ini tampak akan terus menjadi kendala bagi keinginan India untuk terus meningkatkan kekuatan militernya.

¹⁷Alasan ekonomis agaknya menjadi alasan kekhawatiran Australia mengingat Samudera Hindia punya arti penting sebagai jalur komunikasi dan perdagangannya. Sekitar 50% perdagangan internasional Australia melalui samudera ini berikut suplai minyak dari Timur Tengah. Selanjutnya lihat a.l. Ronald Nangoi, "Arti Samudera Hinda bagi Australia," *Analisa*, 5 (Mei 1980).

¹⁶Lebih jauh lihat di antaranya Michael Soebagyo, "India dan Asia Tenggara", *Analisa*, 6 (Juni 1983).

Bagi kita di kawasan Asia Tenggara meningkatnya kemampuan militer India tampaknya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Berbagai keterbatasan ekonomis maupun politis akan dengan sendirinya mencegah New Delhi menggunakan kemampuan militernya untuk maksud negatif terhadap kawasan ini. Perilaku agresif tampaknya hanya sebatas lingkup regional yang agaknya memang diperlukan New Delhi untuk menunjukkan bahwa tidak dapat diingkari India ini merupakan negara dominan yang punya kewajiban melindungi keamanan kawasan. Masih perlu pembuktian lebih lanjut apakah keterlibatan India dalam masalah Tamil di Srilanka, misalnya, semata-mata merupakan cermin agresifitas India atau memang karena kehadirannya dikehendaki oleh pemerintah yang berkuasa saat itu di Colombo (PM Jayewardene).

Ada baiknya apabila predikat India sebagai salah satu kekuatan besar dalam bidang militer di Asia ini dilihat ASEAN sebagai potensi untuk memperkuat ketahanan regional dua kawasan yang memang saling ter-

hubung. Jika India menghendaki terciptanya zona damai di Samudera Hindia¹⁸ dan kita di Asia Tenggara berupaya mewujudkan konsep ZOPFAN, maka tidak tertutup kemungkinan paduan dua konsep ini akan menciptakan keamanan dan ketahanan yang lebih baik di kawasan Asia Tenggara-Selatan. Dengan itu maka kepentingan-kepentingan pembangunan masing-masing negara di dua kawasan ini akan lebih terjamin. Akankah hal ini terwujud sangat tergantung pada kemauan dan keputusan elit politik di negara-negara di dua kawasan ini. Keduanya sudah memiliki dua organisasi kerjasama regional, SAARC dan ASEAN. Meskipun SAARC harus banyak belajar dari pengalaman ASEAN, ketimpangan yang ada kiranya bukan merupakan hambatan bagi kedua organisasi untuk mulai merintis kerjasama dalam arti luas termasuk bidang militer.

¹⁸Lihat misalnya Adar Korwa, "The Indian Ocean as a Zone of Peace", *Strategic Studies*, Vol. 8 No. 2 (Winter 1985): 70-85.

Mengapa 'Komunisme Lokal' Eropa Timur Telah Gagal?

Ivan T. BEREND

SEMANGAT Komunisme yang menyebar di seluruh Eropa akhirnya berkol di Eropa Timur dan melaksanakan eksperimen komunisme. Pada mulanya ia mulai dengan usaha-usaha tragis untuk secara langsung memperkenalkan utopia masa depan yang benar-benar indah. Mereka menyebutnya komunisme-perang; pada dasawarsa-dasawarsa selanjutnya ia disebut langkah-langkah pertama di jalan menuju komunisme, yaitu sosialisme. Sekalipun label berlain-lainan dilekatkan pada Komunisme Eropa Timur -- "perwujudan sosialisme", "perkembangan sosialisme" -- namun tidak dapat dipandang komunisme atau sosialisme seperti dalam arti kata pemikiran Marx yang asli. Pada kenyataannya, dalam bentuk eksperimentalnya yang seadanya -- saya tekan lagi dalam arti pemikiran Marx yang asli -- komunisme ini pasti gagal.

Dalam tulisan mereka yang tak selesai yaitu "Ideologi Jerman", Marx dan Engels

Diterjemahkan oleh Sunarto Ndaru Mursito dari kuliah umum Profesor Ivan T. BEREND pada *Panglaykim Memorial Lecture 1990* di Jakarta, 11 Agustus 1990.

dengan jelas menyatakan pada tahun 1847 bahwa sosialisme dapat "berada secara konkrit hanya sebagai tindakan 'simultan' dari rakyat yang memerintah dan pada saat yang sama, dan ini mengandaikan suatu perkembangan umum kekuatan-kekuatan produksi maupun suatu kontak dunia yang berkaitan dengan itu."

Tanpa suatu pembagian kerja yang universal sampai ke tingkat tinggi perkembangan kekuatan-kekuatan produksi, di tengah-tengah kondisi kemiskinan, atau terisolasi dari ekonomi dunia, maka eksperimen yang memperkenalkan komunisme "hanyalah akan membuat kemiskinan menjadi gejala umum, karena itu kemalangan ini selalu akan menampilkan perebutan kebutuhan-kebutuhan hidup dan seluruh kebobrokan sosial akan muncul lagi." Masyarakat komunisme terisolasi yang mempertahankan kemiskinan demikian "hanya dapat menjadi fenomena lokal ... dan setiap bentuk perluasan kontak-kontak (dalam arti: perkembangan ekonomi dunia) akan mengakibatkan penghapusan komunisme lokal."

Percobaan orang-orang Bolsheviki yang heroik yang memandang masyarakat Pinggiran Eropa termiskin sebagai pangkalan yang pasti dari mana dunia dapat diubah struktur-strukturnya sudah gagal, kendatipun eksperimen komunisme telah menyebar ke benua-benua lain dan kendatipun kesuksesan sementara selama setengah abad. "Eksperimen Russia" dapat dipandang berhasil terlebih lagi di mata para perintis dan pemimpinnya, hanyalah jika mekanisme "revolusi permanen", seperti diartikan Trotski, benar-benar terlaksana dan jika inisiatif masyarakat pinggiran yang sakit hati, seperti diharapkan Lenin, telah menumbangkan masyarakat mapan Eropa. Akan tetapi bukannya revolusi ini dipercepat, melainkan masyarakat-masyarakat pinggiran yang paling miskin dalam sistem dunia ini hanya bersekutu. Masyarakat pinggiran Eropa Tengah dan Timur tidak bersekutu dengan senang hati, tetapi karena dipaksa oleh kemenangan perang Soviet dan dominasi yang permanen. Kemudian Cina mengikuti, juga beberapa negara Asia bekas jajahan, lalu sejumlah negara miskin di Afrika dan Amerika Latin.

Sejarah tidak mengikuti struktur intelektual dari revolusi yang permanen.

Sebaliknya, ramalan dari "Ideologi Jerman" terbukti benar: "kontak-kontak dunia" telah mengubah secara radikal, memperluas jaringan kerja mereka yang dimulai setelah Perang Dunia II dan meluas secara spektakuler pada dasawarsa tujuh-puluhan dengan pergeseran dalam sistem pemerintahan-pemerintahan teknikal, dan telah meruntuhkan landasan komunisme lokal Soviet yang bercorak autarki regional dalam waktu yang lama.

Komunisme Eropa Timur Sebagai Suatu Model Modernisasi

Komunisme Eropa Timur, kendatipun telah mencoba memaksakan pengenalan prinsip-prinsip komunis, menyangkut kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan pasar baik mengenai hubungan kepemilikan maupun distribusi, namun "hanya dapat menyebarkan kemiskinan" -- jadi ramalan Marx terbukti -- diikuti dengan kediktatoran yang kejam, dan sama sekali tidak mampu menata prinsip-prinsip ekonomi maupun membangun demokrasi umum sosialisme.

Kita harus menambahkan bahwa bagi para pencipta sistem jenis Uni Soviet, bagi Trotsky dan Preobrazhensky, ini bukanlah berarti perwujudan aktual sosialisme, melainkan hanya merupakan suatu tahap persiapan: itu adalah suatu jalan perkembangan industrial dipaksakan yang berusaha mempercepat pembangunan ekonomi. Dalam terminologi sekarang ia merupakan suatu model modernisasi. Mereka berusaha mengejar ketertinggalan, seraya melepaskan keterbelakangan mereka menuju ke tingkat perkembangan di mana prinsip-prinsip sosialisme dapat berlaku. "Thermidore Stalin" dalam Revolusi Bolsheviki -- seperti yang disebut Trotsky perubahan tahun 1924 -- secara sadar mengubah dan secara bertahap membangun sistem khusus model modernisasi nasional, terutama sejak akhir dasawarsa, yang didasarkan atas penghapusan hak milik pribadi, persamaan dan sentralisasi yang ketat, melaksanakan "akumulasi modal awal" yang demikian dipaksakan dengan penghapusan pasar dan harga-harga pasar, dengan pemajakan yang kejam pada mayoritas petani, yang menjanjikan suatu gerakan maju yang sukses bagi negara terbelakang yang sebagian besar penduduknya

agraris melalui akselerasi industrialisasi.

Model pengejaran kemajuan ini menjamin kondisi-kondisi sosial dan politik untuk penggalakan, ketika ia merombak masyarakat hirarkis kaku yang hampir menyerupai sistem kasta, ciri negeri-negeri terbelakang, dengan kebrutalan yang kejam, dan ketika ia membawa bangsa ke dalam disiplin industrial yang menggunakan hukum-hukum ketat dan peraturan-peraturan Dracone (keras), ciri era akumulasi modal awal.

Model modernisasi yang dimaklumkan untuk menjadi perwujudan sosialisme, mencoba mengejar seabad keunggulan kapitalisme Barat dengan sama sekali menolak fakta bahwa ia menggunakan setiap cara yang ada untuk melepaskan dari sistem ekonomi dunia -- dan barangkali tepat untuk memaknai arti yang lebih luas dari terminologi asli Marx: dari sistem "kontak-kontak dunia." Adalah usaha yang logis bila kita memandang bahwa "kontak-kontak" dalam sistem dunia merupakan kontak pusat yang kaya dengan periferi yang miskin, dieksploitasi, disubordinasi di mana kebebasan tampaknya mengabdikan kepada si kaya. Negara-negara periferi tidak bahagia atas keadaannya yang sudah seabad, mereka menjadi terisolasi, melawan sistem dunia.

Lajos Kossuth dari Hongaria berbicara tentang kebebasan dagang antara Austria dan Hongaria sebagai sesuatu yang mengingatkan orang pada hubungan antara pelayan bar (*bartender*) dan tong minuman (*barrel*): pelayan bar bebas mengambil isi tong mana saja. Friedrich List dari Jerman pada tahun 1841 membantah dan menolak liberalisme perdagangan bebas ajaran Adam Smith dari Inggris. Sesungguhnya teori orang Jerman yang lain, Johann Gottlieb Fichte, telah muncul pada 1880 mengenai

"negara dagang tertutup." Untuk melihat dasar-dasar intelektual lama abad mana yang melandasi sistem ide-ide modernisasi sosialisme Eropa Timur, layak untuk mencatat rangkaian pemikiran Fichte. Sebagai akibat tantangan Revolusi Industri dan sosial Inggris-Perancis dan dipacu oleh cita-cita untuk mengejar ketertinggalan Jerman, ia menyatakan: "hanya negara dapat menyatukan rakyat ... Peranan dasar dari negara ..., adalah menempatkan setiap orang dalam posisi yang sesuai dengannya. Hal yang terakhir ini dapat dicapai hanya jika negara menghapus anarki dalam perdagangan ... dan jika negara menutup dirinya sendiri sebagai sebuah negara dagang." "Tak seorang pun khususnya dapat menjadi kaya, tetapi tak seorang pun juga dapat menjadi miskin, atau ... kesejahteraan nasional dan bukan kesejahteraan sedikit orang" menjadi tujuan. Untuk itu setiap kegiatan hendaknya diarahkan oleh negara. Dilarang untuk menjual produk-produk yang dibuat di luar sektor negara. "Perdagangan apa pun oleh warga negara dengan orang-orang asing harus dilarang ... setiap sarana pembayaran internasional harus ditarik dari peredaran dan ... digantikan dengan uang ... yang sah satu-satunya di dalam negeri." Suatu perkembangan industri harus dilaksanakan tak tergantung dari luar dan impor harus dihapuskan secara bertahap, "produksi lokal membuat produk asli atau produk pengganti ... produksi domestik yang direncanakan didasarkan perhitungan-perhitungan dan tidak menjadi kemungkinan penambahan yang terus-menerus tanpa terkendali, produk-produk buatan asing digantikan oleh produk-produk buatan nasional." Perdagangan yang diatur, harga-harga yang ditetapkan dan kondisi-kondisi yang dijamin bagi setiap orang akan menyebabkan suatu perekonomian yang berkem-

bang dan pada waktu yang sama "kehormatan nasional pun menjadi lebih tinggi," karena "para warga bangsa akan hidup di antara mereka sendiri dan hanya akan mempunyai sedikit hubungan dengan orang-orang asing."

Barangkali "negara perdagangan tertutup" yang dikemukakan Fichte dapat dipandang sebagai model modernisasi yang pertama. Meskipun inilah merupakan suatu gagasan teoritis-utopis sehubungan dengan Fichte, Trotsky dan Preobrazhensky, pencipta-pencipta teori model Soviet, atau dengan Stalin, pelaksana bertangan besi dan berdarah dingin, namun ini adalah penarikan konsekuensi yang kejam atas analisis perkembangan kapitalisme di saat itu. Ini mengakibatkan keberhasilan sementara dari model tersebut pada tingkat dunia.

Di awal tahun 1930-an, Uni Soviet tidak hanya dapat melindungi diri dari akibat resesi ekonomi dunia yang secara menghancurkan negara-negara agraris, tetapi juga dapat mengambil langkah-langkah besar ke depan dalam program tahun 1931 untuk mengejar keterbelakangan limapuluh tahun industrinya dalam sepuluh tahun. Batu uji nyata terobosan industri, Perang Dunia II, adalah kemenangan dalam perang industri dan material yang melandasi kemenangan militer akhirnya. Sistem Soviet telah mengangkat negeri terbelakang menempati kedudukan adikuasa ekonomi dan militer, dan dengan ini ditawarkan model sebagai suatu alternatif nyata bagi negara-negara periferi non-industri di samping model negara Barat. Keberhasilan ekonomi Uni Soviet yang bersifat sementara jelas dibuktikan oleh kenyataan bahwa Yugoslavia, atau Cina, Vietnam dan Kuba semua dengan senang hati berpaling pada model ini, seraya melihat suatu bentuk pemecahan di dalam-

nya terhadap masalah-masalah mereka sendiri. Suatu bukti yang bahkan lebih meyakinkan adalah setelah Perang Dunia II, sebagian besar negara maju kapitalis terpesona oleh model ini juga. Banyak negara maju atau yang jelas sedang berkembang memperkenalkan rencana pembangunan lima tahun dan kebijakan-kebijakan perusahaan milik negara dan campur tangan negara.

Sebagai sistem dan unit yang terisolasi, "kubu sosialis" melepaskan diri dan secara konsisten mengisolasi diri dari dunia, maka pencangkakan sepenuhnya model Soviet dan pengkaitan sistem yang diseragamkan sebagai suatu "sistem dunia" yang paralel terwujud di Eropa Tengah dan Timur, atau sebagaimana sering disebut semuanya ini dengan "Eropa Timur". Negara-negara di kawasan ini terkait secara militer oleh Pakta Warsawa, secara ekonomi oleh CMEA, tetapi terutama terkait oleh dominasi Soviet (dan teristimewa kehadiran militer).

Tepatnya perwujudan pencangkakan modernisasi model sosialis Soviet yang dipaksakan ke negeri-negeri ini hampir dengan segera berakibat perlawanan-perlawanan yang keras. Seluruh rangkaian perlawanan dan pemberontakan pecah melawan kebijakan pembangunan imperium Soviet dan kediktatorannya yang secara serius melanggar perasaan-perasaan nasional bahkan dalam formalitas-formalitas dan menginjak-injak hak-hak asasi manusia kendati menyerukan slogan-slogan revolusioner. Pada tahun 1953 di Berlin, tahun 1956 di Poznan, kemudian dengan kekuatan yang unik dan kemenangan sementara yang unik di Budapest, tahun 1968 suatu cara damai dimulai dari atas di Praha, dan atas dasar perlawanan luar biasa massa Solidaritas di Gdansk pada tahun 1980.

Meskipun demikian model modernisasi komunisme Eropa Timur mengakibatkan keberhasilan sementara di beberapa negara Eropa Tengah dan Timur. Perlulah dibedakan mengenai akibat-akibat karena percepatan akumulasi modal, pertumbuhan pesat industri dari penindasan struktur sosial hirarkis yang kaku yang membuka kemungkinan penting modernisasi pada keterbelakangan Balkan di pertengahan abad 20, menciptakan beberapa kesempatan terbatas dan sementara pada keterbelakangan relatif tipe negara Hongaria-Polandia bahkan jika mereka membayar harga yang sangat mahal untuk itu semenjak permulaan dalam bentuk pemborosan manajemen, pemaksaan penggunaan struktur-struktur lama, kelalaian merusak dalam hal infrastuktur dan mempertahankan taraf hidup pada tingkat yang rendah.

Meskipun demikian, di negara-negara ini industrialisasi yang mahal dan modernisasi yang menyeluruh telah menghasilkan keberhasilan yang tidak meragukan, untuk meninggalkan ekonomi pertanian, penderitaan masyarakat petani pedesaan dan tingkat kebudayaan. Dalam hal keterbelakangan Balkan, segi positifnya dipandang lebih banyak, dalam hal Polandia-Hongaria imbalan lebih berat positif negatifnya dapat diperdebatkan. Akan tetapi, pada tingkat perkembangan budaya Barat di Cekoslovakia dan Jerman Timur pengaruh modernisasi sosialisme Eropa Timur bisa diabaikan, sementara pengaruh negatif model ini sangat mendominasi terus-menerus dan menyebabkan kesenjangan yang semakin lebar dari peradaban Eropa.

Kendati perbedaan-perbedaan ini secara praktis dapat kita katakan bahwa pada umumnya negara-negara Eropa Tengah-Timur ketika pertengahan abad 20 dipaksa,

meskipun tidak sama sekali tanpa dukungan dari dalam untuk mempraktekkan komunisme Eropa Timur, model yang dikagumi pada tahun 1930-1940 di seluruh dunia dan setelah Perang Dunia banyak dari unsurnya diterapkan di berbagai negara, makin lama semakin kurang terjamin modernisasinya. Kemungkinan-kemungkinannya yang menjamin kemajuan cepat di jalan yang cocok dengan kondisi-kondisi masa peralihan abad, yaitu kondisi permulaan abad 20, dan demikian mereka janjikan mengejar keteringgalan, mereka membantu proses-proses yang *bertentangan dengan* teknologi yang paling mutakhir dalam sistem ekonomi-teknik internasional yang berubah secara radikal. Payahnya infrastruktur yang dibangun dalam pertengahan pertama abad ini bahkan lebih anakronistik, karena revolusi teknik di masyarakat yang disebut pasca-industri telah menghasilkan infrastruktur baru bagi suatu era baru, yang secara dini meletakkan sistem produksi, bahkan mekanisme-mekanisme sosial, atas dasar-dasar yang sama sekali baru. Kecepatan luar biasa dari industrialisasi ekstensif yang memutlakkan struktur-struktur industri di masa peralihan abad ini hanya mereproduksi keterbelakangan struktural walaupun laju pertumbuhannya pesat.

Dan tatkala terobosan industri masuk ke negara-negara yang lebih terbelakang di kawasan ini juga, dan makanya tercipta kesempatan kerja penuh, kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan ekstensif sudah susah.

Oleh karena itu, komunisme Eropa Timur sebagai suatu model modernisasi, hanya memiliki kemungkinan-kemungkinan yang terbatas. Dalam hal-hal tertentu ia mengalami malapetaka dari awalnya, dalam hal-hal lain pengaruhnya bertentangan, tetapi

pada tahun 1960-an praktis peluang-peluangnya secara internasional payah. Karena memaksakan diri lebih lanjut dan menetapkan diri sebagai ideologi yang selalu benar akhirnya mengubahnya dari model modernisasi menjadi model keterbelakangan. Pengaruh ini dalam tahun 1970-1980-an -- di tengah-tengah transformasi spektakuler perekonomian dunia semenjak itu -- menjadi nyata.

Pembaruan dan "Kegagalan yang Sukses"

Kontradiksi-kontradiksi yang serius dari komunisme Eropa Timur tampak sejak awal sekali, kekacauan-kekacauan operasionalnya di negara-negara Eropa Tengah dan Timur telah menyebabkan konflik-konflik sangat dini menyangkut tradisi-tradisi dan kekhasan pelbagai negara dan berakibat pada upaya untuk "memperbaiki" model, mengubahnya melalui pembaruan-pembaruan dan memperkenalkan model-model sosialisme yang lain. Teori pembaruan sama usianya dengan model Soviet Stalinis, karena sistem gagasannya dilahirkan dalam perdebatan-perdebatan pada waktu model gagasan Trotsky-Preobrazhensky tentang perencanaan gaya instruksi diambil-alih oleh Stalin dan dipraktikkan secara ekstrim dalam bentuk sosialisme Soviet. Orang pertama yang menjabarkannya adalah Nikolai Bukharin, ketika di tahun 1926 ia mengkontraskan perencanaan dan program industrialisasi yang diterapkan di tengah suatu sistem harga yang mengikuti pasar dan hubungan nilai dengan sistem instruksi terencana.

Model Bukharin yang segera ditolak dan kemudian dikutuk di Soviet, dikembangkan lebih lanjut di tahun 1930-an dalam karya-karya teoritis Oscar Lange, orang Polandia,

yang hidup dalam pengasingan, dan ini menjamin kesinambungannya pada aliran ekonomi Polandia tahun 1950-an, di mana mereka menjabarkan kembali sosialisme model pasar dengan M. Kalecki dan W. Brusz di tengah meningkatnya pengalaman tahun 1950-an, bahkan di antara krisis-krisis ekonomi-politis yang pertama.

Kira-kira pada saat yang sama muncul pula aliran ekonomi Hongaria, yang melukiskan dan menganalisis kekacauan-kekacauan operasional dan ketidakcocokan praktek komunisme lokal Eropa Timur dan menghasilkan gagasan-gagasan pembaruan yang didasarkan atas kombinasi sistem pasar dan perencanaan. Analisis-analisis kritis dari Gyorgy Peter dan Janos Kornai dan suara-suara keras untuk kebutuhan dan prinsip-prinsip pokok mengubah model dan kemudian rancangan yang disiapkan atas dasar-dasar ini oleh Istvan Varga dan Istvan Antos dengan bantuan selusin ahli lain pada paruhan pertama tahun 1957, mengajukan suatu alternatif yang mempertimbangkan pengalaman-pengalaman praktis.

Akan tetapi, penyalahan dan kecurigaan ideologis, tuduhan pada usaha-usaha itu sebagai kebangunan kapitalisme, revisionisme dan pengkhianatan sosialisme menutup jalan untuk penerapan gagasan-gagasan teoritis itu. Sampai pertengahan tahun 1960-an, tidak ada satu kesempatan pun untuk memperkenalkan pembaruan-pembaruan yang nyata. Debat-debat pembaruan yang meluas telah melahirkan banyak koreksi kecil dalam sosialisme Stalin. Secara praktis tidak terjadi apa-apa, hanya mereka mengurangi jumlah instruksi wajib yang telah direncanakan, pada umumnya dengan tidak menetapkan komposisi wajib produk perusahaan-perusahaan. Ada beberapa perubahan struktural juga terjadi, yang me-

nyederhanakan tiga tingkat direksi birokrasi, yang menghapus apa yang disebut direksi tingkat tengah. Meskipun demikian, ini disertai oleh *merger* ekstrim perusahaan-perusahaan, dengan pembentukan trust-trust besar dan perusahaan-perusahaan industri (industri-industri tertentu dihimpun ke dalam satu perusahaan tunggal). Pada kenyataannya tidak ada sesuatu pun yang berubah di mana saja sampai pertengahan tahun 1960-an, kecuali barangkali pembaruan agraria Hongaria satu-satunya yang diperkenalkan oleh pemerintahan Imre Nagy bulan Oktober 1956 dan diperkenalkan lagi oleh pemerintahan Kadar bulan November 1956. Penghapusan penyerahan wajib dalam produksi pertanian telah meruntuhkan tiang-tiang penopang instruksi-instruksi terencana dan menggantikannya dengan suatu pasar yang diatur. Akibat-akibat dari langkah ini bukanlah sumbangan yang tidak penting untuk terobosan pembaruan-pembaruan Hongaria selanjutnya.

Pada pertengahan tahun 1960-an bahkan di Uni Soviet berlangsung perdebatan umum mengenai perlunya pembaruan yang mengarah melampaui koreksi-koreksi. Di Cekoslovakia, Profesor Ota Sik dipercayakan untuk menyusun suatu proyek pembaruan. Di Hongaria, Rezső Nyers memimpin analisis berfungsinya ekonomi perencanaan dan penyiapan "mekanisme ekonomi baru" yang menyeluruh.

Keputusan pembaruan Mei 1966 menghapuskan sistem instruksi terencana yang wajib dan menciptakan beberapa kondisi pasar sebagian dalam perekonomian. Perusahaan-perusahaan berdagang di pasaran produk dengan harga pasar bebas atas dasar keuntungan, kecuali harga energi yang ditentukan negara dan bahan-bahan mentah tertentu dan harga beberapa bahan pangan.

Investasi barang-barang yang dahulu dibiayai negara kini dibiayai dengan laba perusahaan.

Sekalipun demikian, peranan negara tetap merupakan faktor yang menentukan. Ia menjamin agar 90-95% aset dimiliki oleh negara atau koperasi-koperasi yang besar dan kegiatan swasta dibatasi secara ketat. Ia mempunyai peranan terutama dalam kerangka kepemilikan negara atau koperasi (toko-toko milik negara dan restoran-restoran yang disewakan kepada orang perseorangan, rumah tangga swasta merencanakan produksi dalam sistem koperasi pertanian, dan lain-lain), atau melalui kegiatan-kegiatan bantuan (setelah jam-jam kerja resmi, pekerjaan reparasi yang diakui, jasa atau pekerjaan produktif).

Regulasi harga dan upah secara terpusat juga menjamin dominasi negara, demikian juga monopoli negara atas pinjaman berbagai jenis pajak dan pembayaran.

Akhirnya, sebagai ganti instruksi-instruksi terencana yang wajib, dilaksanakan kegiatan ekonomi yang lebih fleksibel dan bijaksana, tetapi ini masih merupakan fungsi kegiatan regulasi negara secara terpusat. Keterkaitan pasar dan perencanaan yang berusaha mengkombinasikan keunggulan-keunggulan keduanya sekaligus menghindari keburukannya merupakan hasil dari kompromi yang sangat serius. Pasar tidak bisa riil, tetapi lebih merupakan hasil simulasi. Tidak mungkin pasaran kerja dan pasaran modal sama sekali direkayasa. Monopoli-monopoli yang besar mencegah para produsen untuk bersaing mencari konsumen.

Penciptaan pasar yang riil tidak terlaksana karena sistem pembayaran luar negeri yang terisolasi dari dunia, karena kurangnya konvertibilitas dan karena kenyataan bahwa

mayoritas perdagangan luar negeri berlangsung di antara negara-negara CMEA melalui pertukaran barang atas dasar kontrak-kontrak antar negara. Semua ini meniadakan persaingan dari pasaran dunia, membuatnya tak perlu berupaya *up-to-date* dengan perkembangan teknik dan dengan demikian menghilangkan semua insentif penting. Subsidi-subsidi negara meningkatkan keamanan perusahaan-perusahaan di seluruh pasar, yang tidak cocok untuk mengembangkan kehidupannya.

Batas-batas politis-ideologis terhadap pembaruan segera menjadi kenyataan. Prinsip pemberian pekerjaan sepenuhnya dan stabilitas harga tetap merupakan tabu ideologi yang baku, jadi memaksa pembaruan untuk melakukan kompromi-kompromi yang serius dan membatasi prinsip-prinsipnya sendiri yang diakui. Misalnya, kemerdekaan perusahaan yang diinginkan pada dasarnya dirintangi oleh kenyataan pengangkatan dan penurunan manajer-manajer perusahaan oleh departemen-departemen. Sebagai suatu ciri khusus yang tak berubah negara-partai, maka organisasi partai dapat mencampuri keputusan-keputusan dan seluruh bidang kegiatan perusahaan dan lembaga-lembaga berdasarkan daftar kekuasaan.

Semua ini telah menyebabkan pembaruan Hongaria yang unik, yang pasti berakibat perubahan, menjadi model suatu semi-pemecahan yang radikal. Perkawinan sistem telah menjadi tidak konsisten. Mereka ingin mengatasi kekacauan dan fenomena yang tidak dikehendaki melalui campur tangan negara secara langsung. Dalam sistem baru ini berarti terutama modifikasi peraturan-peraturan, dan bukan peraturan-peraturan yang baru. Hal-hal ini seringkali dilakukan oleh pelobi-pelobi industri besar untuk se-

makin memenangkan kepentingan mereka sendiri.

Maka, ciri-ciri yang baku dari komunisme Eropa Timur tidak dapat diubah secara parsial, perbaikan-perbaikan kecil bahkan tidak mengarahkan perubahan-perubahan riil, juga pembaruan Hongaria tidak mampu berbuat demikian.

Kurangnya kemampuan menyesuaikan diri dan tak dapat berubahnya sistem ekonomi yang tidak cocok bukanlah akibat sistem ekonomi komunis Eropa Timur itu sendiri, melainkan lebih sebagai akibat dari struktur politik ideologisnya. Struktur negara-partai monolitis yang dilindungi oleh ideologilah yang pertama-tama berwenang dalam hal eksplorasi riil atas situasi. Dan mereka telah mengajukan suatu pendekatan ideologis terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai kenyataan. Mereka memungkinkan berlangsungnya ketakpedulian yang percaya-diri kepada kekuasaan yang tidak terkontrol, kepada "kepercayaan politis" yang mendominasi sebagai suatu kontra-seleksi terhadap keahlian dan kemampuan. Lingkungan ideologis-politis ini memaksa pembaruan hanya bersifat setengah-pemecahan, yang mensubordinasikan rasionalitas ekonomi kepada apa yang disebut nilai-nilai ideologi sosialis. Demikianlah struktur politik, kelangkaan demokrasi, di mana dapat kita temukan sebagai alasan akhir yang membuat krisis struktural serius setelah tahun 1973 berevolusi seputar keadaan tak terpecahkan di Eropa Timur, dan yang menghalangi kelanjutan transformasi yang berlangsung dalam perekonomian dunia.

Sama sekali bukanlah demokrasi yang menjadi satu-satunya lingkungan politik yang perlu bagi penyesuaian ekonomi, efisiensi, dan kegiatan-kegiatan pasar yang

fleksibel. "Keajaiban-keajaiban" Asia akhir-akhir ini merupakan bukti bahwa negara-negara tertentu yang mencapai prestasi-prestasi ekonomi yang spektakuler dipegang oleh pemerintahan kediktatoran yang keras. Tetapi negara-negara diktatorial autokratis ini bukanlah negara totaliter sebagaimana negara-negara komunis Eropa Timur, dan mereka tidak membatasi kegiatan-kegiatan lingkungan swasta yang praktis bebas dari "establishment" kediktatoran atau mereka pun tidak membatasi kegiatan modal asing; sebagai kenyataan dalam arti tertentu mereka menjamin lingkungan yang "tenang" untuk aktivitas usaha mereka.

Mukjizat ekonomi Asia telah terjadi terutama dalam sistem kediktatoran autokratis dan perkembangan keberhasilan ekonomi ini merongrong sistem-sistem politik itu dan menuntut atau memaksa terwujudnya pemerintahan demokrasi.

Situasi komunisme Eropa Timur adalah kebalikan. Tanpa dihapuskannya negara-partai totaliter yang menyebabkan kemunduran perekonomian dan tanpa dibangunnya struktur-struktur politik yang demokratis, maka "mukjizat ekonomi" sama sekali tidak mungkin.

Meskipun demikian, tak diragukan lagi bahwa logika mendasar dari pembaruan telah menampilkan kepemimpinan ekonomi terhadap perubahan-perubahan yang lebih baru, kesinambungan pembaruan dalam hal-hal gangguan ekonomi yang masih ada atau yang baru muncul. Tendensi ini menjadi kuat dalam pembaruan Hongaria sejak awal tahun 1980-an. Program-program radikalisi pembaruan yang telah terlaksana, dengan kata lain capaian "pembaruan atas pembaruan-pembaruan" atau capaian "perbaikan dan pembaruan", sejak mereka kebetulan berhadapan dengan oposisi ideolo-

gis-politis, telah mengarah pada usaha untuk membaharui politik dan ideologi, untuk menuntut transformasi struktur monolitik yang menghalangi semuanya dan untuk membangun suatu negara demokrasi konstitusional yang pluralis.

Jadi pembaruan yang mengakibatkan perubahan dalam model tetap merupakan setengah pekerjaan karena halangan-halangan eksternal maupun internal dasar dan karena esensinya sendiri, maka tidak dapat mencapai tujuannya yang sungguh-sungguh. Tidaklah menjadi masalah bahwa pembaruan telah, bahkan dengan hasil-hasil setengah pekerjaan ini, mencapai sukses relatif, dan telah menempatkan Hongaria praktis pada posisi kekecualian selama dua dasawarsa ini. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lebih baik, manajemen yang lebih rasional, kondisi hidup yang lebih bagus dilengkapi dengan kebebasan yang semakin besar, kurangnya pelanggaran hak-hak asasi manusia, kemungkinan yang lebih besar untuk bepergian daripada di negara sosialisme Eropa Timur mana pun. Kendati semua ini, pembaruan tidak bisa berhasil; ternyata kita harus berbicara mengenai kegagalan-kegagalan yang merupakan akibat bukan hanya karena keadaan itu.

Bahkan falsafah awal dari pembaruan -- sejak ia mencoba mengawinkan api dengan air -- berkesudahan menjadi suatu kekeliruan. Tetapi ia sekaligus menyebabkan erosi bertahap pada komunisme Eropa Timur, dan akhirnya ketika melalui logika mendasar ia mengarah pada tujuan pembaruan sistem politik yang pluralis, ia merongrong sistemnya sendiri. Usaha untuk membaharui komunisme Eropa Timur dan untuk menciptakan sosialisme demokratis yang didasarkan atas ekonomi pasar yang efisien berkembang menjadi penghapusan menyeluruh terhadap komunisme Eropa Timur. Ja-

lannya sudah diakui oleh Hegel: "... perbuatan-perbuatan rakyat berakibat pada sesuatu yang lain ... bahwa apa yang telah mereka maksudkan ... atau apa yang ... telah mereka inginkan ... mereka menciptakan sesuatu yang lebih ... yang tidak mereka pikirkan atau maksudkan."

Demi tercapainya sosialisme demokratis dengan ekonomi yang efisien, mereka memulai revolusi damai dari atas di Hongaria pada bulan Mei 1988 dengan menyatakan prinsip-prinsip baru dan menurunkan Janos Kadar maupun kepemimpinan orang-orang tua, dan akhirnya pada bulan Maret-April 1990 diakhiri dengan pemilihan bebas anggota-anggota parlemen yang mengakibatkan transformasi sistem secara menyeluruh.

Dalam proses panjang hampir dua tahun ini tentu saja peranan penting dimainkan oleh partai-partai oposisi yang pembentukannya diajukan dengan undang-undang oleh revolusi yang dimulai dari atas, yang bertujuan untuk membangun struktur sosialisme demokratis yang pluralistik. Perkembangan partai-partai oposisi dan serangan-serangan mereka yang semakin kuat atas berbagai bentuk komunisme Eropa Timur dan perilaku antikomunis mereka yang keras segera memaksa setiap pihak sosialisme menjadi defensif.

Autentisitas khusus terdapat pada pendekatan ini dan keberhasilan dijamin oleh golongan ortodoks anti pembaruan yang merupakan mayoritas kaum komunis Eropa Timur, oleh kediktatoran ekstrim yang mengingatkan masa Stalinis, oleh praktek penindasan hak-hak asasi manusia. Apa saja yang berlangsung di beberapa negara tetangga, di Hongaria itu telah setengah ditolak, setengah dikutuk, tetapi belum lama ini masih diterima. Kebijakan Stalinisme Hongaria

tahun 1950-an ditolak pemerintahan Kadar, tetapi basis kelembagaan strukturalnya praktis tidak tersentuh. Kesamaan khusus antara keadaan Hongaria belum lama ini dan keadaan di negara-negara tetangga sekarang, kesempatan untuk mengeksplorasi dan membicarakan hal-hal yang tidak dilaksanakan dan tidak terbuka, kejahatan-kejahatan nasional lama yang disembunyikan memungkinkan identifikasi pemerintahan Kadar dengan era Rakosi atau dengan pemerintahan Honecker-Jakes-Ceausescu dan pencelaan total pembaruan sosialisme Hongaria dengan penghapusan prestasi-prestasi pembaruan yang partial dan keberhasilan relatif dan dasawarsa-dasawarsa sebelumnya.

Maka akibatnya, akselerasi kejadian-kejadian historis yang mengalir melalui pintu-pintu dengan kekuatan besar, melalui pintu-pintu yang telah dibuka oleh para perintis pembaruan, memerlukan pembuka-pembuka pintu terus-menerus. Transformasi sistem makin lama semakin didikte oleh kekuatan-kekuatan oposisi, yang kebanyakan baru terbentuk.

Semua itu di Polandia terjadi dalam bentuk yang berlainan, karena di sana prosesnya tidak dimulai oleh kekuatan pembaruan dari pihak penguasa. Sebaliknya, pihak penguasa bahkan menggunakan kediktatoran militer melawan organisasi spontan besar yang didirikan oleh oposisi pekerja, Solidaritas, yang dilarang dan dikejar-kejar. Akan tetapi kekuatan militer juga tidak mampu mengatasi krisis yang menyebabkan dan memperkuat oposisi Solidaritas. Proses memburuknya keadaan di sini disebabkan oleh tidak adanya perubahan riil dan oleh semakin parahnya krisis, dan ini menyebabkan runtuhnya kekuasaan. Sebagai akibat ketidakmampuan kediktatoran yang telah lemah dan krisis yang tidak memberi harapan lagi, diusahakanlah kompromi dengan pihak

oposisi setelah satu dasawarsa. Dengan kondisi-kondisi jaminan politis tertentu dan posisi-posisi kekuasaan maupun keparlemenan yang disepakati (keanggotaan pemerintahan dan jabatan presiden), disetujui untuk dilakukan pemilihan umum, yang berkesudahan dengan kemenangan Solidaritas dan karena itu terbentuk pemerintahan oleh Solidaritas.

Transformasi ini tampaknya saja penuh damai. Sebenarnya ada bahaya perang saudara dan pihak militer gagal mengambil alih kekuasaan sesudah itu.

Perkembangan yang sejalan dari apa yang dihasilkan di Polandia dan apa yang berproses di Hongaria tentu saja saling memperkuat dan menciptakan -- setelah kebijakan *glasnost* dan *perestroika* Gorbachev -- suatu kelompok vertikal berorientasi pembaruan, yang mentransformasikan sosialisme Eropa Timur: Uni Soviet, Polandia, dan Hongaria. Selama beberapa waktu yang terjadi tampaknya berlawanan dengan ini, negara-negara sosialis Eropa Timur yang sehaluan -- Jerman Timur, Cekoslovakia, Rumania, dan Bulgaria -- secara keras dan konservatif menentang semua pembaruan. Sebagai akibatnya dapat dimengerti adanya inisiatif Rumania untuk melakukan intervensi militer bersama terhadap Polandia dan Hongaria.

Pengikisan komunisme Eropa Timur yang tidak mau memperbaharui diri bagaimanapun tidak dapat dicegah. Mereka tidak dapat lagi menghindari akibat dari transformasi pembaruan yang berlangsung di negara-negara tetangga. Akibat-akibat pembaruan ini memperlihatkan daya banding yang meluas.

Cukup untuk membuka satu lubang kecil saja pada sistem tertutup yang terlalu tertekan dan ledakan terjadi. Ketika Hongaria sebagai bagian dari transformasi di awal

tahun 1989 menghapuskan semua pembatasan untuk bepergian dan membuka perbatasannya, ketika Hongaria sebagai yang pertama mendobrak kunci perbatasan yang disebut tirai besi, maka puluhan ribu warga negara Jerman Timur datang ke Hongaria sehingga mereka dapat memasuki Jerman Barat melalui jalan di situ. Dalam musim panas tahun 1989 pemerintah Hongaria membuat suatu keputusan historis dan menolak untuk memegang teguh persetujuan yang ditandatangani di kalangan negara-negara sosialis Eropa Timur dan tidak mencegah pelarian orang-orang Jerman Timur. Sistem tertutup Republik Demokrasi Jerman ambruk. Arus kaum pengungsi tidak terbenjung. Dalam musim gugur tahun 1989 bukan hanya rezim Honecker runtuh, melainkan Tembok Berlin juga harus dibuka. Penghancuran Tembok Berlin yang telah berdiri di sana selama tiga dasawarsa dan menjadi suatu simbol memiliki tujuan sama dengan maksud pendiriannya ketika itu: untuk menghentikan arus para pengungsi Jerman Timur. Demonstrasi besar-besaran dan tak dapat dihentikan di Berlin maupun Leipzig dan arus pengungsi yang terus-menerus menghancurkan sosialisme Jerman Timur. Proses ini diakhiri dengan kemenangan partai konservatif pada pemilihan umum Musim Semi tahun 1990.

Gerakan massa dan keruntuhan Jerman mendorong rakyat Cekoslovakia yang telah tertidur selama 20 tahun mengikuti jejaknya juga. Rezim Cekoslovakia yang tidak yakin akan dirinya sendiri dan berada dalam krisis moral hanya sekali berani menumpahkan darah untuk membubarkan demonstrasi di Leipzig. Sebagai akibat demonstrasi yang berulang-ulang, rezim Husak-Jakes harus mundur dan penulis yang beberapa kali dipenjarakan, Vaclav Havel, memasuki Hradzhin. Sebagai akibat serangkaian kegagalan,

cukup seorang pastor saja, Laszlo Tokes, tampil gagah berani dan demikian seluruh keadaan pahit getir di kota, di seluruh negeri mendidih dan menyalakan peperangan. Di mana penindasan sangat kejam dan kediktatoran amat bengis, maka di sanalah ledakan revolusi paling dahsyat. Revolusi Rumania telah mengakhiri prosesnya dalam bulan Desember 1989 dengan revolusi berdarah dan dengan menghukum mati diktator terakhir yang barangkali paling dibenci di Eropa abad ke-20. Komunisme Eropa Timur telah membuat satu sama lain berjatuhan bagaikan kartu-kartu domino.

Tentu saja mudah melukiskan berbagai kejadian dan menerangkan alasan-alasannya, bahkan arah internal lebih dalam dari hubungan mereka. Kendatipun demikian, kita tidak dapat menginterpretasi dan menjelaskan keruntuhan komunisme Eropa Timur hanya dari dirinya sendiri.

Keterkaitan Internasional dari Keruntuhan

Komunisme Eropa Timur justru tidak runtuh dari dirinya sendiri. Keruntuhannya merupakan bagian dari proses perkembangan luar biasa dari "kontak-kontak" dunia", dari perekonomian dunia.

Saat terakhir dari perkembangan ini adalah perubahan dalam lapangan teknik yang dimulai setelah Perang Dunia II dan berkembang sampai pada pengaruh berskala penuh di pertengahan dasawarsa 1970-an. Revolusi keilmuan dari dasawarsa-dasawarsa ini mentransformasikan telekomunikasi maupun transportasi dan meningkatkan produksi besar-besaran dengan peralatan elektronik dan robotisasi sedemikian jauh sehingga berakibat transformasi struktural menyeluruh dalam perekonomian, sebagai akibat bersamaannya adalah perubahan da-

lam lapangan teknologi. Sedemikian jauh proses ini berlangsung di negara-negara terkaya, sehingga struktur ekonomi dan tingkat teknologi negara-negara terbelakang justru menjadi ketinggalan. Jadi berkembang krisis struktural menyeluruh dalam perekonomian dunia. Kekuatan-kekuatan penggerak yang besar mengguncangkan sistem dunia dan membawa keruntuhan industri-industri penarik yang besar dan menciptakan industri-industri baru. Dengan bobot pelayanan yang berlebihan struktur lapangan pekerjaan yang baru berkembang dalam masyarakat pasca-industri di pusat perekonomian dunia. Semua ini mempercepat internasionalisasi ekonomi dunia sebegitu besar sehingga memudahkan kerangka kerja ekonomi nasional. Perusahaan-perusahaan multinasional dan perekonomian multinasional menerobosi prinsip nasional yang telah mengatur semuanya beberapa waktu sebelumnya, dan melalui integrasi ekonomi, khususnya di Eropa Barat, integrasi berakibat kecenderungan umum menuju Masyarakat Eropa.

Proses ekonomi dasar telah amat pesat membentuk perbedaan sosial ciri khas abad 19 dan awal abad 20. Struktur lapangan kerja berubah secara radikal. Pertama, kelas pekerja petani menghilang. Kemudian, kelas perburuhan klasik menciut di beberapa negara industri -- mencerminkan keadaan mendatang negara-negara yang lain juga -- sampai 10-20% bagian penduduk. Bersamaan dengan proses ini, "kelas menengah" mulai berkembang pesat, dan tendensi baru yang paling jelas dalam hal ini adalah kenaikan tajam perbandingan kaum intelektual dan mereka yang berpendidikan tinggi di antara angkatan kerja. Ini tidak hanya mencampurkan penggolongan tradisional pekerja intelektual dan buruh, tidak hanya menghapus pembatasan pekerjaan "blue

collar” dan ”white collar” sebagaimana dikatakan di negara-negara berbahasa Inggris, tetapi juga kejutan dimulainya kecenderungan ”intelektualisasi”. Ini tampak sangat jelas pada kenyataan bahwa di negara-negara paling kaya dan maju kira-kira separuh kelompok umur antara 18 dan 24 tahun berpendidikan lebih tinggi dan memasuki pasaran kerja dengan kualifikasi demikian. Pembagian kelas dari masyarakat abad 19 sama sekali telah berubah dewasa ini di negara-negara paling maju.

Jelaslah proses sosial-ekonomi mendasar ini telah menyebabkan transformasi radikal pada kapitalisme-kapitalisme kaya. Sistem kapitalisme yang dikenal pada abad 19 dan dibahas oleh Marx telah berubah banyak dewasa ini. Tampak seakan-akan ciri khasnya yang semula, imperialisme berekspansi dengan penaklukan dan kelas penindas yang memeras bagaimanapun telah hilang. Di lain pihak, telah muncul ciri-ciri khas baru hubungan aliansi integrasional dari masyarakat ”kesejahteraan” atau ”konsumen”.

Meskipun demikian, ada faktor politik yang jelas dalam transformasi kapitalisme. Sebab organisasi-organisasi dari kelas buruh yang dahulu ditindas, serikat-serikat pekerja dan partai-partai sosial demokratis mempunyai peran yang agak besar dalam memaksakan perubahan-perubahan ini melalui perjuangan sepanjang abad yang tak henti-henti. Marx di pertengahan abad 19 berpandangan bahwa hanya *revolusi* proletariat yang sanggup mengubah keadaan-keadaan itu, dan Lenin pada perlimaian pertama abad 20 mengakui ini masih merupakan pilihan yang sah di tengah tatanan keterbelakangan Russia yang diktatorial dan berpolarisasi sangat tajam.

Akan tetapi, pergerakan kaum buruh sosialis Eropa Barat dan Tengah pada peralihan abad 19 dan 20 mulai mengikuti cara-

cara baru, tidak sedikit karena pengalaman gerakan kaum buruh Jerman yang telah tumbuh menjadi kekuatan yang besar. Menurut penalaran gagasan E. Bernstein dalam bukunya yang diterbitkan justru di ambang abad 20, pada tahun 1899, ”Prospects of Socialism and the Task of Social Democracy”, perkembangan kapitalisme melewati jalan yang berlainan daripada jalan yang dipaparkan dalam analisis Marx. Pengurangan bertahap atas kemiskinan dan pembaruan kesejahteraan yang dicapai secara damai oleh gerakan-gerakan massa buruh dan oleh perundangan parlemen berakibat pada perbaikan dan kemajuan yang terjamin. Kesempatan-kesempatan untuk pemilihan-pemilihan umum yang demokratis telah menyebabkan perumusan strategi pembaruan dalam kerangka kerja parlementarisme.

K. Kautsky -- bahkan meskipun berdasarkan alasan-alasan yang lain -- menentang pandangan Luxembourg, Lenin dan pemikiran komunis kemudian tentang kapitalisme dalam mengartikan fenomena imperialisme. Sebab menurut ulasannya imperialisme sama sekali bukanlah perkembangan tingkat ”tertinggi” kapitalisme dan itu pun bukan ”tahapnya terakhir”, itu hanya merupakan suatu jenis politik, metode tertentu untuk memaksimalkan keuntungan (tepat seperti usaha mempekerjakan wanita dan anak-anak pada tahap-tahap awal kapitalisme). Sekalipun demikian, dikatakannya kapitalisme dapat hidup tanpa koloni-koloni juga, dan ia dapat mencegah konflik ekspansi pula. Dikatakan dalam tulisannya pada tahun 1914 ”tidak mustahil bahwa kapitalisme akan mengalami fase perkembangan yang lain yaitu menjadi ultra-imperialisme, ketika kebijakan kartel dialihkan ke kebijakan luar negeri.” Kekuatan-kekuatan raksasa setelah dapat mencapai persetujuan, dapat mengadakan perkaitan secara internasional,

dan kapitalisme yang telah bertransformasi dapat berkembang lebih lanjut.

R. Hilferding menyimpulkan berdasarkan analisis pada kapitalisme Barat di awal abad 20 bahwa "kapitalisme baru" yang telah bertransformasi dapat menghapus anarki yang merupakan ciri khas kapitalisme lama melalui fungsi perbankan dan keuangan, dan akan menciptakan "hubungan-hubungan sosial teratur yang disadari dalam batas-batas hubungan ekonomi minimum." Proses konsentrasi yang mengarah pada bank sentral "tunggal" dan "kartel umum", barangkali dalam bentuk antagonistik, akan menciptakan "masyarakat teratur secara sadar." Berdasarkan hal-hal ini sebagaimana dirumuskan pada Kongres tahun 1923 dari Kaum Sosialis Internasional, "kegiatan pengawasan sadar atas keseluruhannya" dapat dilaksanakan dan akan mungkin untuk "menghindari kesalahan-kesalahan kapitalisme" bahkan dalam sistem kapitalis. Partai Sosialis Jerman adalah yang menyatakan dalam bentuk paling matang pada Kongresnya tahun 1927 bahwa "kita akan sampai pada suatu organisasi ekonomis kapitalis di mana kita berangkat dari suatu perekonomian yang ditentukan oleh permainan bebas kekuatan-kekuatan menuju perekonomian yang terorganisasi." "Kapitalisme terorganisasi sesungguhnya berarti -- ia tambahkan -- bahwa prinsip kapitalis persaingan bebas akan digantikan oleh prinsip sosialis produksi terencana."

Teori sosial demokratis yang ditempa pada awal abad 20 melalui perjuangan gerakan yang praktis telah mengantarkan pada kegiatan pemerintahan sosial demokratis setelah Perang Dunia II, pada sistem sosialis Skandinavia yang dibentuk dari "kapitalisme terorganisasi." Semua ini menghasilkan proses yang bergerak maju melalui transformasi gerakan partai, melalui perkembangan

baru teori demokrasi sosial dan melalui akibat-akibatnya pada bidang praktis.

Pembaruan sosialis dari kapitalisme hampir tak dapat berhasil jika pada perjalanannya tidak dibantu oleh tantangan komunisme Eropa Timur setelah Perang Dunia II. Adalah suatu paradoks sejarah bahwa menyebarluasnya praktek demokrasi sosial dinyatakan Stalin merupakan musuh terbesar dan dianggap sebagai "sayap moderat" fasisme. Dan kenyataan bahwa itu diterima dalam mayoritas negara-negara kapitalis maju karena didorong oleh perkembangan Uni Soviet yang Stalinis menjadi suatu negara adikuasa yang kuat.

Kapitalisme abad 19 harus menyingkapkan hiasan di wajahnya. Mengambil bagian dalam persaingan antara dua sistem dunia demi kepentingan vital membuktikan bahwa kapitalisme fleksibel dan jinak. Barangkali Milton Friedman telah menemukan pernyataan yang paling tepat ketika ia mengatakan bahwa kapitalisme telah belajar banyak, karena ternyata telah mengambil banyak dari sosialisme, sementara sosialisme tidak ingin, atau tidak sanggup belajar, bahkan dari kapitalisme yang sukses.

Atas dasar transformasi sosial-ekonomi yang telah dikemukakan di depan, cita-cita masyarakat konsumen-kesejahteraan telah diangkat ke tingkat kebijakan pemerintah secara sadar, dan mereka berhasil mewujudkannya dalam perekonomian yang tumbuh pesat.

Sementara kapitalisme yang masih berada di tingkat periferi, di tengah kemiskinan relatif, menanggung sebagian besar keadaan jelek masyarakat abad 19 kendatipun sudah ada perubahan-perubahan tertentu, kapitalisme kaya yang berada di pusat sistem dunia telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Keadaan-keadaan baru, kapitalisme yang telah dibaharui mengalami kemajuan besar

dalam memecahkan dilema dasar. Sebagai ganti pertentangan tajam terdahulu antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, di mana efisiensi mengurbankan keadilan, mereka berhasil membangun sistem yang didasarkan atas perekonomian efisien, yang mengarah pada semakin besarnya keadilan sosial.

Meskipun demikian imperialisme -- jenis prognosis Kautsky yang mau memperlihatkan kebenaran -- sama sekali tidak menjadi perhentian terakhir dari kapitalisme. Setelah Perang Dunia II "ultra imperialisme" menjadi sistem yang berupaya menjauhi konflik-konflik perang dan mengintegrasikan sistem yang berusaha membentuk "kartel kebijakan luar negeri" yang merupakan titik berat kebijakan Masyarakat Eropa beberapa dasawarsa ini dan bahkan akan menjadi titik berat kebijakan selanjutnya setelah peristiwa penting tahun 1992.

Sistem Barat ini yang kuat dalam strukturnya, dibaharui kemasyarakatannya dan dinamis perekonomiannya, telah berhasil bertahan dalam krisis strukturalnya yang spektakuler dan guncangan-guncangan serius yang terjadi setelah tahun 1973. Pada peralihan dasawarsa 1970-an ke 1980-an fenomena baru inflasi yang mencemaskan disertai stagnasi dan meluasnya pengangguran mengisyaratkan seriusnya permasalahan, tetapi semua ini hanya berlangsung beberapa tahun. Dan yang lebih penting ialah adanya pembaruan ekonomi struktural dibalik itu. Berhasilnya pembaruan ini mengakibatkan perkembangan kemakmuran baru dan kemampuan mengatasi guncangan krisis pada tengah-tengah kedua dasawarsa tahun 1980-an.

Jika sebelumnya komunisme Eropa Timur merupakan tantangan bagi kapitalisme Barat lama, maka sekarang perubahan struktural yang besar dalam perekonomian dunia, transformasi kapitalisme maupun ke-

tidakmampuan berubah yang kaku dari komunisme Eropa Timur berarti tantangan yang terus-menerus dan semakin besar bagi pihak belakangan ini.

Malahan tiga dasawarsa yang lalu, komunisme Eropa Timur adalah pihak yang memaklumkan persaingan dan menetapkan batas waktu dua tahun untuk mengatasi dan melewati Barat. Akan tetapi, pada tahun 1970-1980-an kecenderungan perkembangan sosialisme telah berantakan. Mereka tidak hanya tidak bisa menghindari krisis struktural perekonomian dunia, melainkan akibat-akibatnyapun ternyata lebih berat dan lebih serius daripada di Barat. Sebagai akibat ketidakmampuan mengatasi, stagflasi menjadi permasalahan khusus tidak hanya untuk beberapa tahun, melainkan sampai sekarang sudah satu setengah dasawarsa. Tingkat perkembangan pesat sebelumnya berhenti. Harga-harga yang sebelumnya tetap dalam beberapa kasus berubah menjadi terpacunya inflasi. Rasa aman dalam kehidupan berangsur-angsur menghilang, sementara persamaan bertingkat rendah makin lama harus ditinggalkan.

Komunisme lokal Eropa Timur telah kehilangan semua keunggulan dan hasil-hasilnya yang terdahulu. Menjadi nyata untuk selamanya bahwa tidak mungkin mempraktekan prinsip-prinsip dan slogan-slogan sosialis, dan dalam percobaan pembaruan-pembaruan dan modernisasi semua ini makin lama harus ditinggalkan. Sekarang seluruhnya terbukti bahwa bahkan sebagai model modernisasi pun ia tidak cocok untuk memenuhi tuntutan zaman baru.

Krisis ekonomi yang lama telah menghapuskan semuanya, yang diperburuk oleh tidak adanya transformasi struktural secara menyeluruh. Hal ini -- karena gagalnya transformasi yang sungguh-sungguh inti -- menjadi penyebab krisis sosial dan politik.

Hilangnya daya saing ekonomi menghadapi Barat, dalam hal Uni Soviet, menyebabkan kalahnya perlombaan senjata (meskipun kita harus menambahkan bahwa sebagian benar dalam arti lain juga: beban-beban perlombaan senjata secara ekonomis juga ikut menyebabkan kalahnya daya saing ekonomi). Semua ini telah merongrong kedudukan negara adikuasa dan dominasi Uni Soviet atas Eropa Tengah dan Timur.

Demikianlah perkembangan telah tamat. Faktor-faktor internasional bersama dengan proses-proses dalam negeri, terlambatnya percobaan pembaruan atau ketidakmauan-nya yang keras untuk melakukan pembaruan berakhir dengan keruntuhan komunisme Eropa Timur.

Reaksi Konservatif

Keruntuhan ini sungguh sangat serius karena di dalamnya mencakup penolakan menyeluruh terhadap sistem selama empat dasawarsa. Di Republik Demokrasi Jerman mayoritas absolut kelompok demokrat Kristen pada masa-masa pemilihan dan partisipasi bersama tidak lebih daripada sepertiga suara Sosial Demokrat mengacu pada penyatuan Jerman Barat, di samping pengganti yang berorientasi pembaruan dari partai pemerintah sebelumnya secara bersama benar-benar menunjukkan ini. Di Hongaria gambarannya bahkan lebih jelas, karena kekuatan-kekuatan menuntut tampilnya sosialisme dalam bentuk jenis sosial demokrat Barat, atau para pembaharu tradisional dengan prestasi historisnya dan segala macam kekuatan yang bagaimanapun dekat dengan ide-ide sosialis bersama tidak mampu mencapai lebih daripada hanya seperlima suara.

Nasionalisme Bulgaria anti-Turki yang kuat, kekerasan kaum nasionalis Rumania menghadapi minoritas orang Hongaria, fun-

damentalisme golongan Pamiaty Russia dan sikap anti-semitisme tak bertoleransi mereka yang menyebabkan pengungsian orang-orang Yahudi, kelompok-kelompok neo-nazi di Republik Demokrasi Jerman, emosi-emosi tertekan tetapi kadang-kadang meletus yang menyertai transformasi Hongaria, percobaan autoritatif populis baru yang menghasut merupakan semua isyarat yang memperingatkan.

Keinginan untuk menempatkan masa empatpuluh tahun yang lalu di antara tanda kurung, slogan-slogan untuk kembali ke tahun 1938, 1945, atau 1947, daya tarik Thatcherisme, dan keinginan yang naif terhadap kapitalisme pasar persaingan bebas gaya Amerika dengan hak milik pribadi menunjukkan bahwa pendulum -- sesuai dengan hukum alam dan politik -- telah berayun ke arah yang berlawanan.

Kemenangan jalan Kristen-nasional yang konservatif, kekalahan menyedihkan dari ajaran sosialis, kelompok-kelompok sosial demokrat, dan emosi-emosi antikomunis yang mencoba "menghapuskan masa lampau untuk selamanya" tampaknya akan mempunyai peranan historis dalam menyapkan secara radikal komunisme Eropa Timur.

Apa jenis proses-proses historis baru yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang, apa jenis tatanan sosial dan ekonomi baru maupun struktur politiknya akan dibangun di negara-negara Eropa Tengah dan Timur, dan apakah dapat sama sekali kita perhitungkan arah yang sama dari perkembangan di kawasan, barangkali hanya beberapa garis besar yang mungkin atau perpanjangan dari kecenderungan tertentu bisa menjawab. Dan sejarah ini yang justru baru mulai, untuk sekarang ini, adalah bagian dari masa depan.

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA

I. KERJASAMA EKONOMI ASEAN

A. Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN

B. KTT Business ASEAN

C. Konperensi Federasi Ikatan Sarjana
Ekonomi ASEAN

D. Kerjasama Industri, Mineral dan Energi

1. Sidang AFCM ke-14

2. Pertemuan Dewan AFTEX ke-12

E. Kerjasama Perdagangan dan Pariwisata

1. Zona Perdagangan Bebas

2. Kunjungan Wisatawan Manca Negara

3. Taman Nasional

4. Tahun Kunjungan Indonesia 1991

II. KERJASAMA NON-EKONOMI ASEAN

A. Kerjasama Kebudayaan dan Informasi

1. Kunjungan Wartawan ASEAN

ke Muangthai

2. Lokakarya dan Seminar Wartawan
ASEAN

3. Sidang Kelompok Kerja ASEAN-COCI

4. Festival Lagu-lagu ASEAN

5. Hadiah ASEAN bagi Wartawan,
Pelukis dan Pengarang

B. Lokakarya Strategi Penyusunan Hukum

C. Kerjasama Keamanan

1. Konperensi Keamanan Regional

2. Badan Keamanan Pasifik

III. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

A. Hubungan ASEAN-MEE

- Pertemuan ASEAN-ME

B. Usaha ASEAN Membantu Penyelesaian
Konflik Kamboja

1. Pertemuan Kelompok Kerja Konperensi
Internasional Paris tentang Kamboja
(PICC)

2. Pertemuan Lima Anggota Tetap DK-PBB

I. KERJASAMA EKONOMI ASEAN

A. PERTEMUAN MENTERI EKONOMI ASEAN

Pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-22 berlangsung di Jakarta tanggal 29 Oktober 1990 dan dilanjutkan di Denpasar tanggal 29-30 Oktober 1990 untuk membahas: (1) perkembangan dan kemajuan ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN di bidang keuangan dan perbankan, pertanian dan kehutanan, industri, mineral dan energi, transportasi dan komunikasi serta perdagangan dan pariwisata; (2) kerjasama ekonomi ASEAN dengan mitra dialognya dan organisasi internasional lainnya; (3) perdagangan multilateral yang berkaitan dengan Putaran Uruguay (*Angkatan Bersenjata*, 27-10-1990).

Kepala Biro Humas Departemen Perdagangan RI sekaligus Humas AEM, Suprpto Ranuatmojo mengatakan kepada Antara di Sanur tanggal 23 Oktober 1990 bahwa: (1) kerjasama ekonomi intra ASEAN melalui pola yang sudah ada seperti *ASEAN Preferential Trading Arrangements* (PTA), *ASEAN Industrial Project* (AIP) dan *ASEAN Industrial Complementation* (AIC), dewasa ini masih lamban dan kurang berkembang. Konsekuensinya ASEAN dapat ketinggalan kereta dari perkembangan ekonomi dunia; (2) kelambanan kerjasama ekonomi intra ASEAN disebabkan oleh pola perdagangan negara anggotanya yang terfokus pada negara-negara besar dan barang produksi yang tidak saling mengisi, bahkan menimbulkan kesan saling bersaing; (3) pola produksi yang sama jika menimbulkan persaingan maka pada gilirannya dapat menghambat kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN; (4) potensi untuk mengembangkan kerjasama ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya di ASEAN masih terbuka luas; (5) ASEAN perlu mencari inisiatif baru yang berani agar dapat mewujudkan kerjasama ekonomi yang kokoh; (6) sidang AEM ke-22 hendaknya dapat menjabarkan tekad yang telah dilontarkan dalam sidang AEM ke-21 di Brunei Darussalam tahun 1989, yakni mengembangkan gagasan-gagasan baru di bidang kerjasama ekonomi intra ASEAN, sehingga tujuan mewujudkan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi regional yang tangguh, kohesif dan maju segera dapat direalisasikan; (7) maju dan kokohnya kerjasama ASEAN akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masing-masing negara dan dapat memperkuat ketahanan regional kawasan ini (*Angkatan Bersenjata*, 27-10-1990).

Presiden Soeharto mengatakan pada pembukaan Sidang para Menteri Ekonomi ASEAN ke-22, di Istana Negara tanggal 29 Oktober 1990 bahwa: (1) ASEAN perlu meningkatkan berbagai usaha agar tercipta kerjasama ekonomi intra ASEAN yang lebih berarti dan efektif; (2) ASEAN perlu memikirkan cara-cara pendekatan baru, terutama di bidang perdagangan dan investasi; (3) ASEAN perlu memusatkan perhatian pada usaha industri patungan dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada; (4) kerjasama ASEAN di bidang investasi perlu terus disempurnakan agar dapat meningkatkan stabilitas ekonomi di kawasan ini; (5) ASEAN perlu mencari terobosan-terobosan baru dan meningkatkan usaha memperkuat kerjasama yang telah ada; (6) ASEAN perlu mencari kemungkinan kerjasama baru yang mampu mendorong dan mengembangkan kerjasama ASEAN; (7) para Menteri Ekonomi ASEAN perlu mempertimbangkan sungguh-sungguh gagasan mempercepat pelaksanaan preferensi perdagangan di atas kesepakatan bersama yang telah dicapai, serta menghapus hambatan non-tarif dan menyederhanakan tata cara pengaturan perdagangan preferensi; (8) kebijaksanaan untuk mendorong perdagangan dan investasi pada produk-produk industri tertentu melalui tarif efektif yang berlaku bersama-sama untuk ASEAN perlu diuji bersama; (9) bentuk kerjasama pertanian, kehutanan, keuangan dan pengangkutan yang lebih efektif perlu dipelajari bersama; (10) kegiatan penerangan perlu ditingkatkan agar para pengusaha semakin mengetahui berbagai peluang yang ada, sehingga dunia usaha ASEAN dapat memperoleh manfaat nyata dari preferensi perdagangan; (11) penelitian untuk memperkuat Sekretariat ASEAN perlu dimulai; (12) Sekretariat ASEAN hendaknya dapat memberikan pelayanan penyediaan data dan informasi, sehingga tugas para pejabat untuk merumuskan berbagai gagasan dan prakarsa baru dapat diperlancar; (13) Indonesia telah berusaha mendorong peningkatan investasi diberbagai proyek industri. Usaha ini diharapkan memperluas kesempatan pembangunan usaha-usaha swasta; (14) Indonesia menyambut gembira peran serta para pengusaha ASEAN dalam proyek-proyek di Indonesia; (15) semakin bertambah baiknya iklim ekonomi, dunia usaha akan memberikan peran serta yang lebih besar dalam kerjasama intra ASEAN (*Kompas*, 30-10-1990); (16) hubungan antara para pengusaha swasta ASEAN perlu terus dikembangkan, agar menghasilkan berbagai bentuk kerjasama baru, sesuai dengan tuntutan zaman yang sedang berubah secara dinamis; (17) kerjasama ekonomi antara anggota ASEAN diharapkan dapat

lebih meningkatkan sumbangannya pada pembangunan ekonomi dan kerjasama antar bangsa-bangsa di dunia, terutama kerjasama Selatan-Selatan dalam rangka mewujudkan Tata Ekonomi Internasional Baru yang lebih jujur, adil dan serasi; (18) berbagai usaha untuk mendorong kerjasama ekonomi intra ASEAN, seperti peningkatan hubungan ekonomi melalui penyempurnaan Pengaturan Perdagangan Preferensi dan usaha patungan industri ASEAN telah diadakan; (19) kerjasama ASEAN dengan mitra dialognya telah membawa manfaat yang penting bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN; (20) ketangguhan ASEAN terletak pada semangat yang berintikan kesatuan dan solidaritas anggota-anggotanya; (21) tidak sedikit masalah internasional, khususnya politik dan ekonomi, yang berhasil diselesaikan dengan memuaskan melalui semangat ASEAN; (22) kawasan Asia-Pasifik dewasa ini berhasil mempercepat kegiatan ekonominya, sehingga kekuatan ekonomi bergeser ke arah kawasan itu; (23) pertumbuhan ekonomi kawasan Asia-Pasifik berada di atas rata-rata dunia dan inflasi berada dalam tingkat yang relatif rendah, sedangkan investasi dan alih teknologi semakin meningkat; (24) kebijaksanaan perdagangan, industri dan keuangan yang didasarkan pada kekuatan pasar untuk efisiensi dalam alokasi sumber-sumber daya telah dijalankan oleh sebagian besar negara di kawasan ini; (25) arus investasi di kawasan Asia-Pasifik dalam tahun-tahun terakhir telah meningkat secara berarti; (26) saling ketergantungan dalam usaha-usaha secara sadar menuju ekonomi yang lebih terbuka pada sebagian besar wilayah Asia-Pasifik telah memperbesar peluang untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan itu; (27) ASEAN perlu menciptakan kerjasama yang lebih tepat dan lebih menarik di bidang perdagangan, investasi alih teknologi dan sumber daya manusia; (28) ASEAN berkepentingan untuk menemukan pelbagai cara yang dapat menghasilkan keterkaitan dan manfaat bersama yang nyata guna memecahkan pelbagai masalah yang dihadapi negara-negara Asia-Pasifik; (29) ASEAN telah diakui memegang peranan yang makin meningkat dalam pembangunan dan kerjasama internasional. Pengakuan ini seyogyanya dimanfaatkan oleh ASEAN untuk mendorong pelaksanaan perdagangan yang terbuka, jujur dan adil; (30) ASEAN perlu mendukung sepenuhnya dan berusaha dengan berbagai cara untuk menyukseskan Putaran Uruguay, sehingga pembangunan ekonomi dunia akan didorong oleh sistem perdagangan internasional yang bebas dari segala hambatan (*Angkatan Bersenjata*, 30 Oktober 1990).

Menteri Perdagangan RI, Arifin Siregar, mengatakan kepada pers di Istana Negara Jakarta se usai pem-

bukaan sidang AEM itu bahwa: (1) perkembangan Batam-Singapura-Johor atau segitiga pertumbuhan merupakan bentuk kerjasama ASEAN, meskipun tidak semua negara anggota terlibat, tetapi dapat diterapkan dan tidak perlu semua negara anggota ASEAN menyetujui; (2) dalam kerjasama intra ASEAN masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, karenanya perlu dipelajari cara-cara untuk meningkatkan kerjasama itu; (3) Indonesia ingin mengkonsultasikan cara-cara baru untuk meningkatkan kerjasama intra ASEAN guna menghadapi negara-negara atau pihak ketiga seperti Bank Dunia dan sebagainya; (4) belum pasti banyak suara yang setuju untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pada akhir 1991, sebab masih diperlukan persiapan yang matang, khususnya dalam bidang ekonomi; (5) KTT ASEAN merupakan salah satu dorongan bagi para menteri dan pejabat negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan dan memperbaiki kerjasama yang telah ada (*Angkatan Bersenjata*, 30-10-1990).

Menteri Kehutanan RI, Hasjru Harahap, mengatakan kepada pers di Denpasar se usai penutupan sidang AEM hari pertama tanggal 29 Oktober 1990, bahwa: (1) jika dikaji lebih mendalam, maka sesungguhnya negara-negara industri yang menjadi sumber polusi utama selama ini, tetapi opini publik telah diarahkan untuk kepentingan negara-negara pengimpor kayu saja dengan tanpa melihat sisi dan kepentingan negara-negara pengekspor; (2) jika MEE mau mendengar suara Parlemennya saja untuk memboikot impor kayu tropis, maka Indonesia bersama ASEAN akan mengkonternya; (3) ASEAN telah sepakat untuk menjawab aksi Parlemen Eropa yang menganjurkan kepada pemerintahnya agar tidak mengimpor kayu dari Serawak, oleh sebab itu wajar bila ASEAN dan Indonesia khususnya, melakukan reaksi untuk hal yang sama; (4) ASEAN mendukung sikap Indonesia itu, karena kepentingan yang dilihat bukan masalah antar negara lagi, tetapi adalah sistem perdagangan internasional; (5) Indonesia tidak akan terkena dampak dari tindakan itu yang berupa menurunnya investasi dari MEE, sebab Jepang, Uni Soviet dan RRC sudah siap untuk masuk.

Pada saat yang sama, Menteri Perdagangan Arifin Siregar mengatakan kepada pers bahwa: (1) kampanye anti kayu tropis sedang gencar dilancarkan di seluruh dunia, khususnya oleh negara-negara MEE; (2) ASEAN telah sepakat untuk mengkonter isu anti kayu tropis, untuk itu pada tahap awal akan diadakan negosiasi antar negara-negara ASEAN; (3) polusi yang dibuat oleh negara-negara industri itu sayangnya tidak mendapat

tempat dalam pemberitaan pers internasional, termasuk pers Indonesia sendiri; (4) dunia usaha banyak memberi masukan dan bahkan keluhan akibat birokrasi yang berlebihan yang telah menghambat kelancaran dunia usaha; (5) pemerintah negara anggota ASEAN akan mempelajari secara serius keluhan itu untuk dicarikan jalan keluar yang baik sehingga semua kepentingan, baik pemerintah maupun swasta tidak terganggu; (6) kendala birokrasi memang benar ada dan perlu dicarikan cara yang tepat untuk mengatasinya.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Sotion Ardjanggi, yang merangkap Wakil Presiden ASEAN-CCI mengatakan bahwa: (1) dalam merintis usaha-usaha perdagangan antar dunia usaha atau swasta, hambatan-hambatan banyak bermuara pada aturan-aturan yang kaku dari pihak pemerintah; (2) banyak keputusan-keputusan antar dunia usaha yang telah disepakati namun dalam operasionalnya banyak ditemui batu sandungan akibat aturan pemerintah dan birokrasi (*Suara Karya*, 30-10-1990).

Keputusan yang dihasilkan antara lain: (1) ASEAN akan melipatgandakan usahanya untuk meningkatkan kerjasama intra ASEAN dengan menerapkan serangkaian kebijaksanaan baru di bidang perdagangan, kerjasama industri dan investasi; (2) ASEAN menilai Segitiga Pertumbuhan Batam-Johor-Singapura dapat dijadikan model yang bermanfaat untuk memperkuat kerjasama, sekaligus mendorong perekonomian di kawasan; (3) ASEAN sangat prihatin terhadap hasil yang dicapai Perundingan Perdagangan Multilateral (MTN) Putaran Uruguay dan sekaligus mendesak negara-negara lain berbuat maksimal seperti yang dilakukan ASEAN demi keberhasilan Putaran Uruguay; (4) para Menteri Ekonomi ASEAN puas atas usaha melawan kampanye anti kayu lapis yang dilakukan oleh para Menteri Kehutanan ASEAN ke negara-negara MEE pertengahan bulan Oktober 1990. Misi serupa akan dilaksanakan pula ke negara-negara maju lainnya, termasuk dilakukannya serangkaian ikhtiar bersama ASEAN di setiap perundingan di bidang kehutanan; (5) mereka akan mengkaji kembali kerjasama ekonomi intra ASEAN yang dihadapkan pada perubahan politik dan ekonomi yang berkembang, baik di dalam maupun di luar kawasan ini, sebab berbagai perubahan dan perkembangan itu merupakan tantangan dan sekaligus kesempatan bagi masa depan ASEAN; (6) dunia swasta agar meningkatkan peran sertanya dalam bidang yang dilakukan di berbagai kesempatan; (7) persatuan ASEAN dalam APEC sangat penting dan diharapkan agar APEC melapangkan jalan bagi terciptanya perda-

gangan global serta tidak menjadi blok perdagangan tersendiri; (8) ASEAN prihatin atas berlanjutnya subsidi hasil pertanian di negara maju, karena subsidi itu akan mengurangi ekspor negara berkembang, termasuk ASEAN; (9) mereka menyambut gembira meningkatnya penggunaan mata uang negara ASEAN dalam perdagangan intra ASEAN, dan diharapkan angin segar ini juga berlangsung di bidang kerjasama perpajakan, manajemen keuangan dan moneter, serta pengembangan pasar modal dan BUMN. Di samping itu mereka sepakat untuk: (1) meningkatkan arus perdagangan dengan diterapkannya konsep tarif preferensi efektif yang sama terhadap sejumlah produk industri terpilih. Tero-bosan baru ini akan melapangkan jalan bagi arus barang intra ASEAN, sebab sejumlah komoditi industri yang belum ditentukan jumlah jenisnya akan mendapatkan potongan tarif bea masuk, bahkan tidak mustahil bea masuknya akan dihapuskan; (2) memperbarui program kerjasama patungan di bidang industri (AIJV) sehingga lebih atraktif bagi investasi di luar ASEAN dengan cara memperpanjang kesempatan bagi investor dari luar ASEAN untuk ikut serta dalam AIJV sampai akhir tahun 1993; (3) menerapkan tarif preferensi efektif yang sama pada barang-barang yang dihasilkan AIJV; (4) menghapuskan persyaratan minimum 5% dari modal yang ditanamkan negara ASEAN dalam proyek AIJV, namun sekurang-kurangnya harus ada dua negara ASEAN yang ikut serta, dan setelah proyek beroperasi komersial selama 4 tahun modalnya minimal 40%; (5) memperpanjang perlakuan khusus berupa pemotongan tarif bagi barang-barang yang dihasilkan AIJV. Hasil keputusan ini akan dinikmati oleh negara peserta AIJV; (6) memperpanjang persetujuan pemotongan tarif sebagaimana diatur dalam PTA yang akan berakhir 1992 menjadi tahun 1999; (7) memperluas PTA yang mencakup berbagai komoditi lainnya yang diharapkan akan meliputi peninjauan kembali terhadap potongan tarif (MOP atau *Margin of Preference*) bagi berbagai komoditi menjadi 75%, sedangkan bagi komoditi baru yang kelak dimasukkan dalam daftar PTA akan menikmati MOP 50% dari tarif normal yang berlaku sekarang ini. Dengan PTA baru ini, dari 15.000 jenis komoditi ASEAN yang masuk dalam daftar PTA yang menikmati MOP bervariasi antara 25% dan 50% akan naik menjadi 75%, sehingga perdagangan intra ASEAN akan meningkat dan harganya lebih bersaing dibandingkan dengan barang serupa dari luar ASEAN; (8) mengurangi persentase asal bahan baku kandungan ASEAN dari 50% menjadi 35% terhadap 21 jenis produk kimia, dan Indonesia ditetapkan 42% bagi produk kimia sejenis.

Pada akhir sidang para Menteri menandatangani beberapa protokol antara lain: (1) persetujuan tambahan mengenai proyek pertambangan potasium ASEAN yang berupa proyek patungan berkapasitas 1 juta ton potasium chlorida yang berlokasi di Muangthai dengan biaya investasi US\$289 juta; (2) persetujuan dasar mengenai *ASEAN Industrial Joint Venture* (AIJV) (*Kompas*, 31-10-1990).

Menteri Perdagangan RI, Arifin M. Siregar mengatakan kepada pers se usai sidang, bahwa: (1) gagasan untuk membentuk "Pasar Bersama ASEAN" tidak pernah terpikirkan dalam sidang Menteri Ekonomi ASEAN di Bali; (2) ASEAN tidak berkeinginan untuk membentuk suatu blok perdagangan seperti MEE, walaupun kalangan MEE sendiri berulang kali menegaskan bahwa Pasar Tunggal itu tidak menjurus kepada "Benteng Eropa"; (3) para pejabat teras ASEAN hanya memfokuskan perhatian pada peningkatan kerjasama intra ASEAN untuk menghadapi pihak ketiga, baik dalam rangka Uruguay Round (Putaran Uruguay) maupun dengan MEE dan AS; (4) ASEAN belum mengetahui dengan seksama, apakah Pasar Tunggal itu akan menjurus kepada perlindungan pasar atau proteksionisme; (5) cara terbaik untuk mewujudkan daya saing adalah dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada mitra usaha dalam arti yang luas apabila Pasar Tunggal Eropa itu dibentuk (tahun 1992); (6) ASEAN harus berkonsentrasi untuk menggalang kekuatan ke dalam, karena hubungannya dengan negara-negara non-ASEAN sendiri telah berjalan sangat mulus; (7) kerjasama ekonomi antara ASEAN sejauh menyangkut hubungan dengan negara-negara di luar ASEAN sangat baik dan sukses, tetapi hubungan intra ASEAN sendiri yang justru perlu dicarikan pola dan cara-cara baru untuk meningkatkan kerjasamanya; (8) dalam sidang tertutup Indonesia mengusulkan perlunya diterapkan "common tariff" atau tarif bersama dalam rangka peningkatan kerjasama ASEAN dan telah disetujui, sehingga pada masa-masa mendatang hasilnya telah dapat dirasakan; (9) selama ini ASEAN mentolerir mitra non-ASEAN tentang prinsip *joint venture* yakni dalam pembagian saham (*equity share*) 60% maksimum untuk non-ASEAN dan 40% untuk negara-negara ASEAN pemilik proyek; (10) komitmen kepada AIJV untuk memberikan toleransi sampai 60% kepada pihak swasta non-ASEAN yang sebenarnya harus berakhir 31 Desember 1990 diperpanjang sampai 31 Desember 1993 guna memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada investor non-ASEAN, terutama pihak MEE untuk menjadi partner ASEAN melalui AIJV (*Suara Karya*, 31-10-1990).

Sementara itu, Menteri Perindustrian Ir. Hartarto mengatakan kepada pers di Denpasar tanggal 30 Oktober 1990 bahwa: (1) salah satu keputusan para Menteri Ekonomi ASEAN yang sangat strategis adalah kesepakatan untuk menetapkan bea masuk yang sama untuk beberapa barang hasil industri di kawasan ASEAN; (2) keputusan ini selain untuk memperlancar arus barang secara bebas di kawasan ini, juga akan meningkatkan perdagangan dan investasi di kalangan negara-negara anggota ASEAN; (3) hasil kesepakatan ini menunjukkan kedewasaan ASEAN, karena selain merupakan hal yang telah lama diperjuangkan dan diperdebatkan juga sangat fundamental; (4) pengarahannya Presiden Soeharto dalam sidang pembukaan di Jakarta telah digunakan sebagai acuan penting dalam pembahasan sidang AEM; (5) dua hal pokok yang didiskusikan secara mendalam adalah Putaran Uruguay dan tatacara serta usaha yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di kalangan ASEAN agar perkembangan ekonominya meningkat; (6) ASEAN sepakat untuk terus bekerjasama agar cita-cita Putaran Uruguay dapat dijalankan dengan baik; (7) ASEAN berharap negara-negara lain dapat melaksanakan kerjasama serupa agar peningkatan ekonomi dunia dapat dicapai dengan baik; (8) Putaran Uruguay dianggap suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi semua negara di dunia melalui aktivitas perdagangan; (9) ASEAN memandang pelaksanaan keputusan dari Putaran Uruguay sangat lambat dan menghadapi suatu krisis, karena itu semua negara agar bekerjasama untuk mensukseskan sidang yang dilaksanakan bulan Desember 1990 (*Suara Pembaruan*, 2-11-1990).

Wakil Sekretaris FKP DPR-RI bidang Polkam, Marzuki Darusman, mengatakan kepada Suara Pembaruan bahwa: (1) KTT ASEAN yang direncanakan terselenggara akhir tahun 1991 diharapkan dapat melahirkan wawasan yang lebih luas untuk menciptakan keamanan baru guna menunjang peningkatan perekonomian di Asia Tenggara; (2) terciptanya keamanan baru sangat penting bagi ASEAN, khususnya untuk menjamin kelancaran upaya peningkatan investasi, perdagangan dan ekonomi; (3) selama ini ekonomi ASEAN berkembang dalam suasana keamanan yang dijamin oleh kehadiran Amerika Serikat di kawasan ini. Pertanyaan timbul jika AS tidak berkepentingan lagi berada di sini, apakah Jepang yang menggantikan kedudukan itu atau India dengan kekuatan barunya?; (4) kerjasama keamanan ASEAN hendaknya mencakup semua hal yang memberikan wawasan lebih luas daripada sekedar keamanan di bidang militer; (5) KTT diharapkan mampu mengambil langkah politik untuk mendorong proses

pembentukan identitas ASEAN, karena identitas ASEAN sangat penting untuk meningkatkan rasa solidaritas di kalangan negara anggotanya agar dapat maju bersama, khususnya di bidang ekonomi; (6) untuk membangun identitas ASEAN diperlukan penelitian sejarah mengenai negara-negara yang tergabung dalam wadah regional tersebut; (7) ASEAN harus mampu merumuskan konsep hak-hak azasi, karena selama ini ASEAN dinilai defensif sekali terhadap hal itu; (8) di bidang politik, ASEAN dapat melakukan kerjasama dan perbandingan sistem parlemen serta menyerasikan prinsip-prinsip hukum; (9) membuat prinsip-prinsip hukum merupakan tantangan ASEAN untuk mendekatkan pandangan atas masing-masing sistem nasional yang ada agar terjadi faktor perekat di bidang hukum (*Suara Pembaruan*, 3-11-1990).

Direktur Eksekutif Institut Manajemen Prasetya Mulya, Dr. Djisman S. Simandjuntak, mengatakan bahwa: (1) integrasi ekonomi ASEAN sebenarnya telah terjadi pada dua jalur di luar ASEAN, yakni melalui: (a) liberalisasi di masing-masing negara, seperti penurunan tarif bea masuk, merombak tata niaga yang telah dilakukan Singapura dan diikuti Indonesia serta Malaysia, sedangkan Muangthai sekarang juga telah melakukannya sampai tingkat tertentu, namun Filipina masih tersendat-sendat karena situasi politiknya; (b) faktor Jepang yang menganut pola produksi komponen demi komponen. Akibatnya produksi ASEAN terintegrasi dengan sendirinya, karena untuk menghasilkan barang jadi tertentu ada sebagian komponen yang dibuat di Malaysia, sebagian di Muangthai, sebagian lagi di Singapura dan seterusnya; (2) meskipun konsep full manufacturing telah ketinggalan zaman dalam era globalisasi, tetapi justru memberikan momentum untuk membina kerjasama ekonomi ASEAN yang lebih maju dalam arti membuka pasar domestik; (3) langkah-langkah yang diusulkan AEM itu memang perlu dilakukan untuk memperkuat skema-skema yang telah ada; (4) sekarang ini yang diperlukan ASEAN adalah visi, sebab visi yang jelas tentang kerjasama negara-negara Asia Tenggara ini sampai sekarang belum ada; (5) proses liberalisasi deregulasi itu berlaku umum dalam arti tidak hanya ditujukan pada sesama negara anggota ASEAN; (6) perdagangan bebas secara multilateral tetap lebih baik daripada di dalam blok; (7) pada prinsipnya, jika ASEAN mau survive dalam persaingan global, ASEAN harus melepaskan sisa-sisa tataniaga dan program lokalisasi yang tidak realistis; (8) untuk Indonesia yang masih kurang adalah program kebijakan perdagangan (*trade policy*) yang jelas dan

transparan. Indonesia telah melakukan berbagai deregulasi dan reformasi perdagangan, tetapi tidak ada *trade policy* yang transparan dalam arti diketahui orang; (9) pola interdependensi perdagangan dunia telah bergeser dari vertikal menjadi horisontal, dan kebanyakan barang yang diperdagangkan adalah komponen serta barang setengah jadi dan bukan lagi barang mentah dan barang jadi; (10) perdagangan sekarang ini menjadi agak kebal terhadap proteksi sebab impor komponen tidak dapat dilarang karena dapat mematikan industri dalam negeri sendiri; (11) policy maupun mekanisme perdagangan yang bebas dan transparan sangat penting dalam persaingan di pasar dunia yang semakin ketat; (12) suatu forum kebijakan perdagangan yang bertugas melakukan evaluasi dan merancang kebijakan perdagangan Indonesia perlu didirikan.

Pada saat yang sama, Prof. Dr. M. Sadli mengatakan bahwa: (1) sejak tahun 1987 Indonesia menempuh serangkaian deregulasi, berbarengan dengan liberalisasi ekonomi yang dilakukan di negara-negara anggota ASEAN lainnya, sehingga boom ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN justru memantapkan momentum itu; (2) munculnya blok-blok perdagangan di Eropa Barat dan Amerika Utara ditambah dengan kerjasama ekonomi Asia-Pasifik (APEC) mendorong ASEAN untuk tampil; (3) Indonesia tidak takut lagi bersaing dengan produk Malaysia dan Muangthai, bahkan produk Indonesia telah laku dijual di Singapura; (4) kalangan resmi di Jakarta tidak lagi apriori dan menolak gagasan dan tujuan jangka panjang kerjasama ekonomi ASEAN, termasuk integrasi pasarnya, misalnya pengembangan segi tiga Singapura-Johor-Batam; (5) kerjasama ekonomi ASEAN relatif sulit, karena nasionalisme ekonomi sejumlah negara anggotanya masih tebal untuk melindungi produksi dalam negerinya dan Sekretariat Jenderal belum kuat serta belum ada yang mampu menjadi juru bicara ASEAN; (6) Menteri ekonomi Indonesia di kalangan ASEAN pernah dijuluki sebagai Mr. NO, tetapi setelah pertemuan AEM ke-22 di Bali itu Indonesia dijuluki sebagai Mr. GO, karena Indonesia mendukung kuat hasrat untuk maju secara *bold* dan *innovative* antara lain dengan niengganti pendekatan proteksi dengan sistem bea masuk yang realistis. Dari sisi kemampuan industri, Indonesia memang pantas dijuluki Mr. GO; (7) perubahan sikap Indonesia menunjukkan industri di Indonesia bukan lagi *infant industries* yang perlu dilindungi begitu ketat; (8) inisiatif Hartarto yang meminta penyesuaian bea masuk semen, kapal dan pulp di empat negara anggota ASEAN (kecuali Singapura dan Brunei Darussa-

lam yang terbilang rendah) paling tinggi 15% mencerminkan bahwa tingkat efisiensi industri di dalam negeri telah lebih baik; (9) Indonesia yang tingkat upah buruhnya lebih murah kini justru merasa lebih siap bersaing dengan Malaysia dan Muangthai; (10) kesepakatan yang dicapai para Menteri Ekonomi ASEAN di Bali masih menjadi pertanyaan untuk dapat direalisasikan; (11) kesepakatan itu jangan sampai seperti hasil KTT Manila 1987, kendati telah disepakati oleh para kepala negara beserta para menteri tak kunjung terlaksana di lapangan akibat para pejabat eselon di bawah menteri tidak menemukan kesepakatan (*Kompas*, 5-11-1990).

KTT BUSINESS ASEAN

Direktur Pusat Data Business Indonesia (PDBI), Drs. Christianto Wibisono mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 30 Oktober 1990 bahwa: (1) setelah diwujudkannya segi tiga Batam-Johor-Singapura, peran Indonesia dalam kerjasama intra ASEAN sangat tergantung dari kebijaksanaan perdagangan Indonesia sendiri; (2) jika perdagangan Indonesia masuk dalam pasar global, maka ekspor yang selama ini separuhnya melalui Singapura dapat langsung ke negara tujuan; (3) posisi Singapura bagi ASEAN sangat penting, karena di samping kemampuan keuangan, negara ini memiliki jalur penerbangan yang terbesar di ASEAN; (4) meskipun perdagangan internasional memasuki pasar global, ASEAN tetap memerlukan Singapura sebagai negara penghubung; (5) Singapura akan berkembang menjadi negara teknologi dan pusat keuangan; (6) KTT Business ASEAN ke-1 yang diselenggarakan di Singapura adalah untuk memantau lalu-lintas moneter yang berkiblat dan berkisar pada dana ACU atau *ASEAN Currency Unit* di negara itu dan kesiapan Indonesia untuk mendaur ulang dana ACU dan membahas bentuk konkret kerjasama ASEAN yang telah berlangsung; (7) PDBI akan menyampaikan makalah tentang Profil dan Anatomi Konglomerat ASEAN. Hal ini merupakan tindak lanjut dari seruan Presiden mengenai perlunya peningkatan kerjasama intra ASEAN dalam program yang lebih konkret tanpa menunggu kesepakatan birokratisasi seperti pasar bersama ASEAN, PTA dan berbagai prosedur administratif; (8) meskipun kerjasama ASEAN pada tingkat birokrasi baru dirasakan dalam bentuk rekomendasi dan risalah rumusan sidang, tetapi pada tingkat operasional bisnis telah terjadi transaksi dan interaksi lintas batas intra ASEAN serta antar berbagai kekuatan bisnis swasta secara aktif dan dinamis; (9) 5

perusahaan milik Indonesia telah masuk dalam daftar 1.000 perusahaan top di Singapura, beberapa perusahaan lagi masuk dalam 500 perusahaan top di Muangthai dan top 1.000 di Filipina; (10) mereka bersama dengan perusahaan top ASEAN lainnya telah melakukan *acqui*si dan investasi lintas batas intra ASEAN (*Suara Karya*, 31-10-1990).

KTT Business ASEAN ke-1 berlangsung di Singapura tanggal 16 November 1990, dihadiri oleh 75 orang peserta dari ASEAN, Jepang, Amerika Serikat dan Hongkong untuk membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan manajemen, perdagangan teknologi dan *ASEAN Currency Unit* (ACU).

Direktur PDBI Christianto Wibisono mengatakan pada seminar itu bahwa: (1) runtuhnya sistem komunisme dunia yang mengakhiri era perang dingin selama 45 tahun antara AS dan Uni Soviet telah menimbulkan proses deideologisasi dalam masyarakat dunia; (2) pada dekade 1990-an sekarang ini, kehidupan masyarakat internasional akan diwarnai oleh tumbuhnya kekuatan baru yang berorientasi pada ekonomi; (3) jaringan kekuatan baru yang disebut *Triad Power* adalah AS, Jepang dan Eropa Barat merupakan kekuatan terpadu "super power baru", yang akan mendominasi konflik versi baru antara Utara dan Selatan; (4) *triad power* cenderung membela kepentingan ekonomi masyarakat kaya berkulit putih dari Utara dan mengabaikan masyarakat miskin yang bukan kulit putih dari Selatan; (5) kekuatan Selatan masih terpecah dan tidak dapat bersatu serta miskin, karena dibebani perasaan primordialisme; (6) majalah *Institutional Investor* tahun 1983 mencatat 12 orang terkaya di dunia dan separuhnya berasal dari ASEAN, 5 dari Timur Tengah serta hanya 1 dari negara maju kapitalis. Majalah *Forbes*, dan *Fortune* 1987 masing-masing mencatat daftar yang berbeda mengenai 100 orang terkaya di dunia, tetapi tetap tokoh ASEAN yang terkemuka, Fortune menempatkan Sultan Brunei sebagai orang terkaya di dunia dan empat orang berikutnya juga berasal dari ASEAN. Secara demikian tidak meragukan lagi bahwa warga ASEAN mengungguli semua orang terkaya di Utara; (7) ASEAN sebagai grup bangsa-bangsa mempunyai kapabilitas untuk mengangkat masyarakatnya dan menciptakan persamaan dengan masyarakat dunia lainnya untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik di masa mendatang; (8) ASEAN relatif berlimpah sumber alamnya dan dinamis sumber daya manusianya; (9) gabungan GNP ASEAN memang masih pada peringkat ke-13 dibanding negara-negara di dunia, tetapi NICs (Korea Selatan, Hongkong

dan Taiwan) telah melihat potensi ASEAN dan investasi mereka di ASEAN mencapai 61% dari total investasinya di Asia; (10) total investasi ASEAN tahun 1989 meningkat 23% dari tahun 1988, menjadi US\$4,4 milyar, dan investasi Jepang di kawasan ini meningkat 48% menjadi US\$1,9 milyar pada periode yang sama; (11) sejak Singapura bertekad menjadi pusat keuangan *Off Shore* dunia dan pada tahun 1988 menciptakan ACU seperti ECU di Eropa, maka pada tahun 1990 volume Asia dolar di ACU meningkat 80 kali menjadi US\$2,5 milyar atau 1,5 kali gabungan GNP ASEAN dan 25% dari volume ECU yang telah lama operasinya; (12) masyarakat ASEAN mampu penciptaan dananya sendiri dan menginvestasi kembali wilayahnya; (13) potensi-potensi ASEAN ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat ASEAN sendiri. Beberapa pengusaha ASEAN telah melihatnya dan tidak menunggu keputusan pemerintah negara anggota ASEAN yang memakan waktu lama untuk menciptakan kerangka kerjasama ekonomi; (14) para pengusaha telah melakukan usaha patungan dan merger serta membuka perwakilan atau kantor cabang secara lintas batas di seluruh kawasan. Banyak pembentukan konglomerat-konglomerat di ASEAN yang bersifat lintas perusahaan besar, menengah dan kecil, secara bersama-sama bersaing dengan perusahaan global dari lain negara; (15) landasan kerjasama telah ada dan potensi tidak diragukan lagi bagi ASEAN untuk mengimbangi dominasi *triad power* untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik; (16) ASEAN memerlukan pemimpin-pemimpin yang bertekad mendidik kembali dan mengubah hati masyarakatnya dari beban primordialisme dan nasionalisme etnis ke semangat nasionalisme modern yang rasionalistik; (17) jika asimilasi dan integrasi masyarakat Cina di Indonesia dan tingkat ASEAN dapat diterima sebagai alternatif terbaik, maka ASEAN dapat menjadi kekuatan ekonomi riil bagi kemakmuran masyarakat di kawasannya, tanpa harus konfrontasi dengan *triad power* (*Suara Pembaruan*, 19-11-1990).

Prof.Dr. Juwono Sudarsono, Dekan Fisipol UI dan moderator seminar mengatakan bahwa: (1) Indonesia agak lambat memulai pembangunannya, lemah dalam kemampuan berorganisasi, sedikit sekali tenaga terdidik dalam bidang ekonomi dan teknologi dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya; (2) pada tahap sekarang, semakin meningkatnya pembangunan ekonomi di Indonesia justru semakin lemah kontrol pemerintah dan semakin tidak jelas arah pembangunan selain hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan. Indone-

sia memerlukan ramuan yang tepat antara keterbukaan dan kontrol.

Prof. Kunio Yoshihara dari Tokyo University Jepang mengatakan bahwa: (1) Indonesia telah lebih dulu mempunyai organisasi bisnis modern dibanding Jepang dan negara ASEAN lainnya; (2) Oei Tiong Ham Co. di Semarang tahun 1920-an telah memanfaatkan manajer profesional untuk mengembangkan bisnisnya; (3) pengusaha ASEAN tidak dapat lebih jauh dari Oei Tiong Ham, dan tertinggal jauh dari pengusaha di negara industri; (4) dunia usaha baru dapat berkembang besar bila menguasai kapitalisme industri atau kemampuan manufacturing yang bersumber pada kemampuan teknologi; (5) para pengusaha ASEAN lebih berorientasi sebagai pedagang atau kasir dengan memutar uang ke kanan dan ke kiri, sedangkan bila ada pabrik modern pengelolanya diserahkan pada tenaga profesional dari negara lain seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan (*Suara Pembaruan*, 19-11-1990).

Sementara itu, Dr. Anwar Nasution mengatakan bahwa: (1) pengusaha Indonesia perlu memanfaatkan dana *ASEAN Currency Unit* yang jumlahnya cukup besar di tengah ketatnya likuiditas saat ini; (2) dana yang dihimpun melalui ACU sangat besar dan dapat dijadikan alternatif sumberdaya; (3) hingga kini masih banyak pengusaha Indonesia yang belum mengetahui fasilitas ini, padahal persyaratan yang ditetapkan tidak terlalu ketat dan bunganya rendah; (4) hingga kini dana ACU baru dimanfaatkan oleh pengusaha besar saja, karena mereka sudah lengkap; (5) bila pengusaha Indonesia ingin memanfaatkan dana ACU yang perlu diutamakan adalah soal informasi dan ketertiban administrasi, seperti laporan keuangan atau akuntannya dapat dipercaya (*Bisnis Indonesia*, 17-11-1990).

Seminar menyimpulkan antara lain: (1) negara-negara anggota ASEAN harus memanfaatkan ketajaman bisnis untuk memperoleh akses teknologi melalui pasar dan pengembangan ekspor; (2) ASEAN sangat berkepentingan untuk memperhatikan masalah politik dan sosial, karena hal ini mempengaruhi kesanggupan ASEAN untuk mempertahankan kelangsungan hidup bersama (*Bisnis Indonesia*, 17-11-1990).

C. KONPERENSI FEDERASI IKATAN SARJANA EKONOMI ASEAN

Konperensi Federasi Ikatan Sarjana Ekonomi ASEAN ke-15 berlangsung di Singapura tanggal 15-17

November 1990 untuk membahas masalah pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di ASEAN serta meninjau perekonomian ASEAN, baik prospek maupun permasalahan yang dihadapi.

Deputi Direktur Institute of Policy Studies Singapura, Dr. Lee Tsao Yuan, mengatakan pada pertemuan itu bahwa: (1) ASEAN merupakan kawasan yang paling menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, khususnya Indonesia, Malaysia, Singapura dan Muangthai yang telah dapat mempertahankannya dalam waktu cukup lama, sehingga keempat negara itu tidak ragu lagi bersama-sama menjadi negara industri baru seperti Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan; (2) Filipina mengalami berbagai kemalangan, termasuk akibat krisis Teluk yang memaksa tenaga kerja negara itu harus pulang ke negerinya sehingga mengurangi pendapatan devisa; (3) kesuksesan keempat negara itu bersumber pada faktor yang sama yakni: (a) mengalami boom ekonomi karena memacu ekspor industri; (b) masuknya modal asing yang besar; (c) deregulasi ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing di pasaran internasional; (d) kondisi internasional yang mendukung strategi pembangunannya; (e) negara industri mampu mengimpor banyak produk dan jasa ASEAN, karena mengalami pertumbuhan ekonomi yang panjang, sehingga proteksionisme bukan merupakan persoalan; (f) revaluasi (peningkatan nilai) mata uang dari negara industri baru dan Jepang, mengakibatkan ekspor mereka menjadi mahal dan memaksa mereka untuk memindahkan kegiatan produksinya serta dananya ke ASEAN; (4) tantangan konkret dari lingkungan internasional yang dihadapi ASEAN adalah: (a) krisis Teluk yang telah mempercepat pertumbuhan inflasi; (b) penurunan pertumbuhan ekonomi di banyak negara industri mengancam ekspor ASEAN yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi mereka; (5) saat ini perdagangan regional antar ASEAN menjadi semakin penting; (6) perundingan perdagangan di GATT yang akan mengakhiri Putaran Uruguay, ternyata mengalami keseretan yang berat; (7) negara-negara ASEAN harus dapat meningkatkan daya saingnya agar dapat tetap menembus pasaran dunia, karena proteksionisme semakin kuat; (8) pembaruan politik dan sosial di Eropa Timur akan menimbulkan pesaing baru bagi barang-barang ASEAN di pasaran dunia, meskipun mereka membutuhkan waktu yang lama untuk mengungguli ASEAN. Negara-negara Eropa Timur akan menjadi pesaing ASEAN, dalam arti sumber dana internasional akan banyak mengalir ke Eropa Timur, sehingga nilai dana dapat semakin mahal bagi pinjaman-pinjaman un-

tuk investasi di ASEAN; (9) persatuan Pasar Eropa 1992 akan mengancam ekspor ASEAN di bidang-bidang yang sensitif bagi Eropa, seperti kendaraan bermotor, tekstil, pakaian jadi dan sepatu; (10) Indonesia mengalami kemakmuran, tetapi berdiri di atas yang rapuh. Indonesia juga akan menghadapi masalah sosial akibat ketimpangan antar kelompok dan geografis; (11) Singapura akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dalam lima tahun mendatang, karena harga minyak yang tinggi dan kurangnya tenaga kerja; (12) Muangthai akan mengalami kesulitan dengan infrastruktur yang padat, serta akan macet akibat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan ketimpangan ekonomi secara regional yang sangat terkonsentrasi di Bangkok serta kurang efisien di sektor perpajakan untuk pendapatan negara; (13) Filipina saat ini yang mengalami krisis ekonomi bertubi-tubi, nasibnya sangat ditentukan oleh cepat tidaknya penyelesaian krisis Teluk; (14) hanya Malaysia yang masih mempunyai prospek yang baik; (15) dalam jangka menengah negara-negara anggota ASEAN tetap mempunyai prospek yang baik; (16) orientasi ekspor dan deregulasi sebagai strategi utama ASEAN dan yang selama ini menjadi kunci keberhasilan harus tetap dilanjutkan (*Suara Pembaruan*, 17-11-1990).

Prof. Dr. Boediono, Deputi Ketua Bappenas RI, mengatakan bahwa: (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 20 tahun di Indonesia telah diikuti oleh pengurangan kemiskinan absolut, tetapi belum pada ketimpangan pendapatan; (2) jumlah orang miskin absolut berkurang 24,2 juta orang selama 20 tahun, yakni dari 54,2 juta orang pada tahun 1966 menjadi 30 juta orang tahun 1987, namun masalah ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan tidak kaya tampak agak lambat perbaikannya; (3) ketimpangan pendapatan di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh perbedaan pendapatan regional; (4) ditinjau secara sektoral pengurangan kemiskinan yang paling banyak terdapat pada sektor pertanian, pertambangan, transportasi dan konstruksi; (5) sektor industri pengolahan mengalami paling sedikit pengurangan kemiskinan karena penyebaran pabrik-pabrik yang kurang merata, dan hal ini yang menjadi sumber ketimpangan ekonomi; (6) peranan Pulau Jawa dalam output dan kesempatan kerja di sektor industri mulai menurun dibanding dengan wilayah lainnya; (7) pengurangan ketimpangan pendapatan hanya terjadi melalui perpindahan penduduk dari sektor pertanian ke sektor industri dan perpindahan dari desa ke kota, tetapi urbanisasi menambah ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan; (8) orang sulit mendapatkan pening-

katan pendapatan secara riil, kalau tidak pindah pekerjaan, baik secara sektoral maupun geografis; (9) sektor ekonomi yang relatif berpendapatan tinggi dibanding sektor lain tidak berminat meningkatkan gaji, karena masih banyak tenaga kerja baru yang mudah diambil dengan tingkat gaji yang ada; (10) sektor yang berpendapatan rendah sulit meningkatkan gaji, karena produktivitasnya tidak meningkat, kecuali mata pencaharian di sektor pertanian beras.

Sementara itu, Prof.Dr. Hendra Asmara, Ketua Delegasi ISEI dari Indonesia mengatakan bahwa: (1) banyak pakar ekonomi merasa prihatin, apakah benar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat juga menciptakan pemerataan, bila tidak maka para ekonom merasa harus mencari teori dan gagasan-gagasan kebijaksanaan baru agar masalah itu tidak berlarut-larut; (2) kalau ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan justru yang menonjol maka akan memancing kecemburuan dan keresahan sosial yang pada gilirannya dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi; (3) melalui konferensi ini para sarjana ekonomi ASEAN ingin memeriksa kembali secara ilmiah, apa yang sesungguhnya terjadi di negara masing-masing tentang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (*Suara Pembaruan*, 17-11-1990).

D. KERJASAMA INDUSTRI, MINERAL DAN ENERGI

1. Sidang AFCM ke-14

Sidang *ASEAN Federation Cement Manufactures* (AFCM atau Federasi Industri Semen ASEAN) ke-14 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 19-20 Oktober 1990 dihadiri oleh seluruh pengusaha semen dari ASEAN, termasuk 14 orang delegasi Indonesia untuk membahas masalah harga jual dan kebutuhan semen ASEAN.

Seusai sidang, Presiden AFCM Ir. Setiadi Dirgo mengatakan kepada Antara bahwa: (1) pemerintah negara-negara anggota ASEAN perlu menetapkan harga semen yang wajar, agar pembangunan dapat berjalan lancar dan industri semen dapat hidup dengan meningkatkan kapasitas produksinya; (2) pada tahun 1991 ASEAN secara keseluruhan masih akan kekurangan 6,7 juta ton semen; (3) kapasitas produksi semen ASEAN tahun 1990 adalah 52,4 juta ton sehingga terdapat kekurangan yang cukup besar, khususnya bagi Filipina dan Muangthai; (4) harga jual semen di negara-

negara ASEAN yang umumnya cukup murah akan menyebabkan industri semen terus menderita dan kurang mampu melakukan perluasan produksi; (5) perluasan produksi semen perlu dana, namun dana hanya dapat diadakan jika harga semen layak dari segi semua pihak yakni pemerintah, konsumen dan industri semen sendiri; (6) sekarang jika ada krisis semen seolah-olah pabrik yang disalahkan, padahal hal itu merupakan masalah bersama sehingga untuk mengatasinya perlu kerjasama pula. Produksi semen di Indonesia masih di atas permintaan, untuk tahun 1990 proyeksi kebutuhan adalah 13,4 juta ton, sedangkan produksinya sekitar 17 juta ton dan kelebihan produksi ini untuk diekspor; (7) masalah angkutan semen merupakan masalah tersendiri, bahkan dalam soal angkutan darat juga masih terdapat kekurangan sarana angkutan; (8) krisis semen yang sedang terjadi di Indonesia akan menjadi pengalangan yang berharga, terutama bagi kalangan pemerintah dan kalangan industri semen untuk mencegah agar hal itu tidak terulang lagi di masa mendatang; (9) peristiwa ini hendaknya dapat mendorong semua pihak untuk melakukan langkah-langkah mendasar agar produksi semen makin terjamin dengan harga jual yang layak (*Merdeka*, 22 Oktober 1990).

2. Pertemuan Dewan AFTEX ke-12

Pertemuan Federasi Industri Tekstil ASEAN (AFTEX) ke-12 berlangsung di Jakarta tanggal 16-17 November 1990 dihadiri oleh 40 orang peserta yang merupakan tokoh terkemuka industri tekstil ASEAN untuk membahas persoalan industri di ASEAN.

Ketua AFTEX Indonesia, Ir. H. Aminuddin, mengatakan di Jakarta tanggal 28 Oktober 1990 bahwa: (1) untuk menghadapi laju pertumbuhan industri tekstil yang meningkat 30%, negara-negara ASEAN yang tergabung dalam AFTEX agar menggalakkan ekspornya dan memperhatikan kepentingan regionalnya yang relatif kecil; (2) ASEAN memiliki potensi dan kemampuan menjadi salah satu pengekspor tekstil utama di dunia; (3) ASEAN agar melakukan keterpaduan operasional pemasaran dengan sarana *think tank* dan riset bersama AFTEX, serta kegiatan regional yang bersifat komplementer melalui *co-production* dan pengurangan tarif di lingkungan ASEAN; (4) momentum yang paling menentukan dalam perundingan pembatasan perdagangan internasional adalah pada pertemuan babak terakhir Putaran Uruguay di Brussel bulan Desember mendatang. Pertemuan itu akan menentukan pembatas-

an-pembatasan perdagangan TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), yang mungkin akan dihapuskan secara bertahap dengan berbagai pilihan modal; (5) pertemuan AFTEX ke-12 sangat penting dan bernilai sejarah, karena peserta diharapkan akan membawakan aspirasi kalangan pengusaha industri tekstil negaranya masing-masing. Di samping itu para peserta juga ingin mendapatkan kesatuan bahasa dan saling pengertian mengenai masalah pertekstilan (*Pelita*, 30-10-1990).

Menteri Muda Perindustrian Tunki Aribowo mengatakan dalam pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) AFTEX agar mengadakan pengkajian ulang atas posisi industri tekstil ASEAN serta menegaskan kembali kepentingan mereka untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam perdagangan dunia; (2) perubahan-perubahan penting yang bakal terjadi dalam dasawarsa 1990 ini (yang mempengaruhi pola perdagangan internasional pada umumnya dan tekstil pada khususnya) di antaranya adalah: (a) upaya Masyarakat Eropa membentuk suatu blok ekonomi yang mencakup kawasan seluas Amerika Serikat di Eropa; (b) upaya Amerika dan Kanada, dan mungkin juga akan melibatkan Meksiko untuk membentuk suatu kawasan ekonomi di Amerika Utara untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan; (c) reformasi ekonomi sosialis di Eropa Timur dan Uni Soviet untuk menghidupkan kembali sektor swasta; (d) beralihnya pusat pertumbuhan ekonomi dunia dari kawasan Atlantik ke Asia-Pasifik; (3) perubahan itu menimbulkan dampak yang mengharuskan sektor industri melakukan restrukturisasi dengan pembentukan strategi dan pengaturan produksi bersama sebagai gejala globalisasi untuk mempertahankan daya saing dan segmen pasar.

Menteri Muda Perdagangan Dr. Soedradjad Djiwandono mengatakan bahwa: (1) integrasi menyeluruh perdagangan tekstil internasional ke dalam Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) sebagaimana usulan ASEAN merupakan langkah yang paling tepat bagi pelaksanaan mandat Deklarasi Punta del Este yang menandai awal ditempuhnya perundingan GATT Putaran Uruguay; (2) ASEAN mengusulkan agar pada tahun 2000, sistem kuota tekstil dalam perdagangan tekstil internasional dapat dihapuskan, karena perdagangan tekstil diharapkan terintegrasi secara menyeluruh ke dalam GATT; (3) ASEAN menilai cara ini merupakan jalan yang paling sesuai untuk melaksanakan mandat Deklarasi Punta del Este dalam permasalahan tekstil; (4) Deklarasi Punta del Este yang diusulkan oleh para Menteri Perdagangan yang tergabung

dalam GATT tahun 1986 itu bertujuan memperkuat peranan GATT serta sebagai langkah penyempurnaan sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip dan ketentuan GATT. Hal ini berarti, berlakunya sistem perdagangan internasional yang bebas terbuka dan tidak diskriminatif serta bersifat timbal balik dan lebih transparan; (5) pada perundingan GATT Putaran Uruguay tentang tekstil dan pakaian jadi, AS mengusulkan penerapan sistem kuota global sebagai pengganti MFA, yang mulai berlaku 1 Januari 1992 dengan penetapan masa transisi selama 10 tahun; (6) negara-negara anggota Masyarakat Eropa menentang usulan ini, karena merasa takut kalau-kalau ekspor mereka akan diberlakukan begitu juga. Demikian juga, negara-negara pengekspor menyatakan keberatannya, karena sistem itu dinilai hanya sebagai perubahan cara MFA dalam bentuk lain. Sebaliknya AS yang merasa terpicil bersikeras untuk terus memperjuangkan usulannya; (7) MEE secara efektif telah menghambat perundingan tekstil dan pakaian jadi dengan menginterpretasikan Deklarasi Punta Del Este memperkuat ketentuan dan disiplin GATT yang merupakan dasar dari usaha pengintegrasian sektor tekstil ke dalam GATT (*Merdeka*, 17-11-1990); (8) ASEAN tidak menginginkan pengaturan perdagangan tekstil dan pakaian jadi diintegrasikan ke dalam GATT secara mendadak dan drastis. Sementara itu ASEAN juga menolak ide memperpanjang masa berlakunya Persetujuan Multi Serat (MFA); (9) kegiatan bisnis tekstil dan pakaian jadi sampai sekarang masih diatur oleh MFA yang tidak sejalan dengan ketentuan GATT; (10) ASEAN masih menyetujui pembatasan ekspor berupa ketentuan kuota yang ditetapkan oleh negara pengimpor kepada negara pengekspor tertentu secara selektif. ASEAN menerima pembatasan itu dengan pengertian akan dihilangkan secara bertahap dan kuota akan ditingkatkan secara progresif dalam jangka waktu yang disepakati; (11) usul MEE untuk membentuk sebuah komite yang bertugas menghapuskan secara bertahap dilaksanakan tidak dapat diterima negara pengekspor; (12) seluruh anggota AFTEX agar selalu mendukung sikap yang diambil pemerintah negara anggota ASEAN dalam bidang tekstil ini (*Angkatan Bersenjata*, 17-11-1990).

Seusai pertemuan, Ketua Umum AFTEX Indonesia, Ir. H. Aminuddin, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 16 November 1990 bahwa: (1) pasaran MEE bagi ekspor tekstil dan produk-produk tekstil (TPT) Indonesia kini makin terbuka; (2) bila semula MEE hanya mengizinkan sctiap negara anggota ASEAN mengeks-

por TPT berdasarkan kuota negaranya, kini suatu negara ASEAN dapat mengekspor berdasarkan kuota yang dimiliki negara ASEAN lainnya; (3) persetujuan MEE ini dibahas dalam Pertemuan AFTEX ke-12 dan diharapkan dalam waktu dekat dapat direalisasikan; (4) untuk dapat memanfaatkan peluang itu, di antara negara anggota ASEAN harus ada kerjasama yang baik; (5) di masa lalu Singapura hanya boleh mengekspor TPT ke MEE lewat negara itu meskipun mereka memesannya dari Indonesia, tapi kini Singapura yang mempunyai kuota cukup besar dapat langsung mengekspor dari Indonesia ke MEE berdasarkan kuota yang dimilikinya; (6) kebijaksanaan ini hanya berlaku untuk pasaran MEE dan tidak untuk AS, dan bila dilakukan Indonesia untuk pasaran AS, maka Indonesia dapat terkena hukuman dari AS; (7) negara anggota ASEAN yang memiliki kuota besar tetapi memiliki tenaga kerja yang makin mahal cenderung mengekspornya dari Indonesia; (8) kebijaksanaan ini menguntungkan Indonesia dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya, karena biaya produksi di Indonesia jauh lebih murah; (9) Indonesia harus mempersiapkan diri agar mampu menyediakan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan negara yang akan mengekspor produknya; (10) pasaran MEE masih potensial karena yang dikenakan kuota oleh mereka hanya untuk jenis-jenis tekstil tertentu seperti pakaian jadi, tetapi untuk beberapa jenis produk tekstil di antaranya benang tidak dikenakan kuota (*Kompas*, 17-11-1990).

Pada saat yang sama Presiden Asosiasi Industri Serat Sintetis Muangthai, Sophon Wichitrakorn, mengatakan kepada pers di Jakarta bahwa: (1) AFTEX menerima baik persetujuan bilateral antara negara-negara anggotanya dengan mengekspor tekstil dan produk tekstil (PTP) ke MEE. Kuota yang disetujui agar dimanfaatkan sepenuhnya; (2) untuk meningkatkan ekspor PTP ke MEE, negara-negara ASEAN boleh menggunakan kuota ekspor negara lainnya yang tidak dapat memanfaatkan kuota ekspornya ke MEE dengan label dan dokumen ekspor negara pemakai kuota; (3) melalui kesepakatan ini para anggota AFTEX dapat saling membantu dengan tukar kuota guna memanfaatkan peluang ekspor PTP ke MEE semaksimal mungkin; (4) AFTEX prihatin atas perundingan internasional mengenai tekstil untuk membantu terwujudnya liberalisasi perdagangan tekstil di Jenewa dalam rangka Putaran Uruguay yang hingga kini belum membuahkan hasil yang konkret; (5) AFTEX sepakat untuk meningkatkan kerjasama di kalangan industri tekstil ASEAN dalam bentuk rencana aksi yang akan dirumuskan dalam pertemuan panitia tetap kerjasama industri AFTEX di

Bangkok tahun 1991; (6) peningkatan kerjasama AFTEX sangat penting, terutama untuk menghadapi kenyataan semakin kuatnya kecenderungan regional untuk membentuk blok-blok ekonomi dan perdagangan seperti MEE dan Amerika Utara (*Merdeka*, 19-11-1990).

E. KERJASAMA PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

1. Zona Perdagangan Bebas

Ketua Federasi Industri Jerman, Dr. Tyll Necker mengatakan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan Malaysia di Kuala Lumpur tanggal 30 Oktober 1990 bahwa: (1) Malaysia, Singapura dan Muangthai sebaiknya membentuk suatu zona perdagangan bebas dan mengelompokkan menjadi satu pasar agar mampu menarik investasi ke negaranya; (2) ketiga negara ini dalam kegiatan bisnis bukannya saling mengisi, tetapi cenderung bersaing, namun hal itu dapat diselesaikan seperti antara Jerman dan Perancis; (3) Eropa menghadapi masalah serupa guna memperkuat ekonominya, tetapi setelah hubungan antara negara-negara anggotanya dapat diperkokoh melalui pasaran bersama, kini Eropa menjadi suatu kekuatan ekonomi yang dinamis (*Antara*, 31-10-1990).

2. Kunjungan Wisatawan Manca Negara

Humas Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi mengatakan kepada *Antara* di Jakarta tanggal 5 November 1990 bahwa: (1) negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1990 diperkirakan menerima sebanyak 18,4 juta wisatawan mancanegara atau meningkat 11,3% dibandingkan tahun 1989; (2) devisa yang akan diperoleh negara-negara ASEAN diperkirakan mencapai US\$16,9 milyar; (3) Indonesia selama semester pertama tahun 1990 diperkirakan memperoleh devisa US\$885,91 juta. Hal ini berdasarkan perhitungan setiap wisatawan untuk setiap kunjungan mengeluarkan US\$790; (4) pada semester pertama tahun 1990, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia melalui empat pintu utama sebanyak 1.121.408 orang atau meningkat 36% dibanding periode yang sama tahun 1989; (5) wisatawan yang masuk sebagian besar mengunjungi Jakarta 31% dengan lama tinggal rata-rata 2,5 hari, menyusul Bali dan Sumatera Utara sebesar 38,8% dengan lama tinggal 1,9 sampai empat hari (*Antara*, 6-11-1990).

3. Taman Nasional

Pertemuan Kelompok Kerja ASEAN mengenai Pelestarian Alam berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 6-7 November 1990 untuk membahas berbagai usulan proyek yang akan dilaksanakan tahun 1991. Proyek-proyek itu antara lain: (1) kerjasama pengelolaan taman-taman perbatasan antara dua negara ASEAN dan kawasan-kawasan lainnya yang dilindungi di rantau ASEAN; (2) pelestarian beragam obyek biologi di ASEAN; (3) perlindungan burung air dan tanah di ASEAN; (4) perlindungan jenis yang terancam kepunahan (*Angkatan Bersenjata*, 8-11-1990).

Deputi Menteri Iptek dan Lingkungan Malaysia, Peter Fah Kui Chin, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) Taman Nasional Kerinci-Seblat di Sumatera bagian tengah, telah dinyatakan sebagai salah satu taman kekayaan ASEAN bersama sejumlah taman nasional lainnya di negara-negara ASEAN; (2) taman-taman ini merupakan contoh kekayaan alam yang luar biasa dari ekosistem dalam Asia Tenggara; (3) sehubungan dengan terjadinya pembunuhan tujuh ekor badak di Taman Kerinci-Seblat, akhir-akhir ini taman itu banyak memenuhi media masa internasional, termasuk di Malaysia; (4) taman-taman nasional yang dinyatakan sebagai kekayaan ASEAN lainnya adalah Gunung Leuser dan Lorentz di Indonesia, Gunung Apo dan Iglit-Baco di Filipina, Gunung Kinabalu dan Hulu di Malaysia, Khao Yai dan Tarutao di Muangthai; (5) kawasan-kawasan itu sangat penting untuk melindungi kekayaan biologis ASEAN yang beragam dan merupakan potensi besar untuk pelancongan dan rekreasi; (6) pernyataan sejumlah taman sebagai kekayaan ASEAN yang harus dilestarikan bersama merupakan salah satu hasil dari pertemuan-pertemuan ASEAN mengenai pelestarian alam yang sudah diadakan delapan kali sejak 1978; (7) Jepang telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu pendanaan berbagai proyek pelestarian alam ASEAN; (8) ASEAN perlu membentuk berbagai program antara lain: (a) penyelamatan penyu laut ASEAN dan perlindungan burung yang berpindah mengikuti musim; (b) perencanaan pengelolaan taman-taman dan kekayaan alam ASEAN serta *ASEAN World Life Society*; (c) pembentukan pusat informasi ASEAN mengenai kekayaan alam, bantuan latihan dan teknik, sumber pendanaan, implementasi kesepakatan ASEAN mengenai pelestarian alam dan sumber-sumber kekayaan alam serta rencana ASEAN mengenai perlindungan jenis yang terancam punah; (9) sejumlah hewan yang terancam punah dari Indonesia yang masuk dalam proyek

perlindungan ini adalah badak Sumatera, badak Jawa, gajah, penyu, anoa, orang utan, langur Mentawai, sedangkan taman nasionalnya adalah Kerinci-Seblat, Gunung Leuser dan Ujung Kulon (*Angkatan Bersenjata*, 8-11-1990).

4. Tahun Kunjungan Indonesia 1991

Direktur Operasi PJKA/Pelaksana Harian Kaperjanka Anwar Supriyadi mengatakan kepada pers di Bandung tanggal 13 November 1990 bahwa: (1) kereta api khusus telah disiapkan oleh Perum PJKA untuk mendukung penyelenggaraan ASEAN Tourism Forum (ATF) dan tahun kunjungan Indonesia 1991; (2) kereta api wisata yang sekarang baru' sebuah akan ditambah lagi dengan dua buah kereta, demikian pula kereta-kereta eksekutif akan ditambah jumlahnya; (3) ada perusahaan swasta yang ingin bersama-sama Perum KA mengembangkan usaha ini; (4) untuk kegiatan ATF, perusahaan itu bersedia mencarter kereta api guna keperluan tersebut; (5) saat ini Perum KA sedang mempersiapkan penambahan kereta eksekutif yang banyak diminati, termasuk promosi Visit Indonesia Year 1991 di gerbong-gerbong maupun stasiun-stasiun kereta api yang didukung sponsor dari swasta; (6) pusat informasi dan pelayanan pembelian tiket untuk wisatawan mancanegara kini telah tersedia di stasiun-stasiun besar; (7) pusat informasi bagi wisatawan dilayani oleh pegawai Perum KA dan petugas-petugas dari Diparda; (8) di stasiun Bandung telah disediakan telepon yang dapat berhubungan langsung dengan hotel-hotel tertentu untuk pemesanan kamar; (9) wartel maupun sarana dan fasilitas lainnya telah tersedia di stasiun-stasiun kereta api; (10) sejak tahun 1989 PJKA memberikan kemudahan kepada para wisatawan mancanegara untuk menggunakan kereta api saja dan di mana saja dengan satu karcis terusan yang diberi batas waktu 10-20 hari dan dapat diperoleh di stasiun besar (*Angkatan Bersenjata*, 15-11-1990).

II. KERJASAMA NON-EKONOMI

A. KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

1. Kunjungan Wartawan ASEAN ke Muangthai

PM Muangthai, Chatichai Coonhavan, mengatakan kepada 20 orang wartawan ASEAN yang sedang mengadakan lokakarya tentang peliputan industri dan

perdagangan regional ASEAN di Bangkok tanggal 13 September 1990 bahwa: (1) negaranya tetap mengutamakan kerjasama dengan sesama negara ASEAN kendati saat ini ingin membangun kerjasama yang erat dengan negara-negara Indocina dan Myanmar; (2) negara-negara Indocina dan Myanmar merupakan tanggungannya, karena itu Muangthai perlu mengembangkan kerjasama dengan negara-negara tersebut; (3) kerjasama dengan negara-negara ASEAN akan menjadi semakin penting di masa depan, apalagi diperkirakan Eropa Barat akan memberikan perhatian yang lebih banyak kepada Eropa Timur; (4) AS, Jepang dan Australia diharapkan tetap memberi perhatian yang besar pada kawasan Asia-Pasifik agar tidak terjadi kekosongan di kawasan itu akibat perkembangan di Eropa; (5) Muangthai belum akan menjadi negara industri baru dalam waktu dekat ini, karena belum memiliki industri dasar; (6) Muangthai memerlukan pabrik baja, karena sumber daya alamnya telah tersedia; (7) perang panjang di Kamboja telah menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan regional, karena itu pemerintahnya menetapkan kebijakan untuk mengubah medan tempur Indocina menjadi pasar (*Antara*, 14-9-1990).

2. Lokakarya dan Seminar Wartawan ASEAN

Lokakarya dan Seminar Wartawan ASEAN ke-4 dengan tema "Menulis untuk Media Massa ASEAN" berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 17-30 September 1990, untuk membahas masalah lingkungan, politik luar negeri dan ekonomi ASEAN.

Ketua Komite Kebudayaan Penerangan (COCI) Malaysia, Maslan Achmad, mengatakan pada pembukaan seminar itu bahwa: (1) para wartawan ASEAN diharapkan mampu mengidentifikasi perbedaan-perbedaan di antara negara anggota ASEAN sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak membesar; (2) kemampuan mengenal berbagai perbedaan dan persamaan akan memungkinkan media massa ASEAN membantu cita-cita perhimpunan ini; (3) Indonesia melalui media massanya telah banyak membantu ASEAN untuk menjaga kekompakannya dan seharusnya menjadi tugas semua wartawan ASEAN (*Antara*, 7-9-1990).

Pemimpin redaksi *Bernama*, Malaysia, Abdullah Rahman Sulaiman, mengatakan bahwa: (1) program pertukaran berita antar negara ASEAN (ANEX) agar lebih efektif sehingga mampu menyaingi berita-berita mengenai ASEAN dari kantor-kantor berita internasional; (2) ANEX agar lebih meningkatkan kegiatan-

nya, paling tidak mampu mempertahankan kemajuan yang dicapai pada tahun-tahun awal dilancarkannya jaringan berita itu; (3) suatu kantor berita yang punya dana dan staf yang kuat dapat mengambil alih peran ANEX, terutama dalam fungsinya sebagai organisasi pers regional di Asia Tenggara; (4) jika *Bernama*, *PNA*, *TNA* dan *Antara* masing-masing dapat berkembang menjadi kantor berita dengan pengaruh regional, maka kemungkinan ide tentang ANEX dapat ditinggalkan.

Salah seorang redaktur eksekutif *Bernama* SN. Rajan mengatakan bahwa: (1) ANEX harus dilanjutkan karena jaringan ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi anggotanya yang memerlukan berita tentang ASEAN oleh ASEAN sendiri; (2) ANEX perlu meninggalkan pikiran-pikiran yang terlalu ambisius; (3) *Bernama*, *PNA*, *TNA* dan *Antara* masing-masing cukup mengirimkan tiga berita yang berlatar belakang lengkap, disunting dengan baik, serta tepat waktu untuk ANEX; (4) ANEX harus mempertahankan kemauan politik yang sekarang ada, karena banyak surat kabar ibukota-ibukota ASEAN telah memastikan berita-berita ANEX akan mendapat tempat jika ditulis sesuai dengan patokan-patokan umum yang berlaku tentang berita yang baik (*Antara*, 19-9-1990).

Menteri Penerangan Malaysia, Mohammad Rahmat, mengatakan pada wartawan ASEAN dalam jamuan makan di Kuala Lumpur tanggal 24 September 1990 bahwa: (1) organisasi media massa ASEAN dapat berkembang pesat karena persaingan tidak selalu dilihat dari sisi negatifnya saja; (2) Malaysia menganut konsep yang relatif liberal dalam kebebasan untuk mendapatkan informasi; (3) Malaysia tidak membatasi peredaran buku-buku yang boleh jadi dilarang di Indonesia, tetapi negaranya tidak mengizinkan penggunaan antena parabola yang memungkinkan semua lapisan masyarakat mendapatkan segala macam informasi dari Barat; (4) buku-buku hanya akan mempengaruhi sejumlah kecil orang karena membaca buku membutuhkan kemampuan intelektual, sedangkan mencerna siaran televisi praktis dan dapat dilakukan oleh siapa saja; (5) ASEAN tidak akan mengalami kemunduran dalam kekompakannya, selama masih ada unsur pengikat seperti bahaya komunisme dan upaya menyingkirkan kemiskinan (*Pelita*, 25-9-1990).

3. Sidang Kelompok Kerja ASEAN-COCI

Sidang Kelompok Kerja ASEAN-COCI ke-6 berlangsung di Semarang tanggal 13-15 November 1990,

diikuti oleh delegasi Singapura, Malaysia, Muangthai, Filipina, Brunei Darussalam (masing-masing 3 orang) dan Indonesia (8 orang), untuk membahas pengembangan program-program baru (*Merdeka*, 14-11-1990).

Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan pada pembukaan sidang itu bahwa: (1) kemajuan teknologi informasi berakselerasi sangat cepat, karenanya baik langsung maupun tidak langsung teknologi baru di bidang informasi dan komunikasi itu sedang menancapkan pengaruhnya pada pembangunan dan transformasi kehidupan di ASEAN; (2) perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat dewasa ini sangat baik untuk dipertimbangkan penggunaannya untuk meningkatkan kerjasama ASEAN di bidang media cetak; (3) ASEAN harus berusaha secara konstan memperkuat rasa solidaritas di segala bidang termasuk kebudayaan dan informasi; (4) kerjasama antar anggota ASEAN dalam berbagai hal harus membuat ASEAN menjadi sebuah kelompok regional yang efektif untuk meningkatkan pembangunan sosial budaya seperti halnya di bidang ekonomi dan kestabilan politik; (5) keberhasilan ASEAN terutama dirasakan dalam hubungan bertetangga baik dan saling pengertian yang memberikan rasa memiliki identitas regional; (6) berdiskusi tentang masalah-masalah regional dan internasional merupakan motivasi untuk memelihara kepentingan sebagai kelompok; (7) sidang agar memperbaiki rumusan tentang efisiensi dalam kerjasama di bidang media interpersonal dan media cetak; (8) peningkatan media interpersonal tentu tidak akan mengurangi peranan media cetak dan elektronika, bahkan sebaliknya media interpersonal akan meningkatkan keterpaduan informasi dan komunikasi; (9) tujuan pembangunan penerangan dan media massa di Indonesia adalah: (a) sebagai sarana untuk menciptakan penerangan dan komunikasi timbal-balik antar masyarakat, antar masyarakat dan pemerintah, guna menimbulkan semangat kebangsaan untuk berjuang mempertahankan kesatuan dan persatuan; (b) untuk menstimulasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya; (c) untuk memperdalam rasa tanggung jawab dan disiplin nasional; (d) untuk memperkaya nilai-nilai budaya nasional dan memperkuat identitas nasional; (10) media massa dan mereka yang berkepentingan dengan penyebaran informasi harus memperkuat dedikasi dan rasa tanggung jawab profesionalnya, mengembangkan kemampuan dan kualitas tenaga kerjanya serta menggunakan sarana dan prasarana secara lebih efektif dan efisien; (11) pemerintah Indonesia telah meluncurkan program pembangunan fasilitas komunikasi beserta

prasarananya, terutama dalam pembangunan prasarana komunikasi yang efektif dan nasional, yaitu melalui SKSD Palapa (untuk meningkatkan dan memperkuat komunikasi secara luas agar mencapai daerah atau desa terpencil di kepulauan ini); (12) pemerintah Indonesia telah memberikan penekanan khusus kepada orientasi penerangan pedesaan untuk meningkatkan pembangunan pedesaan, karena sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan; (13) 12 macam usulan proyek baru tentang media cetak dan interpersonal cukup baik dan bermanfaat bagi pengembangan kerjasama ASEAN pada kedua media itu; (14) kerjasama proyek-proyek itu hendaknya dapat diprioritaskan pada berbagai pokok yang telah disepakati dan diputuskan dalam Konperensi para Menteri Penerangan ASEAN ke-1 tahun 1989; (15) negara anggota ASEAN yang berpartisipasi dalam ANEX agar memperkuat kemampuan ANEX dalam pengumpulan dan penyebaran berita, baik di dalam maupun di luar ASEAN; (16) ASEAN-COCI agar memberikan bantuan dana, supaya ANEX dapat mengembangkan program-program baru seperti pengajuan data bank dan pertukaran informasi serta kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan ANEX (*Merdeka*, 14-11-1990).

4. Festival Lagu-lagu ASEAN

Festival dan Lokakarya Lagu-lagu ASEAN ke-5 berlangsung di Surabaya tanggal 4-13 Oktober 1990, untuk: (1) memperkenalkan perkembangan kebudayaan ASEAN lewat lagu-lagu dan tarian dengan meningkatkan interaksi sosial di antara artis dan komposer ASEAN; (2) meningkatkan apresiasi kebudayaan bersama dari masing-masing negara ASEAN (*Merdeka*, 4-10-1990).

Ketua Lokakarya Paul Hutabarat mengatakan kepada pers di Surabaya tanggal 12 Oktober 1990 bahwa lokakarya gagal melahirkan Hymne ASEAN sebab: (1) ada tiga negara yang sampai saat ini tidak dapat memenuhi persyaratan *verse* dan *refrainnya*; (2) *scale* yang ditentukan sangat sulit bagi beberapa negara untuk membuat *verse* sesuai dengan ciri khas musik negaranya. Tetapi mereka sepakat agar Festival dan Lokakarya Lagu-lagu ASEAN ke-6 diadakan di Muangthai dan sebelumnya setiap negara anggota diwajibkan mengirimkan dua buah lagu Hymne ASEAN. Lagu itu diserahkan kepada ASEAN COCI Muangthai dalam bentuk *music score* yang lengkap dan direkam dalam pita kaset dengan batas waktu akhir Januari 1991.

Sedangkan liriknya dapat menggunakan bahasa negara masing-masing anggota ASEAN dan mencerminkan identitas ASEAN; (3) ASEAN-COCI Muangthai akan mengedarkan 12 lagu itu kepada negara anggota lainnya untuk mendapat tanggapan; (4) hymne akan didiskusikan dan dipilih yang terbaik oleh komite anggota yang terdiri dari seorang komposer dan seorang musikus dari masing-masing negara anggota ASEAN, sebelum pelaksanaan festival ke-6 (5) COCI dapat membahas pemberian proteksi *copyright* di kalangan komposer ASEAN, karena hal ini sangat penting; (6) seluruh insan musik ASEAN dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkecil dominasi pengaruh musik-musik Barat terhadap musik tradisional (*Merdeka*, 13-10-1990).

Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan pada pembukaan festival itu bahwa: (1) ASEAN mempunyai sumber kebudayaan yang sangat kaya dan tinggi mutunya; (2) ASEAN dapat secara bersama-sama menggali nilai-nilai kebudayaan itu dan menampilkan dalam bentuk lagu, baik tradisional maupun lagu populer yang telah berkembang di kawasan ASEAN; (3) dalam era globalisasi sekarang ini, pengaruh-pengaruh informasi dan budaya luar, baik yang jelek maupun yang baik, tidak dapat dipilih-pilih untuk menerimanya, dan yang dapat dilakukan ASEAN hanya memperkuat ketahanan sendiri untuk menangkal pengaruh itu; (4) para delegasi telah melakukan lokakarya dan memberikan informasi musik dan perkembangannya serta manfaatnya bagi negara masing-masing; (5) perlindungan hak cipta sangat perlu dan harus dibahas serta ditindak lanjuti, karena selain untuk mencegah pembajakan juga sangat bermanfaat bagi para musisi dan pencipta lagu; (6) festival selain untuk saling berkomunikasi dan mempererat persahabatan juga untuk meningkatkan pergaulan di antara seniman ASEAN; (7) musik dapat mendorong peningkatan persatuan dan kesatuan di samping meningkatkan seni budaya bangsa. Oleh sebab itu para seniman musik hendaknya dapat menciptakan lagu-lagu yang sesuai bagi bangsa ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 15-10-1990).

5. Hadiah ASEAN bagi Wartawan, Pelukis dan Pengarang

Di Singapura tanggal 8 November 1990, Menteri Luar Negeri Singapura, Wong Kan Seng, selaku wakil ASEAN, memberikan penghargaan berupa hadiah senilai US\$1.500 untuk karya terbaik dari wartawan, artis dan pengarang: (1) untuk komunikasi diberikan kepada

wartawan Haji Abdul Wahab Mohammad dari Brunei, Samuel Pardede dari Indonesia, A. Samad Ismail dari Malaysia, Jose L. Pavia dari Filipina, Tan Lian Choo dari Singapura dan Somkiat Onwimon dari Muangthai; (2) untuk seni rupa diberikan kepada Pehin Haji Abdul Rahman Bin Haji Taha dari Brunei, Gregorius Sidharta Soegijo dari Indonesia, Hijjas Kasturi dari Malaysia, Jose Joya dari Filipina, Ng Eng Teng dari Singapura dan Tawes Nandakuang dari Muangthai; (3) untuk kesusasteraan diberikan kepada Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri dari Brunei, Hans Bague Jassin dari Indonesia, Shahnnon Ahmad dari Malaysia, Amelia Lapena Bonafacio dari Filipina, Masuri Bin Sali Un dari Singapura dan M.L. Pin Malakul dari Muangthai; (4) untuk penyutradaraan film diberikan kepada Awang Haji Masri Bin Raub dari Brunei, Teguh Karya dari Indonesia, Abdul Fatah Karim dari Malaysia, Lucio B. San Pedro dari Filipina, Choo Hoey dari Singapura dan Somchai Asanichinda dari Muangthai. Hadiah ini diberikan tiga tahun sekali dan setiap negara akan memperoleh seorang wakil untuk setiap kategori (*Angkatan Bersenjata*, 12-11-1990).

B. LOKAKARYA STRATEGI PENYUSUNAN HUKUM

Lokakarya Strategi Penyusunan Hukum dan Pembangunan Ekonomi ASEAN berlangsung di Bali tanggal 29 Oktober - 10 November 1990, diikuti oleh 41 sarjana Hukum dan Ekonomi dari berbagai perguruan tinggi ASEAN, PNG dan Kanada, untuk membahas analisis ekonomi terhadap suatu peraturan atau penerapan hukum seperti hak milik intelektual, investasi, hukum perburuhan dan transportasi serta perlindungan lingkungan (*Antara*, 7-11-1990).

Menteri Muda Perdagangan RI, Dr. Soedradjad Djiwandono, mengatakan pada lokakarya itu, tanggal 8 November 1990 bahwa: (1) peta perdagangan dunia dewasa ini sedang mengalami perubahan sehingga perkembangan ekonomi dan perdagangan internasional berubah menuju ke arah globalisasi di bidang investasi, informasi, modal, keuangan dan pasar-pasar komoditi; (2) pada saat yang sama beberapa negara melakukan integrasi ekonomi dalam bentuk kerjasama ekonomi regional seperti yang dilakukan di Eropa Barat dengan rencana pembentukan Pasar Tunggal dan Amerika Utara dengan perjanjian bilateral perdagangan bebas AS-Kanada; (3) kawasan Asia Timur, termasuk ASEAN, masih melakukan kerjasama dan integrasi

ekonomi; (4) saat integrasi ekonomi internasional terjadi di mana-mana dan menjadi perhatian, ternyata ada masalah-masalah lain yang dihadapi, seperti bidang hukum, termasuk hukum internasional; (5) ketika negara-negara berkembang mulai memasuki pasar-pasar ekspor, pesaing-pesaing di luar negeri memperhatikan atau mengharapakan kehadiran hukum dagang untuk proteksi; (6) keterlibatan dalam kontrak-kontrak perdagangan dan investasi yang tidak mengenakan batas suatu bangsa pada gilirannya menuntut perlu adanya hukum baru yang berkaitan dengan hak milik serta pelaksanaan perjanjian; (7) kerjasama ekonomi intra ASEAN sejak 1967 telah memberikan manfaat bagi negara anggota dan mitranya di luar ASEAN, namun perkembangannya masih memerlukan waktu (*Suara Karya*, 10-11-1990).

C. KERJASAMA KEAMANAN

1. Konperensi Keamanan Regional

Menteri Luar Negeri Filipina, Raul Manglapus, mengatakan kepada pers di Manila tanggal 12 September 1990 bahwa: (1) ASEAN telah merencanakan suatu konperensi mengenai keamanan regional, yang akan membicarakan dasar-dasar yang bersifat non-ASEAN, karena sebelumnya telah disepakati untuk tidak membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dalam kerangka ASEAN; (2) beberapa lembaga yang telah mengadakan studi teknis mengenai masalah keamanan regional dan telah menyodorkan hasilnya, kemungkinan dapat dipakai dalam konperensi; (3) pertemuan antar Menlu ASEAN mengenai masalah keamanan regional baru tampaknya akan berhasil bila lebih dahulu diadakan pertemuan yang sifatnya bilateral; (4) perundingan masalah keamanan regional itu tidak perlu tergantung pada masalah pangkalan AS di Filipina yang sewanya akan berakhir bulan September 1991 (*Kompas*, 13 September 1990).

2. Badan Keamanan Pasifik

Menlu Singapura, Wong Kan Seng, mengatakan kepada pers di Jasper Alberta, Kanada, tanggal 6 Oktober 1990 bahwa: (1) para Menlu ASEAN skeptis atas usul pembentukan organisasi gaya Eropa untuk meningkatkan keamanan dan perdagangan di Pasifik; (2) situasi di Eropa telah memudahkan konsep Kerja-

sama dan Konperensi Keamanan di Eropa (CSCE), namun kondisi yang sama belum didapat di Asia; (3) sebelum masalah keamanan didiskusikan, masalah kebudayaan, etnis dan politik negara di Asia yang berbeda harus diharmoniskan persepsinya agar ada persamaan hukum (*Bisnis Indonesia*, 8-10-1990).

Menlu RI, Ali Alatas, mengatakan kepada Kompas di New York tanggal 6 Oktober 1990 bahwa: (1) untuk menghadapi perkembangan-perkembangan baru di Eropa, Indonesia akan tetap berpegang pada deklarasi ASEAN (ZOPFAN); (2) Indonesia dan Jepang tidak berniat membentuk semacam pengaturan keamanan untuk kawasan Asia-Pasifik seperti yang ada di Eropa; (3) pertemuan 15 Menlu negara-negara Asia-Pasifik yang dipimpin oleh Jepang dan Indonesia di Hotel Waldorf Astoria tidak akan menuju kepada pembentukan suatu organisasi baru tentang keamanan dan kerjasama untuk mengimbangi CSCE di Eropa; (4) ASEAN harus berhati-hati dan jangan menganggap permasalahan dan pendekatan yang berlaku di Eropa dapat diterapkan begitu saja di Asia-Pasifik; (5) pertemuan itu hanya untuk bertukar pikiran mengenai perkembangan yang terjadi di berbagai bagian dunia serta membahas kemungkinan dampaknya bagi negara-negara Asia-Pasifik; (6) ZOPFAN telah cukup merupakan cetak biru yang tidak hanya menyangkut Asia Tenggara, tetapi juga menyangkut tata hubungan negara-negara Asia Tenggara dengan negara-negara besar di sekelilingnya; (7) Indonesia setuju untuk berbicara tentang era baru menjelang masalah Kamboja selesai, tetapi akan berpegang pada ZOPFAN dan akan lebih terbuka mengemukakan idenya berdasarkan ZOPFAN; (8) ASEAN selama ini belum berhasil menerapkan konsep ZOPFAN maupun melaksanakannya, karena munculnya masalah Kamboja; (9) ZOPFAN masih relevan dan ASEAN perlu berpegang pada konsep ini; (10) setelah masalah Kamboja selesai, ASEAN dapat memusatkan perhatian pada masalah-masalah masa pasca Kamboja agar negara-negara Asia Tenggara dapat maju bersama; (11) akan ada satu Asia Tenggara dan bukan Asia Tenggara yang terbagi yang terpolarisasi antara Indocina dan ASEAN; (12) di Asia Tenggara akan terjadi kerjasama yang lebih serasi dan penuh pengertian untuk menghadapi berbagai permasalahan; (13) masalah Kamboja selama ini telah menyelingi dan menghambat pelaksanaan rencana ASEAN; (14) pemikiran bahwa masalah Kamboja sebagai perekat ASEAN sama sekali keliru, sebab prinsip kerjasama ASEAN telah tercipta sebelum masalah itu muncul (*Kompas*, 9-10-1990).

III. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

A. HUBUNGAN ASEAN-MEE

- *Pertemuan ASEAN-ME*

Pertemuan pejabat tinggi kehutanan ASEAN dengan para pejabat ME berlangsung di Brussel tanggal 8-10 Oktober 1990 dan Den Haag tanggal 11-16 Oktober 1990, untuk membahas kebijaksanaan pengelolaan dan konservasi hutan tropis di negara-negara ASEAN.

Komunike bersama pada akhir pertemuan menyatakan: (1) pembahasan difokuskan pada pengelolaan hutan tropis di negara-negara ASEAN; (2) perlu kerjasama program riset hutan tropis antara ME dan negara-negara ASEAN; (3) ME dan ASEAN sepakat untuk bertanggungjawab atas konservasi dan penghijauan kembali hutan tropis; (4) ME mengakui komitmen ASEAN atas pengelolaan hutan yang berkesinambungan; (5) perlu memperkuat mekanisme lembaga-lembaga yang sudah ada untuk kerjasama, seperti ITTO dan TFAP; (6) persetujuan internasional tentang konservasi hutan dunia dan evaluasi dari aspek lingkungan sosial tentang proyek-proyek yang dilaksanakan dalam kawasan hutan tropis adalah penting; (7) sepakat bahwa konservasi hutan dunia merupakan tanggung jawab bersama dan pengembangannya harus berkesinambungan *baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan hidup*; (8) sumber daya manusia seperti ahli-ahli pengelolaan hutan adalah penting.

Dalam seminar sehari tentang Pengelolaan dan Pembangunan Hutan Tropis yang Berkesinambungan di ASEAN yang berlangsung di Den Haag tanggal 11 Oktober 1990, Ketua Delegasi ASEAN, Hasjru Harahap, mengatakan bahwa: (1) ASEAN mengajak pemerintah dan para ahli Belanda untuk bekerjasama dalam pengelolaan dan konservasi hutan tropis di kawasan ASEAN; (2) ASEAN meminta bantuan tenaga ahli dan teknologi dari Belanda; (3) pengelolaan dan konservasi hutan tropis adalah tanggung jawab bersama, baik negara berkembang maupun negara maju; (4) penyelesaian masalah kehutanan dilakukan dengan melaksanakan pengelolaan dan pembangunan hutan yang berkesinambungan sehingga keseimbangan lingkungan dapat dipertahankan (*Antara*, 12-10-1990).

Dalam jumpa pers se usai seminar, Menteri Hasjru Harahap juga mengatakan: (1) tindakan memboikot impor kayu tropis ke negara-negara industri adalah counter-productive; (2) apabila pemboikotan terjadi maka kayu akan dijual ke negara-negara lain atau terpaksa hutan akan dikonversi menjadi lahan non-hutan

guna mengkompensasi pendapatan dari kayu yang tidak bisa dipasarkan; (3) yang dibutuhkan ASEAN adalah perdagangan yang fair, bantuan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia; (4) ASEAN tidak menginginkan dana yang dikompensasikan dengan larangan pemanfaatan hutan tropis; (5) ASEAN harus menjelaskan kepada konsumen Eropa Barat tentang cara pemanfaatan hutan tropis di ASEAN (*Kompas*, 12-10-1990).

B. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

1. *Pertemuan Kelompok Kerja Konperensi Internasional Paris tentang Kamboja (PICC)*

Pertemuan pertama dalam rangka membuka kembali Konperensi Internasional Paris tentang Kamboja (PICC) berlangsung di Jakarta tanggal 9-10 November 1990, dihadiri oleh 13 delegasi dari Indonesia, Perancis, AS, Inggris, Uni Soviet, Cina, Kanada, India, Malaysia, Laos, Australia, Jepang serta utusan khusus Sekjen PBB untuk membahas rancangan naskah perdamaian Kamboja berdasarkan dokumen kerangka dasar yang disusun lima anggota tetap DK-PBB.

Menlu Ali Alatas mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) pertemuan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan naskah resmi yang mengikat, tetapi untuk bertukar pikiran dan mencari masukan guna menjabarkan dokumen kerangka dasar penyelesaian masalah Kamboja yang disusun oleh lima anggota tetap DK-PBB; (2) pertemuan diharapkan dapat mencerminkan pemikiran bersama semua pihak yang terlibat dalam PICC; (3) apabila pertemuan gagal maka Ketua Bersama Indonesia-Perancis akan terus menyusun rancangan naskah perdamaian Kamboja, namun sekalipun berhasil naskah tidak dapat dipaksakan untuk diterima oleh pihak-pihak yang bertikai (*Antara*, 9-11-1990); (4) ada dua pendekatan untuk mempertimbangkan bentuk dan struktur naskah perdamaian: (a) membuat satu naskah persetujuan menyeluruh yang ditambah dengan annex-annex; (b) menyusun beberapa kesepakatan yang merupakan bagian dari persetujuan menyeluruh; (5) pertemuan juga membahas tentang hubungan antara SNC dengan UNTAC (*Kompas*, 11-11-1990).

Pertemuan itu menunjukkan antara lain: (1) rancangan naskah perdamaian Kamboja hanya akan berhasil bila mendapat dukungan dan pengertian dari anggota-anggota Dewan Nasional Tertinggi (SNC) Kamboja; (2) tercapai pengertian bersama tentang

struktur dan pendekatan yang harus digunakan untuk menyusun rancangan naskah penyelesaian politik secara menyeluruh; (3) aspek substantif penyelesaian politik secara menyeluruh di Kamboja yang merupakan konsensus anggota tetap DK-PBB dan Ketua Bersama PICC akan dikembangkan dalam pertemuan di Paris; (4) pertemuan selanjutnya tergantung pada pemecahan masalah internal Kamboja (*Antara*, 11-11-1990); (5) pertemuan Kelompok Kerja PICC adalah untuk membantu kedua co-chairman guna menyelenggarakan PICC lagi; (6) peserta PICC mengharapkan agar penentuan Ketua SNC terbentuk (*Kompas*, 11-11-1990).

2. Pertemuan Lima Anggota Tetap DK-PBB

Pertemuan Lima Anggota Tetap DK-PBB, Inggris, Perancis, AS, Uni Soviet dan Cina ditambah wakil dari

Indonesia berlangsung di Paris tanggal 23-25 November 1990 untuk mendapatkan rancangan perjanjian perdamaian tentang Kamboja.

Dalam pernyataannya dikatakan bahwa: (1) kini terserah pada rakyat Kamboja sendiri untuk menyelesaikan perselisihan yang selama ini menghambat pelaksanaan rencana PBB untuk mencapai perdamaian di Kamboja; (2) mendesak bangsa Kamboja untuk menjamin SNC benar-benar berfungsi sehingga PICC segera dapat dimulai; (3) perlu segera dipilih seorang Ketua SNC, sedangkan wakilnya akan dirundingkan kemudian; (4) dokumen rancangan perjanjian berisi: (a) usul tentang pemberian mandat kepada UNTAC; (b) rincian persyaratan tentang gencatan senjata dan penarikan pasukan; (c) pemilu; (d) pemulangan pengungsi Kamboja; (e) prinsip-prinsip konstitusi baru (*Kompas*, 27-11-1990).

Para Penulis

- **BANDORO, Bantarto,**
Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional Publik, Universitas Indonesia, 1978; MA dalam Hubungan Internasional dari International University of Japan, Graduate School of International Relations, 1986; sejak 1980 menjadi anggota Departemen Hubungan Internasional (HI) CSIS, peneliti dan pengamat masalah Asia Timur, khususnya Jepang dan hubungannya dengan Amerika Serikat.
- **BEREND, Ivan T.,**
Lulusan Universitas Ekonomi dari Fakultas Filsafat di Budapest, Hongaria. Menjadi dosen sejarah ekonomi pada almahaternya pada 1953; Ph.D didapat dalam ilmu ekonomi (1957) dan ilmu sejarah (1958). Dilantik menjadi profesor pada 1964 dan menjadi rektor universitas selama 1973-1979. Diangkat menjadi Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Hongaria sejak 1985 dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Eropa sejak 1986. Secara intensif memberi kuliah pada pelbagai lingkungan universitas di Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Israel, Swedia, Finlandia, Austria, Kanada, dll. Sejak tahun 1955 Berend telah menerbitkan lebih dari 20 buku dan lebih dari 120 studi, baik sendiri maupun bersama pengarang lain.
- **DEWANTO, Wisnu,**
Sarjana Hukum Internasional dari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1985; sejak Agustus tahun itu menjadi staf peneliti di CSIS, menangani penelitian dalam bidang Organisasi Internasional, Hukum Laut, Afrika Barat Daya & Selatan serta sebagian Amerika Latin dan Asia Selatan.
- **PRASETYONO, Edy,**
Sarjana Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Indonesia (1989). Sejak Maret 1990, staf Departemen Hubungan Internasional CSIS, mengkaji masalah-masalah Indocina.
- **SOESASTRO, Hadi,**
Sarjana di bidang Teknik Pesawat Terbang (Dipl. Ing.), Rhenish Westfaelische Technische Hochschule, Aachen, Jerman Barat, 1971 dan pada 1978 memperoleh Ph.D dari The Rand Graduate Institute for Policy Studies, Santa Monica, Amerika Serikat; kini anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif CSIS; Anggota Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia (1981 sampai sekarang), Dosen FISIP dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- **SUKMA, Rizal,**
Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung (1989); sejak Juni 1990, staf Departemen Hubungan Internasional CSIS, mengkaji masalah-masalah RRC dan Asia Timur.

tatan:



Kepada:
Biro Pemasaran
Centre for Strategic and
International Studies

Jl. Tanah Abang III/23-27
Jakarta 10160
Telepon: 356532-5

an-
tau
nat

penulis yang telah dikirimkan naskah yang akan diterbitkan, naskah yang pantas. Naskah-naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis jika hal itu dikehendakinya. Surat menyurat yang berhubungan dengan hal tersebut harap ditujukan ke Redaksi ANALISIS CSIS.

Langganan

Harga pengganti ongkos cetak Rp 3.000,00 per eksemplar; langganan setahun (6 nomor, sudah termasuk ongkos kirim biasa) Rp 15.000,00. Surat menyurat yang berhubungan dengan langganan ditujukan ke Biro Pemasaran, CSIS.

Alamat

Jalan Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160, Telepon 356532, 356533, 356534, 356535.